

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETAHANAN
PANGAN DAERAH**

(Studi Pada Program Peningkatan Produksi Beras Nasional 9P2BN di Kabupaten Kotawaringin Barat)



**TAPM Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Sains Dalam Ilmu Administrasi
Bidang Minat Administrasi Publik**

Disusun Oleh :

SURYATI

NIM: 018788364

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
JAKARTA
2014**

ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETAHANAN PANGAN DAERAH (Study Pada Program Peningkatan Produksi Beras Nasional/P2BN di Kabupaten Kotawaringin Barat)

Suryati

suryanuraini@ymail.com

Program Pasca Sarjana

Universitas Terbuka

Pangan merupakan kebutuhan dasar bagi manusia dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketahanan pangan merupakan capaian peningkatan ketersediaan pangan, dengan menerapkan strategi swasembada pangan melalui peningkatan produksi pangan dengan target ketersediaan pangan oleh hasil produk domestik. Kebijakan ketahanan pangan daerah dilaksanakan melalui Program Peningkatan Produksi Beras Nasional. Implementasi kebijakan ketahanan pangan melalui program P2BN diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pangan daerah dari produksi daerah. Pemenuhan kebutuhan pangan daerah dari produksi sendiri masih jauh dari harapan, hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Kotawaringin Barat masih rentan rawan pangan apabila pasokan dari daerah luar terganggu. Tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan dan menganalisis faktor – faktor yang dapat menyebabkan kurang berhasilnya implementasi kebijakan ketahanan pangan daerah pada program peningkatan produksi beras (P2BN) di Kabupaten Kotawaringin Barat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber informasi terdiri dari unsur birokrasi, masyarakat petani dan LSM. Sumber data dalam penelitian ini ditentukan dengan snowball sampling. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi dan wawancara. Analisa data terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan /verifikasi. Hasil penelitian Implementasi kebijakan ketahanan pangan daerah (Study Pada Program Peningkatan Produksi Beras Nasional /P2BN) di Kabupaten Kotawaringin Barat belum optimal. Faktor – faktor yang mempengaruhi adalah organisasi pelaksana implementasi kebijakan kurang mampu menggerakkan organisasi, sumberdaya kurang memadai, Disposisi atau komitmen pelaksana rendah, Kebijakan Top Down, Identifikasi Permasalahan tidak diidentifikasi sejak dini, Komunikasi dan kordinasi kurang, Keterpaduan dan kondisi eksternal. berpengaruh sangat besar terhadap keberhasilan peningkatan produksi beras antar lain faktor alam, kondisi lahan, serangan hama penyakit tanaman, adanya alih fungsi lahan pertanian pangan ke non pangan .

**Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Ketahanan Pangan, Daerah
Program, Peningkatan Poduksi Beras, Nasional**

ABSTRACT

REGIONAL FOOD SECURITY POLICY IMPLEMENTATION (Studies in the National Rice Production Enhancement Program / P2BN in West Kotawaringin)

Suryati²
suryanuraini@ymail.com
Graduate Program
Universitas Terbuka

Food is a basic need for human, and the fulfillment is the part of human rights, and has to be guaranteed by Constitutions of Indonesia Year 1945. Food security is an improvement for availability of the sufficient food, by implementing self-sufficient food strategies and increasing the food production on food security targets by domestic production. Regional food security policy implemented through the National Rice Production Enhancement Program. The implementation of food security policies through P2BN program is expected to meet the food needs of local areas of production. Meeting the needs of local food production is still far from complete, this shows that the West Kotawaringin still vulnerable food insecure if disrupted supplies from outside the region happened. The purpose of this study is to describe and analyze the factors-factors that can lead to less successful implementation of regional food security policy on rice production enhancement program (P2BN) in West Kotawaringin. This study uses descriptive qualitative approach. Sources of information consisting of elements of the bureaucracy, farming communities and NGOs. Sources of data in this study was determined by snowball sampling. Collecting data using observation and interviews. The data analysis consists of three concurrent flow of activities: data reduction, data display and conclusion drawing/verification. The results of the research areas of food security policy implementation (Study in National Rice Production Enhancement Program / P2BN) in West Kotawaringin not optimal. Factors-factors that affect the implementation of the policy is the implementing organizations are less able to move the organization, resource inadequate, disposition or commitment to implementing low, Top Down Policies, Identification Problems are not identified early, less communication and coordination, and integration of external conditions. A great impact on the success of the increase in rice production among the natural factors, soil conditions, plant pests and diseases attack, the transfer of agricultural land Functions of food to non-food function.

Keywords: Implementation, Policy, Food Security, Regional Programs, production Rice Improvement, National

²Mahasiswa Program PascaSarjana, Magister Administrasi Publik, Universitas Terbuka. Email : suryanuraini@ymail.com

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA**

PERNYATAAN

Tugas Akhir Program Magister (TAPM) dengan judul; **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETAHANAN PANGAN DAERAH (Study Pada Program Peningkatan Produksi Beras Nasional di Kabupaten Kotawaringin Barat)**, adalah hasil karya saya sendiri dan seluruh sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Palangka Raya, Agustus 2014

Yang Menyatakan,



**Ir. SURYATI
NIM. 018788364**

LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

Judul TAPM : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETAHANAN PANGAN DAERAH (Study Pada Program Peningkatan Produksi Beras Nasional/P2BN di Kabupataen Kotawaringin Barat).

Penyusun TAPM : SURYATI

NIM : 018788364

Program Studi : Magister Administrasi Publik (MAP)

Hari/Tanggal : Sabtu / 23 Agustus 2014

Menyetujui :

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. IMAM HANAFLI, S.Sos, M.Si
NIP. 196910021998021001

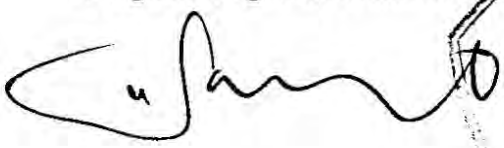


Dr. LIESTYODONO B. IRIANTO, M.Si
NIP. 195812151986011009

Mengetahui :

Ketua Bidang Ilmu Administrasi Publik
Program Magister Administrasi Publik

Direktur Program Pascasarjana



Dr. Darmanto, M.Ed
NIP. 195910271986031003



SUCIATI, M.Sc, Ph.D
NIP. 19520213 198503 2 001

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCA SARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

PENGESAHAN

Nama : SURYATI
NIM : 018788364
Program Studi : Magister Administrasi Publik (MAP)
Judul TAPM : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETAHANAN PANGAN
DAERAH (Study Pada Program Peningkatan Produksi Beras
Nasional/P2BN di Kabupaten Kotawaringin Barat)

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister
(TAPM) Administrasi Publik Program Pasca Sarjana Universitas Terbuka pada :

Hari/Tanggal : Sabtu / 23 Agustus 2014

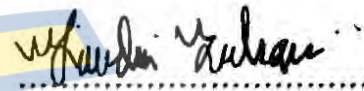
Waktu : 09.00 - 11.00 WIB

dan telah dinyatakan **LULUS**

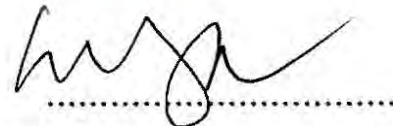
PANITIA PENGUJI TAPM

Tanda Tangan

Ketua Komisi Penguji
Aminuddin Zuhairi, M.Ed., Ph.D



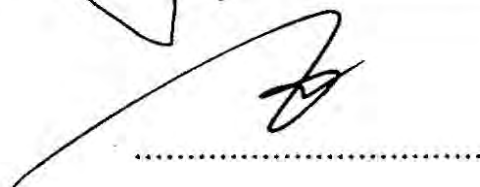
Penguji Ahli
Prof. Dr. Irfan Ridwan Maksum, M.Si



Pembimbing I
Dr. Imam Hanafi, S.Sos, M.Si



Pembimbing II
Dr. Liestyodono B. Irianto, M.Si



Tugas Akhir Program Magistar (TAPM) ✓

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan yang maha kuasa atas rahmad dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tugas Akhir Program Magister. Penulisan ini mengambil judul **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETAHANAN PANGAN DAERAH (STUDY PADA PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI BERAS NASIONAL DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT) “**

Tugas Akhir Program Magister (TAPM) ini diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains dalam Ilmu Administrasi Bidang Minat Administrasi Publik pada Universitas Terbuka. Keberhasilan penulis pada proses akademis yang dijalani tidak lepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada:

1. Prof. DR. HOLTEN SION, M. Pd, selaku kepala UPBJJ Palangka Raya yang telah banyak memberikan keleluasaan bagi mahasiswa PPs MAP untuk berkreasi.
2. DR. IMAM HADAFI, M.Si, selaku pembimbing I penulisan tesis ini. Beliau dengan penuh kesabaran dan ketulusan telah meluangkan waktu dan tenaga untuk memberikan bimbingan, referensi, arahan dan motivasi yang sangat berharga selama perkuliahan dan selama penyusunan Tugas Akhir Program Magister ini.

3. DR. LIESTYODONO B. IRIANTO, M.Si, selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan serta referensi, arahan dan motivasi bagi penulis.
4. Sdri. STEFANIE MADE AYU, M.Si, yang telah memberikan berbagai bantuan terutama untuk kelancaran proses tutorial hingga penyelesaian Tugas Akhir Program Magister ini.
5. Pengelola PPs MAP Pangkalan Bun dan Nanga Bulik serta seluruh unsur pimpinan dan staf UPBJJ UT Palangka Raya yang telah banyak memberikan kemudahan kepada penulis saat melakukan penulisan tugas studi mandiri ini.
6. Semua keluarga, sahabat, kolega, rekan dan pihak yang memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung selama penyelesaian studi ini.

Semoga Allah SWT memberikan rahmat-Nya kepada semua pihak yang telah membantu seimbang dengan amal baiknya. Penulis menyadari bahwa karya ini bukan satu – satunya ungkapan yang harus disetujui, namun justru terbuka untuk diteliti, dikaji dan dikritik. Tiada gading yang tak retak, penulis harapkan kritik untuk kesempurnaan tulisan ini.

Palangka Raya, Agustus 2014

Penulis



SURYATI
NIM.018788364

DAFTAR ISI

	Halaman
Abstrak	i
Abstract	ii
Pernyataan	iii
Lembar Persetujuan	iv
Lembar Pengesahan	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	viii
Daftar Tabel	xii
Daftar Grafik	xiii
Daftar Gambar	xiv
Daftar Lampiran	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kegunaan Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Kajian Teori	13
1. Kebijakan Publik	13
a. Pengertian Kebijakan Publik	13
b. Model Kebijakan Publik	14
2. Implementasi Kebijakan Publik	19
3. Faktor – faktor yang mempengaruhi implementasi Kebijakan Publik	21
4. Kebijakan Swasembada Beras	26

	a. Beras dan Kebijakan Pangan	26
	b. Persoalan Produksi Pangan	29
	c. Politik Perberasan	32
	d. Strategi Peningkatan Produksi Beras	34
	B. Tinjauan Penelitian Terdahulu	35
	C. Kerangka Berpikir	40
	D. Operasionalisasi Konsep	41
BAB III	METODOLOGI PENELITIAN	49
	A. Desain Penelitian	49
	B. Fokus Penelitian dan Lokus Penelitian	50
	C. Sumber Informasi dan Pemilihan Informan	51
	D. Instrumen Penelitian	51
	E. Prosedur Pengumpulan Data	52
	F. Metode Analisis Data	52
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	55
	A. Diskripsi Obyek Penelitian	55
	1. Luas Wilayah dan Letaetak Geografis	55
	2. Topografi	56
	3. Geomorfologi	57
	4. Iklim	57
	5. Potensi Lahan	58
	6. Demografi	61
	7. Kondisi Tanaman Pangan dan Hortikultura	62
	B. Hasil Penelitian.....	64
	1. Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan Daerah Pada Program Peningkatan Produksi Beras Nasional /P2BN di Kabupaten Kotawaringin	64
	a. RuangLingkup.....	76
	b. Dasar Hukum.....	77
	c. Tujuan.....	78

d. Organisasi.....	78
e. Uraian Tugas.....	80
f. Pelaksanaan Kegiatan.....	82
g. Sosialisasi.....	87
h. Indikator Kinerja.....	88
2. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan Daerah Pada Program Peningkatan Produksi Beras Nasional / P2BN di Kabupaten Kotawaringin Barat	97
a. Struktur Birokrasi	97
b. Sumber Daya.....	104
c. Disposisi.....	106
d. Kebijakan Top Down.....	108
e. Idenfikasi Permasalahan.....	111
f. Komunikasi dan Koordinasi.....	113
g. Keterpaduan.....	114
h. Kondisi Eksternal.....	115
C. Pembahasan	116
1. Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan Daerah Pada Program Peningkatan Produksi Beras Nasional / P2BN di Kabupaten Kotawaringin	116
2. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan Daerah Pada Program Peningkatan Produksi Beras Nasional / P2BN di Kabupaten Kotawaringin Barat	118
a. Struktur Birokrasi	118
b. Sumber Daya.....	124
c. Disposisi.....	126
d. Kebijakan Top Down.....	128
e. Idenfikasi Permasalahan.....	129

	f. Komunikasi dan Koordinasi.....	130
	g. Keterpaduan.....	131
	h. Kondisi Eksternal.....	132
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	133
	A. KESIMPULAN	133
	B. SARAN	135
	DAFTAR PUSTAKA	136



DAFTAR TABEL

1.	Tabel 2.1.	Penelitian Terdahulu Jadwal Yang Relevan	36
2.	Tabel 4.1.	Luas Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat Menurut Kecamatan	56
3.	Tabel 4.2.	Data Ketinggian dan Kemiringan Lahan	57
4.	Tabel 4.3	Potensi Lahan	58
5.	Tabel 4.4.	Penyebaran Tekstur Tanah	59
6.	Tabel 4.5.	Penyebaran Faktor Pembatas Kemampuan Lahan	60
7.	Tabel 4.6.	Jumlah Penduduk Per Kecamatan Tahun 2010	61
8.	Tabel 4.7.	Jumlah Rumah Tangga, Penduduk dan Sex Ratio	62
9.	Tabel 4.8.	Kepadatan Penduduk/ Km ² dan Rata – Rata Penduduk Per Rumah Tangga	62
10.	Tabel 4.9.	Capaian Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2009 s/d 2016	63
11.	Tabel 4.10.	Realisasi Luas Tanan dan Luas Panen	84
12.	Tabel 4.11	Sasaran Tanam dan Luas Panen	85
13.	Tabel 4.12.	Sasaran Produksi Tahun 2012	85
14.	Tabel 4.13.	Sasaran Produksi Tahun 2013	88
15.	Tabel 4.14.	Peningkatan Luas Areal.....	89
16.	Tabel 4.15.	Bantuan Sapropdi.....	92
17.	Tabel 4.16.	Rekomendasi Tehnologi Dari BPTP Kalimantan Tengah.....	95

18. **Tabel 4.17. Pelaksanaan Anggaran Kegiatan APBN, APBD Propinsi / Kabupaten Kantor Penyuluhan dan Ketahanan Pangan 100**
19. **Tabel 4.18. Ketersediaan Pangan (Beras) di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2013 109**



DAFTAR GRAFIK

1.	Grafik	1.1	Perbandingan Kebutuhan dan Ketersediaan Beras	8
2.	Grafik	1.2	Data Potensi Lahan Sawah Per Kecamatan	8
3.	Grafik	1.3.	Tingkat Produktifitas Padi	9
4.	Grafik	4.1.	Sasaran Produksi 2012-2016.....	84
5.	Grafik	4.2.	Perbandingan Jumlah Penyuluh dan Jumlah Kelompok Tani	105



DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 2.1	Faktor Penentu Implementasi menurut Edward III	24
2. Gambar 2.2	Kerangka Pikir	41
3. Gambar 4.1.	Peta Kabupaten Kotawaringin Bar	54
4. Gambar 4.2.	Strategi Percepatan Peningkatan Produksi Padi	83



DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1	Pedoman Wawancara	136
2. Lampiran 2	Transkrip Wawancara	177
3. Lampiran 3	Permentan Nomor 45/Permentan OT.140/8/2011 Tanggal 23 Agustus 2011 tentang Tata Hubungan Kerja Antar Kelembagaan Teknis, Penelitian dan Pengembangan dan Penyuluhan dalam mendukung Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN).....	198
4. Lampiran 4	Surat Keputusan Bupati Nomor DKP/228.1/V/2010 Tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Barat	199
5. Lampiran 5	Surat Keputusan Bupati Nomor DKP/154/III/2012 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Barat	203
6. Lampiran 6	Surat Keputusan Bupati Nomor : PPP.020/11.a/I/2013 Tentang Tim Pelaksana Tingkat Kabupaten, tingkat Kecamatan dan Tingkat Desa Pada Pos Simpul Koordinasi (POSKO) P2BN di Kabupaten Kotawaringin Barat	208
7. Lampiran 7	Foto Dokumentasi Wawancara	218
8. Lampiran 8	Daftar Riwayat Hidup.....	218

DAFTAR LAMPIRAN

1.	Lampiran 1	Badanan Wawancara	130
2.	Lampiran 2	Transkrip Wawancara	167
3.	Lampiran 3	Foto Dokumentasi Wawancara	194
4.	Lampiran 4	Permentan Nomor 45/Permentan UF.140/8/2011 Tanggal 23 Agustus 2011 tentang Tata Hubungan Kerja Antar Kelembagaan Teknis Penelitian dan Pengembangan dan Penyuluhan dalam mendukung Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN).....	213
5.	Lampiran 5	Surat Keputusan Bupati Nomor DKP/228.1/V/2010 Tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Barat	267
6.	Lampiran 6	Surat Keputusan Bupati Nomor DKP/154/III/2012 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Barat	272
7.	Lampiran 7	Surat Keputusan Bupati Nomor : PPP.020/II.a/I/2013 Tentang Tim Pelaksana Tingkat Kabupaten, tingkat Kecamatan dan Tingkat Desa Pada Pos Simpul Koordinasi (POSKO) P2BN di Kabupaten Kotawaringin Barat	275
8.	Lampiran 8	Daftar Riwayat Hidup.....	285

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pangan merupakan kebutuhan dasar bagi manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas (UU No. 18 tahun 2012 tentang pangan). Negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumberdaya, kelembagaan, dan budaya lokal.

Penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan yang bertujuan untuk : (1) meningkatkan kemampuan memproduksi pangan secara mandiri, (2) menyediakan pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan gizi bagi konsumsi masyarakat, (3) mewujudkan tingkat kecukupan pangan, terutama pangan pokok dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat, (4) mempermudah atau meningkatkan

akses pangan bagi masyarakat terutama masyarakat rawan pangan dan gizi, (5) meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas pangan di pasar dalam negeri dan luar negeri, (7) meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pangan yang aman, bermutu dan bergizi bagi konsumsi masyarakat, (8) meningkatkan kesejahteraan bagi petani, nelayan dan pembudidaya ikan, dan pelaku usaha pangan dan (9) melindungi dan mengembangkan kekayaan sumber daya pangan nasional.

Ketahanan pangan merupakan capaian peningkatan ketersediaan pangan dengan ruang lingkup wilayah nasional, sasaran utamanya adalah komoditas pangan dari produk pertanian seperti beras, jagung kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar dengan menerapkan strategi swasembada pangan melalui peningkatan produksi pangan dengan target ketersediaan pangan oleh hasil produk domestik (tidak impor).

Aspek ketahanan pangan terdiri dari 4 (empat) yaitu ketersediaan, akses, penyerapan pangan dan stabilitas pangan. Ketersediaan, akses dan penyerapan pangan merupakan aspek yang harus terpenuhi secara utuh. Apabila salah satu aspek tersebut tidak terpenuhi maka suatu negara belum dapat dikatakan mempunyai ketahanan pangan yang cukup baik. Dari sisi ketersediaan pangan pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab atas ketersediaan pangan daerah dan pengembangan produksi pangan lokal di daerah.

Untuk menjamin ketersediaan pangan dari produksi dalam negeri Presiden Republik Indonesia pada sidang kabinet terbatas tanggal 6

September 2011 dan Pidato Kebijakan setelah Pelantikan Kabinet Indonesia Besatu II tanggal 19 Oktober 2011, mengamanatkan bahwa produksi pangan dalam negeri harus mampu menyediakan surplus beras sebesar 10 juta ton pada tahun 2014. Kebijakan ini layak mendapat perhatian dari berbagai pihak termasuk dari kalangan akademisi dan mempunyai arti yang sangat strategis serta membawa implikasi yang cukup luas bagi setiap daerah untuk menajamkan skala prioritas pembangunan yang menjadi tanggung jawabnya. Terlebih dalam rangka pengentasan kemiskinan dan fasilitasi pelayanan kepada masyarakat yang masih tertinggal dilapisan bawah secara lebih adil. Hal ini jelas merupakan agenda penting yang perlu mendapat perhatian setiap daerah.

Dalam konteks pembangunan, peningkatan ketersediaan pangan terutama program peningkatan produksi beras merupakan bagian dari kebijakan publik di bidang pangan. Pada tataran realita, ternyata pelaksanaan program peningkatan produksi beras yang sudah berjalan beberapa tahun belum mampu menunjukkan adanya tingkat ketersediaan yang mencukupi untuk konsumsi dalam negeri. Petani dihadapkan pada kondisi yang tidak menguntungkan akibat politik ekonomi pemerintah, kondisi iklim yang tidak bersahabat serta tingkat aksesibilitas petani terhadap teknologi dan permodalan.

Untuk mewujudkan pembangunan pertanian perlu upaya – upaya yang harus dilaksanakan oleh seluruh komponen bangsa untuk memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya usaha – usaha tanaman pangan yang mampu menghasilkan produk dari hulu sampai hilir, yang

berorientasi pada peningkatan produksi (ketersediaan) dan peningkatan pendapatan. Untuk itu faktor produktivitas, peningkatan kapasitas usaha serta optimalisasi efisiensi usaha, nilai tambah dan daya saing menjadi indikator penting, sehingga arah dan kebijakan program peningkatan produksi, produktivitas, dan mutu tanaman pangan untuk mencapai swasembada dan swasembada berkelanjutan menjadi sangat prioritas.

Untuk mewujudkan surplus beras, Kementerian Pertanian telah menetapkan sasaran produksi padi pada tahun 2012 sebesar 72,03 juta ton GKG, tahun 2013 sebesar 75,63 juta ton, dan pada tahun 2014 sebesar 79,41 juta ton GKG. Strategi untuk mencapai surplus beras sebesar 10 juta ton, Kementerian Pertanian melakukan upaya-upaya: (1) Peningkatan produktivitas; (2) Perluasan areal dan optimasi lahan; (3) Penurunan konsumsi beras; dan (4) Penyempurnaan manajemen Gerakan Massal P2BN. Untuk mewujudkan surplus beras tersebut, pada tahun 2012 diperlukan luas tanam sebesar 14,02 juta ha. Dari luasan tersebut, kegiatan SL-PTT memerlukan luas tanam sebesar 3,5 juta ha, GP3K sebesar 1,14 juta ha, SRI sebesar 60 ribu ha, swadaya murni petani sebesar 8,85 juta ha, dan sisanya (perluasan areal tanam dan pengurangan lahan) sebesar 0,47 juta ha.

Gerakan masal program peningkatan produksi beras nasional (P2BN) secara otomatis akan mempengaruhi dalam setiap aspek pembangunan pertanian terutama sektor tanaman pangan di daerah untuk mewujudkan ketahanan pangan daerah dengan prinsip demokrasi,

partisipasi, efisiensi dan efektifitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam kebijakan ketahanan pangan daerah dilaksanakan melalui Program Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) berdasarkan pendekatan komoditas antara lain adalah pengembangan tanaman pangan khususnya padi/beras. Hal itu sesuai dengan kajian teknis potensi wilayah dan seiring dengan komitmen daerah untuk berperan serta dalam upaya program percepatan swasembada dan swasembada berkelanjutan yang telah dicanangkan oleh pemerintah pusat.

Program Peningkatan Produksi Beras (P2BN) dilaksanakan dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah pusat serta untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat terhadap beras di Kabupaten Kotawaringin Barat yang sampai saat ini hanya dapat dipenuhi dari produksi daerah sendiri baru sebesar $\pm 45\%$ dari total kebutuhan, sisanya masih dipasok dari luar daerah, terutama dari Kalimantan Selatan dan pulau Jawa. Kondisi ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Kotawaringin Barat masih rentan rawan pangan apabila pasokan dari luar daerah terhambat. Disamping itu potensi pengembangan komoditi pertanian terutama padi/beras masih sangat besar. Namun demikian upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mencukupi kebutuhan beras dari produksi daerah sendiri memerlukan kerja keras dari semua pihak.

Secara garis besar permasalahan peningkatan produksi beras di Kabupaten Kotawaringin Barat menunjukkan bahwa menghadapi berbagai

macam permasalahan mulai dari kondisi lahan yang marjinal, tata air yang sebagian hanya mengandalkan tadah hujan, dan pasang surut, kelembagaan dan permodalan petani yang masih lemah acaman alih fungsi lahan ke non tanaman pangan, kurangnya pengetahuan tentang tehnologi pertanian akibat tranfer tehnologi yang lamban serta kurangnya minat masyarakat terhadap usaha pertanian tanaman pangan.

Sejalan dengan hal tersebut diatas pembangunan pertanian tanaman pangan perlu mendapat perhatian yang cukup besar dari pemerintah daerah, oleh karena itu kebijakan dalam peningkatan produksi beras perlu dirumuskan untuk mencapai target swasembada beras daerah melalui program – program yang pro rakyat.

Pencapaian target produksi padi/beras berdasarkan skenario swasembada beras dilaksanakan dengan meningkatkan kinerja lembaga lembaga teknis bidang pertanian yaitu Lembaga Penelitian, Lembaga Penyuluhan dan Dinas Teknis melalui penerbitan Permentan nomor ; 45/Permentan OT.140/8/2011 tanggal 23 Agustus 2011 tentang Tata Hubungan Kerja Antar Kelembagaan Teknis, Penelitian dan Pengembangan dan Penyuluhan dalam Mendukung Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN).

Sesuai Permentan tersebut untuk meningkatkan sinergitas dan koordinasi dalam pelaksanaan program P2BN, maka dibentuk Tim Pengendali di Tingkat Pusat, Tim Pembina di Tingkat Propinsi, dan Tim Pelasana di Tingkat Kabupaten /Kota dan Kecamatan. Tim Pelaksana

Tingkat Kabupaten adalah Dinas Teknis yang membidangi tanaman pangan, Badan Penyuluhan dan Peneliti Pendamping pada Balai Pengkajian Tehnologi Pertanian (BPTP) dan Tim Tingkat Kecamatan terdiri dari Camat, UPTD pertanian, Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan, Kepala Desa, Penyuluh Pertanian serta petugas pertanian yang terkait. Oleh Karena itu implementasi kebijakan ketahanan pangan melalui program P2BN sangat tergantung kepada lembaga – lembaga tersebut diatas.

Walaupun Pemerintah Daerah sudah mencanangkan Program Ketahanan Pangan Daerah dengan membentuk posko P2BN mulai dari Tingkat Kabupaten sampai Tingkat Desa, dan produksi beras terus mengalami kenaikan namun untuk pemenuhan kebutuhan pangan dari produksi sendiri masih jauh dari harapan, hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Kotawaringin Barat masih rentan rawan pangan apabila dari sisi pasokan dari daerah luar terganggu. Hal ini bisa dilihat dari grafik 1.1 pada halaman 8 berikut ini :

Grafik 1.1

Perbandingan Kebutuhan dan Ketersediaan Beras

**PRODUKSI vs KEBUTUHAN BERAS
TAHUN 2006 - 2011**


Sumber Data : Distanak Kobar

Dari sisi potensi lahan, pemanfaatan lahan di Kabupaten Kotawaringin Barat juga masih sangat rendah sebagaimana terlihat dari grafik berikut :

Grafik 1.2

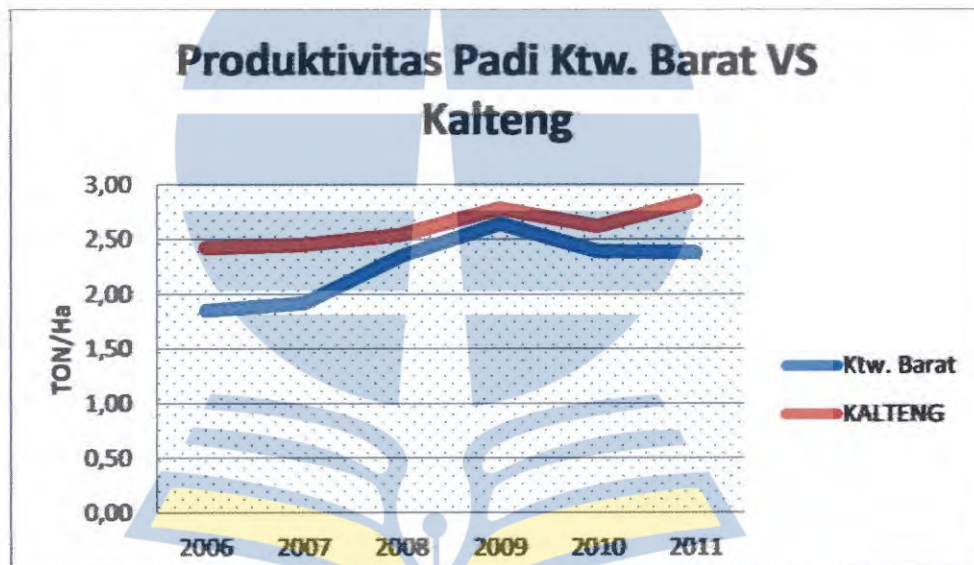
Data Potensi Lahan Sawah



Sumber : Distanak Kobar

Dari sisi produktivitas padi di Kotawaringin Barat masih dibawah rata rata produksi propinsi yaitu sebesar 27,78 Kw/Ha sedangkan produktivitas propinsi sebesar 29.17 Kw/Ha. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat penerapan tehnologi masih rendah yang disebabkan lambannya transfer tehnologi. Perbandingan produktifitas padi Kabupaten Kotawaringin Barat dengan produktifitas padi Propinsi Kalimantan Tengah sebagaimana tercantum pada grafik 1.3 berikut ini :

Grafik 1.3
Tingkat Produktifitas Padi



Sumber : Distanak Kobar (diolah)

Masih belum optimalnya program peningkatan produksi beras (P2BN) di Kabupaten Kotawaringin Barat tidak terlepas dari bagaimana peran aktor – aktor implementor kebijakan dalam melaksanakan kebijakan publik. Keberhasilan implementasi suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh delivery mechanism (mekanisme penyampaian). Purwanto, E,A dan Sulistyastuti,D.R.(2012:125) menyebutkan bahwa delivery mechanism

keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh implementing agency, yaitu keberadaan organisasi atau lembaga yang diberi mandat untuk mengimplementasikan suatu kebijakan.

Berdasarkan pada permasalahan diatas, peneliti tertarik untuk memahami lebih jauh tentang persoalan – persoalan yang menghambat peningkatan produksi pangan /beras dan langkah – langkah yang ditempuh oleh pemerintah daerah sebagai upaya memenuhi kebutuhan pangan daerah dan mencapai swasembada beras. Apakah penyelenggaraan program peningkatan produksi beras sudah sesuai dengan Permentan 45/Permentan OT.140/8/2011 tanggal 23 Agustus 2011. Oleh Karena itu peneliti mengambil judul “ Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan Daerah” (Study pada Program Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) di Kabupaten Kotawaringin Barat.

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Identifikasi Masalah.

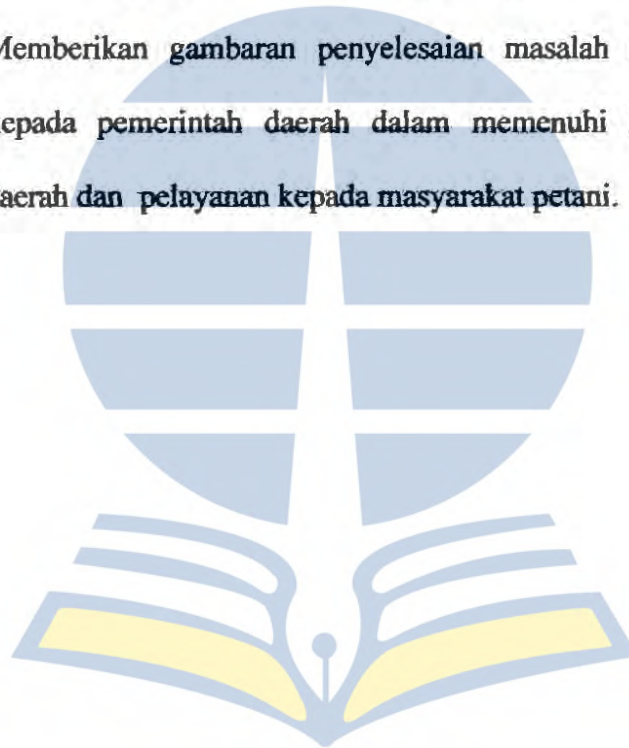
Berbagai persoalan - persoalan yang mempengaruhi terhadap upaya pencapaian peningkatan produksi beras adalah :

- a. Tingkat produktivitas dan produksi padi sangat rendah.
- b. Transfer tehnologi sangat lambat sehingga tingkat pengetahuan petani sangat rendah.
- c. Penguasaan Tehnologi petani sangat rendah karena minimnya informasi tehnologi baru.
- d. Kurang pedulinya petani terhadap program – program peningkatan produksi beras.

- b. Meningkatkan penguasaan teori – teori yang relevan atas permasalahan dan penguasaan konsep dasar yang berhubungan dengan kebijakan peningkatan produksi beras.

2. Kegunaan Praktis

- a. Penelitian ini berguna untuk mengetahui permasalahan – permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah dalam mewujudkan ketahanan pangan melalui peningkatan produksi beras.
- b. Memberikan gambaran penyelesaian masalah serta rekomendasi kepada pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan pangan daerah dan pelayanan kepada masyarakat petani.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Kebijakan Publik

a. Pengertian Kebijakan Publik

Istilah Kebijakan publik secara luas dapat diartikan suatu keputusan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan untuk kepentingan publik. Menurut Krismartini, dkk, (2005:1.4-1.5) definisi kebijakan publik mengandung hal –hal sebagai berikut :

- 1) Tujuan tertentu yang ingin dicapai. Tujuan tertentu yang berpihak kepada kepentingan masyarakat (interest publik)
- 2) Serangkaian tindakan untuk mencapai tujuan. Serangkaian tindakan untuk mencapai tujuan adalah strategi yang disusun untuk tujuan dengan lebih mudah yang acapkali dijabarkan kedalam bentuk program dan proyek – proyek.
- 3) Usulan tindakan dapat berasal dari perorangan atau kelompok dari dalam atau luar pemerintahan.
- 4) Penyediaan input untuk melaksanakan strategi input berupa sumberdaya baik manusia maupun bukan manusia.

Thomas R. Dye (Krismartini, 2005:1.6) menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan dalam upaya mencapai tujuan negara, pemerintah perlu mengambil pilihan langkah tindakan yang dapat berupa

melakukan atau tidak melakukan suatu apapun merupakan kebijakan publik karena merupakan upaya pencapaian tujuan dan pilihan tersebut memiliki dampak publik yang sama besarnya dengan pilihan langkah untuk melakukan sesuatu terhadap masyarakat. James E. Anderson (Indiahono.H, 2009:17) mendefinisikan kebijakan sebagai perilaku dari sejumlah aktor (Pejabat, Kelompok, Instansi Pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Pembicaraan tentang kebijakan memang tidak terlepas dari kepentingan antar kelompok, baik tingkat pemerintahan maupun masyarakat secara umum. Sedangkan Indiahono, (2009:18), menyatakan bahwa kebijakan publik dalam kerangka substantif adalah segala aktifitas yang dilakukan pemerintah untuk memecahkan masalah publik yang dihadapi untuk memenuhi kepentingan dan penyelenggaraan urusan – urusan publik.

b. Model Kebijakan Publik

Model adalah abstraksi dari realita. Mustopadidjaja (Krismartini, dkk. 2005: 1.21) merumuskan model sebagai penyederhanaan dari kenyataan persoalan yang dihadapi, diwujudkan dalam hubungan – hubungan kausal atau fungsional. Model dapat digambarkan dalam bentuk skematik (seperti Flowchat dan arrow diagram). Menurut Ali, F dan Alam AS (2012:107) model kebijakan publik berdasarkan keperluan implementasi dibagi menjadi 4 (empat) model yaitu :

1) Model Mazmanian dan Sabatier

Model mazmanian dan Sabatier adalah model yang dikembangkan dan disusun atas dasar proses implementasi kebijakan. Sebagai suatu proses ditegaskan bahwa dalam tahapan implementasi kebijakan terdapat tiga variabel bebas yang dapat berpengaruh yaitu : (1) mudah tidaknya masalah dikendalikan: (2) kemampuan kebijaksanaan untuk menstrukturkan proses implementasi dan (3) variabel diluar kebijaksanaan yang mempengaruhi proses implementasi. Dari ketiga variabel bebas, Variabel (1) berpengaruh secara langsung terhadap variabel (2) dan (3). Sedangkan variabel tergantung adalah tahapan – tahapan dalam proses implementasi yang akan terjadi. Tahapan kegiatan bawah dari output kemudian diikuti oleh keadaan kesediaan kelompok sasaran. Untuk kemudian memberikan dampak nyata yang selanjutnya dipersepsi dan berakhir pada tahapan perbaikan yang mendasar dalam undang – undang . Adapun indikator dari variabel mudah/tidaknya masalah kebijakan adalah terdiri dari :

- (1) Kesukaran – kesukaran tehnis keragaman prilaku kelompok sasaran.
- (2) Prosentase kelompok sasaran dibandingkan jumlah penduduk.
- (3) Ruang lingkup perubahan prilaku yang diinginkan.

Sedangkan pada variabel kemampuan kebijakan indikatornya adalah sebagai berikut :

- (1) Kejelasan dan konsistensi tujuan.
- (2) Digunakannya teori kausal yang memadai.
- (3) Ketetapan alokasi sumber dana.
- (4) Keterpaduan hierarki dalam dan diantara lembaga pelaksana.
- (5) Aturan – aturan keputusan dari badan pelaksana.
- (6) Rekrutmen Pejabat pelaksana.
- (7) Akses formal pihak luar.

Variabel diluar kebijakan indikatornya adalah : (1) Kondisi sosial ekonomi dan teknologi; (2) Dukungan Publik; (3) Sikap sumber sumber yang dimiliki kelompok – kelompok; (4) komitmen dan Kemampuan Kepemimpinan pejabat – pejabat pelaksana.

2. Model Hogwood dan Gun

Model yang dikembangkan oleh Hogwood dan Gunn (Wahab, 1995) yang menjelaskan bahwa dalam kebijaksanaan negara secara sempurna diperlukan beberapa syarat yaitu ; (1) Hal yang akan menimbulkan gangguan/kendala yang serius; (2) Untuk pelaksana program tersedia waktu dan sumber – sumber yang cukup memadai; (3) perpaduan sumber – sumber yang diperlukan cukup memadai; (4) Kebijakan yang akan diimplementasikan didasari oleh suatu hubungan kausalitas yang andal; (5) Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya

sedikit mata rantai penghubungnya; (6) Hubungan saling ketergantungan harus kecil; (7) Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan ; (8) Tugas – tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat: (9) Komunikasi dan koordinasi yang sempurna; (10) Pihak – pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

3. Model Grindle

Model yang dikembangkan oleh Grindle (Wibawa dkk, 1995) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan ditentukan oleh isi dan konteks implementasinya. Kedua hal tersebut harus didukung oleh program aksi dan proyek individu yang didesain dan dibiayai, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan akan memberikan hasil berupa dampak pada masyarakat, individu dan kelompok serta perubahan dan penerimaan oleh masyarakat terhadap kebijakan yang dilaksanakan. Indikator isi kebijakan menurut Grindle adalah : (1) kepentingan yang dipengaruhi; (2) Tipe Manfaat; (3) derajat perubahan yang diharapkan; (4) letak pengambilan keputusan; (5) Pelaksana Program; (6) sumber daya yang dilibatkan. Sedangkan konteks implementasi indikatornya adalah : (1) Kekuasaan, strategi aktor yang terlibat: (2) Karakteristik lembaga dan penguasa; (3) Kepatutan daya tanggap.

4. Model Meter dan Horn.

Model Meter dan Horn adalah model yang dikembangkan Meter dan Horn (Wahab, 1995) yang mengemukakan perbedaan – perbedaan dalam proses implementasi dipengaruhi oleh sifat kebijaksanaan yang akan dilaksanakan. Dikemukakan bahwa jalan yang menghubungkan antara kebijaksanaan dan prestasi kerja dipisahkan oleh sejumlah variabel – variabel bebas yang saling berkaitan yang terdiri dari : (1) Variabel ukuran dan tujuan kebijaksanaan serta variabel sumber – sumber kebijaksanaan sebagai dua variabel yang secara bersama – sama mempengaruhi variabel komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksanaan; (2) Variabel sumber – sumber kebijakan mempengaruhi variabel sikap para pelaksana dan variabel lingkungan ekonomi, sosial dan politik; (3) Variabel komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksanaan mempengaruhi variabel sikap para pelaksana dan ciri badan pelaksana; (4) Variabel lingkungan ekonomi, sosial dan politik mempengaruhi ciri badan pelaksana dan variabel sikap para pelaksana; (5) Variabel ciri badan pelaksana disamping mempengaruhi variabel sikap para pelaksana juga mempengaruhi variabel komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksanaan; (6) Variabel sikap para pelaksana yang telah terbentuk oleh berbagai variabel, yang telah mempengaruhi

prestasi kerja sebaliknya prestasi kerja akan mempengaruhi pula oleh ciri badan pelaksana.

2. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi adalah tahap tindakan/aksi, dimana semua perencanaan yang dirumuskan menjadi kebijakan yang dioperasionalkan (Denhardt, 1995:25). Selanjutnya dalam memahami implementasi kebijakan berarti memahami apa yang terjadi sesudah suatu program dilaksanakan atau dirumuskan. Peristiwa – peristiwa dan kegiatan - kegiatan yang terjadi setelah proses pengesahan kebijakan, baik yang berhubungan dengan usaha pengadministrasian-nya, maupun usaha – usaha untuk memberikan dampak nyata pada masyarakat (Mazmanian dan Sabatier, 1986:4). Sedangkan Taufan L.A 2013 menyebutkan bahwa Implementasi merupakan suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan dengan harapan akan memperoleh suatu hasil yang sesuai dengan tujuan satu sasaran dari suatu kebijakan itu sendiri.

Study implementasi yang paling pokok ialah mempelajari bagaimana kinerja suatu kebijakan, serta mengkaji secara kritis faktor – faktor yang mempengaruhi suatu kebijakan dalam mencapai tujuan kebijakan (Effendi, 2000). Keterlibatan aktor – aktor dalam perumusan kebijakan kemudian menjadi ciri khusus dari kebijakan publik, kenyataan ini disebabkan kebijakan itu diformulasikan oleh penguasa dalam suatu sistem politik yaitu para sesepuh petinggi suku, anggota – anggota eksekutif, legislatif, yudikatif, administrator, penasehat, raja

dan semacamnya (Budi Winarno, 2000:18). Tujuan lain dalam mempelajari implementasi kebijakan publik adalah menyangkut konflik dan keputusan serta siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan (Wahab, 1997:59).

Banyak konsep implementasi kebijakan yang pernah dibahas para ahli, salah satunya adalah yang dikemukakan oleh Meter dan Horn (dalam Samudra Wibawa, 1994:15) yang mendefinisikan bahwa implementasi kebijakan sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah baik secara individu maupun kelompok yang bertujuan untuk mencapai sebagaimana yang telah dirumuskan dalam kebijakan. Implementasi kebijakan sebagai tindakan – tindakan yang dilakukan individu atau kelompok – kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan – tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan – keputusan kebijakan sebelumnya (Budi Winarno, 2002:102). Implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh faktor perilaku birokrasi pelaksana, perilaku sangat dipengaruhi oleh lingkungan.

Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier (dalam Sholichin Abdul Wahab, 1997:68) menyatakan implementasi kebijakan sebagai pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang – undang, namun dapat pula berbentuk perintah – perintah atau keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan.

3. Faktor – faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Faktor – faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan menurut Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn (dalam Riant Nugroho, 2003: 170-174) kebijakan negara dapat diimplementasikan dengan baik diperlukan syarat – syarat sebagai berikut :

1. Jaminan bahwa kondisi eksternal yang dihadapi oleh lembaga /badan pelaksana tidak akan menimbulkan masalah yang besar.
2. Untuk melaksanakan program tersedia waktu dan sumber – sumber yang memadai termasuk sumberdaya waktu.
3. Perpaduan sumber – sumber yang diperlukan benar – benar tersedia. Kebijakan publik adalah kebijakan yang kompleks dan menyangkut dampak yang luas. Karena itu implementasi kebijakan publik akan melibatkan berbagai sumber yang diperlukan baik dalam konteks sumber daya atau sumber aktor.
4. Kebijaksanaan yang akan diimplementasikan didasari oleh suatu hubungan kualitas yang handal. Prinsipnya adalah apakah kebijakan tersebut memang dapat menyelesaikan masalah yang hendak ditanggulangi.
5. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubung. Asumsinya semakin sedikit hubungan sebab akibat, semakin tinggi pula hasil yang dikehendaki oleh kebijaksanaan tersebut dapat tercapai. Sebuah Kebijakan yang mempunyai hubungan kausalitas yang kompleks akan menurunkan efektifitas implementasi kebijakan.

6. Hubungan saling ketergantungan harus kecil. Asumsinya adalah jika hubungan saling ketergantungan tinggi justru implementasi tidak akan berjalan efektif, apalagi jika hubungannya adalah hubungan ketergantungan.
7. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan dalam urutan tujuan yang tepat tidaklah begitu sulit dipahami, bahwa mereka yang ada dalam perahu yang sama sepakat akan tujuan yang sama.
8. Tugas – tugas telah dirinci lalu ditempatkan dalam urutan yang tepat. Tugas yang jelas dan prioritas yang jelas adalah kunci efektifitas implementasi kebijakan.
9. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna. Komunikasi adalah perekat organisasi dan koordinasi adalah asal muasal dari kerjasama tim serta terbentuknya sinergi.
10. Pihak – pihak yang mempunyai wewenang kekuasaan dapat menuntut mendapatkan kepatuhan yang sempurna. Kekuasaan atau power adalah syarat bagi efektifitas implementasi kebijakan. Tanpa otoritas yang berasal dari kekuasaan, maka kebijakan tetap berupa kebijakan tanpa ada dampak bagi target kebijakan.

Keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh banyak variabel atau faktor sebagaimana teori – teori implementasi kebijakan yang dikutip dari buku analisis Kebijakan Publik oleh Suharsono (2005:89), maka faktor – faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan menurut George C. Edwards III adalah :

1. **Komunikasi**

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group). Apabila tujuan dan sasaran tidak jelas atau tidak diketahui oleh kelompok sasaran, maka akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

2. **Sumberdaya**

Isi kebijakan yang sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia yakni kompetensi implementor dan sumber daya finansial. Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tetapi sumberdaya dan kebijakan hanya menjadi dokumen saja.

3. **Disposisi**

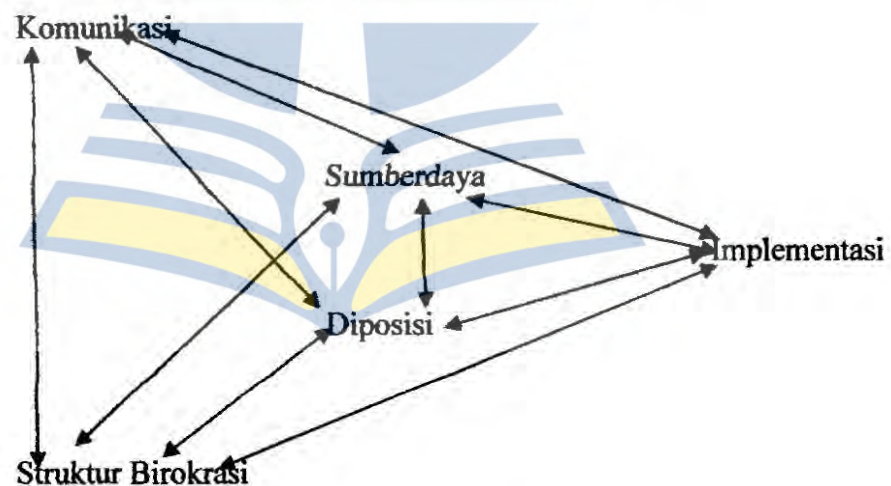
Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

4. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (Standard operating procedures atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang akan menyebabkan aktifitas organisasi tidak fleksibel.

Gambar 2.1

Faktor Penentu Implementasi menurut Edward III



Sumber : AG. Suharsono (2005:91)

Menurut Purwanto E.A dan Sulistyastuti.D.R (2012:85,86,87) menyatakan bahwa “ Di Indonesia sendiri telah banyak kegagalan implementasi kebijakan maupun program. Kegagalan implementasi yang

terjadi di Indonesia tidak jauh berbeda dengan kegagalan yang ditemukan di negara lain. Setidaknya ada enam faktor yang menjadi penentu berhasil atau tidaknya suatu proses implementasi". Adapun keenam faktor tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kualitas Kebijakan.

Kualitas Kebijakan menyangkut banyak hal seperti kejelasan tujuan, kejelasan implementor atau penanggung jawab implementasi.

2. Kecukupan Input Kebijakan.

Suatu kebijakan atau program tidak akan dapat mencapai tujuan atau sasaran tanpa dukungan anggaran yang memadai. Besarnya anggaran yang dialokasikan terhadap kebijakan atau program menunjukkan seberapa besar political will pemerintah terhadap persoalan yang akan dipecahkan oleh kebijakan tersebut . Dengan demikian besarnya anggaran juga dapat dipakai sebagai proxy untuk melihat seberapa besar komitmen pemerintah terhadap kebijakan tersebut. Secara hipotesis dapat dikatakan bahwa semakin besar anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah terhadap suatu kebijakan maka semakin besar pula peluang keberhasilan kebijakan tersebut, sebab pemerintah juga memiliki komitmen yang kuat untuk mendukung agar implementasi kebijakan tersebut dapat berhasil.

3. Ketepatan Instrumen.

Ketepatan instrumen yang dipakai untuk mencapai tujuan kebijakan (pelayanan, subsidi, hibah dan lainnya). Dengan , analogi suatu

penyakit maka untuk menyembuhkannya diperlukan obat yang tepat. Demikian juga persoalan publik yang ingin dipecahkan memerlukan instrumen yang tepat.

4. Kapasitas Implementor.

Kapasitas implementor (struktur organisasi, dukungan SDM, koordinasi, pengawasan dan sebagainya) Struktur organisasi yang terlalu hirarkis tentu akan menghambat proses implementasi.

5. Karakteristik dan Dukungan Kelompok Sasaran.

Karakteristik dan dukungan kelompok sasaran tersebut (apakah kelompok sasaran adalah individu atau kelompok, laki – laki atau perempuan, terdidik atau tidak). Karakteristik kelompok sasaran tersebut akan sangat berpengaruh terhadap dukungan kelompok sasaran terhadap proses implementasi.

6. Kondisi Lingkungan

Kondisi lingkungan geografis, sosial, ekonomi dan politik dimana implementasi tersebut dilakukan. Kebijakan yang berkualitas tidak akan berhasil ketika diimplementasikan dalam situasi dan kondisi lingkungan yang tidak kondusif terhadap upaya pencapaian tujuan kebijakan.

4. Kebijakan Swasembada Beras

a. Beras dan Kebijakan Pangan.

Negara Indonesia seringkali mengalami krisis pangan, seperti terjadi pada tahun 2007 sampai tahun 2008. Krisis pangan itu

melahirkan satu pemahaman umum di banyak kalangan masyarakat dunia bahwa *“agriculture should be the main agenda in economic development”*. Dalam rangka pembangunan ekonomi itu pertanian haruslah menjadi agenda utama yang digarap, karena terkait dengan pemenuhan ketahanan pangan nasional. Pemenuhan kebutuhan pangan nasional terus mengalami peningkatan karena adanya pertumbuhan konsumsi pangan dan pertambahan penduduk (saat ini sudah mencapai 237,641 juta jiwa). Sampai saat ini, beras merupakan komoditas yang menduduki posisi strategis dalam proses pembangunan pertanian, karena beras telah menjadi komoditas politik dan menguasai hajat hidup rakyat Indonesia. Masyarakat telah menjadikan beras sebagai makanan pokok, sehingga beras menjelma menjadi sektor ekonomi strategis bagi perekonomian dan juga ketahanan pangan nasional

Ancaman terhadap kedaulatan bangsa akan semakin terbuka lebar bila dihadapkan dengan situasi pasar global yang mengandalkan keahlian, permodalan dan penguasaan terhadap teknologi modern. Pasar di era globalisasi menganut sistem pasar bebas, karena didalam pasar tersebut siapa yang lemah akan tergilas dan siapa yang kuat akses terhadap pasar maka akan tidur pulas.

Pada kaitan dengan peran pemimpin dalam membuat kebijakan strategis terhadap ketahanan pangan, maka pemimpin memiliki legitimasi penuh guna mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat, khususnya bidang ketahanan pangan. Peran Pemimpin harus mampu menyediakan ruang kreatif bagi peningkatan ketahanan pangan nasional

melalui kebijakan jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Oleh karena itu pemerintah sebagai pemimpin bangsa sudah selayaknya membuat kebijakan – kebijakan yang berpihak kepada terwujudnya penyediaan pangan secara lokal maupun nasional.

Pangan mempunyai peran strategis dalam pembangunan nasional, minimal dalam tiga hal yaitu akses terhadap pangan dan gizi yang cukup merupakan hak yang paling azasi bagi manusia, kedua pangan memiliki peranan penting dalam pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas dan yang ketiga pangan merupakan pilar utama dalam menopang ketahanan ekonomi dan ketahanan nasional yang berkelanjutan. Untuk memenuhi hal tersebut diperlukan ketersediaan pangan yang cukup setiap waktu, aman, bermutu, bergizi dan beragam dengan harga terjangkau oleh daya beli masyarakat.

Kebijakan strategis yang perlu dibangun untuk keperluan praktis dan implementasi kebijakan strategis kedalam program kerja pimpinan dapat diidentifikasi penjabarannya sebagai berikut : (1) Pada tataran kebijakan nasional : (a) pemenuhan pangan yang cukup bagi seluruh penduduk dari hasil produksi sendiri merupakan kebijakan pokok ekonomi pangan nasional; (b) kebijakan penyediaan pangan dari hasil produksi sendiri diperoleh dengan memanfaatkan, melestarikan dan meningkatkan kapasitas sumber daya secara optimal; dan (c) kebijakan pemerataan pangan antar waktu, antar wilayah, dan antar kelas pendapatan ditangani melalui pengelolaan cadangan pangan, distribusi dan harga pangan; (2) Pada tataran rumah tangga : (a) unit pokok

kelompok sasaran ketahanan pangan adalah individu-individu dalam suatu rumah tangga; (b) tolok ukur pencapaian ketahanan pangan adalah terjaminnya aksesibilitas fisik dan ekonomi atas pangan; dan (c) ketersediaan pangan pada tingkat rumah tangga tersebut harus dapat menjamin agar setiap anggota rumah tangga memperoleh pangan dengan jumlah yang cukup untuk hidup sehat dan produktif; (3) Pada tataran komoditas : (a) karakteristik pangan yang dikonsumsi diarahkan agar memiliki mutu gizi yang baik untuk kesehatan dan aman, serta halal bagi warga muslim; dan (b) walaupun jenis pangan itu beragam dan sangat banyak, yang menjadi titik perhatian untuk ditangani melalui intervensi pemerintah terbatas/ dibatasi pada beberapa pangan pokok. Kebijakan pangan pada intinya berkaitan dengan pengaturan dan fasilitasi pemerintah atas segala aspek ekonomi pangan. Mulai dari cara memproduksi, mengolah, menyediakan, memperoleh, distribusi hingga konsumsi merupakan aspek-aspek yang menjadi perhatian utama pemerintah dibidang pembangunan pangan yang diimplementasikan melalui berbagai regulasi, fasilitasi, dan intervensi. Sebagai Negara dengan pangan pokok beras ketersediaan beras merupakan tugas pemerintah untuk mencukupi kebutuhan pangan masyarakatnya.

b. Persoalan Produksi Pangan.

Menurut Subejo (dalam Abdusalam T.T Pahlevi.R. 2012) persoalan persaingan antara pertumbuhan penduduk dan produksi pangan telah menjadi perhatian para cendekiawan sejak dua abad lalu.

Hal ini merupakan agenda yang sangat serius karena menentukan keberlangsungan hidup umat manusia. Thomas Robert Malthus tahun 1798 telah memprediksi bahwa dunia akan menghadapi ancaman karena ketidakmampuan mengimbangi pertumbuhan penduduk dengan penyediaan pangan memadai. Teori Malthus ringkasnya menyatakan peningkatan produksi pangan mengikuti deret hitung dan pertumbuhan penduduk mengikuti deret ukur sehingga manusia pada masa depan akan mengalami ancaman kekurangan pangan.

Pertumbuhan penduduk yang pesat menuntut penemuan pangan yang sangat besar. US Census Bureau mencatat kebutuhan pangan biji-bijian (beras dan jagung) di Asia akan meningkat pesat dari 344 juta ton tahun 1997 menjadi 557 juta ton tahun 2020 dimana kontribusi China dan India sebesar 26 dan 12 persen. Persoalan krisis pangan dunia yang ditandai kelangkaan pangan dan melonjaknya harga pangan di pasar internasional tahun 2008, salah satunya disebabkan karena membungahnya permintaan pangan oleh kekuatan ekonomi baru China dan India dengan penduduk masing-masing 1 milyar jiwa.

Dalam konteks Indonesia, produksi pangan yang mampu menjamin kebutuhan penduduk merupakan persoalan yang serius. Meskipun selama 2 tahun terakhir dilaporkan swasembada beras dapat dicapai kembali namun untuk jangka panjang masih menjadi pertanyaan besar. Salah satu solusi dalam peningkatan produksi pangan adalah peningkatan areal dan produktivitas. Meskipun hal tersebut telah dilakukan dengan berbagai strategi namun data

menunjukkan masih jauh dari cukup. Selama 5 tahun terakhir (2004-2008), areal panen padi hanya meningkat 0,47 juta ha dengan komposisi 11,92 juta ha tahun 2004 menjadi 12,39 juta ha tahun 2008. Dari segi produktivitas mengalami peningkatan 0,32 ton/ha dengan komposisi 4,54 ton/ha tahun 2004 dan 4,86 ton/ha tahun 2008.

Dengan prediksi jumlah penduduk 300 juta tahun 2015, kebutuhan beras akan mencapai 80-90 ton/th. Menggunakan asumsi luas panen yang tidak akan banyak berubah dari angka 12 juta ha/th, maka solusinya pada tuntutan produktifitas hingga 10 ton/ha. Hal tersebut hampir dipastikan sebuah *mission impossible*. Sejarah produksi beras dunia mencatat bahwa negara yang memiliki sejarah dan tradisi produksi beras paling panjang dan teknologi paling hebat seperti Jepang, Taiwan, Korea dan China hanya mampu memproduksi beras di lahan petani secara stabil dalam skala lapangan paling tinggi 7 ton/ha.

Abubakar Mustofa menjelaskan bahwa karakteristik produksi beras mempunyai ketimpangan antar tempat, antar waktu serta diproduksi oleh jutaan produsen yang sebagian besar adalah petani kecil, petani tanpa tanah/buruh tani. Produksi padi dihasilkan oleh jutaan petani dengan lahan sempit yang dikelola secara tradisional dan subsistem secara turun temurun. Dari aspek tempat sebagian besar produksi padi dihasilkan di pulau Jawa. Sedangkan dari aspek antar waktu 60% produksi beras dihasilkan pada periode Januari – Mei, 30 % pada pereode Juni – Agustus dan 10 % pada periode September -

Desember, Karakteristik ini merupakan permasalahan produksi beras dalam menjaga kestabilan ketersediaan pangan secara lokal dan nasional.

c. Politik Perberasan

Pertumbuhan penduduk yang begitu pesat yang tidak diimbangi dengan peningkatan produksi menyebabkan sebuah hubungan konsekuensi logis atas dua kondisi yang berlawanan dalam masalah pangan. Peningkatan jumlah penduduk berpengaruh terhadap peningkatan jumlah konsumsi bahan pangan, sementara produksi bahan pangan terus mengalami penurunan. Kondisi ini memicu kenaikan dan fluktuasi harga pangan. Perkembangan perdagangan pangan beras internasional dan dalam menghadapi krisis pangan menurut Efendi, Toni Dian secara umum terdapat dua paradigma besar yaitu aliran neoliberalisme yang pandangan dasarnya adalah meletakkan bahan pangan pada mekanisme pasar. Mekanisme kebijakan aliran ini adalah dibebaskannya bea masuk dan proteksi terhadap barang – barang pertanian. Penerapan ini adalah fluktuasi harga pangan didasarkan pada hukum permintaan dan penawaran secara politik bebas dipasaran. Belum lagi terkait ekonomi internasional yang mengaitkan pasar bebas dengan hegemoni dan penguasaan ekonomi negara – negara kecil oleh negara besar.

Aliran kedua adalah neofungsionalisme yang menekankan pada kerjasama global negara – negara didunia untuk menstabilkan harga pangan. Aliran ini berpendapat bahwa perlu dibangun sebuah

institusi supranasional yang mengatur perdagangan bahan pangan dunia berdasarkan kesepakatan bersama antar negara – negara dan kemudian bersama – sama mengintervensi pasar guna menstabilkan dan menurunkan harga pangan.

Dalam skala nasional politik perberasan ditekankan pada perlindungan produksi dalam negeri dengan pemberlakuan bea dan jatah impor yang menumbuhkan subsidiaritas untuk membatasi membanjirnya bahan pangan impor. Asumsi dasarnya adalah untuk meningkatkan sejauh mungkin produksi pangan lokal yang dapat dipenuhi oleh petani. Pendapat Colin Hines bahwa untuk mengatasi permasalahan pangan bagi negara – negara dunia khususnya negara dunia ketiga adalah dengan kembali kepada tataran lokal dan mulai meninggalkan globalisasi ekonomi.

Untuk melindungi produksi beras nasional posisi dan peran Bulog sebagai operator penyediaan pangan dengan harga terjangkau diseluruh wilayah Indonesia serta mengendalikan harga pangan ditingkat konsumen dan produsen mempunyai empat tugas yaitu Jaminan Harga Dasar Pembelian Pemerintah Untuk Gabah, Stabilisasi Harga, Raskin dan Cadangan / Stok Pangan Nasional. Keempat hal tersebut saling kait mengkait.

Kebijakan perberasan melalui penetapan tarif bea masuk perlu dibarengi pula dengan penegakan hukum (law enforcement) mengingat wilayah geografis Indonesia yang luas karena kecenderungan terjadi penyelundupan beras ke negara Indonesia sangat besar.

Dalam jangka panjang pemerintah perlu memikirkan program pemberian income support to the farmer, yaitu memberikan transfer uang secara langsung kepada petani berdasarkan jumlah produksi yang dijual kepada Pemerintah. Seperti model yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia. Walaupun kebijakan ini merupakan kebijakan yang mahal dari sudut pandang ekonomi, kebijakan ini merupakan bentuk keseriusan keberpihakan pemerintah kepada petani domestik yang sebagian besar hidup dari bercocok tanam padi.

Apabila petani padi tidak diberi perlindungan maka jumlahnya akan semakin berkurang karena tidak mampu bersaing dengan sektor non padi dan sektor industri. Dalam jangka panjang hal tersebut akan meningkatkan ketergantungan impor yang besar sehingga dapat mengganggu ketahanan pangan nasional (Syahjoni Putra Rahmat).

Joko Suseno dan Hemptri Suyatna (2006 :53) mengatakan bahwa kebijakan harga dasar gabah yang diberlakukan oleh pemerintah justru tidak menguntungkan bagi petani. Pada setiap panen harga gabah yang diterima petani dibawah harga penetapan pemerintah, sementara petani didesak oleh kebutuhan.

d. Strategi Peningkatan Produksi Beras.

Bayu Krisnamurti (2003) mengungkapkan bahwa ada beberapa langkah strategi dalam peningkatan produksi beras adalah (1) Mencegah dan mengurangi laju konversi lahan produktif, (2) Memanfaatkan dengan lebih optimal berbagai bentuk sumber daya lahan untuk kepentingan pemantapan produksi beras, (3) mendukung

usaha peningkatan produktivitas melalui penggunaan bibit unggul dan mengurangi kehilangan hasil pasca panen, (4) melakukan rehabilitasi, pemeliharaan dan optimalisasi pemanfaatan infrastruktur irigasi dan jalan desa, (5) melakukan berbagai langkah konkret dalam konservasi sumber daya tanah dan air terutama dalam wilayah aliran sungai, (6) mempromosikan produksi dan konsumsi aneka pangan lokal.

B. Tinjauan Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Beberapa penelitian yang telah dilakukan pada waktu yang lalu dan relevan dengan penelitian yang akan kami laksanakan akan disajikan dalam tabel seperti pada tabel 2.1 pada halaman 36 sebagai berikut ini;



Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu Yang Relevan

No	Nama Peneliti	Tema	Hasil Penelitian
1	Zefirinus K Lewoma dan Roby Fauza 2008	Pembangunan Pertanian Rakyat Menuju Ketahanan dan Swasembada Pangan.	Memenuhi kebutuhan pangan dalam bentuk impor bukanlah pilihan yang ideal, oleh karena itu pemenuhan kebutuhan pangan menjadi tanggungjawab semua pihak.
2	Achmad Suryana 2008	Menelisis Ketahanan Pangan, Kebijakan Pangan, Dan Swasembada Beras.	Untuk mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan perlu ada penyempurnaan dan fine tuning dari program ketahanan pangan dengan program peningkatan kapasitas produksi pangan
3	Prajogo U. Hadi dan Sri Hery S.	Prospek, Masalah dan Strategi Pemenuhan Kebutuhan Pangan Pokok.	Strategi untuk meningkatkan produksi pangan pokok adalah dengan peningkatan peran daerah otonom dalam penyediaan pangan
4	Tri Ratna Saridewi dan Amelia Nani Siregar	Hubungan Antara Peran Penyuluh dan Adopsi Tehnologi Oleh Petani Terhadap Peningkatan Produksi Padi di Kabupaten Tasikmalaya	Korelasi Peran Penyuluh dengan adopsi teknologi secara bersama sama bersinergi meningkatkan produksi
5	Mewa Ariani	Penguatan Ketahanan Pangan daerah untuk Mendukung Ketahanan Pangan Nasional.	Produksi pangan terus meningkat dengan peningkatan terkecil adalah beras, Ketergantungan beras terhadap impor sangat tinggi. Oleh karena itu ketahanan pangan nasional harus diwujudkan dengan penguatan ketahanan pangan daerah.

Zefirinus K Lewoema dan Roby Fauzan dalam penelitiannya tentang Pembangunan Pertanian Menuju Ketahanan dan Swasembada Pangan menggambarkan bahwa Pemenuhan kebutuhan pangan tidak hanya bagaimana memperoleh pangan tetapi juga bagaimana mengurangi ketergantungan pangan kepada pihak manapun. Memenuhi kebutuhan pangan dalam bentuk impor bukanlah sebuah pilihan yang ideal. Ketahanan Pangan berperan vital dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka tanggung jawab akan hal ini dibebankan kepada semua pihak. Dengan demikian perlu

ada jaringan kerja yang jelas di antara para pihak sehingga dihasilkan arah dan kebijakan pertanian yang merakyat. Untuk mendukung suksesnya pertanian rakyat menuju ketahanan dan swasembada pangan, peran penyuluh perlu direvitalisasi. Mengingat dinamika dan kompleksitas dalam masyarakat (tani) maka revitalisasi peran penyuluh pertanian perlu dimulai dari perubahan extension workers menjadi communication workers. Karena ketahanan pangan menyangkut kehidupan masyarakat, maka perlu adanya kebijakan – kebijakan pemerintah yang berpihak kepada rakyat serta petani sebagai produsen pertama pangan nasional dengan melakukan diversifikasi pangan, memperkuat jaringan petani dalam rangka meningkatkan posisi tawar terhadap harga jual produksi petani, integrasi kebijakan sistem ketahanan pangan sebagai bagian integral sistem ketahanan pangan nasional dan revitalisasi peranan penyuluh pertanian.

Penelitian tentang Menelusik Ketahanan Pangan, Kebijakan Pangan dan Swasembada Beras oleh Ahmad Suryana (2008) menjelaskan bahwa negara dengan ciri wilayah menyebar dalam bentuk gugusan pulau seperti Indonesia mempunyai kebijakan umum yang meletakkan ketahanan pangan sebagai salah satu pilar penopang keberlanjutan pemerintahan negara dan bangsa sudah tepat. Secara umum Indonesia mampu menyediakan sebagian besar kebutuhan pangannya dari produksi domestik. Gejolak harga yang terjadi bukan disebabkan anjloknya kemampuan produksi domestik, tetapi lebih karena faktor eksternal, termasuk dinamika pasar internasional dan aspek politik dalam negeri. Pada Tataran praktis upaya pencapaian ketahanan pangan seringkali direduksi menjadi kebijakan ekonomi beras, terutama

berupa stabilisasi harga dan pasokan. Hal ini dilandasi oleh kenyataan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat hampir semua komponen bagsa memperlakukan beras sebagai komoditas pokok yang mewarnai kebijakan ketahanan pangan nasional 15 -20 tahun ke depan. Untuk mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan perlu adanya pemyempurnaan dan fine turning dari program ketahanan pangan yang selama ini dilaksanakan melalui empat program pokok untuk pencapaian ketahanan pangan yaitu (1) Peningkatan Kapasitas Ekonomi Masyarakat, (2) Peningkatan Kapasitas Produksi Pangan, (3) Pengelolaan Distribusi dan Pasar Pangan dan (4) Peningkatan Mutu Konsumsi Pangan.

Prajogo U. Hadi dan Sri Hery Susilowati dalam Penelitiannya *Prospek, Masalah dan Strategi Pemenuhan Kebutuhan Pangan Pokok* memberikan gambaran bahwa kebutuhan pangan pokok terus meningkat di masa datang akibat dari peningkatan jumlah penduduk dan daya beli masyarakat konsumsn perlu dicukupi, produksi padi, jagung, kedelai dan gula terus meningkat, namun dengan laju yang lambat. Pertumbuhan produksi masih tergantung pada perkembangan luas areal panen, bukan pada perbaikan produktivitas. Kemampuan produksi untuk memenuhi kebutuhan domestik makin tinggi untuk padi, namun masih pas – pasan sehingga beresiko terjadi penurunan. Belum tercapainya sasaran produksi pada tahun 2010 merupakan indikasi adanya potensi resiko tersebut. Indonesia mempunyai potensi sangat besar untuk peningkatan produksi.

Sementara itu Penelitian tentang Hubungan Antara Peran Penyuluh dan Adopsi Teknologi oleh Petani Terhadap Peningkatan Produksi Padi di

Kabupaten Tasikmalaya yang dilakukan oleh Tri Ratna Saridewi dan Amelia Nani Siregar menyebutkan bahwa peran penyuluh dan adopsi teknologi secara parsial maupun bersama – sama menunjukkan bahwa koefisien peran penyuluh memiliki nilai yang lebih kecil dibandingkan dengan nilai adopsi teknologi hal ini menunjukkan bahwa adopsi petani lebih berpengaruh dibandingkan dengan peran penyuluhan sehingga dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan harus benar – benar melihat sampai sejauhmana tingkat adopsi oleh petani.

Penelitian Penguatan Ketahanan Pangan Daerah untuk Mendukung Ketahanan Pangan Nasional yang dilaksanakan oleh Mewa Ariani menyebutkan bahwa produksi pangan nabati dan pangan hewani di Indonesia menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dengan pertumbuhan sekitar 1- 13 % pertahun dengan peningkatan terkecil adalah komoditas beras. Kemandirian pangan dilihat dari ketergantungan pangan terhadap impor untuk komoditas beras mempunyai resiko yang relatif tinggi dibanding jenis pangan yang lain impor beras perlu mendapat perhatian serius. Penguatan Ketahanan Pangan Daerah dilakukan untuk advokasi kembali yang lebih instensif kepada pemerintah daerah karena sesuai dengan PP. 68 tentang Ketahanan Pangan, Pemerintah Daerah mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mewujudkan ketahanan pangan daerah dengan mendorong partisipasi swasta dan masyarakat turut berperan dalam mewujudkan ketahanan pangan daerah.

Hasil dari beberapa penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat produksi beras masih sangat rentan terjadi penurunan oleh karena itu untuk

memenuhi kebutuhan pangan dalam bentuk impor bukan pilihan yang ideal, perlu strategi untuk mewujudkan ketahanan pangan daerah dengan meningkatkan kapasitas peran stake holder di daerah dalam meningkatkan produksi beras .

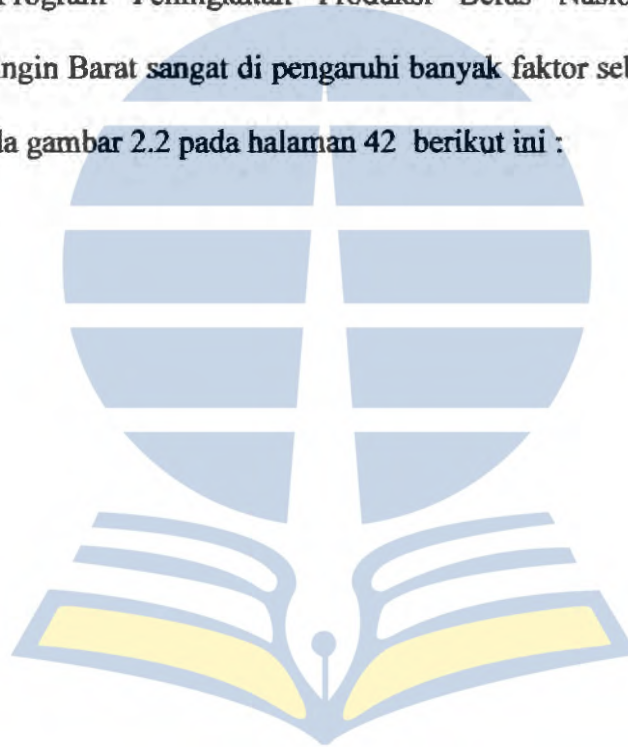
C. Kerangka Berpikir

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, setelah Cina, India dan Amerika Serikat. Dengan kondisi tersebut jumlah penduduk di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun mengikuti deret ukur, sedangkan produksi pangan di Indonesia seperti deret hitung, oleh karena itu ketahanan pangan nasional merupakan suatu keniscayaan guna mewujudkan stabilitas politik, ekonomi, sosial dan keamanan.

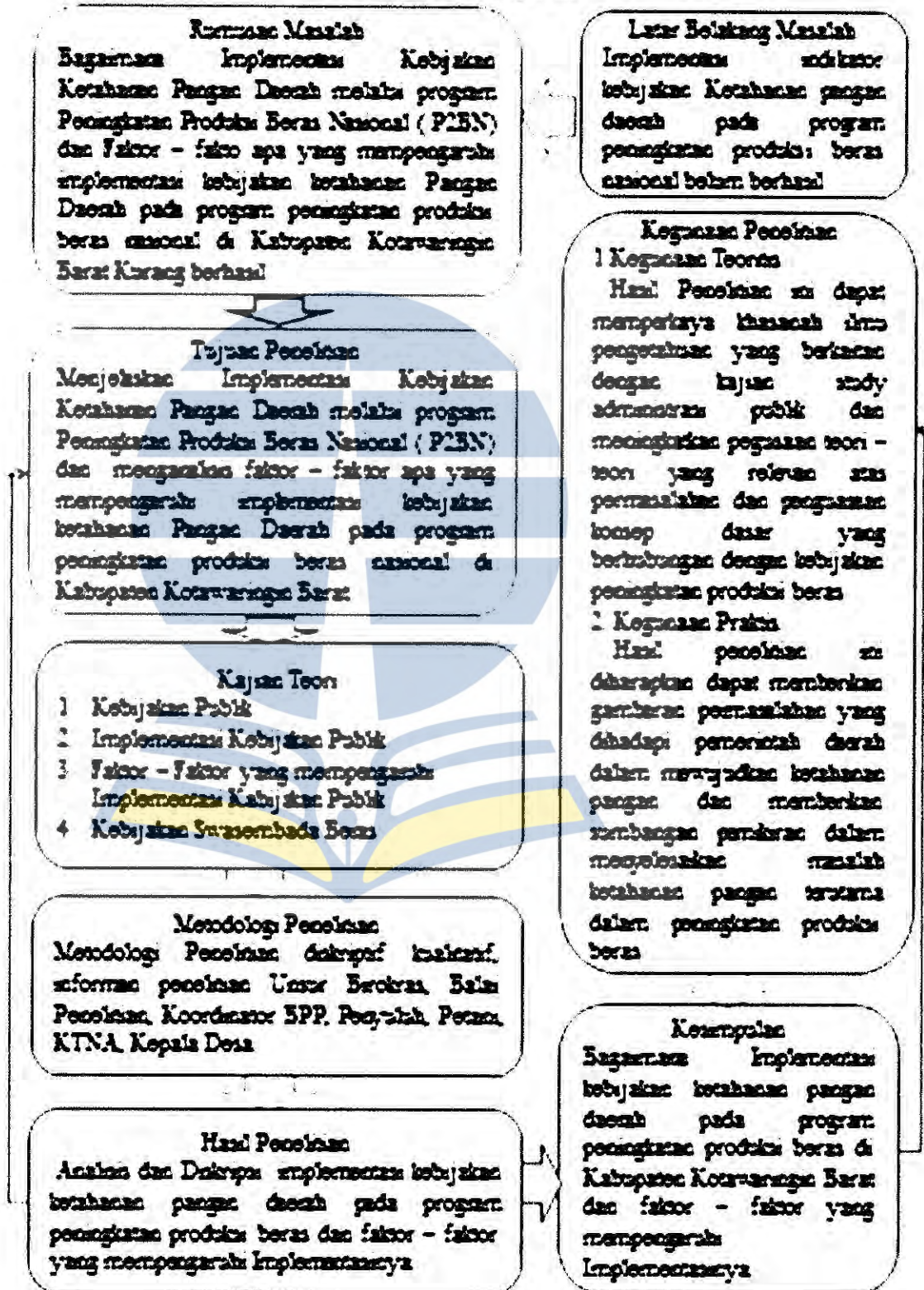
Untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional Kementerian Pertanian Republik Indonesia telah menetapkan target produksi sebesar 70,60 juta ton pada tahun 2014 dengan pertumbuhan produksi padi sebesar 5,22%. Instrumen yang digunakan untuk mencapai target produksi tersebut adalah : 1) Perluasan areal, 2) Peningkatan produktivitas, 3) Rekayasa teknologi dan sosial. Perluasan areal dilakukan melalui kegiatan pencetakan sawah baru, optimasi lahan, peningkatan indeks pertanaman (IP). Peningkatan produktivitas dilaksanakan melalui penggunaan varietas unggul, pemupukan, pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT), teknologi pasca panen. Rekayasa teknologi dan sosial dilakukan melalui demplot, Dem Area dan SL-PTT (Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu).

Dalam rangka pencapaian target peningkatan produksi beras dengan instrumen sebagaimana tersebut diatas maka pemerintah meluncurkan Program Peningkatan Produksi Beras Nasional yang disingkat menjadi P2BN dengan melibatkan banyak instansi /unit kerja baik di Pusat maupun di Daerah. Atas dasar hal – hal diatas untuk efektifitas pelaksanaan tugas masing – masing instansi/ unit kerja dalam mewujudkan sasaran program P2BN.

Keberhasilan Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan Daerah Pada Program Peningkatan Produksi Beras Nasional di Kabupaten Kotawaringin Barat sangat di pengaruhi banyak faktor sebagaimana kerangka pikir pada gambar 2.2 pada halaman 42 berikut ini :



Gambar 2.2
Kerangka Berpikir



D. Operasionalisasi Konsep

Dalam rangka memudahkan proses pengukuran variabel yang digunakan dalam penelitian ini maka konsep yang telah dirumuskan di operasionalkan dalam bentuk indikator – indikator penelitian yang berskala ordinal. Adapun operasional konsep yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah :

1. Program Peningkatan Produksi Beras Nasional atau yang disingkat P2BN adalah Program Pemerintah dalam rangka meningkatkan produksi beras nasional.
2. Tata Hubungan Kerja adalah hubungan kerja yang mengatur terselenggaranya kerjasama yang harmonis antar unit kerja sehingga terhindarnya tumpang tindih atau tidak tertanganinya suatu pekerjaan.
3. Kelembagaan Teknis adalah Direktorat Jenderal Lingkup Kementerian dan Dinas yang membidangi Tanaman Pangan.
4. Kelembagaan Penelitian dan Pengembangan Pertanian adalah kelembagaan yang menangani fungsi penelitian dan pengembangan pertanian di lingkungan Kementerian Pertanian, baik Kelembagaan Pusat maupun Unit Pelaksana Teknis.
5. Kelembagaan Penyuluhan Pertanian adalah kelembagaan yang menangani fungsi penyuluhan pertanian baik instansi pusat maupun Daerah.
6. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, perairan, dan air baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan

atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

7. Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.
8. Kemandirian pangan adalah kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat.
9. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
10. Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.

11. Produksi pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan /atau mengubah bentuk produk.
12. Ketersediaan pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.
13. Cadangan Pangan Nasional adalah persediaan pangan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk konsumsi manusia dan untuk menghadapi masalah kekurangan pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat.
14. Cadangan Pangan Pemerintah adalah persediaan pangan yang dikelola dan dikuasai oleh Pemerintah.
15. Cadangan Pangan Pemerintah Propinsi adalah persediaan pangan yang dikelola dan dikuasai oleh Pemerintah Propinsi.
16. Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/kota adalah persediaan pangan yang dikelola dan dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten/kota.
17. Cadangan Pangan Pemerintah Desa adalah persediaan pangan yang dikelola dan dikuasai oleh Pemerintah desa.
18. Cadangan Pangan Masyarakat adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh masyarakat di tingkat pedagang, komunitas dan rumah tangga.
19. Penyelenggaraan pangan adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam penyediaan, keterjangkauan, pemenuhan

- konsumsi pangan dan gizi, serta keamanan pangan dengan melibatkan peran serta masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.
20. Pangan Pokok adalah pangan yang diperuntukan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan sumber daya dan kearifan lokal.
 21. Penganekaragaman pangan adalah upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan berbasis sumber daya lokal.
 22. Pangan Lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.
 23. Pangan segar adalah pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan pangan.
 24. Pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
 25. Petani adalah warga negara, baik perseorangan maupun beserta keluarganya yang melakukan usaha tani bidang pangan.
 26. Perdagangan pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penjualan dan/atau pembelian pangan, termasuk penawaran untuk menjual pangan dan kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindahtanganan pangan dengan memperoleh imbalan.
 27. Ekspor pangan adalah kegiatan mengeluarkan pangan dari daerah pabean negara Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, tempat – tempat tertentu di zona Ekonomi Eksklusif, dan landas kontinen.

28. Impor pangan adalah kegiatan memasukkan pangan kedalam daerah pabean negara Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara diatasnya, tempat – tempat tertentu di zona Ekonomi Eksklusif, dan landas kontinen.
29. Peredaran Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran pangan kepada masyarakat, baik diperdagangkan maupun tidak.
30. Bantuan Pangan adalah Bantuan Pangan Pokok dan Pangan lainnya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat dalam mengatasi Masalah Pangan dan Krisis Pangan, meningkatkan akses bagi masyarakat miskin dan/atau rawan pangan dan gizi, dan kerjasama internasional.
31. Masalah Pangan adalah keadaan kekurangan, kelebihan, dan/atau ketidakmampuan perseorangan atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan dan keamanan pangan.
32. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan pangan yang dialami sebagai besar masyarakat disuatu wilayah yang disebabkan oleh antara lain, kesulitan distribusi, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang.
33. Rekayasa genetik pangan adalah suatu proses yang melibatkan pemindahan gen (pembawa sifat) dari suatu jenis hayati ke jenis hayati lain yang berbeda atau sama untuk mendapatkan jenis baru yang mampu menghasilkan produk pangan yang lebih unggul.

34. Pangan Produk Rekayasa Genetik adalah pangan yang diproduksi atau yang menggunakan bahan baku, bahan tambahan pangan, dan/atau bahan lain yang dihasilkan dari proses rekayasa genetik.
35. Mutu Pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan dan kandungan gizi pangan.
36. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
37. Pelaku Usaha Pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.
38. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
39. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji implementasi kebijakan ketahanan pangan daerah pada program peningkatan produksi beras nasional (P2BN) di Kabupaten Kotawaringin Barat dan peran sektor swasta dan masyarakat dalam meningkatkan produksi beras. Dalam hal ini peneliti harus memahami kepentingan subyektif dari pelaku yang diperankan oleh birokrasi pemerintah, swasta dan masyarakat dalam merespon kebijakan peningkatan produksi beras.

Metodologi yang digunakan penelitian “Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan Daerah Pada Program Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif karena penelitian bertujuan untuk menggambarkan kondisi obyek penelitian Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dari sudut pokok kajian implementasi kebijakan ketahanan pangan daerah pada program peningkatan produksi beras (P2BN) untuk memenuhi kebutuhan pangan di Kabupaten Kotawaringin Barat. Metode ini diyakini peneliti sebagai metode yang lebih tepat dalam memperoleh pemahaman tentang kepentingan subyektif.

Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data diskriptif: ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat

diamati dari orang – orang (subyek) itu sendiri. Oleh karena itu penelitian ini diarahkan kepada individu - individu dalam suatu lingkungan yang utuh. Dengan demikian tidak boleh mengisolasi individu dan organisasi dalam variabel atau hipotesis tetapi harus memandang sebagai bagian dari keseluruhan.

B. Fokus Penelitian Dan Lokus Penelitian

Fokus dari penelitian ini adalah Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan Daerah (Study pada Program Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) di Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan Permentan nomor 45/Permentan/OT.140/8/2011 tanggal 23 Agustus 2011, Komunikasi dan sikap aktor pelaksana dalam implementasi kebijakan ketahanan pangan terutama pada program peningkatan produksi beras nasional (P2BN), Sumberdaya yang dikerahkan dalam pelaksanaan kebijakan, sikap masyarakat terhadap kebijakan ketahanan pangan, faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan ketahanan pangan daerah terutama Program P2BN. Sedangkan lokus penelitian di Kabupaten Kotawaringin Barat. Lokasi ini dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa implementasi dari kebijakan tersebut dilaksanakan dari pusat sampai kedaerah dimana peneliti bekerja di wilayah tersebut sehingga diharapkan akan mendapatkan akses dalam melakukan penelitian tanpa mengabaikan ketentuan dalam penelitian.

C. Sumber Informasi dan Pemilihan Informan

Sumber informasi dalam penelitian ini terdiri dari unsur birokrasi, informan yang diwawancarai terdiri dari pejabat di tingkat Dinas Pertanian, Pejabat di Lembaga Penyuluhan, Penelitian dan para Mantri Tani dan Koordinator BPP, Penyuluh, Masyarakat petani. Sedangkan sumber data dari swasta adalah organisasi – organisasi atau pengusaha yang bergerak dibidang tanaman pangan khususnya padi/beras baik industri hulu maupun industri hilir. Selain sektor swasta, sektor masyarakat merupakan pihak yang menjadi sumber informasi sebagai pelaku usaha dilapangan.

Pemilihan informan sebagai sumber data dalam penelitian ini dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi populasi dengan membiarkan data mengalir dari orang – orang yang menjadi subyek dan berada didalam situasi sosial obyek penelitian. Oleh sebab itu penelitian ini dilakukan dengan teknik snowball sampling dengan mencatat siapa yang terlibat sebagai subyek penelitian, unturnya, jumlahnya dan menetapkan siapa yang menjadi informan kunci/key informan.

D. Instrumen Penelitian

Data yang ingin diperoleh dari penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data Primer diperoleh dari responden dengan menggunakan kuesioner dan wawancara terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara. Sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur - literatur yang terkait dengan kajian penelitian.

E. **Prosedur Pengumpulan Data**

Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan beberapa teknik antara lain :

1. Observasi.

Observasi atau pengamatan langsung adalah merupakan prosedur pengumpulan data dimana peneliti terjun langsung ke lapangan.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk memperoleh data dari masyarakat langsung melalui komunikasi dua arah.

F. **Metode Analisis Data.**

Analisa data terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan /verifikasi. Ketiga hal tersebut berhubungan satu dengan yang lain sebelum, pada saat dan sesudah pengumpulan data untuk membangun analisis.

Reduksi data adalah proses pemilahan data yang terkumpul dalam catatan lapangan kedalam penggolongan data, penentuan bagian – bagian yang hendak dibuang, dipertajam dan dikembangkan.

Penyajian data merupakan proses pengelompokan data – data ke dalam upaya untuk menyimpulkan data yang akan dilakukan dengan sebuah deskripsi yang berisi penjelasan tematik sesuai hasil penemuan lapangan.

Verifikasi adalah upaya untuk melakukan pengecekan kembali data data lapangan untuk meneliti kebenaran sehingga dapat diperoleh kesepakatan dengan obyek penelitian.

Metode pemeriksaan keabsahan data merupakan satu teknik memeriksa data untuk meningkatkan derajat kepercayaan data. Teknik ini penting dilakukan mengingat penelitian kualitatif mengandalkan peneliti sebagai instrumen penelitian. Metode penelitian kualitatif menghendaki peneliti untuk terlibat dalam lapangan penelitian dalam waktu lama. Dalam situasi seperti ini, kecenderungan peneliti untuk berempati dan hanyut dalam pengalaman subyek penelitian menjadi lebih besar. Untuk menghindari kecenderungan peneliti teracuni oleh pemikiran subyek penelitian dan ketika keluar dari lapangan peneliti tidak dapat lagi berpikir sebagai seorang pengamat, maka diperlukan suatu metode untuk memeriksa keabsahan data.

Teknik pemeriksaan keabsahan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah triangulasi. triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan data dari beberapa sumber seperti informan, penyidik dan teori dalam triangulasi dengan menggunakan sumber, dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Membandingkan data hasil - hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan berbagai persepektif tentang suatu topik. Dalam menggali masalah mengenai strategi peningkatan produksi beras yang sudah dilakukan oleh pemerintah dan organisasi publik (swasta), peneliti akan membandingkan pespektif pejabat birokrasi ,pejabat

organisasi publik pelaku usaha agribisnis dengan masyarakat yang sebagai pelaku dilapangan.

3. Membandingkan hasil wawancara dengan dokumen terkait.

Dalam triangulasi dengan teori, pemeriksaan data dilakukan dengan menguji fakta yang berupa data yang didapat di lapangan melalui penjelasan banding atau rival explanation. Dalam hal ini analisis telah menguraikan pola hubungan dan mencari tema atau penjelasan yang muncul dari analisis. Maka penting sekali untuk mencari tema atau penjelasan pembandingan secara logika dilakukan dengan jalan memikirkan kemungkinan logis lain dan kemudian melihat apakah kemungkinan –kemungkinan itu dapat ditunjang oleh data. Peneliti mencari data yang menunjang alternatif penjelasan itu.

Untuk pengecekan keakuratan data dari apa yang dikatakan para informan, maka peneliti menggunakan data atau arsip serta dokumen yang sudah ada dan juga berbincang dengan beberapa informan.

BAB IV

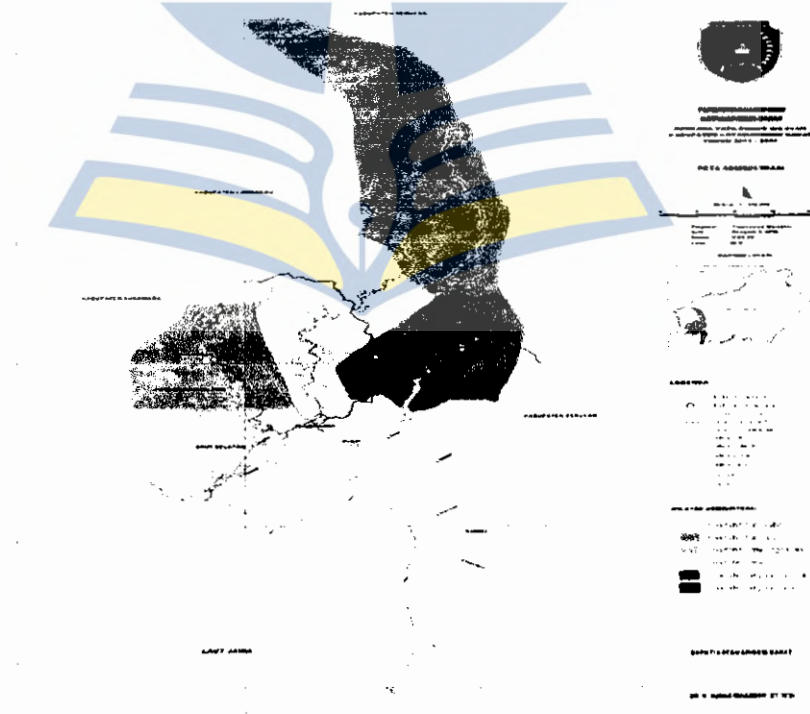
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. DISKRIPSI OBYEK PENELITIAN

1. Luas Wilayah dan Letak Geografis

Luas Kabupaten Kotawaringin Barat adalah 10.759 km² terdiri dari 6 (enam) Kecamatan yaitu Kecamatan Arut Selatan, Kumai, Kotawaringin Lama, Arut Utara, Pangkalan Banteng dan Pangkalan Lada. Dua kecamatan terakhir adalah hasil pemekaran dari Kecamatan Kumai. Luas Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat menurut Kecamatan dapat dilihat pada gambar 4.1 dan Tabel 4.1 pada halaman berikut ini :

Gambar 4.1 Peta Kabupaten Kotawaringin Barat



Sumber : Kobar Dalam Angka

Tabel 4.1.
Luas Kabupaten Kotawaringin Barat Menurut Kecamatan

Kecamatan	Luas		Jml. Desa/ Kelurahan
	Km ²	%	
1. Arut Selatan	2.400	22,31	20
2. Kumai	2.921	27,15	18
3. Kotawaringin Lama	1.218	11,32	17
4. Arut Utara	2.685	24,96	11
5. Pangkalan Lada	229	3,08	11
6. Pangkalan Banteng	1.306	10,21	17
KTW. BARAT	10.759	100	94

Sumber : Kotawaringin Barat Dalam Angka 2010

Kabupaten Kotawaringin Barat terletak antara 110^o25'26'' - 112^o50'36 Bujur Timur (BT) dan antara 1^o19'35'' - 3^o36'59 Lintang Selatan (LS). Secara administratif letak geografisnya berbatasan dengan :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Lamandau
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Seruyan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Sukamara

2. Topografi

Keadaan topografis Kabupaten Kotawaringin Barat dapat digolongkan menjadi 4 (empat) bagian, yaitu dataran, daerah datar berombak, daerah berombak berbukit dan daerah berbukit-bukit yang terdiri dari

- Sebelah Utara adalah pegunungan dan macam tanah Latosol tahan terhadap erosi.
- Bagian Tengah terdiri dari tanah Podsolik Merah Kuning juga tahan terhadap erosi.

- Sebelah Selatan terdiri dari danau dan rawa-rawa Alluvial/ Organosol banyak mengandung air.

3. Geomorfologi

Keadaan geomorfologi/bentuk lahan terhadap ketinggian dari permukaan air laut dan prosentase tingkat kemiringan menurut Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut ini :

Tabel 4. 2.
Data Ketinggian dan Kemiringan di Kab. Kotawaringin Barat.

Kecamatan	Ketinggian (MDPL)	Kemiringan (%)
1. Arut Selatan	0 – 500	0 – 40
2. Kumai	0 – 500	0 – 40
3. Ktw. Lama	7 – 100	0 – 2 dan 15 – 40
4. Arut Utara	25 – (>500)	2 – (>40)
5. Pangkalan Lada	0 – 500	0 – 40
6. P. Banteng	0 – 500	0 – 40

Sumber : Kotawaringin Barat Dalam Angka 2010

4. Iklim

Faktor pembentuk iklim adalah curah hujan, suhu udara, kecepatan angin dan kelembaban. Iklim daerah Kabupaten Kotawaringin Barat secara umum beriklim tropis yang dipengaruhi oleh musim kemarau dan musim hujan. Musim kemarau pada Bulan Juni sampai dengan September sedangkan musim penghujan bulan Oktober sampai dengan bulan Mei. Suhu maximum berkisar $31,0^{\circ}\text{C}$ – $33,8^{\circ}\text{C}$ dan suhu minimum antara $21,3^{\circ}\text{C}$ – $23,4^{\circ}\text{C}$, kelembaban udara berkisar 85,58 %.

5. Potensi Lahan

Jenis lahan/tanah pada suatu kawasan wilayah sangat berpengaruh terhadap pengalokasian lahan yang dialokasikan penggunaannya oleh Pemerintah Daerah dalam pengembangan pembangunan kawasan seperti pertanian, perkebunan, kehutanan dan perumahan. Demikian pula dalam penggunaan tanah yang merupakan indikator intensitas pemanfaatan ruang.

Penggunaan tanah yang kompleks akan menunjukkan intensitas pemanfaatan ruang yang tinggi. Di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat tampilan lahan (*land cover*) masih didominasi oleh corak alamiah yaitu berupa hutan. Penggunaan lahan didominasi oleh perkebunan rakyat, perkebunan besar, sawah, ladang/tegalan, kebun campuran, permukiman dan lain-lain. Berikut data potensi lahan pada tabel 4.3 berikut :

Tabel 4.3.
Potensi lahan di wilayah Kobar

No	Peruntukan	Luas (Ha)	%
1	Konsesi kehutanan	565.028	52,52
2	Konsesi transmigrasi	28.641	2,66
3	Kawasan pengembangan		
A	- Konsesi perkebunan + Cadangan + Tertanam	120.807 160.973	11,23 14,96
B	- Konsesi non perkebunan	191.309	17,78
4	Danau dan sungai	9.142	0,85
	Jumlah	1.075.900	100,00

Sumber : Kotawaringin Barat Dalam Angka 2010.

Tanah merupakan unsur penting dalam rangka budidaya pengembangan komoditas pertanian. Berdasarkan data statistik (BPS, 2011) bahwa keadaan tanah di wilayah Kotawaringin Barat kondisinya sangat bervariasi dengan tingkat kesuburan yang sangat terbatas.

Keadaan tanah di Kabupaten Kotawaringin Barat termasuk klasifikasi tanah kelas IV sampai dengan kelas VII (yaitu keadaan tanah yang mempunyai kadar hambatan yang sedang sampai tinggi). Dilihat dari tekstur tanah, umumnya wilayah Kowaringin Barat sebagian besar didominasi oleh tekstur tanah lempung berpasir/tekstur tanah halus. Data Penyebaran Tekstur Tanah sebagaimana tabel 4.4 berikut :

Tabel 4.4.
Penyebaran Tekstur Tanah di kabupaten Kotawaringin Barat

No.	Kecamatan	Tekstur (ha)				Jumlah
		Halus	Sedang	Kasar	Lain-lain	
1	Arut selatan	139.704	34.320	65.976	-	240.000
2	Arut Utara	266.271	-	2.229	-	268.500
3	Ktw. Lama	79.468	25.152	17.186	-	121.800
4	Kumai	83.639	193.168	79.183	89.610	445.600
5	P. Lada					
6	P. Banteng					
	Jumlah	569.076	252.640	164.574	89.610	1.075.900
	%	52,89	23,48	15,30	8,33	100,00

Sumber : Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Tengah, 2008

Jenis tanah di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut :

- Tanah Alluvial, yaitu tanah yang merupakan endapan tanah yang berasal dari sungai pada waktu banjir. Tanah tersebut sebagian besar terdapat di daerah pinggiran aliran sungai dan rawa-rawa.
- Tanah Organosol, adalah jenis tanah yang terdiri dari bahan organik yang terdapat di daerah dataran rendah.
- Tanah Latosol dan Tanah Podsolik Merah Kuning yang lebih banyak terdapat pada wilayah perbukitan. Jenis tanah ini lebih tahan erosi dan lebih cocok untuk budidaya pengembangan komoditas pertanian.

Secara umum terdapat 8 jenis tanah di Kotawaringin Barat dengan dominan Podsolik Merah Kuning (51,51%) yaitu :

- Podsolik Merah Kuning	:	554.242	ha
- Laterit	:	59.012	ha
- Regosol Podsol	:	110.206	ha
- Latosol	:	50.230	ha
- Alluvial	:	85.680	ha
- Organosol	:	112.669	ha
- Komplek Podsolik Merah Kuning Podsol	:	97.247	ha
- Rawa	:	6.614	ha
Jumlah	:	1.075.900	ha

Faktor pembatas kemampuan lahan di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah lahan gambut dan pasir seluas 120.753 ha, sekitar 11,22% dari luas wilayah dan terbanyak di wilayah Kecamatan Kumai yang terperinci seperti yang disajikan pada tabel 4.5 berikut ini

Tabel 4.5.
Penyebaran Faktor Pembatas Kemampuan Lahan

No.	Kecamatan	Tekstur (ha)			Jumlah
		Gambut	Pasir	Batu	
1	Arut selatan	17.040	1.229	-	18.268
2	Arut Utara	-	813	-	813
3	Ktw. Lama	16.553	4.980	-	21.513
4	Kumai	68.865	11.273	-	80.138
5	P. Lada				
6	P. Banteng				
	Jumlah	102.458	18.295	-	120.753

Sumber : Kantor wilayah BPN Provinsi Kalimantan Tengah, 2010

6. Demografi

Secara umum keadaan sosial budaya masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat dalam proses pertumbuhan sejalan dengan dinamika pembangunan. Sampai dengan akhir Desember 2010 penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat berjumlah 241.383 jiwa, dengan rincian sebagaimana tabel 4.6. berikut ini :

Tabel 4.6.
Jumlah Penduduk Per Kecamatan Tahun 2010

No.	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	JUMLAH
1.	Arut Selatan	52.246	48.115	100.361
2.	K u m a i	24.617	22.544	47.461
3.	Ktw. Lama	9.062	8.038	17.100
4.	Arut Utara	9.654	7.055	16.709
5.	Pangkalan Lada	15.158	13.335	28.493
6.	P. Banteng	17.012	14.547	31.559
	Jumlah	127.746	113.634	241.383

Sumber : Kotawaringin Barat Dalam Angka 2010

Pertambahan dan pertumbuhan penduduk biasanya lebih tinggi pada kawasan/daerah yang prasarana dan sarana dasar serta fasilitas umumnya cukup tersedia, selain daripada hal tersebut di atas pertambahan penduduk biasanya terpusat pada sentra-sentra tertentu seperti : tempat usaha/bekerja, pasar, pelabuhan, terminal dan sebagainya. Jumlah penduduk serta kepadatan penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat pada tabel 4.7 dan dan tabel 4.8 pada halaman 62 berikut ini :

Tabel 4.7.

**Jumlah Rumah Tangga, Penduduk dan Sex Ratio di
Kabupaten Kotawaringin Barat**

Kecamatan	Rumah Tangga	Penduduk			Sex Ratio
		Laki	Wanita	Jumlah	
Arut Selatan	26.956	52.246	48.115	100.361	108,59
Kumai	10.827	24.617	22.544	47.461	109,20
Ktw. Lama	4.729	9.062	8.038	17.100	112,74
Arut Utara	4.710	9.654	7.055	16.709	136,84
P. Lada	7.868	15.158	13.335	28.493	113,67
P. Banteng	9.014	17.012	14.547	31.559	116,95
Tahun 2010	64,104	121.749	113.634	241.383	112,42
Tahun 2009	60,209	121.650	109.334	230.984	110,63
Tahun 2008	58,553	119.440	107.943	227.383	110,65

Sumber : Kotawaringin Barat Dalam Angka 2010

Tabel 4.8.

**Kepadatan Penduduk Km² dan Rata-rata Penduduk per Rumah Tangga di
tiap Kecamatan Kabupaten Kotawaringin Barat**

Kecamatan	Luas (Km ²)	Rata-Rata	
		Kepadatan (Km ²)	Per RT
1. Arut Selatan	2.400	41,82	3,72
2. Kumai	2.921	16,15	4,36
3. Kotawaringin Lama	1.218	14,04	3,62
4. Arut Utara	2.685	6,22	3,55
5. Pangkalan Lada	229	124,62	3,62
6. Pangkalan Banteng	1.306	24,16	3,50
Tahun 2010	10.759	22,44	3,77
Tahun 2009	10.759	21,47	3,84
Tahun 2008	10.759	21,13	3,88

Sumber : Kotawaringin Barat Dalam Angka 2010

7. Kondisi Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Dalam pengembangan pertanian tanaman pangan dan hortikultura komoditi strategis di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah padi dan jagung. Capaian produksi tanaman pangan di Kabupaten Kotawaringin Barat selama periode 2009 sampai dengan 2011 disajikan pada Tabel 4.9 pada halaman 63 berikut ini :

Tabel 4.9.
Capaian Produksi TPH di Kab. Kotawaringin Barat tahun 2009-2011

No.	Komoditas	Tahun			Rata-rata
		2009	2010	2011	Pertumbuhan
1.	Padi Sawah	7.307,81	10.707,01	11.176,60	25,45
2	Padi Ladang	3.405,48	7.490,94	13.872,96	102,58
	<i>Jumlah Padi</i>	<i>10.713,29</i>	<i>18.197,95</i>	<i>25.049,56</i>	<i>53,76</i>
3	Jagung	4.127,57	4.930,14	3.679,13	(2,97)
4	Kedelai	70,86	54,60	307,40	220,03
5	Kacang Tanah	219,66	212,26	442,49	52,55
6	Kacang Hijau	18,17	26,98	37,91	44,50
7	Ubikayu	7.470,08	7.355,17	10.924,55	23,50
8	Ubi Jalar	1.162,70	1.347,54	1.458,18	12,05
9	Sayuran	5.884,94	5.219,00	6.105,57	2,84
10	Buah-buahan	11.578,00	12.125,20	12.309,52	3,12

Kobar Dalam Angka 2010.

Produksi padi di Kabupaten Kotawaringin Barat dalam kurun waktu tiga tahun terakhir mengalami kenaikan rata-rata sebesar 25,45% pertahunnya. Hal ini karena adanya kegiatan cetak sawah dan SLPTT padi lahan kering dan SLPTT padi sawah. Produksi padi tahun 2010 mengalami kenaikan dibanding tahun 2009 sebesar 18.197,95 Ton GKG. Kemudian di tahun 2011 mengalami peningkatan lagi sebesar 25.049,56 Ton GKG.

Produksi Jagung pada tahun 2011 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2009 dan 2010 yaitu sebesar 3.679,13 ton Pipilan Kering atau mengalami penurunan rata-rata sebesar 2,97%. Penurunan produksi ini terjadi akibat tidak adanya program yang dilakukan oleh PD. Agrotama Mandiri yang menyebabkan petani enggan untuk menanam jagung, sedangkan keadaan sebaliknya terjadi pada tahun 2009 dan 2010.

Produksi kedelai tahun 2011 mencapai 307,40 ton biji kering, terjadi peningkatan sebesar 220,03% jika dibandingkan dengan produksi tahun 2010 yang hanya mencapai 54,60 ton.

B. Hasil Penelitian

1. Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan Pada Program Peningkatan Produksi Beras Nasional /P2BN di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Berdasarkan hasil penelitian melalui pengamatan langsung maupun hasil wawancara dan data - data yang diperoleh peneliti selama melakukan penelitian di Kabupaten Kotawaringin Barat terkait dengan fokus penelitian maka peneliti akan menyampaikan beberapa hasil penelitian dan pembahasan lebih rinci akan dituangkan pada anak bab selanjutnya.

Kebijakan Ketahanan Pangan di Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam mewujudkan kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari ketersediaan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, terjangkau dan merupakan hal yang penting dan strategis.

Dasar kebijakan ketahanan pangan daerah adalah sebagaimana diatur dalam Undang – Undang No. 7 tahun 1998 dan diubah dalam Undang – undang no 18 tahun 2012 tentang pangan dan secara khusus diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002.

Kebijakan Ketahanan Pangan Daerah Di Kabupaten Kotawaringin Barat sebelumnya ditangani oleh Subdin Ketahanan Pangan yang berada di Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat. Pejabat yang berwenang menangani urusan Ketahanan Pangan adalah Kepala Sub

Dinas Ketahanan Pangan setingkat dengan Eselon III. Dengan adanya perubahan struktur organisasi dan perangkat daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 19 Tahun 2008 Tanggal 1 Juni 2008 tentang Struktur Organisasi Kantor Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Struktur Organisasi sebagai berikut :

- a. Kepala Kantor.
- b. Sub Bagian Tata Usaha.
- c. Seksi Ketahanan Pangan.
- d. Seksi Pengembangan SDM, Kelembagaan dan Tata Penyuluhan Pertanian, Peternakan dan Perikanan.
- e. Seksi Pengembangan SDM, Kelembagaan dan Tata Penyuluhan Perkebunan dan Kehutanan.

Dengan Penetapan Perda Nomor 19 tahun 2008 tersebut maka tanggal 1 Agustus Tahun 2008 kewenangan urusan Ketahanan Pangan diserahkan kepada Kantor Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Barat yang ditangani oleh Seksi Ketahanan Pangan (Eselon IV).

Untuk melaksanakan kebijakan ketahanan pangan daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat dalam rangka mewujudkan ketahanan

pangan daerah maka dirumuskan visi dan misi dan strategi kebijakan Kantor Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu :

Visi “ *Terwujudnya Kantor Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan sebagai Lembaga yang handal dalam rangka Pemberdayaan Penyuluhan dan Pemanapan ketahanan pangan yang berkelanjutan sampai ketingkat rumah tangga.*”.

Untuk mewujudkan visi tersebut maka, misi yang dirumuskan oleh Kantor Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Barat adalah :

- Mendorong terwujudnya pelayanan prima terhadap petani dalam rangka meningkatkan daya saing sebagai pelaku agribisnis.
- Menguatkan fungsi dan peran kelembagaan penyuluhan pertanian dalam pelaksanaan otonomi daerah.
- Mengembangkan wawasan dan profesionalisme penyuluh pertanian.
- Mengembangkan kepemimpinan, keswadayaan dan keswakaryaan petani serta masyarakat pelaku agribisnis.
- Mengembangkan metodologi dan model model penyuluhan pertanian sistem partisipatif dan usaha agribisnis.
- Mewujudkan ketahanan pangan daerah melalui peningkatan produktivitas tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan serta penganekaragaman konsumsi pangan.
- Membangun kemandirian kelembagaan petani- nelayan melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia anggota kelompok.
- Meningkatkan kemampuan kewirausahaan petani/kelompok tani –

nelayan untuk memperkuat posisi tawar dan permodalan petani – nelayan.

Adapun strategi kebijakan untuk mewujudkan visi dan misi tersebut adalah sebagai berikut :

- Mengoptimalkan peran penyuluh lapangan sebagai ujung tombak terwujudnya pelayanan prima terhadap petani dalam rangka meningkatkan daya saing sebagai pelaku agribisnis.
- Melakukan koordinasi dan harmonisasi dengan stakeholder untuk menguatkan fungsi dan peran kelembagaan ketahanan penyuluhan pertanian dan otonomi daerah.
- Mengupayakan peningkatan /mengembangkan wawasan dan profesionalisme penyuluh pertanian melalui diklat teknis sesuai dengan bidang tugasnya.
- Menerapkan dan mengembangkan metodologi dan model – model penyuluhan pertanian sistem partisipatif dan usaha agribisnis.
- Mendorong tumbuhnya kepemimpinan, keswadayaan dan keswakaryaannya petani serta masyarakat pelaku agribisnis.
- Meningkatkan Produksi pangan dengan tehnologi spesifik lokasi, pengembangan dan penyediaan bibit unggul dan jasa alsintan serta penyediaan layanan kredit yang mudah diakses petani melalui dinas teknis daerah.
- Pengembangan percepatan keragaman konsumsi pangan berbasis pangan lokal.
- Peningkatan kelancaran distribusi dan akses pangan melalui peningkatan

kualitas dan peningkatan infrastruktur distribusi.

- Peningkatan efektifitas fungsi koordinasi dinas terkait di bidang pangan dan gizi sehingga terjaminnya keamanan, mutu dan hieGINE pangan yang dikonsumsi masyarakat.

Kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam rangka mewujudkan visi dan misi dibidang ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan kualitas pelayanan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan kepada masyarakat.
- Meningkatkan penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan berdasarkan program penyuluhan.
- Peningkatan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap penyuluh.
- Pemantapan ketersediaan pangan berbasis kemandirian pangan dengan meningkatkan produksi pangan daerah, pengembangan cadangan pangan dan penetapan lahan abadi untuk produksi pangan.
- Peningkatan kemudahan mengakses pangan dengan meningkatkan daya beli dan menurunkan kemiskinan serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi sistem distribusi pangan.
- Peningkatan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan menuju gizi seimbang dengan meingkatkan kemampuan rumah tangga mengakses pangan, pengembangan program perbaikan gizi.

Dari uraian struktur organisasi, visi, misi dan kebijakan Kantor Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin

Barat menunjukkan bahwa peran Kantor Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan Koordinator/sekretariat Dewan Ketahanan Pangan dan lembaga yang mendukung peningkatan produksi beras dilihat dari sisi peran penyuluh.

Untuk mendukung kebijakan Ketahanan Pangan Daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat, Pemerintah membentuk Dewan Ketahanan Pangan Daerah yang langsung dipimpin oleh Bupati Kotawaringin Barat dengan melibatkan 29 (dua puluh sembilan) Dinas/instansi/lembaga dan dibantu oleh sekretariat yang berada pada Kantor Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Barat. Dasar pembentukan Dewan Ketahanan pangan tersebut adalah sebagai berikut :

- Undang – undang Nomor 7 tahun 1996 – dan telah diperbarui dengan Undang – undang nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan
- Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : DKP/228.1/V/2010 Tanggal 1 Mei 2010 Tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Barat.

Berdasarkan Keputusan Bupati tersebut diatas maka Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Barat terbagi menjadi 3 (tiga) kelompok kerja yang meliputi :

- a. Kelompok Kerja Ketersediaan.
- b. Kelompok Kerja Distribusi, Cadangan Pangan dan Stabilisasi
- c. Kelompok Kerja Penganekaragaman Pangan dan Mutu Pangan

Adapun kebijakan dari Dewan Ketahanan Pangan Pangan Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut :

- a. Terwujudnya kebijakan ketahanan pangan daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan memperhatikan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Ketahanan Pangan Pusat dan Dewan Ketahanan Pangan Propinsi Kalimantan Tengah.
- b. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan.
- c. Terjaminnya ketahanan pangan Kabupaten Kotawaringin Barat yang meliputi aspek ketersediaan, distribusi, konsumsi, mutu, gizi, keamanan dan kewaspadaan pangan.
- d. Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pemantapan ketahanan pangan Kabupaten Kotawaringin Barat.
- e. Terselenggaranya rapat Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Barat sekurang – kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun atau sewaktu – waktu sesuai keperluan.
- f. Tersedianya laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati setiap satu bulan sekali atau sewaktu – waktu sesuai keperluan.

Implementasi dari tugas Dewan Ketahanan Pangan tersebut maka Dewan Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat telah menetapkan target capaian sebagai berikut :

- a. Terbentuknya Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang dananya bersumber dari APBD Kotawaringin Barat tahun 2014 yaitu sebesar 50 ton (50%) dari target SPM.
- b. Meningkatnya peran aktif dari seluruh lintas SKPD terkait bersinergi dengan Pemerintah Pusat dan Propinsi serta seluruh stakeholder dalam mendorong dan mengawal pencapaian swasembada beras, jagung, daging sapi dan ikan tahun 2014 dengan mengalokasikan sumber dana
- c. Terkoordinasinya penanganan permasalahan dan kendala pelaksanaan pencapaian swasembada pangan wajib menyelenggarakan rapat DKP sekurang-kurangnya 1 kali setahun dan rapat Pokja DKP sekurang-kurangnya 3 kali setahun atau sesuai kebutuhan.
- d. Meningkatkan ketersediaan pangan wilayah kabupaten untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim berbasis produksi pangan lokal.
- e. Penguatan kelembagaan sosial masyarakat.
- f. Meningkatnya luas areal melalui penataan pola tanam, perbaikan infrastruktur pertanian di desa/kelurahan.
- g. Penyediaan sarana produksi dan penerapan teknologi tepat guna.
- h. Peningkatan akses terhadap modal dan pasar.
- i. Mengembangkan cadangan pangan masyarakat dan cadangan pangan pemerintah yang tidak terbatas pada komoditi beras saja tetapi juga komoditi pangan pokok lainnya yang berbasis pada potensi sumber daya lokal sebagai upaya mengembangkan diversifikasi produksi.
- j. Percepatan dan pemasyarakatan diversifikasi konsumsi pangan.

Hasil observasi dilapangan menunjukkan bahwa target capaian kebijakan ketahanan pangan sebagian besar sudah dilaksanakan namun ada beberapa target capaian yang dilaksanakan belum optimal. Berikut beberapa hasil penelitian yang peneliti peroleh selama melakukan penelitian di lapangan :

a. Aspek Ketersediaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari aspek ketersediaan pangan menunjukkan bahwa ketersediaan pangan di Kabupaten Kotawaringin Barat dikategorikan dalam keadaan tidak aman dengan resiko tinggi hal ini karena 55 % dari kebutuhan pangan dipenuhi dari pasokan dari luar daerah terutama dari pulau jawa dan propinsi Kalimantan Selatan dan hanya 45 % yang dapat dipenuhi dari produksi sendiri. Kondisi seperti ini akan menimbulkan kerawanan pangan di Kabupaten Kotawaringin Barat apabila jalur distribusi terganggu. Penyebab utama kondisi rawan adalah dari indeks ketersediaan yang sangat erat hubungannya dengan luas tanam dan luas panen komoditas pangan terutama beras. Hal ini seperti diungkapkan oleh Mantan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat Ir. H. Akhmad Yadi (Wawancara tanggal 4 April 2014) sebagai berikut :

“Kebutuhan pangan daerah yang mampu dipenuhi dari produksi daerah, saat ini baru 45 % dari total kebutuhan”.

b. Aspek distribusi, cadangan Pangan dan Stabilisasi menunjukkan bahwa aspek distribusi pangan di Kabupaten Kotawaringin Barat lancar dan merata. Arus barang dari Pulau Jawa ke Kabupaten Kotawaringin Barat

melalui pelabuhan Kumai dan selanjutnya di distribusi ke seluruh kecamatan dan desa dengan frekuensi bongkar muat barang 2 kali dalam seminggu. Sedangkan untuk cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang dananya bersumber dari APBD Kotawaringin Barat tahun 2014 sudah terealisasi sebesar 50 ton (50%) dari target SPM yaitu 100 ton.

c. Aspek Penganekaragaman Pangan dan Mutu Pangan menunjukkan bahwa program penganekaragaman pangan dan mutu pangan di Kabupaten Kotawaringin Barat baru sebatas promosi penganeka ragaman pangan dan belum ada program – program nyata untuk penganekaragaman dan peningkatan mutu pangan. Promosi penganekaragaman pangan ditempuh dengan kegiatan :

- Pemasangan dan pembuatan baliho, banner, poster dan leafet, light box.
- Himbauan penggunaan pangan lokal pada acara resmi melalui Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2011 tanggal 14 Juli 2011 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal di Kabupaten Kotawaringin Barat.
- Optimalisasi pemanfaatan pekarangan.
- Penyediaan KIT Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan.

Hal ini seperti ungkapan Ir. Abed Nego (Wawancara Tanggal 7 April 2014) berikut :

“Dari sisi penganekaragaman pangan masih baru slogan, kalau pun ada sangat kecil, dan baru dalam bentuk model”.

d. Meningkatnya peran aktif dari seluruh lintas terkait bersinergi dengan Pemerintah Pusat dan Propinsi serta seluruh stakeholder dalam mendorong dan mengawal pencapaian swasembada beras, jagung, daging sapi dan ikan tahun 2014 dengan mengalokasikan sumber dana. Dari hasil observasi dan data – data lapangan menunjukkan bahwa tidak semua SKPD aktif pada lembaga Dewan Ketahanan Pangan. Hal ini diungkapkan oleh Ir. Abed Nego (wawancara Tanggal 7 April 2014) sebagai berikut :

“Dalam kebijakan ketahanan pangan baru tiga lembaga yang saling koordinasi yaitu peternakan dengan pertanian dan penyuluhan, belum dengan lembaga yang lain, dinas perikanan seperti apa makanya wadah yang dibentuk Dewan ketahanan pangan yang dipimpin langsung oleh bupati belum serius memikirkan kebijakan ketahanan pangan”.

Dari hasil observasi menunjukkan bahwa kondisi diatas disebabkan karena organisasi Dewan Ketahanan Pangan Daerah merupakan organisasi lintas sektor dengan melibatkan 16 Kementerian untuk di Pusat untuk di Kabupaten Kotawaringin Barat Dinas /Instansi yang mendukung ketahanan pangan sebanyak 26 Dinas /instansi/Lembaga. Dengan demikian Kantor Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Barat tidak mampu menggerakkan organisasi sehingga implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan Daerah belum berjalan sesuai dengan maksud dari isi kebijakan. Hal ini karena organisasi pelaksana implementasi kebijakan ketahanan pangan daerah terlalu besar sementara sekretariat dewan terkendala dengan rendahnya eselonering sehingga koordinasi pada dewan ketahanan pangan daerah sangat lemah. Dilain pihak dukungan sumber daya manusia sangat minim

yang di tunjukan adanya jumlah personil yang menangani ketahanan pangan sangat terbatas yang terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Seksi dan 7 (tujuh) orang staf, sementara bidang yang ditangani ada tiga bidang yaitu : (1) bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, (2) bidang distribusi dan akses pangan dan (3) bidang konsumsi dan keamanan pangan.

- e. Terkoordinasinya penanganan permasalahan dan kendala pelaksanaan pencapaian swasembada pangan wajib menyelenggarakan rapat DKP sekurang-kurangnya 1 kali setahun dan rapat Pokja DKP sekurang-kurangnya 3 kali setahun atau sesuai kebutuhan.

Hasil konfirmasi dengan aparaturnya pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat bahwa untuk mendukung kebijakan ketahanan pangan daerah tersebut Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat melaksanakan Program Peningkatan Produksi Beras Nasional/P2BN yang merupakan program yang diluncurkan oleh Pemerintah Pusat guna mendukung kebijakan ketahanan pangan.

Adapun pelaksanaan program P2BN di Kabupaten Kotawaringin Barat dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 45/Permentan/OT.140/8/2011 tentang Tata Hubungan Kerja Antar Kelembagaan Teknis, Penelitian dan Pengembangan dan Penyuluhan Pertanian Dalam Mendukung Peningkatan Produksi Beras Nasional serta untuk meningkatkan sinergitas dan koordinasi pelaksanaan program peningkatan produksi beras nasional (P2BN) Kabupaten Kotawaringin Barat membentuk tim posko P2BN dengan Surat Keputusan

Bupati Kotawaringin Barat Nomor : PPP.020/87.a/II/2012 tanggal 26 Januari 2012 tentang Tim Pelaksana Tingkat Kabupaten, Tingkat Kecamatan dan Tingkat Desa Pada Pos Simpul Koordinasi (Posko) P2BN Kabupaten Kotawaringin Barat.

Program peningkatan produksi beras nasional (P2BN) di Kabupaten Kotawaringin Barat menunjukkan, bahwa pelaksanaan program peningkatan produksi beras nasional menjadi kewenangan dari 3 (tiga) instansi yaitu Dinas Pertanian dan Peternakan, Kantor Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan serta Balai Pengkajian Tehnologi Pertanian Propinsi Kalimantan Tengah. Disamping ketiga lembaga tersebut pelaksanaan P2BN di dukung Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pekerjaan Umum, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Bulog Sub Devisi Reg III dan HKTI Kabupaten Kotawaringin Barat.

Adapun pelaksanaan Program Peningkatan Produksi Beras Nasional di Kabupaten Kotawaringin Barat dari hasil penelitian maka diperoleh informasi sebagai berikut:

a. Ruang Lingkup.

Dikutip dari rencana strategis 2011-2016 bahwa Kebijakan Ketahanan Pangan di Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan kebijakan pemerintah daerah dalam mewujudkan kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari ketersediaan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, terjangkau.

Untuk melaksanakan kebijakan ketahanan pangan daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat dalam rangka mewujudkan ketahanan

pangan daerah ruang lingkup kebijakan dibagi menjadi 3 (tiga) aspek yang meliputi :

- a. Aspek Ketersediaan.
- b. Aspek Distribusi, Cadangan Pangan dan Stabilisasi
- c. Aspek Penganekaragaman Pangan dan Mutu Pangan

Untuk mendukung aspek ketersediaan pangan dan mencapai swasembada pangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat mencanangkan Program Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN).

b. Dasar Hukum

Landasan hukum pelaksanaan kebijakan ketahanan pangan pada program peningkatan produksi beras nasional di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah :

- 1). UU NO. 7 Tahun 1996 dan diubah dalam UU No. 18 tahun 2012 tentang Pangan
- 2). PP No 68 tahun 2002 tentang ketahanan pangan
- 3). PP 28 2004 tentang keamanan, mutu dan gizi pangan
- 4). Perpres No 83 tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan
- 5). Kebijakan umum Ketahanan Pangan 2006-2009 .
- 6). Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 45/Permentan/OT.140/8/2011 tentang Tata Hubungan Kerja Antar Kelembagaan Teknis, Penelitian dan Pengembangan dan Penyuluhan Pertanian Dalam Mendukung Peningkatan Produksi Beras Nasional
- 7). Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : DKP/228.1/V/2010

Tanggal 1 Mei 2010 Tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Barat.

- 8). Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : SEK.DKP/154/III/2012 Tanggal 06 Maret Tahun 2012 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Barat.
- 9). Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : PPP.020/87.a/II/2012 tanggal 26 Januari 2012 tentang Tim Pelaksana Tingkat Kabupaten, Tingkat Kecamatan dan Tingkat Desa Pada Pos Simpul Koordinasi (Posko) P2BN Kabupaten Kotawaringin Barat.

c. Tujuan

Adapun tujuan dari Program Peningkatan Produksi Beras Nasional /P2BN di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut :

- 1). Mewujudkan ketahanan pangan daerah Kabupaten Kotawaringin Barat melalui program peningkatan ketersediaan beras.
- 2). Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan terutama dalam peningkatan produksi beras.

d. Organisasi P2BN

Untuk menunjang ketersediaan pangan melalui peningkatan produksi beras maka dibentuk organisasi pelaksana Program Peningkatan Produksi Beras Nasional di Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Susunan sebagai berikut :

a. **Tim Pelaksana Tingkat Kabupaten**

Susunan Tim pelaksana Program Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) Tingkat Kabupaten adalah sebagai berikut :

Penanggung Jawab : Bupati Kotawaringin Barat

Koordinator : Assisten Perekonomian dan Pembangunan.

Anggota : Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan.

Kepala Bappeda.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum.

Kepala Dinas Perkebunan.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Kepala Bulog Sub Devisi Regional III

Kepala Kantor Penyuluhan & Ketahanan Pangan

Tim Pelaksana Tingkat Kabupaten dibantu oleh sekretariat yang terdiri dari :

Koordinator : Sekretaris Dinas Pertanian dan Peternakan.

Anggota : Kepala Bidang Pengembangan Produksi Pertanian.

Kepala Bidang Pengembangan Saprastan.

Kepala Bidang Perlindungan dan Keselamatan Distanak.

Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas PU.

Kepala Seksi SDM, Kelembagaan dan Penyuluhan.

Kepala Seksi Pengembangan Produksi TPH.

Kepala Seksi Perbenihan dan Perbibitan.

Kepala Seksi Kelembagaan dan Usaha Tani.

Kepala Seksi Perencanaan dan pengendalian Program.

b. **Tim Pelaksana Tingkat Kecamatan.**

Susunan Tim Posko peningkatan Produksi Beras Nasional Tingkat Kecamatan terdiri dari :

Penanggung Jawab : Camat

Ketua : Mantri Tani/Koordinator BPP.

Sekretaris : KJF Tanaman Pangan.

Anggota : Kasi yang membidangi Tanaman Pangan Kec.

Petugas POPT Kecamatan.

c. **Tim Pelaksana Tingkat Desa.**

Tim Posko P2BN Tingkat Desa terdiri dari :

Ketua merangkap anggota : Kepala Desa/Lurah

Sekretaris merangkap Anggota : PPL setempat

Anggota : Gapoktan setempat.

e. **Uraian Tugas Tim P2BN**

1). Tugas Tim Pelaksana Tingkat Kabupaten mempunyai tugas sebagai berikut :

- a). Menyusun rencana kerja peningkatan produksi padi tingkat kabupaten.
- b). Mendampingi/mengawal penerapan teknologi spesifik lokasi di lokasi P2BN.
- c). Menyusun Programa Penyuluhan mendukung P2BN Tingkat Kabupaten.
- d). Menyediakan kebutuhan sarana prasarana mendukung P2BN tingkat Kabupaten.

- 2). Tugas Tim Pelaksana Tingkat Kecamatan adalah sebagai berikut :
- a). Meningkatkan produksi padi tingkat kecamatan sesuai dengan target dan rencana kerja yang ditetapkan.
 - b). Menerapkan rekomendasi teknologi spesifik lokasi.
 - c). Melaksanakan program penyuluhan tingkat kecamatan
 - d). Mengkoordinasikan pemanfaatan prasarana dan sarana yang ada secara efektif dan efisien.
- 3). Tim pelaksana tingkat desa mempunyai tugas sebagai berikut :
- a). Memfasilitasi dan mendampingi, melaksanakan musyawarah /rembung desa antara penyuluh, petani, kepala UPT/UPTD pertanian kecamatan dalam rangka penyiapan CP/CL, penyusunan RDK dan RDKK di tingkat Desa/kelurahan.
 - b). Menggerakkan masyarakat untuk melakukan penanaman padi, penerapan teknologi spesifik lokasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, pengaturan jadwal pembagian dan pergiliran penggunaan air, serta pengendalian organisme pengganggu tumbuhan di wilayahnya masing – masing.
 - c). Memfasilitasi para petani untuk menumbuhkembangkan kelembagaan petani dan kelembagaan petani serta penumbuhan pos penyuluhan desa/kelurahan.
 - d). Memfasilitasi petani dalam mengakses sarana produksi, permodalan dan informasi pasar.

- e). Menyelesaikan permasalahan yang dihadapi petani dan memberikan umpan balik penerapan teknologi spesifik lokasi yang dibutuhkan petani untuk disalurkan kepada peneliti.

f. Pelaksanaan Kebijakan

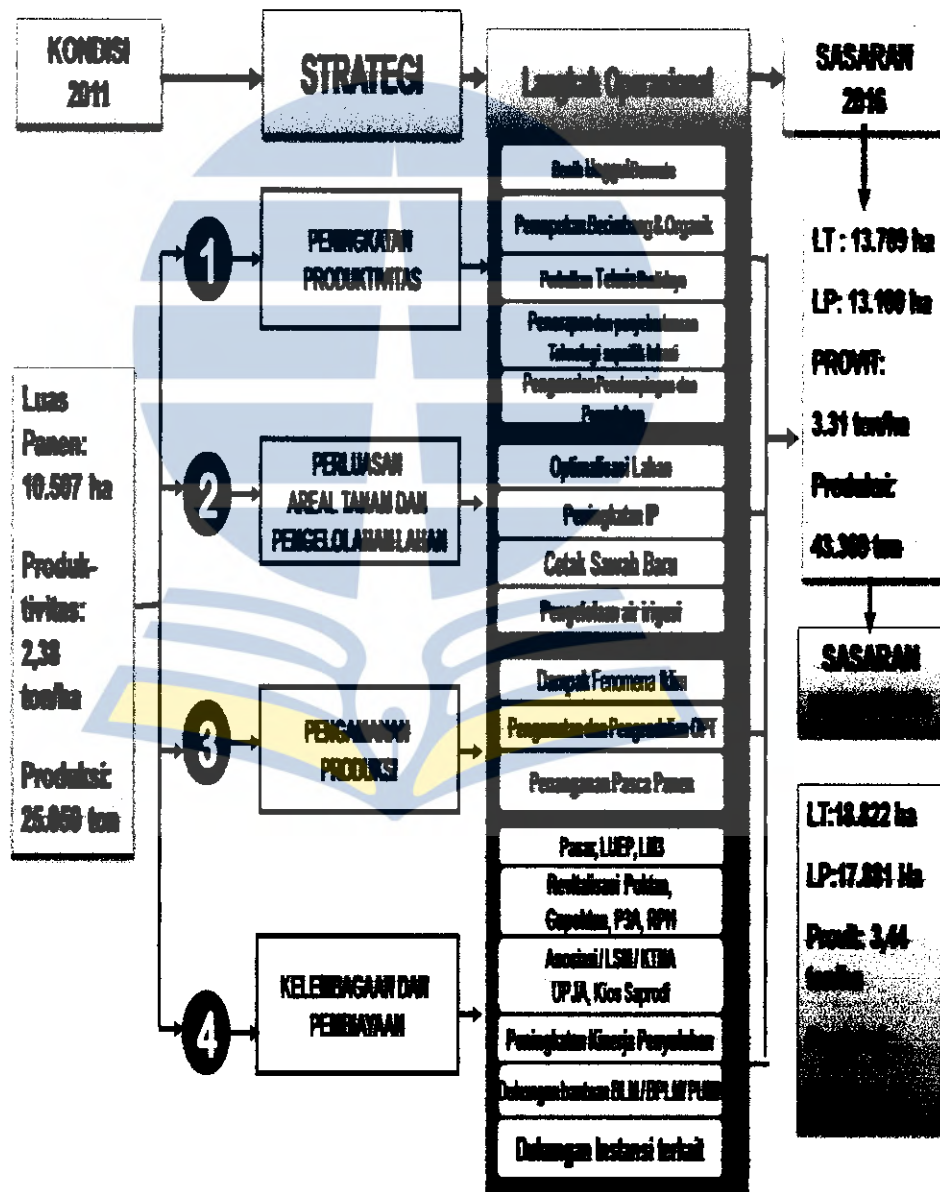
Berdasarkan hasil penelitian melalui pengamatan langsung maupun hasil wawancara dan data - data yang diperoleh peneliti selama melakukan penelitian di Kabupaten Kotawaringin Barat ditemukan bahwa pelaksanaan kebijakan ketahanan pangan pada program peningkatan produksi beras nasional di Kabupaten Kotawaringin Barat melalui program – program antara lain :

- 1). Program peningkatan produktivitas tanaman pangan
- 2). Peningkatan koordinasi dan harmonisasi dengan stakeholder untuk menguatkan fungsi dan peran kelembagaan ketahanan Pangan.
- 3). Meningkatkan Produksi pangan dengan teknologi spesifik lokasi, pengembangan dan penyediaan bibit unggul dan jasa alsintan serta penyediaan layanan kredit yang mudah diakses petani melalui dinas teknis daerah.

Untuk mendorong upaya pencapaian peningkatan produksi beras nasional, komitmen/sikap pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sudah ada namun belum berjalan secara optimal hal ini didukung adanya kegiatan – kegiatan yang dibiayai oleh APBN melalui kegiatan SLPTT, dukungan kegiatan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat melalui APBD Kabupaten adalah Pengembangan Padi Tabela Jajar Legowo seluas 500 Ha, penangkaran seluas 40 ha.

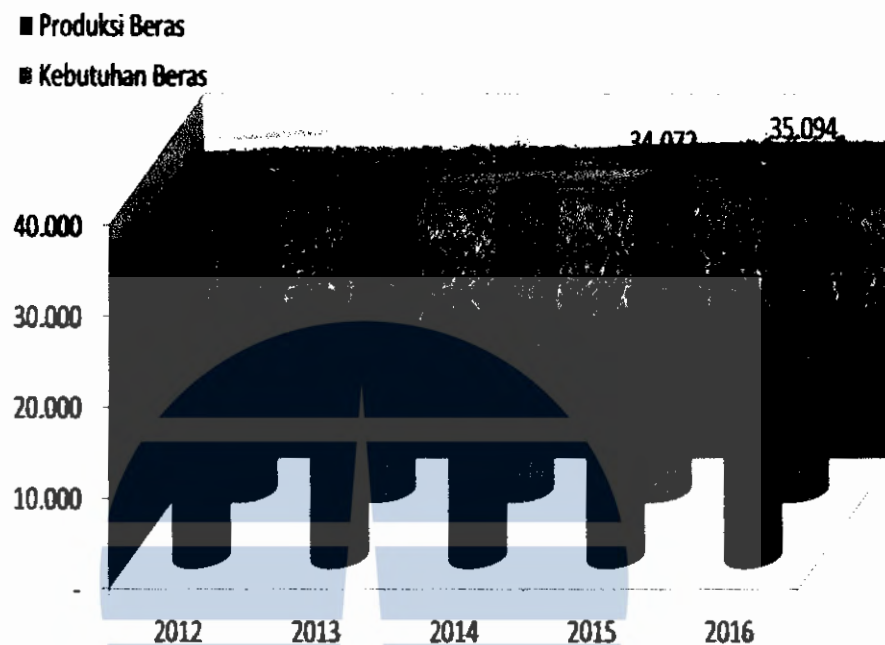
Disamping kegiatan kegiatan tersebut Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat sudah menetapkan strategi pencapaian produksi padi dan sasaran program peningkatan produksi padi sebagaimana gambar 4.2 dan grafik 4.1 pada halaman 84 sebagai berikut :

Gambar 4.2
Strategi Percepatan Peningkatan Produksi Padi 2012-2016



Sumber Distanak Kobar

Grafik 4.1
Sasaran Produksi 2012 -2016



Sumber Distanak Kobar.

Realisasi pencapaian luas tanam/luas panen dapat dilihat pada tabel 4.11. berikut :

Tabel 4.10.

Realisasi Pencapaian Luas Tanam dan Luas Panen

URAIAN	MT. OKMAR 2012/ 2013	MT ASEP 2013	JUMLAH
LUAS TANAM	6.989	315	7.304
LUAS PANEN	6.237	117	6.354

Sasaran tanam pada musim tanam April – September 2013 dan musim tanam Oktober – Maret 2013/2014 dapat dilihat pada tabel 4.12 berikut ini :

Tabel 4.11.
Sasaran Luas Tanam dan Luas Panen

URAIAN	MT. ASEP 2013	MT OKMAR 2013-2014	JUMLAH
LUAS TANAM	3.559	7.520	11.079
LUAS PANEN	525	9.835	10.360

Realisasi produksi pada tahun 2012 sebesar 27.424 ton dan mengalami peningkatan sebesar 9,477 % dibanding dengan realisasi produksi pada tahun 2011 sebesar 25.050 ton. Realisasi Produksi tahun 2012 sebagaimana tercantum pada tabel 4.13 berikut :

Tabel 4.12.
Realisasi Produksi tahun 2012

NO	URAIAN	JUMLAH
1.	Luas Panen	10.283
2.	Produktivitas	2.62
3.	Produksi	27.424

Sesuai Renstra Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat sasaran produksi padi tahun 2013 sebesar 29.554 ton dengan rincian sebagaimana tabel 4.14 berikut :

Tabel 4.13.
Sasaran Produksi Tahun 2013

NO	URAIAN	JUMLAH
1.	Luas Panen	10.386
2.	Produktivitas	2,86
3.	Produksi	29.554

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Pengembangan Produksi Padi tahun 2013 diimplementasikan dalam berbagai program dan kegiatan sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, yang terdiri

dari 4 (empat) program utama dan 2 (dua) program pendukung yang bersumber dari pusat/APBN.

Program utama terdiri dari :

- a. *Program Peningkatan Ketahanan Pangan*
 1. Kegiatan Pengembangan Intensifikasi Padi dan Palawija.
 2. Kegiatan Pengembangan Perbenihan dan Perbibitan.
 3. Kegiatan Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian.
 4. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
- b. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani.
 1. *Kegiatan Pelatihan Petani Pelaku Agribisnis.*
 2. Kegiatan Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani.
- c. Program Peningkatan Penerapan Tehnologi Pertanian.
 1. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Tehnologi Pertanian Tepat Guna.
 2. Kegiatan Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Tehnologi Pertanian Tepat Guna
 3. Kegiatan Pengembangan dan Pendayagunaan Alat Mesin Pertanian.
- d. Program Peningkatan Produksi Pertanian
 1. *Kegiatan Pengendalian dan Perlindungan Tanaman.*
 2. Kegiatan Pengembangan Lahan dan Tata Guna Air Pertanian.

Program Pendukung sumber dana Pusat/APBN terdiri dari :

- a. Program Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Tanaman Pangan untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan.

1. Kegiatan Pengelolaan Produksi Serealia.
 2. Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan.
 3. Dukungan Manajemen dan Teknis Tanaman Pangan.
- b. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian
1. Kegiatan Perluasan Areal.
 2. Pengembangan Jaringan Irigasi di Wilayah Baru.
 3. Optimasi Lahan.
 4. Pengembangan SRI
- g. Sosialisasi**

Sosialisasi Kebijakan Ketahanan Pangan Daerah pada Program Peningkatan Produksi Beras Nasional dilakukan melalui kegiatan – kegiatan sebagai berikut :

1) Rapat Koordinasi

Rapat Koordinasi P2BN dengan melibatkan seluruh stake holder pelaksana program.

2). Media

Sosialisasi media dilaksanakan dengan media masa, media elektronik, penerbitan buklet, leaflet, spanduk, brosur, pemasangan /pembuatan baliho, banner, poster dan , light box.

b. Indikator Kinerja

Implementasi Kebijakan ketahanan pangan daerah melalui program P2BN Kabupaten Kotawaringin Barat telah menetapkan target capaian. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Kabupaten Kotawaringin Barat informasi dan konfirmasi dari pelaksana program Peningkatan Produksi Beras Nasional menunjukkan bahwa program dilaksanakan untuk pencapaian 3 (tiga) target utama yang mendasar yang untuk memenuhi kebutuhan beras dari produksi daerah. Dalam penelitian ini fokus penelitian Kebijakan Ketahanan Pangan Daerah Pada Program Peningkatan Produksi Beras Nasional akan dilihat dari pencapaian target yang ditetapkan dari instrumen yang digunakan dan faktor – faktor yang mempengaruhi implementasinya. Adapun target dari implementasi kebijakan ketahanan pangan pada program peningkatan produksi beras nasional adalah sebagai berikut :

1). Peningkatan Luas Areal

Instrumen meningkatnya luas areal tanaman padi merupakan instrumen dari program peningkatan produksi beras nasional. Perluasan areal dilakukan melalui pembukaan lahan sawah baru, optimasi lahan, dan peningkatan indeks pertanaman.

a). Pembukaan Lahan Sawah Baru

Pembukaan lahan sawah baru merupakan kegiatan penambahan luas baku lahan untuk areal pertanaman.

b).Optimasi Lahan

Optimasi lahan adalah kegiatan untuk meningkatkan kapasitas kemampuan lahan untuk dapat meningkatkan produksi maupun produktifitas.

c).Peningkatan Indeks Pertanaman

Kegiatan peningkatan indeks pertanaman adalah kegiatan yang dilakukan untuk menambah kemampuan lahan agar dapat ditanami lebih dari satu kali. Kegiatan ini dilakukan melalui penambahan jaringan irigasi tingkat usaha tani maupun pengembangan tata air mikro.

Berikut Data Peningkatan Luas Areal sebagaimana tercantum pada tabel

4.14 berikut ini :

Tabel 4.14
Peningkatan Luas Areal

No	Uraian	Tahun/Ha						
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Cetak Sawah	30	-	-	50	-	25	575
2.	Optimasi Lahan	-	890	295	386	-	300	200

Dari kegiatan peningkatan luas areal ini sudah dilakukan namun pencapaiannya belum optimal. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Ketua KTNA Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai berikut :

“Pertanian banyak membuka lahan tetapi tidak maksimal, tidak sesuai dengan regulasi dan tidak kontinyu, artinya membuka kawasan harusnya sampai jadi”.

Dari wawancara dengan Kepala Bidang Pengembangan Produksi Pertanian juga diperoleh informasi bahwa dalam kegiatan perluasan areal terutama kegiatan pembukaan lahan sawah baru belum bisa dimanfaatkan secara maksimal. Berikut petikan wawancaranya :

“ Dari hasil pembukaan lahan sawah baru belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan secara maksimal karena pembukaan lahan tersebut belum dilengkapi dengan sarana yang lain seperti irigrasi dan lain – lain”.

Pernyataan senada juga dikatakan oleh kepala bidang pengembangan sarana dan prasarana sebagai berikut :

“Kegiatan pembukaaan lahan sawah memang belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan untuk pertanaman padi karena padi memang memerlukan kondisi lahan yang ideal sementara lahan hasil bukaan baru proses pelapukan belum sempurna sehingga masih memerlukan proses lebih lanjut”.

Kepala Desa Rungun Kecamatan Kotawaringin Lama menyatakan bahwa dari sisi peningkatan perluasan areal pemerintah kurang serius dalam mempersiapkan lahan – lahan baru untuk peningkatan produksi beras. Berikut ungkapan kepala Desa Rungun tersebut :

“Pemerintah sebenarnya punya komitmen untuk meningkatkan produksi beras namun, dalam perjalanannya masih belum berjalan secara optimal. pemerintah kurang serius kalau memang serius kenapa tidak dimaksimalkan dulu lahan yang sudah ada, tidak perlu pembukaan lahan baru”.

Selain permasalahan pembukaan lahan sawah baru, kegiatan optimasi lahan yang seharusnya dapat meningkatkan indeks pertanaman (IP) namun dalam pelaksanaannya belum berjalan secara optimal Hal ini seperti diungkapkan oleh Mantan Kepala Distanak Ir. H. Akhmad Yadi sebagai berikut :

“Kegiatan optimasi memang sudah dilakukan namun apabila jaringan pengairan masih sangat terbatas ya lahan belum bisa berfungsi dengan baik”.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ir. Abed Nego, M.Si sebagai berikut :

“Optimasi seharusnya dapat meningkatkan indeks pertanaman yang biasanya IP 100 menjadi IP 200 dan yang IP 200 menjadi IP 300 tetapi di Kobar walaupun sudah dioptimasi ya tetap aja Ipnnya kalau naik ya hanya sedikit”.

b). Peningkatan Produktivitas.

Instrumen peningkatan produktivitas merupakan indikator keberhasilan dari implementasi kebijakan ketahanan pangan melalui program peningkatan produksi beras nasional. Peningkatan produktivitas merupakan upaya aktor implementasi dalam menerapkan teknologi pemupukan, perbenihan, pengendalian organisme pengganggu tanaman maupun teknologi pasca panen. Upaya ini sesuai hasil penelitian sudah diterapkan namun belum mencapai target. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Ir. H. Akhmad Yadi dalam wawancara tanggal 4 April 2014 sebagai berikut :

“Untuk peningkatan produktivitas dinas pertanian berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana seperti pupuk, benih, teknologi namun tugas yang menyampaikan kepada petani adalah penyuluh sebagai agen transfer teknologi dan ini yang belum bisa berjalan sesuai harapan”.

Hasil wawancara dan data dari Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat bahwa penyediaan sarana produksi pertanian yang dilaksanakan oleh dinas pertanian sangat terbatas. Sarana produksi pertanian yang disediakan oleh Dinas Pertanian hanya berupa bantuan

benih, Bantuan kapur dilaksanakan satu kali pada tahun 2011 sebesar 71.100 kg. Hal ini dapat dilihat dari tabel 4.15 berikut ini :

Tabel 4.15
Bantuan Saprodi

1. Pengadaan Pupuk /Kapur			
2006	: Kg.	-	
2007	: Kg.	-	
2008	: Kg.	-	
2009	: Kg	-	
2010	: Kg.	-	
2011	: Kg.	71.100	
2012	: Kg.	-	
2. Pengadaan Alat Dan Mesin Pertanian			
2006	: Unit	15	
2007	: Unit	43	
2008	: Unit	70	
2009	: Unit	179	
2010	: Unit	70	
2011	: Unit	-	
2012	: Unit	18	
3. Bantuan Benih			
2006	: Kg	30.500	
2007	: Kg	8.000	
2008	: Kg	82.500	Bansos APBN
2009	: Kg	72.500	BLBU
2010	: Kg	80.000	BLBU
2011	: Kg	113.750	BLBU
2012	: Kg	133.125	BLBU

Sedangkan menurut Kepala Kantor KP2KP dalam wawancara tanggal 7 April 2014 sebagai berikut :

“Tugas penyuluhan dalam program p2bn menyampaikan teknologi akan tetapi walaupun sudah disampaikan maukah petani menerapkan kebijakan tersebut.”

Demikian juga yang dikatakan Kepala Bidang Pengembangan Produksi Pertanian dalam wawancara tanggal 10 April 2014 sebagai berikut :

“ Untuk peningkatan produktivitas Dinas Pertanian bertugas menyediakan sarana dan teknologi tinggal bagaimana petani menerapkan teknologi tersebut sangat tergantung dengan peran penyuluh dilapangan “.

Dari wawancara dengan Kepala Desa Berambai Makmur dalam wawancara tanggal Maret 2014 diperoleh informasi sebagai berikut :

“ Dalam hal peningkatan produktifitas dalam penerapan teknologi pasca panen yang kurang maksimal”.

Hal yang tidak jauh berbeda juga diungkapkan oleh Kepala Desa Rungun Ir. M Bahriwan dalam wawancara tanggal 14 April 2014 sebagai berikut :

“Yang ada baru sarana prasarana walaupun belum sempurna seharusnya dari pihak penyuluhan bisa memberikan pendampingan kepada petani bagaimana memanfaatkan lahan tersebut , sedangkan kehadiran penyuluh tidak rutin setiap hari oleh karena itu desa sudah menyiapkan lahan untuk lokasi balai penyuluhan desa sehingga kedepan diharapkan kehadiran penyuluh bisa rutin artinya siap untuk menyediakan fasilitas untuk menunjang program penyuluhan, apabila penyuluh berada di tempat maka petani mudah untuk mengakses teknologi tidak perlu harus ke kecamatan atau ke kabupaten.”.

Ketua KTNA Kabupaten Kotawaringin Barat juga mengungkapkan bahwa peran penyuluh dalam peningkatan produksi dan produktivitas beras belum maksimal. Hasil wawancara dengan Ketua KTNA Kabupaten Kotawaringin Barat tanggal 5 Mei 2014 sebagai berikut :

“Peran ketiga lembaga dalam peningkatan produksi padi memang sudah jalan namun belum maksimal salah satunya peran penyuluh”.

3). Rekayasa Tehnologi dan Sosial

Dalam pencapaian peningkatan produksi beras instrumen penerapan rekayasa teknologi dan sosial merupakan indikator penting dalam merubah pola pikir masyarakat. Penerapan Tehnologi ini merupakan kewenangan dari Balai Pengkajian Tehnologi Pertanian Propinsi Kalimantan Tengah. Dari wawancara dengan Dr. Susilawai, SP. M.Si Wawancara tanggal 30 April 2014 sebagai berikut :

“ Kami sebagai LO Kegiatan P2BN di Kabupaten Kotawaringin Barat semua tugas tugas kami sudah kami implementasikan dengan baik “

Data dari Balai Pengkajian Tehnologi Pertanian Propinsi Kalimantan Tengah melalui LO kegiatan SLPTT bahwa penerapan dan rekomendasi tehnologi dilakukan melalu, kegiatan Denfarm, Display varietas, uji adaptasi varietas unggul baru, pelatihan, penyebaran informasi dan supervisi penerapan tehnologi.

Dalam pelaksanaan SLPTT di kabupaten Kotawaringin Barat, penerapan rekomendasi teknologi mengacu kepada petunjuk teknis pelaksanaan SLPTT juga hasil-hasil pendampingan dan pengawalan SLPTT yang dilaksanakan melalui kegiatan Demplot dan Display beberapa varietas baru. Selama pelaksanaan pendampingan, BPTP Kalimantan Tengah telah mengaplikasikan Demplot/Gelar Teknologi sebanyak 4 lokasi dengan masing-masing luasan 3 ha. Adapun untuk kegiatan dilah display telah dilaksanakan sebanyak 75 unit display

varietas dengan luasan masing-masing 0,25 ha. Sebanyak lebih dari 15 varietas unggul padi telah dikenalkan dan mendapat respon dan preferensi yang berbeda di tingkat petani.

Adapun Rekomendasi komponen teknologi yang direkomendasikan oleh LO Kabupaten Kotawaringin Barat dari BPTP Prop di lokasi SLPTT adalah sebagaimana tercantum pada tabel 4.16 pada halaman 95 sampai dengan 96 berikut:

Tabel 4.16
Rekomendasi Tehnologi Dari BPTP Kalimantan Tengah

Komponen Teknologi	Penerapan Di Tingkat Lapang	Keterangan
1	2	3
Penggunaan Kalender Tanam	BPTP Telah mengirimkan poster Kalender Tanam ke BPP-BPP, namun belum populer di tinggal lapang.	Sosialisasi dan verifikasi kalender tanam ke tingkat lapang perlu dilakukan
Penggunaan Varietas Unggul	Telah diaplikasikan varietas Inpari 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, dan 20; varietas Inpara 3, 4, 5; varietas Inpago 6, Situbagendit, dan Towoti	Hampir semua varietas mampu berproduksi tinggi 3,0-6,5 t/ha. Varietas yang banyak diminati Inpari 9. Varietas yang kurang Inpara-3, karena rasa nasi tidak disenangi
Tanam Jajar Legowo 2 : 1 dan 4 : 1	Implementasi tanam jajar legowo 2 : 1 dan 4 : 1 telah diaplikasikan di sebagian kelompok tani, namun belum seluruhnya sesuai dengan petunjuk teknis. Sebagian besar aplikasi jajar legowo hanya mengurangi ruang tetapi tidak menyisipkan tanaman ke sela tanaman pinggir, kecuali di lokasi-lokasi denfarm	Implementasi jajar legowo di masyarakat tidak semuanya 2 : 1 dan 4 : 1, tetapi ada yang 6 : 1, 8 : 1 bahkan 10 : 1. Kendala pelaksanaan tanam jajar legowo adalah biaya tanam.

1	2	3
Pemupukan	Berdasarkan hasil analisis tanah di beberapa lokasi di Kab. Kobar dan hasil-hasil analisis sebelumnya yang dilakukan BPTP, maka untuk rekomendasi pemupukan adalah : dolomit 500-1000 kg/ha, Urea 100-200 kg/ha, SP-36 100 kg/ha, KCL 50 kg/ha atau 25 kg + jerami sebanyak 2.500 kg.	Dalam pelaksanaan SLPTT di kab. Kobar sebagian besar petani telah pemupuk tanamannya, namun belum banyak yang mampu memenuhi sesuai rekomendasi.
Panen	Petani menggunakan sabit sebagai alat panen yang dimiliki. Belum ada kelompok tani yang melakukan panen dengan menggunakan alat panen. Tingkat kehilangan hasil masih tinggi.	-
Pasca Panen	Teknologi pasca panen masih rendah.	Pasca panen khususnya pengangkutan, pengeringan dan penyimpanan hasil masih sesuai keinginan petani. Belum banyak petani yang memahami bagaimana cara penjemuran yang baik sehingga diperoleh kadar air yang baik, mengarungan dan pengangkutan agar kehilangan hasil dapat ditekan, dan cara penyimpanan yang kadang hanya ditumpuk di teras dan ditutup dengan terpal.

Rekomendasi Pemupukan

No.	Lokasi	Urea	SP-36	KCl	Kapur
1	Kumpai Batu Bawah, Kobar	200	100	50 Atau 25+ jerami 2.500	500
2	Natai Kerbau, Kobar	100	100	50 atau 25+jerami 2.5000	-

Hal yang berbeda dengan DR Susilawati, SP.M.Si bahwa rekayasa teknologi di Kabupaten Kotawaringin Barat belum menunjukkan

peran yang maksimal dalam penerapan teknologi hal ini seperti diungkapkan oleh Mantan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Ir. H. Ahmad Yadi (Wawancara Tanggal 4 April 2014 sebagai berikut :

“Penelitian dan pengembangan dalam rangka mendukung P2BN memang dalam implementasinya belum optimal betul kita sadar betul dukungan penelitian yang sangat dibutuhkan dalam kaitan pembangunan pertanian khususnya dalam peningkatan sdm dan penguatan kelembagan petani termasuk penerapan teknologi di tingkat lapangan”.

Pendapat senada juga di ungkapkan oleh Ir. Abed Nego, M.Si Kepala Kantor Penyuluhan dan Ketahanan Pangan (Wawancara tanggal 7 April 2014) sebagai berikut :

“Komoditas padi mempunyai nilai harapan rendah dengan resiko tinggi, resiko gagal bencana alam serangan HPT, peran BPTP sangat diperlukan untuk menangani berbagai permasalahan tersebut tetapi apa yang lain punya peran untuk menangani itu, tidak pernah mendapat perhatian bagaimana yang lain ada BPTP, tidak pernah melakukan pengkajian”.

Kurangnya peran BPTP dalam rekayasa teknologi juga diungkapkan Ketua KTNA Kabupaten Kotawaringin Barat Syahrian (Wawancara tanggal 5 Mei 2014) sebagai berikut :

“Apalagi peran BPTP sangat kecil sekali dan tidak dirasakan oleh masyarakat”.

2. Faktor – Faktor Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan Pada Program P2BN di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut :

a. Struktur Birokrasi

Organisasi pelaksana implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan Daerah merupakan faktor yang menghambat dalam implementasi. Kebijakan ketahanan pangan daerah belum berjalan sesuai dengan maksud dari isi kebijakan. Hal ini karena organisasi pelaksana

implementasi kurang mampu menggerakkan organisasi, hal ini disebabkan karena organisasi Dewan Ketahanan Pangan Daerah banyak melibatkan dinas/atau instansi sementara sekretariat dewan terkendala dengan rendahnya eselonering sehingga koordinasi pada dewan ketahanan pangan daerah sangat lemah.

Dari uraian diatas peneliti menemukan bahwa kondisi organisasi pelaksana kebijakan ketahanan pangan daerah belum mampu mengimplementasikan kebijakan secara maksimal karena hanya ditangani oleh pejabat setingkat eselon IV hal ini sesuai dengan pernyataan Ir. Abed Nego, M.Si sebagai berikut :

“Dalam kebijakan ketahanan pangan baru tiga lembaga yang saling koordinasi yaitu peternakan dengan pertanian dan penyuluhan, belum dengan lembaga yang lain, dinas perikanan seperti apa makanya wadah yang dibentuk Dewan ketahanan pangan yang dipimpin langsung oleh bupati belum serius memikirkan kebijakan ketahanan pangan, seharusnya dinas instansi terkait seperti dinas perkebunan, dinas perdagangan dinas yang lain duduk bersama dalam satu wadah supaya kita membangun ketahanan pangan. Sementara kami sekretariat hanya eselon IV dan yang harus digerakkan adalah eselon II jadi sulit.

Sesuai data dari Kantor Penyuluhan dan Ketahanan Pangan bahwa Keadaan dan masalah yang dihadapi dalam menangani Program Ketahanan Pangan di daerah adalah bahwa Eseloneering Kantor KP2KP masih di bawah setingkat dengan Dinas/Badan lainnya sehingga dalam pelaksanaan koordinasi kurang maksimal. Kualitas maupun kuantitas SDM yang menangani Ketahanan Pangan relatif baru /sedikit sehingga beban tugas yang diemban tidak seimbang.

Menurut pendapat Kasubag Tata Usaha (Kambali, SP) adalah sebagai berikut :

“Begini antara beban tugas dengan institusi yang ada tidak imbang sehingga pelaksanaan program pincang, terutama SDM yang menangani kalau dulunya ketahanan pangan ketika masih di Distrik yang menangani kan eselon III dengan tiga seksi, namun setelah berdiri sendiri dengan status kantor justru yang menangani malah turun ke eselon IV nah otomatis kalau dulu yang menangani tiga seksi sekarang hanya satu seksi, betapa beratnya. Dari sisi anggaran ada korelasi walaupun diberi anggaran banyak dengan personil yang tidak memadai maka tidak bisa melaksanakan. Salah satunya jalan agar ketahanan pangan bisa jalan ya harus dengan sarana dan prasarana dan SDM yang mumpuni, jumlah personil terbatas dengan kapasitas rendah”.

Kondisi organisasi leading sektor pelaksana implementasi kebijakan ketahanan pangan daerah yang hanya setingkat eselon III sementara anggota tim setingkat lebih tinggi yaitu eselon II hal ini sangat berpengaruh dalam pergerakan organisasi.

Kurang mampunya organisasi dalam menerapkan kebijakan ketahanan pangan di Kabupaten Kotawaringin Barat dibuktikan dengan tidak terlaksananya kegiatan - kegiatan yang mendukung kebijakan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari penyerapan anggaran APBN. Pagu Anggaran yang diberikan kepada Kantor Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan untuk melaksanakan kegiatan Dana Dekonsentrasi satuan kerja Badan Ketahanan Pangan dan Koordinasi Penyuluhan Propinsi Kalimantan Tengah sesuai DIPA tahun anggaran 2013 adalah sebesar Rp. 442.800.000,- Realisasi pelaksanaan pencapaian fisik 93% dan keuangan Rp. 399.869.900,- (90,3%),- sisanya Rp. 42.931.000,- (9,7%).

APBD Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2013 untuk Program Ketahanan Pangan yang terdiri dari 3 kegiatan yaitu :

- Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Daerah Pagu Rp.70.300.000,- terealisasi sebesar Rp.40.932.000 (58,2%) sisa sebesar Rp. 29.368.000,- (41,8%).
- Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pagu Rp. 30.300.000,- terealisasi sebesar Rp. 9.845.000,- (32,5 %) sisa sebesar Rp. 20.455.000,- (67,5 %).
- Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan Pagu Rp. 51.525.500,- terealisasi sebesar Rp. 35.867.500,- (69,6%) sisa sebesar Rp. 15.657.500,- (30,4%).

Berikut penyerapan anggaran pada program Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Barat seperti terlihat pada Tabel 4.17 berikut ini :

Tabel 4.17.
Pelaksanaan Anggaran Dana Dekonsentrasi APBN & APBD Propinsi/ Kabupaten Tahun 2013

APBN							
No	Nama Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Fisik (%)	Realisasi Keuangan (Rp)	(%)	Sisa Anggaran (Rp)	(%)
1.	DPAKPPKP Kab.Kobar	442.800.000	93	399.869.000	90,3	42.931.000	9,7
APBD							
1.	Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Daerah	70.300.000	100	40.932.000	58,2	29.368.000	41,8
2.	Monitoring Evaluasi, Pelaporan	30.300.000	100	9.845.000	32,5	20.455.000	67,5
3.	Analisis& Penyusunan Pola Konsumsi & Suplai Pangan	51.525.500	100	35.867.500	69,6	15.657.500	30,4

Untuk program P2BN berdasarkan konfirmasi dan observasi diperoleh data bahwa Implementasi Program Peningkatan Produksi Beras Nasional Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 45/Permentan/OT.140/8/2011 tentang Tata Hubungan Kerja Antar Kelembagaan Teknis, Penelitian dan Pengembangan dan Penyuluhan Pertanian Dalam Mendukung Peningkatan Produksi Beras Nasional serta untuk meningkatkan sinergitas dan koordinasi pelaksanaan program peningkatan produksi beras nasional (P2BN) Kabupaten Kotawaringin Barat membentuk tim posko P2BN dengan Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : PPP.020/87.a/II/2012 tanggal 26 Januari 2012 tentang Tim Pelaksana Tingkat Kabupaten, Tingkat Kecamatan dan Tingkat Desa Pada Pos Simpul Koordinasi (Posko) P2BN Kabupaten Kotawaringin Barat.

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa organisasi pelaksana P2BN sudah terbentuk mulai dari tingkat kabupaten sampai ke tingkat desa dengan rincian tugas masing – masing secara jelas, namun dari uraian tugas tersebut belum dijalankan secara maksimal, secara umum telah dilaksanakan namun belum berjalan dengan baik dikarenakan masih banyak aktor – aktor implementor yang tidak menjalankan perannya sesuai dengan tugas yang diberikan, berdasarkan hasil wawancara dengan Ir. H. Ahmad Yadi (Mantan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat) sebagai berikut :

“Kebijakan P2BN di Kabupaten Kotawaringin Barat sudah ada dasar hukum pelaksanaannya seperti Permentan nomor 45 tentang Tata Hubungan Kerja Antar Kelembagaan Teknis, Penelitian dan Pengembangan dan Penyuluhan serta sudah ada Surat Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Posko P2BN Tingkat Kabupaten sampai tingkat Desa, namun dalam implementasinya belum optimal, hal ini kita sadar betul dukungan penyuluhan dan penelitian yang sangat dibutuhkan dilapangan kurang dirasakan di tingkat lapangan”

Hal yang sama juga di ungkapkan oleh Bapak Warjoko Kepala Desa Berambai Makmur sebagai berikut :

“ Mekanisme kerja Program P2BN yang berjenjang mulai dari kabupaten sampai ke desa sangat terlalu jauh sedangkan salah satu unsur pelaksana tidak terlalu aktif, POPT kurang aktif, pelaksana tingkat kecamatan tidak fokus menjalankan perannya untuk memberikan motivasi kepada petani, ya petani kurang semangat, walaupun dari masing – masing sudah ada pembagian tugasnya tetapi tidak dilaksanakan sepenuhnya masak Kades yang harus hendel, saya yakin apabila semua petugas dapat menjalankan tugasnya dengan baik tingkat keberhasilan tinggi dalam mendukung ketahanan pangan”.

Kurang maksimalnya pelaksanaan tugas yang diberikan terhadap pelaksana program P2BN juga diungkapkan oleh Suprapti (Penyuluh Pertanian WKPP Desa Bumi Harjo sebagai berikut :

“ Tugas – tugas kami sebagai penyuluh dalam mendukung P2BN sudah jelas sebagaimana tercantum dalam SK Tim P2BN, namun belum ada SOP sebagai pegangan penyuluh sehingga tugas – tugas yang diberikan kepada kami baru sebagian yang kami laksanakan misalnya pendampingan dalam penyusunan RDK/RDKK sedangkan bimbingan tehnologi spesifik lokasi, fasilitasi sarana produksi, permodalan dan informasi pasar belum kami laksanakan”.

Aina Penyuluh Pertanian Lapangan WKPP Desa Purbasari mengakui bahwa tugas yang diberikan belum semuanya dilaksanakan seperti ungapannya sebagai berikut :

“ Kami sebagai PPL sudah melaksanakan tugas – tugas yang dibebankan kepada kami walaupun belum semuanya kami laksanakan seperti fasilitasi informasi pasar dan melakukan umpan balik penerapan tehnologi spesifik lokasi yang dibutuhkan oleh petani untuk disalurkan kepada peneliti belum pernah kami laksanakan”.

Hal serupa juga di ungkapkan oleh Kepala Desa Rungun sebagai berikut :

“Tugas masing – masing tim pelaksana sudah ada namun tingkat keseriusan dari masing – masing tim yang masih kurang”.

Dari hasil pengamatan dilapangan dan wawancara ditemukan bahwa struktur birokrasi organisasi Program P2BN di Kabupaten Kotawaringin Barat terlalu panjang dan tidak ada SOP yang digunakan sebagai pedoman, hal ini di dukung oleh pernyataan sebagai berikut :

Warjoko, Kepala Desa Berambai Makmur :

“Mekanisme kerja Program P2BN yang berjenjang mulai dari Kabupaten kecamatan dan desa sangat terlalu jauh sedangkan apabila salah satu unsur tersebut kurang aktif sebagai misal kecamatan tidak fokus tidak pernah memberi motivasi ya petani kurang semangat”.

Suprpti, PPL Desa Bumiharjo mengungkapkan sebagai berikut :

“Dalam pelaksanaan program P2BN tugas – tugas suda terinci seperti yang sudah tertuang dalam SK Bupati tentang P2BN namun belum ada SOP sebagai pegangan bagi penyuluh. Tugas Penyuluh sebagai anggota tim pelaksana P2BN yang ada dilapangan tugas – tugas yang diberikan baru sebagaian yang sudah dilaksanakan misal dalam hal penyusunan RUK/RDCK namun dalam hal bimbingan tehnologi spesifik lokasi, memfasilitasi petani dalam hal mengakses sarana produksi, permodalan dan informasi pasar serta pelaksanaan rembug desa belum dilaksanakan”.

Struktur birokrasi pelaksana program peningkatan produksi nasional (P2BN) di Kabupaten Kotawaringin Barat yang melibatkan pejabat dari tingkat kabupaten sampai tingkat desa menyebabkan rentang kendali sangat panjang sehingga pengambilan keputusan memerlukan waktu yang cukup lama dan rumit. Aspek struktur birokrasi menjadi sangat penting dalam implementaasi kebijakan. Mekanisme implementasi yang ditetapkan dengan standart operasinal prosedur tidak ditetapkan

dalam pelaksanaan P2BN di Kabupaten Kotawaringin Barat. Hal ini berakibat pelaksana program tidak memahami tugas – tugas dan bahkan ada tugas – tugas yang belum dilaksanakan.

b. Sumberdaya

Jumlah personil yang menangani ketahanan pangan sangat terbatas yang terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Seksi dan 7 (tujuh) orang staf, sementara bidang yang ditangani ada tiga bidang yaitu : (1) bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, (2) bidang distribusi dan akses pangan dan (3) bidang konsumsi dan keamanan pangan. Sarana dan prasarana untuk operasional di Kantor masih belum memadai bahkan sarana untuk operasional ke lapangan tidak ada sehingga pembinaan ke lapangan belum optimal. Dukungan anggaran dari APBD Kabupaten tidak konsisten bahkan turun naik setiap tahunnya sehingga banyak kegiatan-kegiatan pokok yang tidak terfasilitasi.

Hal ini seperti dikemukakan oleh pernyataan Kambali, SP (Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Penyuluhan dan Ketahanan Pangan) berikut ini :

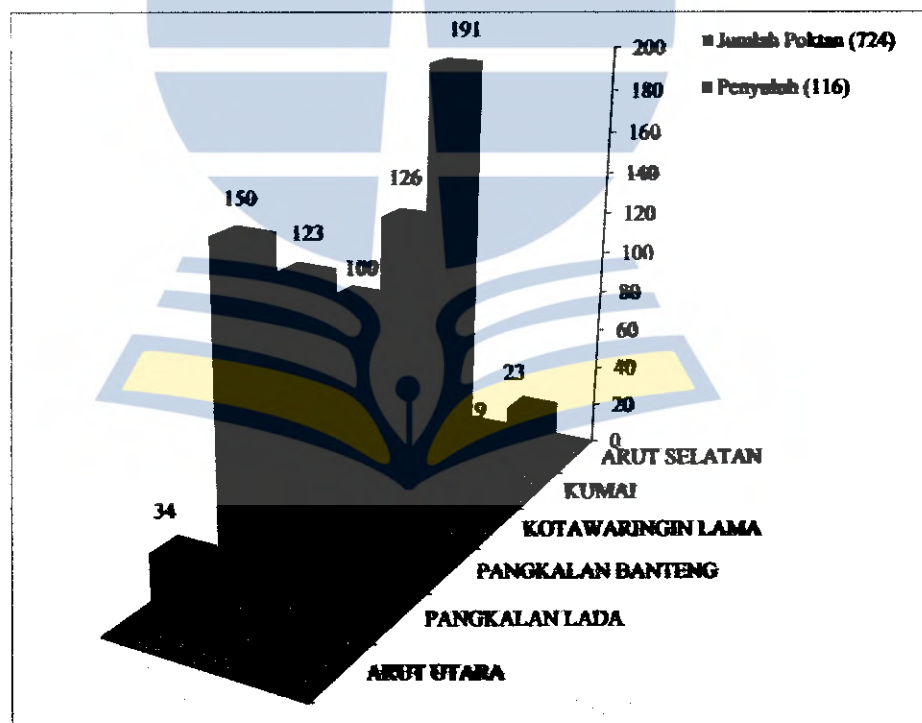
“Dari sisi anggaran ada korelasi antara SDM dan anggaran walaupun diberi anggaran banyak dengan personil yang tidak memadai maka tidak bisa melaksanakan. Salah satunya jalan agar ketahanan pangan bisa jalan ya harus dengan sarana dan prasarana dan SDM yang mumpuni, jumlah personil terbatas dengan kapasitas rendah”.

Sumber daya yang dikerahkan untuk mendukung kebijakan ketahanan pangan daerah terutama program P2BN dirasakan masih sangat kurang seperti kutipan hasil wawancara dengan Ir. H. Akhmad Yadi berikut :

“Faktor kendala adalah petaninya sendiri yang kita akui bahwa petani kita sdmnya masih lemah, kemampuan ekonominya masih lemah, kelembagaanya masih lemah. Pengairan masih sangat terbatas jaringan yang sudah dibangun juga belum berfungsi dengan baik, lokasinya terpencar-pencar, kualitas lahan yang cukup rendah. kondisi – kondisi yang seperti itu kalau kita lihat masyarakatnya petaninya kondisi alamnya infrastruktur masih sangat terbatas .itulah kondisi yang kita hadapi betapa luasnya wilayah maka harus kita lakukan kegiatan kegiatan yang bisa mendorong ini semua seperti bantuan – bantuan stimulan, ada perbaikan sarana prasarana”.

Kemampuan sumber daya manusia khususnya petani yang masih lemah karena proses transfer teknologi yang lambat hal ini karena perbandingan antara kelompok tani dan petani yang tidak imbang seperti tercantum dalam grafik 4.2 berikut ini :

Grafik 4.2
Perbandingan Jumlah Penyuluh dan Jumlah Kelompok Tani



Sumber Distanak Kobar

Ir. Abed Nego, M.Si menjelaskan bahwa kekurangan sumber daya sangat dirasakan seperti ungkapan sebagai berikut :

“Agar kebijakan ini bisa berhasil maka setiap daerah yang mempunyai potensi adakah sarana dan prasarana sebagai misal bendungan, tetapi untuk Ktw. Barat irigrasi yang dibuat PU bisa tidak bisa dimanfaatkan”.

Syahrian Ketua Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Kotawaringin Barat mengungkapkan :

“Begini bu kita membangun pertanian ini berarti tidak hanya menyediakan sarana dan prasarana tetapi membangun manusianya juga, dari sisi ini pemerintah agak lemah keterkaitannya dengan sosialisasi, penyuluhan agak kurang, sarana belajar petani sangat minim sebagai contoh kalau di pulau jawa ada saung tani sebagai tempat pertemuan dan belajar para petani, kalau kita disini tidak ada. Ibu bisa cek hampir setiap desa tidak ada sarana tersebut kecuali di Kubu sudah mulai kita rintis P4S sebagai sarana belajar para petani. Kalau kita hanya mengandalkan penyuluh tidak mungkin karena kadang – kadang satu penyuluh ada yang merangkap beberapa desa. Artinya dalam mencapai suatu program harus secara terintegrasi baik penyediaan sarana prasarana maupun pembangunan manusianya”.

Berdasarkan data – data diatas menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan peningkatan produksi beras nasional (P2BN) di Kabupaten Kotawaringin Barat menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan kurang maksimalnya pelaksanaan program adalah kurangnya sumber daya, baik sumber daya manusia sumberdaya sarana dan prasarana maupun finansial.

c. Disposisi

Komitmen Pemerintah Daerah dalam kebijakan ketahanan pangan masih sangat rendah. Program Ketahanan Pangan merupakan program yang dicanangkan oleh pemerintah pusat sehingga aturan yang dibuat oleh pemerintah di generalisir tanpa memperhatikan kondisi daerah hal ini menyebabkan komitmen pemerintah daerah sangat rendah, menurut pendapat Ir. M. Bahriwan (Kepala Desa Rungun)

“Setahu saya sebenarnya pemerintah daerah punya komitmen untuk meningkatkan ketahanan pangan, namun dalam perjalanannya pemerintah tidak serius menjalankan program ini, hal ini terbukti bahwa program- program yang dicanangkan hangat dibicarakan pada saat awal namun makin lama makin hilang .“

Lebih lanjut dikatakan oleh Syahrian (Ketua KTNA Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai berikut :

“ Ya mungkin apa yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan propinsi juga dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten tetapi kalau ada yang mengatakan di Kobar kurang komitmen ya semuanya kurang komitmen. Ya kalau memang komitmen pemerintah itu kuat ya seharusnya kebijakan tersebut dilaksanakan jangan hanya sepotong – sepotong, jadi masyarakat yang berusaha tani padi bisa menggantungkan hidupnya pada usaha tersebut”.

Program Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) merupakan program yang diluncurkan oleh Pemerintah Pusat, oleh karena itu Pemerintah Daerah sebagai bagian dari pemerintah pusat wajib mendukung dan melaksanakan kebijakan tersebut. Dalam pelaksanaan program komitmen dari pelaksana kegiatan sangat menentukan keberhasilan kebijakan namun komitmen pejabat sudah ada dengan ditetapkannya strategi pencapaian namun komitmen tersebut dirasakan masyarakat masih sangat kurang seperti yang dinyatakan oleh informan sebagai berikut :

Ir. M. Bahriwan menyatakan :

“Komitmen pejabat ada tetapi tingkat keseriusannya kurang, kalau memang serius tidak perlu membuka lahan baru lebih baik memaksimalkan potensi – potensi yang ada sampai dimana tingkat keberhasilannya, sehingga petani dapat berharap dari penghasilan budidaya padi . kalau memang pemerintah itu serius jangan petani disuruh memimjam uang ke bank seperti KUT, sebaiknya uangnya diserahkan kepada petani walaupun dengan jaminan atau perjanjian, jangan sampai petani dibebani dengan program ini kalau memang petani tidak punya modal ya dikasih modal. Kalau seperti desa rungun kalau hanya disediakan bank sementara jarak desa untuk mengakses

permodalan di bank terlalu jauh dan memakan biaya ya petani tidak mampu untuk melaksanakan itu. karena budidaya padi tidak menjanjikan karena resiko sangat besar dan sarana yang disediakan pemerintah masih sangat minim hanya berupa benih kadang kadang hanya pupuk seadanya”

“Rinda Rumpel, SPKP mengemukakan bahwa Komitmen pejabat terhadap program ketahanan pangan maupun program P2BN masih sangat rendah dan belum dilaksanakan samapai tingkat bawah sehingga ketepatan alokasi waktu dana masih jauh dari sasaran”.

d. Kebijakan Top Down

Kebijakan Ketahanan Pangan Daerah merupakan kebijakan yang menggunakan pendekatan *Top Down* yaitu kebijakan yang diluncurkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tinggal melaksanakan apa yang sudah dicanangkan oleh Pemerintah Pusat.

Kurang berhasilnya implementasi kebijakan ketahanan pangan daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat pada tingkat kecukupan pangan dibanding jumlah penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2013 berjumlah 251.050 jiwa yang tersebar di 6 kecamatan. Kebutuhan pangan khususnya beras di Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2013 sebanyak 30.567,87 ton.

Kebutuhan bahan pangan pokok secara umum Kabupaten Kotawaringin Barat masih mendatangkan dari luar daerah (pulau Jawa). Untuk memenuhi kebutuhan beras daerah (sebelum ditambah PSB) baru memberikan kontribusi sebesar 60,53%, (18.503,87 ton), protein hewani daging 19,33% (1.062,51 ton), telur 11,36% (208,12 ton). Khusus ikan Kabupaten Kotawaringin Barat mengalami kenaikan dibandingkan

dengan tahun 2012 mencapai 141,35 % (11.411,28 ton) sedangkan tahun 2013 mencapai 163,46% (13.480,65 ton) atau surplus 5.233,66 ton (63,46%). Untuk komoditas kacang-kacangan terutama kedelai, kacang tanah, kacang hijau dan hortikultura (sayur-sayuran dan buah-buahan) terutama bawang merah, bawang putih, wortel, kubis, cabe dan aneka buah-buahan seperti apel, salak, anggur, jeruk, semangka dan mangga sebagian besar masih mendatangkan dari luar (pulau Jawa).

Berdasarkan perhitungan produksi pangan daerah tahun 2013 Kabupaten Kotawaringin Barat dikategorikan dalam keadaan tidak aman dengan resiko tinggi (warna merah). Hasil perhitungan nilai beras dan palawija (B + NB) beras yang dihasilkan baru mencapai 60,53 % (18.503,87 ton) dan non beras 10,22 % (3.125,79 ton), jumlah 21.629,66 ton (70,76%). Sedangkan kebutuhan pangan beras dengan jumlah penduduk 251.050 jiwa dengan memakai standar konsumsi Badan Ketahanan Pusat (BKP) pusat sebesar 121,76/orang/tahun mencapai 30.567,85 ton maka kekurangan/defisit pangan beras sebesar 8.938,19 ton. Kekurangan pangan beras di Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dipenuhi dari penyaluran Bulog sebagai buffer stock sebesar 4.610,17 ton ditambah penyaluran dan stock importir (pedagang) beras sebanyak 35.185,20 ton dan produksi (B+NB) 21.629,66 ton, sehingga total penyediaan tahun 2013 sebesar 61.425,03 ton berarti masih ada sisa stock 30.857,18 ton untuk \pm 12 bulan**).

Kondisi Pemenuhan kebutuhan pangan khususnya beras di Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana tercantum pada Tabel 4.18. berikut ini :

Tabel 4.18.
Ketersediaan Pangan (beras) di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2013

N ^o	Penduduk (jiwa)	Kebutuhan (ton)	Produksi beras + Non beras (ton)	Penyaluran beras Bulog+Importir beras (ton)	Sisa (ton)
1.	251.050	30.567,85	18.503,87 ^{*)}	4.610,17	Ketersediaan dikurangi konsumsi
			3.125,79 ^{*)} +	35.185,20 ^{**)} +	
			21.629,66	39.795,37	

Keterangan :

Total stock : $21.629,66 + 39.795,37 = 61.425,03$ Ton

Konsumsi : 121,76 orang/tahun = 30.567,85 Ton

Sisa : 30.857,18 ton (cukup untuk 12 bulan 1 hari ke depan^{**)})

Sumber : Data diolah Kantor KP2KP Kabupaten Kotawaringin Barat

^{*)} : Angka produksi sementara data Distanak Kab.Kobar

^{**)} : Khusus pengadaan Importir Penyalurannya sebagian ke kabupaten tetangga (Lamandau, Sukamara, & Seruyan) dan propinsi tetangga (Kalimantan Barat / Kab. Ketapang).

Sehingga Kab. Ktw. Barat merupakan pintu masuk akses pangan (beras) bagi daerah-daerah tersebut. Penyaluran tersebut terjadi melalui 2 cara, yaitu : secara langsung di wilayah Kab. Ktw Barat (penduduk luar daerah membeli langsung di wilayah Kab. Ktw. Barat), dan penyaluran oleh importir ke luar daerah.

Dari data ketersediaan pangan menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan pangan di Kabupaten Kotawaringin Barat masih sangat tergantung dengan daerah pemasok di luar Kabupaten Kotawaringin Barat sehingga berdasarkan data Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Barat menyatakan bahwa Kabupaten Kotawaringin Barat berada pada Zona Merah

artinya Kabupaten Kotawaringin Barat sangat rawan apabila jalur distribusi terhambat.

Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan di Kabupaten Kotawaringin Barat kurang berhasil karena menggunakan pendekatan *Top Down* yaitu kebijakan yang di luncurkan oleh Pemerintah Pusat, sedangkan Pemerintah Daerah tinggal melaksanakan apa yang sudah dicanangkan oleh Pemerintah Pusat seperti yang diungkapkan oleh Bapak Ir. Abed Nego, M.Si (Kepala Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Kab. Kotawaringin Barat) sebagai berikut :

“Bahwa dalam Kebijakan Ketahanan Pangan ada sistem yang dibuat Pemerintah yang saya rasa belum mengena kepada pelaku/petani dan belum berjalan dengan baik karena kita di daerah hanya disuruh menerapkan aturan – aturan yang sudah dibuat oleh Pemerintah Pusat tanpa memikirkan nasib para pelaku utama yaitu petani. Petani hanya menjadi obyek kebijakan pemerintah sementara nasib mereka tidak pernah dipikirkan dari sisi pendapatan yang dibawah UMR, sedangkan menanam padi resiko kegagalan tinggi dan setelah mereka gagal tidak diperhatikan sehingga mereka beralih ke komoditas lain yang lebih menguntungkan dan mungkin menanam padi hanya pilihan terakhir dan hanya yang tua – tua yang mau melaksanakan . ”

e. Identifikasi Permasalahan

Dalam pencapaian peningkatan produksi beras selain faktor aktor implementasi juga dipengaruhi oleh masalah masalah internal maupun eksternal. Faktor eksternal adalah kondisi alam dan lahan di Kabupaten Kotawaringin Barat yang sangat jauh dari kata ideal sehingga permasalahan sangat sulit dikendalikan. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Ir. Akhmad Yadi sebagai berikut :

“ Faktor kendala adalah petaninya sendiri yang kita akui bahwa petani kita sdmnya masih lemah ,kemampuan ekonominya masih lemah,

kelembagaannya masih lemah. Pengairan masih sangat terbatas jaringan yang sudah dibangun juga belum berfungsi dengan baik, lokasinya terpencar-pencar, kualitas lahan yang cukup rendah. Kondisi – kondisi yang seperti itu kalau kita lihat masyarakatnya petaninya kondisi alamnya infrastruktur masih sangat terbatas, itulah kondisi yang kita hadapi betapa luasnya wilayah maka harus kita lakukan kegiatan-kegiatan yang bisa mendorong ini semua seperti bantuan – bantuan stimulan, ada perbaikan sarana prasarana ada kegiatan pendampingan-pengawasan ada kegiatan penyuluhan dan ini kita lakukan ada kegiatan pengkajian bersama – sama oleh BPTP dalam menemukan teknologi yang spesifik lokasi yang mudah diterapkan oleh masyarakat setempat ini yang kita lakukan dan banyak lagi pada intinya faktor yang menghambat ini kalau kita mengatasi bersama-sama secara perlahan akan bisa teratasi. Kalau bicara masalah hambatan sangat komplekslah kalau di pertanian tetapi itulah tugas kita bersama kalau tidak ada masalah di bidang pertanian dalam produksi beras tidak perlu ada P2BN”.

Disamping kondisi alam yang sulit dikendalikan faktor ekonomi sangat berpengaruh. Ir. Abed Nego, M.Si mengungkapkan seperti di bawah ini :

“Dari kebijakan p2bn dinas sudah merencanakan 70 % dari kebutuhan tercukupi dari produksi sendiri, seharusnya masing – masing lembaga menerapkan tugas masing – masing, seperti BPTP bagaimana teknologinya, kemudian penyuluhan yang menyampaikan teknologi akan tetapi walaupun sudah disampaikan maukah petani menerapkan kebijakan tersebut, karena nilai harapan rendah, Sasaran kurang respon karena membangun itu take and give dimana antara pengambil kebijakan dan pelaku sasaran tidak saling menguntungkan maka sasaran kurang respon. Sehingga penerapan kebijakan tidak perlu dipaksakan. Karena daerah hanya menjalankan program dari pusat tetapi pemerintah tidak pernah memikirkan kesejahteraan petani, seharusnya ada subsidi produksi untuk menjamin petani dapat sejahtera, sehingga program ini merupakan program pemiskinan. Agar kebijakan ini bisa berhasil maka setiap daerah yang mempunyai potensi adakah sarana dan prasarana sebagai misal bendungan, tetapi untuk ktw. Barat irigrasi yang dibuat PU bisa tidak bisa dimanfaatkan, artinya keterpaduan antar lembaga kurang. Karena daerah hanya menerima program dari pusat tetapi intinya bagaimana mensejahterakan petani tidak pernah dipikirkan’.

Dari uraian di atas bahwa kebijakan P2BN yang merupakan program pemerintah pusat merupakan program yang digeneralisir tanpa memperhatikan kondisi permasalahan pada masing – masing daerah hal ini akan mengakibatkan kebijakan yang dikeluarkan bukan menjadi jawaban

atas permasalahan yang dialami oleh masyarakat. Identifikasi permasalahan dari masing – masing daerah tidak semua terakomodir pada program dan kebijakan. Berbagai permasalahan tidak diperhitungkan pada saat pembuatan kebijakan sehingga permasalahan – permasalahan akan timbul pada saat implementasi kebijakan.

f. Komunikasi dan Koordinasi

Tim Pelaksana Program Peningkatan Produksi Beras Nasional di Kabupaten Kotawaringin Barat sudah dibentuk sejak tahun 2012, dengan pembentukan posko P2BN Kabupaten Kotawaringin Barat kegiatan – kegiatan yang dilakukan Tim Posko P2BN Tahun 2012 sebagai berikut :

- 1). Penandatanganan Nota Kesepahaman Antara Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Pemerintah Kecamatan se- kabupaten Kotawaringin Barat tentang Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) sesuai dengan sasaran masing – masing kecamatan di laksanakan 1 (satu) kali pada awal program tahun 2012.
- 2). Rapat Kordinasi Peningkatan Produksi Beras Nasional Tingkat Kabupaten Kotawaringin Barat di laksanakan 1 (satu) kali pada awal program tahun 2012.
- 3). Melaksanakan pengawalan, pendampingan pembinaan dan pemantauan peningkatan produksi beras ke wilayah kecamatan dan desa.
- 4). Melakukan koordinasi dengan tim tingkat propinsi dan pusat.

Dari uraian kegiatan Tim P2BN Tingkat Kabupaten koordinasi dan komunikasi antara para aktor implementasi kebijakan masih belum

berjalan secara optimal, hal ini seperti dikemukakan oleh Ir. H. Akhmad

Yadi sebagai berikut :

“ Terkait dengan kegiatan P2BN ini masalah hubungan antara lembaga terkait seperti yang diatur dalam Permentan masih perlu sinkronisasi, harmonisasi dan sinergitas sehingga antara lembaga yang satu dengan yang lain saling mendukung, karena bagaimanapun dalam membangun pertanian tidak mungkin Dinas Pertanian bekerja sendiri perlu ada dukungan dari semua stakeholder mulai dari hulu sampai ke hilir”.

Kurangnya koordinasi antara para implementor kebijakan juga di kemukakan oleh Ir. Abed Nego, M.Si sebagai berikut :

“Dalam Kebijakan P2BN koordinasi, integritasi mulai dari pusat sampai ke daerah sangat lemah sehingga sinergi antar lembaga pelaksana kurang “

Hal serupa seperti diungkapkan oleh Warjoko sebagai berikut :

“Program P2BN seharusnya begitu dicanangkan terus dilakukan koordinasi, pembinaan, pengawasan maka tingkat keberhasilan tinggi dari pada dicanangkan kemudian ditinggalkan atau dipantau lewat HP kan sekarang modelnya begitu sehingga program ini tidak jalan, sebenarnya komunikasi HP ini sangat menolong tetapi ketidakhadiran petugas membuat masyarakat lengah terhadap pelaksanaan program”.

g. Keterpaduan

Dalam melaksanakan program Peningkatan Produksi Beras Nasional di Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana yang sudah diatur dalam Permentan 45 keterpaduan program antar ketiga lembaga teknis sangat kurang seperti yang diungkapkan beberapa informan berikut :

“Ir. Akhmad Yadi mengatakan bahwa keterkaitan masalah keterpaduan antar lembaga terkait dengan masalah P2BN Distanak punya program kemudian tehnologinya ada teman – teman dari BPTP, sarana

penyuluhan, pendampingan/ pengawalan yang dilaksanakan teman – teman KP2KP yang sampai saat ini masih dirasakan kurang efektif”

“ Ir. M. Bahriwan menyebutkan bahwa sebetulnya program ketiga lembaga sudah ada namun dalam pelaksanaannya masih sulit karena baru sarana dan prasarana dari dinas walaupun belum sempurna seharusnya dari pihak penyuluhan bisa memberikan pendampingan kepada petani bagaimana memanfaatkan lahan dan dari BPTP bisa menciptakan teknologi yang sesuai dengan kondisi sehingga lahan bisa dimanfaatkan secara optimal”.

Kurang terpadunya program peningkatan produksi beras nasional di Kabupaten Kotawaringin Barat juga diungkapkan oleh Bapak Syhrian Ketua KTNA Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai berikut :

“Ketiga lembaga belum sinkron, yang paling ada sedikit nyambung itu antara Penyuluh dengan Dinas Pertanian, namun dengan BPTP belum ada sinkron sebagai contoh pengembangan teknologi menjadi tugas BPTP yang menyampaikan ke masyarakat petani adalah penyuluh, kalau dari BPTP tidak ada teknologi jadi apa yang akan disampaikan oleh penyuluh”.

h. Kondisi Eksternal.

Dalam implementasi kebijakan Peningkatan Produksi Beras Nasional di Kabupaten Kotawaringin Barat peneliti menemukan bahwa kondisi eksternal sangat mempengaruhi pelaksanaan, dari hasil wawancara dengan Yan Arfin (Kades Natai Raya) sebagai berikut :

“ Untuk program P2BN perlu pengembangan dilapangan karena dilapangan yang dihadapi oleh petani adalah kondisi alam kondisi lahan yang marjinal sehingga perlu ada bimbingan yang serius dari bidang teknologi dan penyuluhan. Bagaimana kita mengatasi benturan dengan musim yang tidak menentu sehingga sulit untuk menyesuaikan dengan musim”.

Syhrian Ketua KTNA Kabupaten Kotawaringin Barat mengungkapkan sebagai berikut :

“Dalam melaksanakan program seharusnya pemerintah fokus dan tuntas, misalnya ketika sudah ditetapkan suatu kawasan menjadi kawasan pertanian tanaman pangan maka pemerintah harus betul betul memperhatikan seperti bagaimana tehnologinya, penyuluhannya, sarana prasarananya, kemudian pasar juga harus disiapkan hal ini bukan berarti menghilangkan yang lain tetapi perhatian perlu perhatian khusus. Kalau pasar itu ada sangat mustahil orang tidak tertarik dengan budidaya padi, coba lihat seperti sawit karena pasarnya jelas orang berbondong – bondong menanam sawit padahal harga cuma seribu rupiah per kilo, apalagi padi ini harganya jauh lebih tinggi daripada sawit dan turunan dari padi sangat banyak sebetulnya sangat menguntungkan”.

Rinda Rumpel, SPKP Koordinator BPP Pangkalan Banteng menyebutkan sebagai berikut :

“Kendala kendala yang dihadapi yaitu : petani masih kurang respon dalam melaksanakan kegiatan usaha tani padi sawah karena budayanya masih sangat tradisional. Petani masih kurang tertarik terhadap usaha tani padi sawah karena usaha tani perkebunan lebih menjanjikan dibanding padi sawah”.

C. Pembahasan

1. Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan Pada Program Peningkatan Produksi Beras Nasional/P2BN di Kabupaten Kotawaringin Barat .

Melihat gambaran pelaksanaan program Ketahanan Pangan Daerah Study Pada Program Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) diatas dapat dilihat bahwa implementasi kebijakan Ketahanan Pangan Daerah khususnya Program Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) di Kabupaten Kotawaringin Barat kurang berhasil diimplementasikan.

Keberhasilan implementasi Program Peningkatan Produksi Beras Nasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah tolok ukur kinerja bidang peningkatan produksi khususnya padi untuk mendukung Kebijakan Ketahanan Pangan dari aspek

ketersediaan. Tolok ukur kebijakan tersebut harus dicapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Dari ketiga tolok ukur yang telah ditetapkan sudah dilaksanakan namun dampak yang diharapkan belum memberikan kepuasan kepada target group.

a).Meningkatnya luas areal

Instrumen meningkatnya luas areal tanaman padi merupakan instrumen dari program peningkatan produksi beras nasional. Perluasan areal dilakukan melalui pembukaan lahan sawah baru, optimasi lahan, dan peningkatan indeks pertanaman. Berbagai program yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan luas tanamn telah dilaksanakan namun program tersebut belum memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan produksi beras. Perluasan yang telah dilaksanakan belum dapat dimanfaatkan secara maksimal karena kelengkapan belum sempurna.

b). Peningkatan Produktivitas.

Instrumen peningkatan produktivitas merupakan indikator keberhasilan dari implementasi kebijakan ketahanan pangan melalui program peningkatan produksi beras nasional. Peningkatan produktifitas merupakan upaya aktor implementasi dalam menerapkan teknologi pemupukan, perbenihan, pengendalian organisme pengganggu tanaman maupun tehnologi pasca panen. Upaya ini sesuai hasil penelitian sudah diterapkan namun belum mencapai target. Proses peningkatan

produktifitas memerlukan peran peneliti dan penyuluh agar proses transfer teknologi berjalan sesuai harapan.

c).Rekayasa Tehnologi dan Sosial

Dalam pencapaian peningkatan produksi beras instrumen penerapan rekayasa tehnologi dan sosial merupakan indikator penting dalam merubah pola pikir masyarakat. Penerapan Tehnologi ini merupakan kewenangan dari Balai Pengkajian Tehnologi Pertanian Propinsi Kalimantan Tengah. Rekayasa tehnologi dan sosial diharapkan dapat merubah prilaku dari petani

2. Faktor – Faktor Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan Pada Program P2BN di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut :

a. Struktur Birokrasi

Organisasi pelaksana implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan Daerah merupakan faktor yang menghambat dalam implementasi. Kebijakan ketahanan pangan daerah belum berjalan sesuai dengan maksud dari isi kebijakan. Hal ini karena organisasi pelaksana implementasi kurang mampu menggerakkan organisasi karena organisasi Dewan Ketahanan Pangan Daerah terlalu besar sementara sekretariat dewan terkendala dengan rendahnya eselonering sehingga koordinasi pada dewan ketahanan pangan daerah sangat lemah.

Dari uraian diatas peneliti menemukan bahwa kondisi organisasi pelaksana kebijakan ketahanan pangan daerah belum mampu mengimplementasikan kebijakan secara maksimal karena hanya

ditangani oleh pejabat setingkat eselon IV. Kondisi organisasi leading sektor pelaksana implementasi kebijakan ketahanan pangan daerah yang hanya setingkat eselon III sementara anggota tim setingkat lebih tinggi yaitu eselon II hal ini sangat berpengaruh dalam pergerakan organisasi. Sesuai dengan teori Edward III dimana struktur Organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan.

Kurang mampunya organisasi dalam menerapkan kebijakan ketahanan pangan di Kabupaten Kotawaringin Barat dibuktikan dengan tidak terlaksananya kegiatan - kegiatan yang mendukung kebijakan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari penyerapan anggaran APBN. Pagu Anggaran yang diberikan kepada Kantor Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan untuk melaksanakan kegiatan Dana Dekonsentrasi satuan kerja Badan Ketahanan Pangan dan Koordinasi Penyuluhan Propinsi Kalimantan Tengah.

Dari sisi organisasi Kebijakan Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat menggunakan multi organisasi yang melibatkan 29 Dinas/Instansi /lembaga setingkat eselon II dan Kantor Penyuluhan Pertanian Dan Ketahanan Pangan sebagai organisasi yang diberi kewenangan untuk menjadi koordinator (lead agency) dengan eselon setingkat eselon III tidak mampu menggerakkan Dewan Ketahanan Pangan Daerah . Menurut Purwanto E.A dan Sulistyastuti D.R (2012 : 144) bahwa organisasi yang diberi kewenangan sebagai koordinator (lead agency) melakukan peran koordinasi (integrasi) sebagai

output yang dihasilkan berbagai organisasi yang terlibat dalam implementasi dapat diintegrasikan. Integrasi berbagai output ini menjadi kunci agar tujuan dapat diwujudkan. Tentu meskipun sudah ada lead agency hal ini tidak akan selalu menjamin bahwa implementasi suatu kebijakan atau program akan berjalan lancar. Perasaan setara yang dimiliki oleh pimpinan organisasi yang lain yang terlibat dalam implementasi kebijakan akan membuat koordinasi merupakan tantangan yang terus menerus harus dipecahkan oleh orang yang menduduki posisi pimpinan dalam lead agency. Demikian pula dengan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Barat yang langsung di Ketuai oleh Bupati Kotawaringin Barat dan Sekretariat pada Kantor Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan dimana Kepala Kantor sebagai koordinator atau lead agency dengan eselon lebih rendah dengan pimpinan organisasi lain. Dengan demikian dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa implemnetasi kebijakan ketahanan pangan daerah belum dapat diimplementasi dengan baik karena Kantor Penyuluhan pertanian dan Ketahanan Pangan kurang mempunyai kapasitas sebagai lead agency. O,Toole dan Montjoy dalam Purwanto E.A dan Sulistyastuti D.R (2012:146) mengidentifikasi realitas terkait dengan penggunaan pendekatan yang bersifat interorganizational atau multi organisasi tersebut antara lain :

- Proses implementasi yang melibatkan multi organisasi akan mengalami banyak hambatan karena banyak kepentingan yang terlibat.

- Aktifitas koordinasi pada implementasi yang melibatkan multi organisasi akan lebih kompleks.
- Peningkatan Kompleksitas hubungan kerja antar multi organisasi antar multi organisasi akan menurunkan peluang delegasi tugas yang diberikan kepada organisasi untuk dikembangkan menjadi rencana yang lebih detail.

Kantor Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan sebagai birokrasi yang mengimplementasikan kebijakan publik memiliki posisi yang dominan dibanding organisasi yang lain. Sebagai tulang punggung bagi tercapainya tujuan kebijakan publik dalam mengimplementasikan kebijakan sangat dipengaruhi oleh kapasitas organisasi. Hal ini berdasar pendapat Amstrong dalam Purwanto E.A dan Sulistyastuti D.R (2012 : 128) bahwa “ *Organizational capacity is the capacity of organization to function effectivety. It is about is ability to guarantee high level of perfomance, achieve its purpuse (sustained competitive advantage in a commercial business), deliver result and, importantly, meet the needs of stakeholder*”

Sedangkan Implementasi Program Peningkatan Produksi Beras Nasional Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 45/Permentan/OT.140/8/2011 tentang Tata Hubungan Kerja Antar Kelembagaan Teknis, Penelitian dan Pengembangan dan Penyuluhan Pertanian Dalam Mendukung Peningkatan Produksi Beras Nasional serta untuk meningkatkan sinergitas dan koordinasi pelaksanaan program peningkatan produksi beras nasional (P2BN)

Kabupaten Kotawaringin Barat membentuk tim posko P2BN dengan Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : PPP.020/87.a/II/2012 tanggal 26 Januari 2012 tentang Tim Pelaksana Tingkat Kabupaten, Tingkat Kecamatan dan Tingkat Desa Pada Pos Simpul Koordinasi (Posko) P2BN Kabupaten Kotawaringin Barat. Dari hasil pengamatan dilapangan dan wawancara ditemukan bahwa struktur birokrasi organisasi Program P2BN di Kabupaten Kotawaringin Barat terlalu panjang dan tidak ada SOP yang digunakan sebagai pedoman.

Berdasar teori Edward III bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi mencakup dua aspek yaitu mekanisme dan struktur organisasi pelaksana. Mekanisme implementasi program ditetapkan melalui standar operasional prosedur (SOP) dalam pelaksanaan program peningkatan produksi beras nasional di Kabupaten Kotawaringin Barat standar operasional prosedur belum ditetapkan sehingga implementasi di tingkat lapangan kurang maksimal. Struktur Organisasi Program P2BN yang melibatkan aparat dari tingkat pusat sampai tingkat desa mengakibatkan rentang kendali antara pucuk pimpinan dan organisasi pelaksana di bawah mengakibatkan semakin rumit birokrasi dan semakin lambat pelaksana implementasi merespon perkembangan program.

Struktur birokrasi pelaksana program peningkatan produksi nasional (P2BN) di Kabupaten Kotawaringin Barat yang melibatkan pejabat dari tingkat kabupaten sampai tingkat desa dengan menggunakan mekanisme kerja koordinatif sehingga menyebabkan rentang kendali

sangat panjang dan pengambilan keputusan memerlukan waktu yang cukup lama dan rumit. Aspek struktur birokrasi menjadi sangat penting dalam implementasi kebijakan. Mekanisme implementasi yang ditetapkan dengan standart operasional prosedur tidak ditetapkan dalam pelaksanaan P2BN di Kabupaten Kotawaringin Barat. Hal ini berakibat pelaksana program tidak memahami tugas – tugas dan bahkan ada tugas – tugas yang belum dilaksanakan.

Nursalam, 2010 mengungkapkan bahwa tidak adanya mekanisme dan prosedur kerja berimplikasi pada tugas operasional dari aparatur. Organisasi yang tidak memiliki SOP (standart operaional prosedur) sebagai pedoman kerja seringkali dilapangan kegiatan – kegiatan berdasarkan selera atau keinginan masing – masing personil yang menangani bidang tugasnya.

Program P2BN dalam implementasinya melibatkan banyak dinas sehingga struktur organisasi untuk mengimplementasikan kebijakan memiliki karakteristik multi organisasi. Menurut Purwanto E.A dan Sulistyastuti D.R (2012 : 153) menyebutkan bahwa jenis implementasi yang menggunakan struktur multi organisasi memiliki konsekwensi bahwa koordinasi antar unit dan aspek kerjasama antar aktor menjadi sangat penting. Koordinasi dipahami sebagai proses pemanduan sasaran kegiatan dari unit – unit kerja yang terpisah untuk dapat mencapai tujuan organisasi secara efektif. Agar proses kerjasama dapat dilakukan secara baik O Toole dan Montjoy dalam Purwanto E.A dan Sulistyastuti D.R (2012 : 153) mengemukakan bahwa tiga faktor pendukung untuk

terjadinya koordinasi yang baik dalam implementasi adalah authority, common interest dan exchange. Ketiga faktor tersebut diperlukan untuk proses memadukan berbagai kegiatan dari unit – unit kerja yang berlainan.

b. Sumberdaya

Hasil penelitian ditemukan bahwa jumlah personil yang menangani ketahanan pangan sangat terbatas yang terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Seksi dan 7 (tujuh) orang staf, sementara bidang yang ditangani ada tiga bidang yaitu : (1) bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, (2) bidang distribusi dan akses pangan dan (3) bidang konsumsi dan keamanan pangan. Sarana dan prasarana untuk operasional di Kantor masih belum memadai bahkan sarana untuk operasional ke lapangan tidak ada sehingga pembinaan ke lapangan belum optimal. Dukungan anggaran dari APBD Kabupaten tidak konsisten bahkan turun naik setiap tahunnya sehingga banyak kegiatan-kegiatan pokok yang tidak terfasilitasi.

Widodo (2011) menyatakan bahwa: Jika pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber daya untuk melaksanakan kegiatan secara efektif maka kebijakan tersebut tidak akan efektif. Sumber daya disini berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sumberdaya ini mencakup sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, informasi dan kewenangan.

Menurut Edward III, sebagai organisasi publik yang melaksanakan kebijakan ketahanan pangan perlu memiliki staf yang cukup untuk mendukung implementasi kebijakan ketahanan pangan. Dengan uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa jumlah personil yang bertugas menangani ketahanan pangan kurang memadai sehingga proses implementasi kebijakan ketahanan pangan tidak maksimal.

Berdasarkan data – data pelaksanaan program P2BN menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan peningkatan produksi beras nasional (P2BN) di Kabupaten Kotawaringin Barat menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan kurang maksimalnya pelaksanaan program adalah kurangnya sumber daya, baik sumber daya manusia sumberdaya sarana dan prasarana maupun finansial. Edward III menyebutkan bahwa setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai baik sumber daya manusia maupun finansial. Sumber daya manusia adalah kecukupan baik kualitas maupun kuantitas implementor yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya finansial adalah kecukupan modal investasi atas sebuah prograam/kebijakan . Keduanya harus diperhatikan dalam implementasi program.kebijakan. Sebab tanpa kehandalan implementor kebijakan menjadi kurang energik dan berjalan lambat serta seadanya. Sedangkan sumber daya finansial menjamin keberlangsungan program/kebijakan. Tanpa ada dukungan finansial yang memadai program tidak dapat berjalan efektif dan cepat mencapai tujuan dan sasaran.

c. Disposisi

Komitmen Pemerintah Daerah dalam kebijakan ketahanan pangan masih sangat rendah. Rendahnya komitmen pemerintah daerah ini ditunjukkan dengan program program yang hanya berbentuk stimulan dan tidak konsisten. Program Ketahanan Pangan merupakan program yang dicanangkan oleh pemerintah pusat sehingga aturan yang dibuat oleh pemerintah di generalisir tanpa memperhatikan kondisi daerah hal ini menyebabkan komitmen pemerintah daerah sangat rendah.

Menurut Teori Sebatier dan Mazmaniar dinyatakan bahwa tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan merupakan salah satu faktor utama kesuksesan implementasi sebuah kebijakan. Adanya komitmen yang kuat dari aparatur dalam melaksanakan tugasnya. Komitmen mencakup keseriusan dan kesungguhan agar penerapan suatu aturan ataupun kebijakan bisa berjalan dengan baik dan diterima serta dipatuhi oleh sasaran dari kebijakan tersebut.

Purwanto, E.A dan Sulistyastuti (2012 :151) menyebutkan bahwa Komitmen (motivasi) dan kompetensi (keahlian) personil untuk melaksanakan implementasi (will and skill) merupakan dua persyaratan penting yang harus dimiliki pelaksana implementasi. Komitmen merujuk pada kesungguhan pelaksana implementasi untuk menjalankan tugas yang dibebankan kepadanya dan menganggap bahwa pencapaian tujuan organisasi dihayati sebagai tujuan pribadinya.

Dengan demikian dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa implementasi kebijakan ketahanan pangan daerah Kabupaten

Kotawaringin Barat belum dapat berjalan dengan baik karena faktor – faktor yang mempengaruhi proses implementasi yaitu komitmen pelaksana kebijakan masih sangat rendah.

Sebagai upaya pencapaian peningkatan produksi beras nasional, komitmen/sikap pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sudah ada namun belum berjalan secara optimal.

Demikian juga dengan Program Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) merupakan program yang diluncurkan oleh Pemerintah Pusat, oleh karena itu Pemerintah Daerah sebagai bagian dari pemerintah pusat wajib mendukung dan melaksanakan kebijakan tersebut. Dalam pelaksanaan program komitmen dari pelaksana kegiatan sangat menentukan keberhasilan kebijakan namun komitmen pejabat sudah ada dengan ditetapkannya strategi pencapaian namun komitmen tersebut dirasakan masyarakat masih sangat kurang.

Menurut teori Edward III bahwa tingkat komitmen pelaksana implementasi kebijakan/ program dapat diukur dengan tingkat konsistensi antar pelaksanaan kegiatan dengan guideline yang telah ditetapkan. Semakin sesuai dengan guideline semakin tinggi tingkat komitmennya. Data yang diperoleh dalam pelaksanaan program peningkatan program peningkatan produksi beras nasional (P2BN) diatas menunjukkan bahwa komitmen pelaksana implementasi belum ditunjukkan dengan adanya konsistensi dalam pelaksanaan program. Hal ini ditunjukkan dalam penyediaan sarana produksi yang tidak menentu seperti bantuan yang tidak tetap setiap program. Tingkat demokrasi

dapat diukur dengan intensitas pelaksana melakukan proses sharing dengan kelompok sasaran, mencari solusi dari masalah yang dan melakukan diskresi yang berbeda dengan guidelinenya untuk mencapai tujuan dan sasaran program.

d. Kebijakan Top Down

Kebijakan Ketahanan Pangan Daerah merupakan kebijakan yang menggunakan pendekatan *Top Down* yaitu kebijakan yang diluncurkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tinggal melaksanakan apa yang sudah dicanangkan oleh Pemerintah Pusat.

Kurang berhasilnya implementasi kebijakan ketahanan pangan daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat dari data ketersediaan pangan menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan pangan di Kabupaten Kotawaringin Barat masih sangat tergantung dengan daerah pemasok di luar Kabupaten Kotawaringin Barat sehingga berdasarkan data Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Barat menyatakan bahwa Kabupaten Kotawaringin Barat berada pada Zona Merah artinya Kabupaten Kotawaringin Barat sangat rawan apabila jalur distribusi terhambat.

Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan di Kabupaten Kotawaringin Barat kurang berhasil karena menggunakan pendekatan *Top Down* yaitu kebijakan yang di luncurkan oleh Pemerintah Pusat, sedangkan Pemerintah Daerah tinggal melaksanakan apa yang sudah dicanangkan oleh Pemerintah Pusat seperti

Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan di Kabupaten Kotawaringin Barat sangat dipengaruhi oleh banyak faktor. Kebijakan Ketahanan Pangan dan Program Peningkatan Produksi Beras Nasional di Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan suatu proses mewujudkan kecukupan ketersediaan beras untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi daerah. Sebagai suatu proses banyak tahapan implementasi yang dipengaruhi oleh banyak variabel. Menurut teori model Mazmaniar dan Satier bahwa proses implementasi dipengaruhi oleh tiga variabel bebas yaitu : (1) mudah tidaknya masalah dikendalikan. (2) Kemampuan Kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi dan (3) variabel diluar kebijaksanaan yang mempengaruhi proses implementasi. Dari uraian diatas menunjukkan bahwa kebijakan ketahanan pangan yang diluncurkan oleh pemerintah pusat belum mampu menstrukturkan proses implementasi kebijakan karena aturan aturan yang terkait dengan kebijakan ketahanan pangan kurang memperhatikan kondisi obyektif secara keseluruhan sehingga kebijakan tersebut kurang maksimal diimplementasikan.

e. Identifikasi Permasalahan P2BN.

Dalam pencapaian peningkatan produksi beras selain faktor aktor implementasi juga dipengaruhi oleh masalah masalah internal maupun eksternal. Faktor eksternal adalah kondisi alam dan lahan di Kabupaten Kotawaringin Barat yang sangat jauh dari kata ideal sehingga permasalahan sangat sulit dikendalikan.

Dari uraian diatas bahwa kebijakan P2BN yang merupakan program pemerintah pusat merupakan program yang digeneralisir tanpa memperhatikan kondisi permasalahan pada masing – masing daerah hal ini akan mengakibatkan kebijakan yang dikeluarkan bukan menjadi jawaban atas permasalahan yang dialami oleh masyarakat. Identifikasi permasalahan dari masing – masing daerah tidak semua terakomodir pada program dan kebijakan. Berbagai permasalahan tidak diperhitungkan pada saat pembuatan kebijakan sehingga permasalahan – permasalahan akan timbul pada saat implementasi kebijakan. Mazmanian dan Sabatier menyatakan bahwa salah satu variabel yang mempengaruhi kesuksesan implementasi adalah karakteristik dari masalah yang terdiri dari tingkat kesulitan teknis dari masalah yang ada.

f. Komunikasi dan Koordinasi

Dari data – data diatas menunjukkan bahwa koordinasi komunikasi antar pelaksana implementasi kurang maksimal hal ini dapat dilihat dari proses komunikasi dilaksanakan hanya 1 (satu) kali pada saat penancangan setelah itu tidak lagi dilakukan evaluasi maupun rapat – rapat koordinasi. Komunikasi yang kurang maksimal menyebabkan pelaksanaan program peningkatan produksi beras nasional di Kabupaten Kotawaringin Barat kurang optimal . berdasarkan teori Van Meter dan Van Horn dalam Indiahono D (2009:59) menyebutkan bahwa komunikasi antar badan pelaksana, menunjuk kepada mekanisme prosedur yang dicanangkan untuk mencapai sasaran dan tujuan program. Komunikasi harus ditetapkan sebagai acuan seperti : seberapa sering

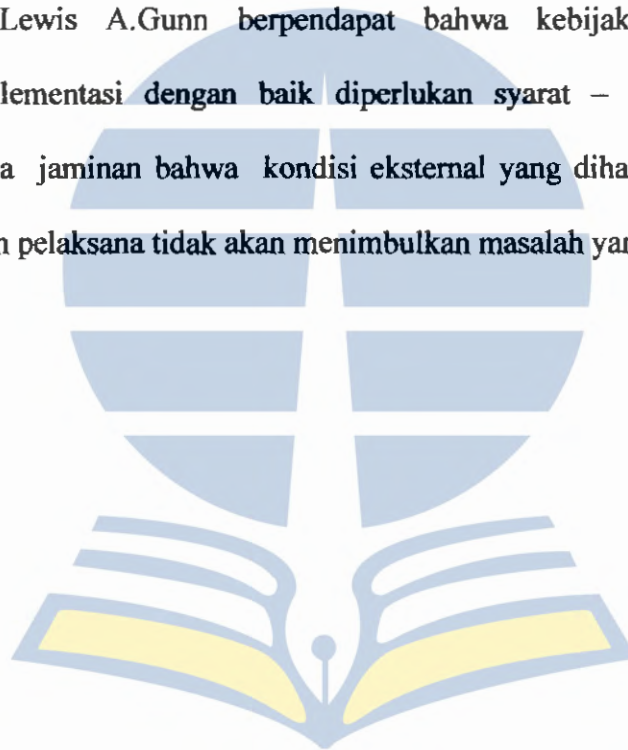
rapat rutin diadakan, tempat dan waktu. Komunikasi antar organisasi menunjuk adanya tuntutan saling dukung antar institusi yang berkaitan dengan program dan kebijakan. Komunikasi antar badan pelaksana memiliki hubungan yang saling mempengaruhi dengan karakteristik badan pelaksana. Komunikasi antar badan pelaksan juga dapat mempengaruhi sikap pelaksana.

g. Keterpaduan

Data diatas menunjukkan bahwa antara pelaksana implementasi program peningkatan produksi beras belum menunjukkan keterpaduan antara program. Dari ketiga lembaga Dinas Pertanian dan Peternakan, Kantor Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan dan Balai Penelitian Tehnologi Pertanian bahwa Dinas Pertanian berperan sebagai penyedia sarana dan prasarana, Kantor KP2KP sebagai lembaga yang bertugas mentransfer tehnologi yang di dihasilkan oleh BPTP. Keterpaduan program dari ketiga lembaga tersebut sangat mendukung keberhasilan program. Teori W. Hogwood dan Lewis A. Gunn berpendapat bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi program /kebijakan dapat diimplementasikan dengan baik diperlukan syarat – syarat antara lain perpaduan sumber – sumber yang diperlukan benar – benar tersedia. Kebijakan publik adalah kebijakan yang kompleks dan menyangkut dampak yang luas. Karena itu implementasi kebijakan publik akan melibatkan berbagai sumber yang diperlukan baik dalam konteks sumber daya maupun aktor.

h. Kondisi Eksternal.

Implementasi Program Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) di Kabupaten Kotawaringin Barat sesuai data hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa kebijakan tersebut banyak menghadapi kendala – kendala diluar faktor – faktor administrasi maupun faktor pelaksana implementasi. Faktor eksternal seperti kondisi lahan, pengaruh cuaca atau iklim yang kurang mendukung. Brian W. Hogwood dan Lewis A.Gunn berpendapat bahwa kebijakan negara dapat diimplementasi dengan baik diperlukan syarat – syarat antara lain adanya jaminan bahwa kondisi eksternal yang dihadapi oleh lembaga /badan pelaksana tidak akan menimbulkan masalah yang besar.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

a. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan analisis data yang telah disajikan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kebijakan Ketahanan Pangan Daerah pada Program Peningkatan Produksi Beras Nasional telah dilaksanakan namun dalam implementasinya kurang berhasil dalam meningkatkan produksi beras dan dampak yang diharapkan agar Kotawaringin Barat mampu mencukupi kebutuhan pangan dari produksi daerah sendiri masih jauh dari harapan. Kebijakan dilaksanakan hanya dari sisi on farm saja belum mencakup sisi of farm sehingga kurang memberikan harapan bagi peningkatan kesejahteraan petani. Kebijakan Ketahanan Pangan kurang mengakomodir kepentingan petani /isi kebijakan belum bisa menjawab seluruh permasalahan dilapangan seperti jaminan harga atau jaminan pasar sehingga respon petani terhadap kebijakan sangat rendah.
2. Faktor – faktor yang mempengaruhi kurang berhasilnya implementasi kebijakan tersebut adalah sebagai berikut :

a. Struktur Birokrasi.

Struktur Birokrasi pelaksana kebijakan kurang mampu menggerakkan organisasi karena struktur organisasi pelaksana kebijakan melibatkan multi organisasi .

b. Sumber Daya.

Sumberdaya yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan kurang memadai. Sumberdaya ini mencakup sumberdaya manusia, sumberdaya finansial maupun sumberdaya pendukung seperti kondisi alam Kabupaten Kotawaringin Barat yang kurang mendukung keberhasilan program.

c. Disposisi

Disposisi ini menyangkut komitmen pemerintah yang rendah hal ini ditunjukkan dengan program – program yang kurang kontinyu dan tingkat pemahaman terhadap program yang rendah.

d. Kebijakan Top Down

Kebijakan Ketahanan Pangan Daerah Pada Program P2BN merupakan Kebijakan yang diluncurkan oleh Pemerintah Pusat sehingga Pemerintah Daerah hanya menjalankan tugas yang diatur oleh pusat.

e. Identifikasi Permasalahan.

Dalam pelaksanaan program P2BN merupakan program yang digeneralisir tanpa memperhatikan kondisi masing – masing wilayah sehingga permasalahan yang timbul tidak semua terakomodir atau kurang diperhitungkan.

f. Komunikasi dan Koordinasi.

Komunikasi dan koordinasi antar implementor kurang sehingga mengakibatkan pelaksanaan program kurang terpadu.

g. **Kondisi Eksternal.**

Dalam pelaksanaan Kebijakan Ketahanan Pangan Daerah Pada Program Peningkatan Produksi Beras Nasional di Kabupaten Kotawaringin Barat meghadapi kondisi eksternal yang kurang mendukung keberhasilan seperti kondisi lahan yang marginal, Cuaca, serangan hama penyakit dan laju alih fungsi lahan ke non pertanian yang cepat.

b. SARAN

Dalam rangka implemnetasi Kebijakan Ketahanan Pangan pada Program Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) di Kabupaten Kotawaringin Barat. Untuk memperoleh hasil yang sesuai dengan harapan maka hal – hal yang harus dilakukan adalah :

1. Kebijakan di dilaksanakan secara komprehensif untuk dapat menyelesaikan semua permasalahan di lapangan.
2. Dalam Implementasi Kebijakan perlu ada evaluasi secara berkelanjutan untuk memastikan apakah kebijakan dapat dilaksanakan sekaligus identifikasi permasalahan – permasalahan yang terjadi di lapangan.
3. Agar sebuah kebijakan dapat di implementasikan dengan baik maka kebijakan harus memperhitungkan kondisi masing – masing daerah.

DAFTAR PUSTAKA

1. Abdusalam, T.T , Pahlevi.Y.R. dkk(2012) *Indonesia Melawan Esai – Esai Perlawanan dari Kampus*, Bulaksumur Yogyakarta.
2. Ariani M, *Penguatan Ketahanan Pangan Daerah untuk mendukung Ketahanan Pangan Nasional*. Pusat Analisis Sosial Ekonomi Kebijakan Pertanian. Bogor.
3. Ali,F dan Alam S.A, 2012. *Study Kebijakan Pemerintah*, PT. Refika Aditama. IKAPI. Bandung.
4. Ali, F, Alam,S.A dan Wantu S.M. 2012. *Study Analisa Kebijakan (Konsep, Teori dan Aplikasi Sampel Teknik Analisa Kebijakan Pemerintah*, PT. Refika Aditama. Bandung.
5. Irawan Prasetya, 2010 *Metodologi Penelitian Administrasi, Materi Pokok Penelitian Adminitrasi Universitas Terbuka Jakarta*.
6. Hadi. P.U dan Susilowati S.H. *Prospek, Masalah Dan Strategi Pemenuhan Kebutuhan Pangan Pokok*. Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Bogor.
7. Indiahono D, 2009, *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Polisy Analisis* ,Gava Media Yogyakarta.
8. *Krismartini, dkk, 2012, Analisis Kebijakan Publik, Materi Pokok Analisis Kebijakan Publik Universitas Jakarta*.
9. Kusumanegara,S, 2010. *Model dan Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik*, Gava Media,Yogyakarta.
10. Mukhtar,2013, *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif. Referensi(GP Press Group) IKAPI. Jakarta*
11. Nursalam, 2010, *Implementasi Kebijakan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Lokal dan Ketahanan Pangan di Propinsi Nusa Tenggara Timut (NTT),Jurnal Administrasi Publik, Volume 1 No. 1 Tahun 2010*.

12. Purwanto E.A. dan Sulistyastuti D.R, 2002, Implementasi Kebijakan Publik, Konsep dan Implementasinya di Indonesia, Gava Media, Yogyakarta.
13. Permentan Nomor 45/Permentan.OT.14n/8/2011 tanggal 23 Agustus 2011 Tentang Tata Hubungan Kerja antar Kelembagaan Teknis, Penelitian dan Pengembangan, Dan Penyuluhan Pertanian dalam Mendukung Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN).
14. Suryana A. 2008 Menelisik Ketahanan Pangan, Kebijakan Pangan, Dan Swasembada Beras. Pengembangan Inovasi Pertanian 1(1),1-16. Pusat Analisis Sosial Ekonomi Dan Kebijakan Pertanian, Bogor.
15. Suseno.D dan Suyatna H,2006 Quo Vadis Petani Indonesia! Terhempasnya Anak Bangsa dari Sektor Pertanian Aditya Media, Yogyakarta
16. Suharsono,A.G, 2005. Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasinya. Pustaka Pelajar. Yogyakarta
17. Sari Dewi T.R dan Siregar A.N, Hubungan Antara Peran Penyuluh Dan Adopsi Teknologi Oleh Petani zterhadap Peningkatan Produksi Padi Kabupaten Tasikmalaya.
18. Taufan, L.A, 2013, Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) di Desa Pulau Sapi Kecamatan Mentarang Induk Kabupaten Malinau, eJournal Administrasi Negara, 2013,1 (3):925-938 ISSN 0000-0000, eJournal.an.fisip-unmul.Org, copyright 2013.
19. Lewoema Z.K dan Fauzan R, (.....), Pembangunan Pertanian Rakyat Menuju Ketahanan dan Swasembada Pangan (sebuah Analisis Hubungan Ketahanan Pangan dan Ketahanan Nasional, Intisari.
20. Riant Nugroho, 2003. Kebijakan Publik Formulasi Implementasi dan evaluasi PT Elex Media Komputindo Jakarta.
21. Budi Winarno, 2002. Teori dan Proses Kebijakan Publik Presindo Yogyakarta

22. Anonymous, 2008, Implementation of Programme and Policy Making Implementation Making, Australian Government . Department of the Prime minister and Cabinet.
23. Undang – Undang nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
24. Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2010-2014. Dewan Ketahanan Pangan Republik Indonesia. Jakarta.
25. Petunjuk Teknis Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT) tahun 2013 Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementrian Pertanian Republik Indonesia. Jakarta
26. Laporan Tahunan Kantor Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008.
27. Laporan Tahunan Kantor Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2009.
28. Laporan Tahunan Kantor Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010.
29. Laporan Tahunan Kantor Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2011.
30. Laporan Tahunan Kantor Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012.
31. Laporan Tahunan Kantor Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2013.
32. Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Barat.

Form. I. Petugas Kabupaten

Pedoman Wawancara Penelitian

Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan Daerah (Study Pada Program Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) di Kabupaten Kotawaringin Barat

Informan :

Asal Instansi :

Peneliti : Suryati/NIM. 018788364

Tanggal/Hari Wawancara :

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimanakah Kebijakan Ketahanan Pangan Daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat ?.	
2.	Dalam mendukung kebijakan Ketahanan Pangan Daerah apakah Program Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) di Kab. Kotawaringin Barat sudah dilaksanakan sesuai dengan Permentan No. 45/Permentan.OT.140/8/2011 tgl 23 Agustus 2011 tentang Tata Hubungan Kerja Antar Lembaga Teknis, Penelitian dan Pengembangan dan Penyuluhan dalam mendukung Program Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) (Apabila Sudah atau belum berikan Alasannya/penjelasan)	
3.	Apabila Program P2BN sudah dilaksanakan di kabupaten Ktw. Barat Apakah kendala – kendala yang dihadapi dalam melaksanakan program P2BN dilihat dari sisi : a.keragaman perilaku sasaran b.Kejelasan dan konsistensi tujuan c.Ketepatan alokasi sumberdana d.Keterpaduan hierarki dalam dan diantara lembaga pelaksana e.Apakah ada dukungan publik?	

	f. Apakah kondisi sosial ekonomi masyarakat dan teknologi mendukung program P2BN?	
4.	Bagaimana komitmen pejabat/pemerintah terhadap Program P2BN ?	
5	Bagaimanakah pandangan anda terhadap Program Ketahanan Pangan Daerah dan Program P2BN yang ada di Kab. Ktw. Barat?	
6.	Dalam pelaksanaan program ketahanan pangan daerah Apakah pemerintah daerah sudah cukup memadai dalam mengalokasikan sumberdaya baik dana, personil maupun waktu?	
7.	Dalam melaksanakan program Program P2BN apakah sudah dilakukan koordinasi baik antar Pusat, Propinsi, Kabupaten, kecamatan dan Desa ? (apabila YA) berapa kali dalam 1 (satu) Tahun koordinasi dilaksanakan dan apa hasil koordinasi tersebut a. Antara pusat dengan propinsi b. Antara pusat dg Kabupaten c. Antara Kabupaten dan Kec. d. Antara Kecamatan dan Desa e. Antara Desa dan masyarakat	
8.	Dalam melaksanakan program ketahanan Pangan dan program P2BN diantara ketiga lembaga teknis yaitu Distanak, KP2KP dan BPTP apakah sudah ada keterpaduan program (apabila SUDAH) berikan Alasannya	
9.	Apakah Tugas – tugas yang dibebankan pada masing – masing instansi sudah terperinci secara tepat ?	
10.	Apakah ada tuntutan dari Pusat kewajiban yang harus dijalankan oleh daerah dalam melaksanakan program?	

11.	Apakah Saudara memahami maksud dan tujuan dari Program Ketahanan Pangan Daerah dan Program P2BN ? (Mohon dijelaskan)	
12.	Menurut Saudara apakah tujuan dan sasaran program tersebut jelas ? (Berikan alasan)	
13.	Apakah ada manfaat dari Program Ketahanan Pangan Daerah dan Program P2BN bagi masyarakat (Apabila ADA) sebutkan manfaat Yang didapat masyarakat dari Program tersebut .	
14.	Apakah saudara sudah merencanakan dan menetapkan target produksi padi ?	SUDAH/BELUM (coret salah Satu yang tidak sesuai)
15.	Dalam melaksanakan program faktor apa saja yang dapat menghambat pelaksanaan program ? (Sebutkan)	
16.	Dalam melaksanakan program ketahanan pangan daerah faktor-faktor apa saja yang dapat mendorong pelaksanaan program ? (Sebutkan)	

Pangkalan Bun,.....2014

Narasumber/Informan

(.....)

Form 2. Petugas Kecamatan.

Pedoman Wawancara Penelitian

Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan Daerah (Study Pada Program Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) di Kabupaten Kotawaringin Barat

Informan :
 Asal Instansi :
 Peneliti : Suryati/NIM. 018788364
 Tanggal/Hari Wawancara :

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimanakah Kebijakan Ketahanan Pangan Daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat ?.	
2.	Dalam mendukung kebijakan Ketahanan Pangan Daerah apakah Program Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) di Kab. Kotawaringin Barat sudah dilaksanakan sesuai dengan Permentan No. 45/Permentan.OT.140/8/2011 tgl 23 Agustus 2011 tentang Tata Hubungan Kerja Antar Lembaga Teknis, Penelitian dan Pengembangan dan Penyuluhan dalam mendukung Program Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) (Apabila Sudah atau belum berikan alasannya)	
3.	Apabila Program P2BN sudah dilaksanakan di kabupaten Ktw. Barat apakah kendala – kendala yang dihadapi dalam melaksanakan program P2BN dilihat dari sisi : a.keragaman perilaku sasaran b.Kejelasan dan konsistensi tujuan c.Ketepatan alokasi sumberdana d.Keterpaduan hieraki dalam dan diantara lembaga pelaksana e.Apakah ada dukungan publik? f.Apakah kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tehnologi mendukung program P2BN?	

4.	Bagaimana komitmen pejabat/ Pemerintah terhadap Program P2BN ?	
5	Bagaimanakah pandangan saudara terhadap Program Ketahanan pangan Daerah dan Program P2BN yang ada di Kab. Ktw. Barat?	
6.	Dalam pelaksanaan program ketahanan pangan daerah apakah pemerintah daerah sudah cukup memadai dalam mengalokasi- sumberdaya baik dana, personil maupun waktu?	
7.	Dalam melaksanakan program Ketahanan Pangan Daerah dan Program P2BN apakah sudah dilaku- kan koordinasi baik antar Pusat, Propinsi, Kabupaten, kecamatan dan Desa ? (apabila YA) berapa kali dalam 1 (satu) Tahun koordinasi dilaksanakan dan apa hasil koordinasi tersebut a. Antara pusat dengan propinsi b. Antara pusat dg Kabupaten c. Antara Kabupaten dan Kec. d. Antara Kecamatan dan Desa e. Antara Desa dan masyarakat	
8.	Dalam melaksanakan program Ketahanan Pangan dan program P2BN diantara ketiga lembaga Teknis yaitu Distanak, KP2KP dan BPTP apakah sudah ada keterpaduan Program (apabila SUDAH) berikan Alasannya	
9.	Apakah Tugas – tugas yang dibeban kan pada masing – masing instansi sudah terperinci secara tepat ?	
10.	Apakah ada tuntutan dari Pusat kewajiban yang harus dijalankan oleh daerah dalam menjalankan Program?	

11.	Apakah Saudara memahami maksud dan tujuan dari Program Ketahanan Pangan Daerah dan Program P2BN ?	
12.	Menurut Saudara apakah tujuan dan sasaran program tersebut jelas ?	
13.	Sebagai bagian dari pelaksana Program apakah saudara mengetahui tugas – tugas saudara secara rinci ?	
14.	Dalam menjalankan program apakah sudah ada SOP ?.	
15.	Apakah ada manfaat dari Program Ketahanan Pangan Daerah dan Program P2BN bagi masyarakat (Apabila ADA) sebutkan manfaat yang didapat masyarakat dari Program tersebut .	
16	Sebagai Tim Pelaksana P2BN TK. Kecamatan apakah Saudara sudah melaksanakan hal – hal berikut : a.Menyusun Rencana Kerja Peningkatan Produksi Padi Tk. Kecamatan (Apabila sudah) Sebutkan dalam bentuk apa renc tersebut. b.Mendampingi dan mengawal Penerapan Tehnologi di lokasi P2BN c.Menyediakan Sarana dan prasarana Untuk mendukung P2BN d.Menindalanjuti Matrik Program P2BN Propinsi e.Apakah Laporan P2BN sudah di laksanakan secara kontinyu dan Tepat waktu.	
17.	Apakah saudara sudah melaksanakan forum penyuluhan tingkat desa dan temu lapang antara petani, penyuluh dan peneliti pendamping Tingkat kecamatan.	
18.	Apakah saudara sudah memfasilitasi Petani untuk menumbuhkembang-	

	kan kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani.	
19.	Dalam melaksanakan program ketahanan pangan daerah dan program P2BN faktor – faktor apa saja yang Dapat menghambat pelaksanaan program tersebut (Sebutkan)	
20.	Dalam melaksanakan program ketahanan pangan daerah dan program P2BN faktor – faktor apa saja yang Dapat mendorong pelaksanaan program tersebut (Sebutkan)	

Pangkalan Bun,.....2014

Narasumber/Informan

(.....)

Form. 3. Petugas Kp2KP.

Pedoman Wawancara Penelitian

Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan Daerah (Study Pada Program Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) di Kabupaten Kotawaringin Barat

Informan :
 Asal Instansi :
 Peneliti : Suryati/NIM. 018788364
 Tanggal/Hari Wawancara :

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimanakah Kebijakan Ketahanan Pangan Daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat ?	
2.	Dalam mendukung kebijakan Ketahanan Pangan Daerah apakah Program Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) di Kab. Kotawaringin Barat sudah dilaksanakan sesuai dengan Permentan No. 45/Permentan.OT.140/8/2011 tgl 23 Agustus 2011 tentang Tata Hubungan Kerja Antar Lembaga Teknis, Penelitian dan Pengembangan dan Penyuluhan dalam mendukung Program Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) (Apabila Sudah atau belum berikan alasannya)	
3.	Apabila Program P2BN sudah dilaksanakan di kabupaten Ktw. Barat apakah kendala – kendala yang dihadapi dalam melaksanakan program P2BN dilihat dari sisi : a. keragaman perilaku sasaran b. Kejelasan dan konsistensi tujuan	

	c.ketepatan alokasi sumberdana	
	d.keterpaduan hieraki dalam dan diantara lembaga pelaksana	
	e.Apakah ada dukungan publik?	
	f.Apakah kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tehnologi mendukung program P2BN?	
4.	Bagaimana komitmen pejabat/ P2BN ?	
5	Bagaimanakah pandangan anda terhadap Program Ketahanan Pangan Daerah dan Program P2BN yang ada di Kab. Ktw. Barat?	
6.	Dalam pelaksanaan program Ketahanan pangan daerah Apakah pemerintah daerah sudah cukup memadai dalam mengalokasi- sumberdaya baik dana, personil maupun waktu?	
7.	Dalam melaksanakan program Ketahanan Pangan Daerah dan Program P2BN apakah sudah dilaku- kan koordinasi baik antar Pusat, Propinsi, Kabupaten, kecamatan dan Desa ? (apabila YA) berapa kali dalam 1 (satu) Tahun koordinasi dilaksanakan dan apa hasil koordinasi tersebut	
	a.Antara pusat dengan propinsi	
	b.Antara pusat dg Kabupaten	
	c.Antara Kabupaten dan Kec.	
	d.Antara Kecamatan dan Desa	
	e. Antara Desa dan masyarakat	
8.	Dalam melaksanakan program Ketahanan Pangan dan program P2BN diantara ketiga lembaga Teknis yaitu Distanak, KP2KP dan BPTP apakah sudah ada keterpaduan Program (apabila SUDAH) berikan Alasannya	

9.	Apakah Tugas – tugas yang dibeban	
	kan pada masing – masing instansi sudah terperinci secara tepat ?	
10.	Apakah ada tuntutan dari Pusat kewajiban yang harus dijalankan oleh daerah dalam menjalankan Program?	
11.	Apakah Saudara memahami maksud dan tujuan dari Program ketahanan Pangan Daerah dan Program P2BN ? (sebutkan maksud dan tujuan program tersebut)	
12.	Menurut Saudara apakah tujuan dan sasaran program tersebut jelas ?	
13.	Sebagai bagian dari pelaksana Program apakah saudara mengetahui tugas – tugas saudara secara rinci ?	
14.	Dalam menjalankan program apakah sudah ada SOP ?.	
15.	Apakah ada manfaat dari Program Ketahanan Pangan Daerah dan Program P2BN bagi masyarakat (Apabila ADA) sebutkan manfaat yang didapat masyarakat dari Program tersebut .	
16	Sebagai Tim Pelaksana P2BN TK. Kabupaten apakah Saudara sudah Melaksanakan hal – hal berikut :	
	a.Menyusun Rencana Kerja Peningkatan Produksi Padi Tk. Kabupaten (Apabila sudah) sebutkan dalam bentuk apa renc tersebut.	
	b.Mendampingi dan mengawal penerepan Tehnologi di lokasi P2BN	
	c.Mnyediakan Sarana dan Prasarana Untuk mendukung P2BN.	
	d.Menindаланjuti Matrik Program P2BN Propinsi	
	e.Apakah Laporan P2BN sudah di	

	Laksanakan secara kontinyu dan Tepat waktu.	
17.	Menyusun programa penyuluhan Kabupaten untuk mendukung Pencapaian target produksi padi	SUDAH/BELUM (coret salah Satu yang tidak sesuai)
34.	Menyusun materi penyuluhan dan Menyebarluaskan tehnologi Spesifik lokasi yang direkomendasi- Kan oleh BPTP	SUDAH/BELUM (coret salah Satu yang tidak sesuai)
18.	Menyusun pengalokasian penugasan PPL berdasarkan Lokasi SLPTT dan Sentra produksi padi	SUDAH/BELUM (coret salah Satu yang tidak sesuai)
19.	Melakukan penyuluhan melalui Media cetak dan elektronik	SUDAH/BELUM (coret salah Satu yang tidak sesuai)
20.	Meningkatkan kapasitas dan kinerja PPL melalui pelatihan dalam rangka Peningkatan produksi padi	SUDAH/BELUM (coret salah Satu yang tidak sesuai)
21.	Menetapkan Lokasi demplot, Denfarm, demarea dan SLPTT Berdasar usulan BPP	SUDAH/BELUM (coret salah Satu yang tidak sesuai)
22.	Merencanakan dan melaksanakan Rembug/forum pertemuan petani, Temu teknis dan temu tugas	SUDAH/BELUM (coret salah Satu yang tidak sesuai)
23.	Melakukan seleksi dan mengusulkan Calon penerima penghargaan bagi Penyuluh dan petani berprestasi Yang berhasil meningkatkan Produksi padi tk kabupaten	SUDAH/BELUM (coret salah Satu yang tidak sesuai)
24.	Dalam melaksanakan program ketahanan pangan daerah faktor-faktor apa saja yang dapat menghambat pelaksanaan program ? (Sebutkan)	

25.	Dalam melaksanakan program ketahanan pangan daerah faktor-faktor apa saja yang dapat mendorong pelaksanaan program ? (Sebutkan)	

Pangkalan Bun, 2014

Narasumber/Informan

(.....)



Form. 4. BPTP

Pedoman Wawancara Penelitian

Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan Daerah (Study Pada Program Peningkatan

Produksi Beras Nasional (P2BN) di Kabupaten Kotawaringin Barat

Informan :
 Asal Instansi :
 Peneliti : Suryati/NIM. 018788364
 Tanggal/Hari Wawancara :

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimanakah Kebijakan Ketahanan Pangan Daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat ?.	
2.	Dalam mendukung kebijakan Ketahanan Pangan Daerah apakah Program Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) di Kab. Kotawaringin Barat sudah dilaksanakan sesuai dengan Permentan No. 45/Permentan.OT.140/8/2011 tgl 23 Agustus 2011 tentang Tata Hubungan Kerja Antar Lembaga Teknis, Penelitian dan Pengembangan dan Penyuluhan dalam mendukung Program Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) (Apabila Sudah atau belum berikan alasannya)	
3.	Apabila Program P2BN sudah dilaksanakan di kabupaten Ktw. Barat Apakah kendala – kendala yang dihadapi dalam melaksanakan program P2BN dilihat dari sisi : a.keragaman perilaku sasaran b.Kejelasan dan konsistensi tujuan c.ketepatan alokasi sumberdana d.keterpaduan hieraki dalam dan diantara lembaga pelaksana e.Apakah ada dukungan publik?	

	f. Apakah kondisi sosial ekonomi masyarakat dan teknologi mendukung program P2BN?	
4.	Bagaimana komitmen pejabat/ Pemerintah terhadap Program P2BN ?	
5	Bagaimanakah pandangan anda terhadap Program Ketahanan Pangan Daerah dan Program P2BN yang ada di Kab. Ktw. Barat?	
6.	Dalam pelaksanaan program ketahanan pangan daerah Apakah pemerintah daerah sudah cukup memadai dalam mengalokasikan sumberdaya baik dana, personil maupun waktu?	
7.	Dalam melaksanakan program Ketahanan Pangan Daerah dan Program P2BN apakah sudah dilakukan koordinasi baik antar Pusat, Propinsi, Kabupaten, kecamatan dan Desa ? (apabila YA) berapa kali dalam 1 (satu) Tahun koordinasi dilaksanakan dan apa hasil koordinasi tersebut	
	a. Antara pusat dengan propinsi	
	b. Antara pusat dg Kabupaten	
	c. Antara Kabupaten dan Kec.	
	d. Antara Kecamatan dan Desa	
	e. Antara Desa dan masyarakat	
8.	Dalam melaksanakan program Ketahanan Pangan dan program P2BN diantara ketiga lembaga Teknis yaitu Distanak, KP2KP dan BPTP apakah sudah ada keterpaduan Program (apabila SUDAH) berikan Alasannya	
9.	Apakah Tugas – tugas yang dibebankan pada masing – masing instansi sudah terperinci secara tepat ?	
10.	Apakah ada tuntutan dari Pusat kewajiban yang harus dijalankan oleh daerah dalam menjalankan Program?	

11.	Apakah Saudara memahami maksud dan tujuan dari Program Ketahanan Pangan Daerah dan Program P2BN ?	
12.	Menurut Saudara apakah tujuan dan sasaran program tersebut jelas ?	
13.	Sebagai bagian dari pelaksana Program apakah saudara mengetahui tugas – tugas saudara secara rinci ?	
14.	Dalam menjalankan program apakah sudah ada SOP ?.	
15.	Apakah ada manfaat dari Program Ketahanan Pangan Daerah dan Program P2BN bagi masyarakat (Apabila ADA) sebutkan manfaat yang didapat masyarakat dari Program tersebut .	
16	Sebagai Tim Pelaksana P2BN TK. Kabupaten apakah Saudara sudah melaksanakan hal – hal berikut :	
	a.Mendampingi dan mengawal Penerapan Tehnologi di lokasi P2BN	SUDAH/BELUM (coret salah Satu yang tidak sesuai)
	b.Menindalanjuti Matrik Program P2BN Propinsi	SUDAH/BELUM (coret salah Satu yang tidak sesuai)
	c.Apakah Laporan P2BN sudah dilaksanakan secara kontinyu dan tepat waktu.	SUDAH/BELUM (coret salah Satu yang tidak sesuai)
	d.Menyiapkan dan merancang benih untuk display dan uji adaptasi serta merekomendasikan penggunaan benih varietas unggul spesilik Lokasi	
	e.Mengawal Penerapan Tehnologi Spesifik lokasi dan kalender tanam	
	f. Menjadi narasumber pelatihan Pemandu Lapangan SLPTT	
	g. Menyebarkan, publikasi, bahan cetakan dan elektronik untuk bahan Penyuluhan.	

	h. Menidentifikasi masalah dan memberikan saran pemecahan masalah dalam penerapan teknologi	
	i. Menyampaikan teknologi tepat guna melalui BPP sebagai bahan materi penyuluhan	
17.	Untuk melaksanakan program Ketahanan pangan daerah dan Program P2BN faktor – faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan program tersebut (sebutkan)	
18.	Untuk melaksanakan program Ketahanan Pangan Daerah dan Program P2BN faktor – faktor apa saja yang mendorong suksesnya pelaksanaan program tersebut ? (sebutkan)	

Pangkalan Bun, 2014

Narasumber/Informan

(.....)

Form. 5 Mantau

Pedoman Wawancara Penelitian

Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan Daerah (Study Pada Program Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) di Kabupaten Kotawaringin Barat

Informan :

Asal Instansi :

Peneliti : Suryati/NIM. 018788364

Tanggal/Hari Wawancara :

No.	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimanakah Kebijakan Ketahanan Pangan Daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat ?	
2.	Dalam mendukung kebijakan Ketahanan Pangan Daerah apakah Program Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) di Kab. Kotawaringin Barat sudah dilaksanakan sesuai dengan Permentan No. 45/Permentan.OT.140/8/2011 tgl 23 Agustus 2011 tentang Tata Hubungan Kerja Antar Lembaga Teknis, Penelitian dan Pengembangan dan Penyuluhan dalam mendukung Program Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) (Apabila Sudah atau belum berikan alasannya)	
3.	Apabila Program P2BN sudah dilaksanakan di kabupaten Ktw. Barat apakah kendala – kendala yang dihadapi dalam melaksanakan program P2BN dilihat dari sisi : a. keragaman perilaku sasaran b. Kejelasan dan konsistensi tujuan c. Ketepatan alokasi sumberdana d. Keterpaduan hierarki dalam dan diantara lembaga pelaksana e. Apakah ada dukungan publik?	

	f. Apakah kondisi sosial ekonomi masyarakat dan teknologi mendukung program P2BN?	
4.	Bagaimana komitmen pejabat/ Pemerintah terhadap Program P2BN ?	
5	Bagaimanakah pandangan anda terhadap Program Ketahanan pangan Daerah dan Program P2BN yang ada di Kab. Ktw. Barat?	
6.	Dalam pelaksanaan program ketahanan pangan daerah apakah pemerintah daerah sudah cukup memadai dalam mengalokasikan sumberdaya baik dana, personil maupun waktu?	
7.	Dalam melaksanakan program Ketahanan Pangan Daerah dan Program P2BN apakah sudah dilakukan koordinasi baik antar Pusat, Propinsi, Kabupaten, kecamatan dan Desa ? (apabila YA) berapa kali dalam 1 (satu) Tahun koordinasi dilaksanakan dan apa hasil koordinasi tersebut	
	a. Antara pusat dengan propinsi	
	b. Antara pusat dg Kabupaten	
	c. Antara Kabupaten dan Kec.	
	d. Antara Kecamatan dan Desa	
	e. Antara Desa dan masyarakat	
8.	Dalam melaksanakan program Ketahanan Pangan dan program P2BN diantara ketiga lembaga Teknis yaitu Distanak, KP2KP dan BPTP apakah sudah ada keterpaduan Program (apabila SUDAH) berikan alasannya	
9.	Apakah Tugas – tugas yang dibebankan pada masing – masing instansi sudah terperinci secara tepat ?	
10.	Apakah ada tuntutan dari Pusat kewajiban yang harus dijalankan oleh daerah dalam menjalankan Program?	

11.	Apakah Saudara memahami maksud dan tujuan dari Program Ketahanan Pangan Daerah dan Program P2BN ?	
12.	Menurut Saudara apakah tujuan dan sasaran program tersebut jelas ?	
13.	Sebagai bagian dari pelaksana Program apakah saudara mengetahui tugas – tugas saudara secara rinci ?	
14.	Dalam menjalankan program apakah sudah ada SOP ?.	
15.	Apakah ada manfaat dari Program Ketahanan Pangan Daerah dan Program P2BN bagi masyarakat (Apabila ADA) sebutkan manfaat yang didapat masyarakat dari Program tersebut .	
16.	Apakah Saudara sudah menetapkan sasaran areal luas tanam	SUDAH/BELUM (coret salah Satu yang tidak sesuai)
17.	Apakah saudara sudah mengkoordinasikan pengawasan peredaran Benih, pupuk, pestisida dan Alsintan Tk. Kecamatan.	SUDAH/BELUM (coret salah Satu yang tidak sesuai)
18.	Apakah saudara sudah menggerakkan penanaman padi pada lokasi sentra produksi padi Tk. Kec.	SUDAH/BELUM (coret salah Satu yang tidak sesuai)
19.	Apakah saudara sudah menghitung Luas areal panen padi	SUDAH/BELUM (coret salah Satu yang tidak sesuai)
20.	Apakah saudara melakukan pendampingan kepada mantri statistik dalam perhitungan hasil perhektar.	SUDAH/BELUM (coret salah Satu yang tidak sesuai)
21.	Apakah saudara merencanakan kegiatan pendampingan penerapan Tehnologi spesifik lokasi dan kalender tanam	SUDAH/BELUM (coret salah Satu yang tidak sesuai)

22.	Apakah saudara menyusun progra- ma penyuluhan kecamatan untuk mendukung pencapaian target Produksi padi	SUDAH/BELUM (coret salah Satu yang tidak sesuai)
23.	Apakah saudara sudah menyebar- luaskan informasi tehnologi spesifik Lokasi yang sudah direkomendasikan oleh peneliti pendamping.	SUDAH/BELUM (coret salah Satu yang tidak sesuai)
24.	Apakah saudara melakukan penga- wasan kepada penyuluh pendam- ping	SUDAH/BELUM (coret salah Satu yang tidak sesuai)
25.	Apakah saudara menyediakan dan menyebarkan luaskan informasi Agribisnis Tk. Kecamatan	
26.	Apakah saudara sudah melaksana- kan sistem LAKU dalam rangka peningkatan kapasitas penyuluh dan petani.	
27.	Apakah saudara sudah melaksana- kan demplot, demarea dan SLPTT sebagai unit pembelajaran petani dalam rangka peningkatan produksi padi	
28.	Apakah saudara sudah melaksana- kan forum penyuluhan tingkat desa dan temu lapang antara petani, penyuluh dan peneliti pendamping Tingkat kecamatan.	

Pangkalan Bun,.....2014

Narasumber/Informan

(.....)

Form.6. Kades.

Pedoman Wawancara Penelitian

Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan Daerah (Study Pada Program Peningkatan

Produksi Beras Nasional (P2BN) di Kabupaten Kotawaringin Barat

Informan :
 Asal Instansi :
 Peneliti : Suryati/NIM. 018788364
 Tanggal/Hari Wawancara :

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimanakah Kebijakan Ketahanan Pangan Daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat ?.	
2.	Dalam mendukung kebijakan Ketahanan Pangan Daerah apakah Program Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) di Kab. Kotawaringin Barat sudah dilaksanakan sesuai dengan Permentan No. 45/Permentan.OT.140/8/2011 tgl 23 Agustus 2011 tentang Tata Hubungan Kerja Antar Lembaga Teknis, Penelitian dan Pengembangan dan Penyuluhan dalam mendukung Program Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) (Apabila Sudah atau belum berikan alasannya)	
3.	Apabila Program P2BN sudah dilaksanakan di kabupaten Ktw. Barat apakah kendala – kendala yang dihadapi dalam melaksanakan program P2BN dilihat dari sisi : a.keragaman perilaku sasaran b.Kejelasan dan konsistensi tujuan c.Ketepatan alokasi sumberdana d.Keterpaduan hieraki dalam dan diantara lembaga pelaksana e.Apakah ada dukungan publik?	

	f. Apakah kondisi sosial ekonomi masyarakat dan teknologi mendukung program P2BN?	
4.	Bagaimana komitmen pejabat/ Pemerintah terhadap Program P2BN ?	
5	Bagaimanakah pandangan anda terhadap Program Ketahanan pangan Daerah dan Program P2BN yang ada di Kab. Ktw. Barat?	
6.	Dalam pelaksanaan program ketahanan pangan daerah apakah pemerintah daerah sudah cukup memadai dalam mengalokasikan sumberdaya baik dana, personil maupun waktu?	
7.	Dalam melaksanakan program Ketahanan Pangan Daerah dan Program P2BN apakah sudah dilakukan koordinasi baik antar Pusat, Propinsi, Kabupaten, kecamatan dan Desa ? (apabila YA) berapa kali dalam 1 (satu) Tahun koordinasi dilaksanakan dan apa hasil koordinasi tersebut a. Antara Kabupaten dan Kec. b. Antara Kecamatan dan Desa c. Antara Desa dan masyarakat	
8.	Apakah ada tuntutan dari Pusat kewajiban yang harus dijalankan oleh daerah dalam menjalankan Program?	
9.	Apakah Saudara memahami maksud dan tujuan dari Program Ketahanan Pangan Daerah dan Program P2BN ?	
10.	Menurut Saudara apakah tujuan dan sasaran program tersebut jelas ?	
11.	Sebagai bagian dari pelaksana Program apakah saudara mengetahui tugas – tugas saudara secara rinci ?	
12.	Dalam menjalankan program apakah sudah ada SOP ?.	

13.	Apakah ada manfaat dari Program Ketahanan Pangan Daerah dan Program P2BN bagi masyarakat (Apabila ADA) sebutkan manfaat yang didapat masyarakat dari Program tersebut .	
14.	Apakah saudara sudah memfasilitasi pelaksanaan musyawarah/rembung Desa antara penyuluh, petani dan Kepala UPTD Pertanian kecamatan dalam rangka penyiapan CP/CL,RDK/RDKK Tk. Desa/Kel	
15.	Apakah saudara sudah menggerakkan Masyarakat untuk melakukan pemeliharaan jaringan irigasi dan pengaturan penggunaan air irigasi Tk Ds.	
16.	Apakah Saudara sudah menggerakkan Masyarakat desa dalam pengendalian OPT	
17.	Apakah saudara sudah memfasilitasi penumbuhan pos penyuluhan Tingkat desa/kelurahan	

Pangkalan
Bun,.....2014

Narasumber/Informan

(.....)

Form. 7. Penyuluh

Pedoman Wawancara Penelitian

Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan Daerah (Study Pada Program Peningkatan

Produksi Beras Nasional (P2BN) di Kabupaten Kotawaringin Barat

Informan :
Asal Instansi :
Peneliti : Suryati/NIM. 018788364
Tanggal/Hari Wawancara :

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah saudara mengetahui kebijakan ketahanan pangan daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat ? (Apabila mengetahui mohon dapat Di jelaskan)	
2.	Apakah P2BN ada dukungan publik?	
3.	Bagaimanakah pandangan anda terhadap Program Ketahanan pangan Daerah dan Program P2BN yang ada di Kab. Ktw. Barat?	
4.	Dalam pelaksanaan program ketahanan pangan daerah apakah pemerintah daerah sudah cukup memadai dalam mengalokasi- sumberdaya baik dana, personil maupun waktu?	
5.	Dalam melaksanakan program Ketahanan Pangan Daerah dan Program P2BN apakah sudah dilaku- kan koordinasi baik antar Pusat, Propinsi, Kabupaten, kecamatan	

	dan Desa ? (apabila YA) berapa kali dalam 1 (satu) Tahun koordinasi	
	dilaksanakan dan apa hasil koordinasi tersebut	
	a. Antara Kabupaten dan Kec.	
	b. Antara Kecamatan dan Desa	
	c. Antara Desa dan masyarakat	
6.	Menurut Saudara apakah tujuan dan sasaran program tersebut jelas ?	
7.	Sebagai bagian dari pelaksana Program apakah saudara mengetahui tugas – tugas saudara secara rinci ?	
8.	Dalam menjalankan program apakah sudah ada SOP ?.	
9.	Apakah ada manfaat dari Program Ketahanan Pangan Daerah dan Program P2BN bagi masyarakat (Apabila ADA) sebutkan manfaat yang didapat masyarakat dari Program tersebut .	
10.	Apakah saudara sudah mendampingi Petani dalam penyusunan RDK/RDKK	
11.	Apakah saudara sudah melakukan Bimbingan penerapan tehnologi Spesifik lokasi sesuai dengan pola Tanam dan pola usaha tani	
12.	Apakah saudara sudah memfasilitasi Petani dalam rangka mengakses Sarana produksi, permodalan dan Informasi pasar	
14.	Apakah saudara sudah melakukan Umpan balik penerapan tehnologi Spesifik lokasi yang dibutuhkan Petani untuk disalurkan kepada Peneliti pendamping.	
15.	Apakah saudara sudah melaksanakan rembung desa di posluhtan dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang dihadapi petani pada sentra produksi padi.	
16.	Apakah saudara sudah	

	memfasilitasi	
	Petani untuk menumbuhkembang-	
	kan kelembagaan petani dan kelem-	
	bagaan ekonomi petani.	
17.	Dalam melaksanakan program keta-	
	hanan pangan daerah dan program	
	P2BN faktor – faktor apa saja yang	
	Dapat menghambat pelaksanaan	
	program tersebut (Sebutkan)	
18.	Dalam melaksanakan program keta-	
	hanan pangan daerah dan program	
	P2BN faktor – faktor apa saja yang	
	Dapat mendorong pelaksanaan	
	program tersebut (Sebutkan)	

Pangkalan Bun,.....2014

Narasumber/Informan

(.....)

Form.8. Petani

Pedoman Wawancara Penelitian

Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan Daerah (Study Pada Program Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) di Kabupaten Kotawaringin Barat

Informan :
 Asal Instansi :
 Peneliti : Suryati/NIM. 018788364
 Tanggal/Hari Wawancara :

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimanakah Kebijakan Ketahanan Pangan Daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat ?.	
2.	Apakah saudara sebagai petani Mendukung program ketahanan Pangan daerah terutama program P2BN	
3.	Apakah kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tehnologi mendukung program P2BN?	
4.	Bagaimana komitmen pejabat/ Pemerintah terhadap Program P2BN ?	
5	Bagaimanakah pandangan anda terhadap Program Ketahanan pangan Daerah dan Program P2BN yang ada di Kab. Ktw. Barat?	
6.	Dalam pelaksanaan program ketahanan pangan daerah apakah pemerintah daerah sudah cukup memadai dalam mengalokasikan sumberdaya baik dana, personil maupun waktu?	
7.	Dalam melaksanakan program Ketahanan Pangan Daerah dan Program P2BN apakah sudah dilakukan koordinasi baik antar kabupaten, dan Desa ? (apabila YA) berapa kali dalam 1 (satu) Tahun koordinasi dilaksanakan dan apa hasil koordinasi tersebut .Antara Desa dan masyarakat	

8.	Dalam melaksanakan program Ketahanan Pangan dan program P2BN diantara ketiga lembaga Teknis yaitu Distanak, KP2KP dan BPTP apakah sudah ada keterpaduan Program (apabila SUDAH) berikan Alasannya	
9.	Apakah Tugas – tugas yang dibebankan pada masing – masing instansi sudah terperinci secara tepat ?	
10.	Apakah Saudara memahami maksud dan tujuan dari Program Ketahanan Pangan Daerah dan Program P2BN ?	
11.	Menurut Saudara apakah tujuan dan sasaran program tersebut jelas ?	
12.	Sebagai bagian dari pelaksana Program apakah saudara mengetahui tugas – tugas saudara secara rinci ?	
14.	Dalam menjalankan program apakah sudah ada SOP ?.	
15.	Apakah ada manfaat dari Program Ketahanan Pangan Daerah dan Program P2BN bagi masyarakat (Apabila ADA) sebutkan manfaat yang didapat masyarakat dari Program tersebut .	
	Dalam melaksanakan program ketahanan pangan daerah dan program P2BN faktor – faktor apa saja yang Dapat menghambat pelaksanaan program tersebut (Sebutkan)	
	Dalam melaksanakan program ketahanan pangan daerah dan program P2BN faktor – faktor apa saja yang Dapat mendorong pelaksanaan program tersebut (Sebutkan)	

Pangkalan Bun,.....2014

Narasumber/Informan

(.....)

Lampiran 2

Transkrip Wawancara

A. Identitas Responden

1. Nama : Ir. H. Ahmad Yadi
2. Pekerjaan/Jabatan : *Mantan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat.*
3. Instansi/Lembaga : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kotawaringin Barat.
4. Tanggal Wawancara: 4 Maret 2014

B. Hasil Wawancara

No	Pertanyaan/Jawaban
1.	Menurut Bapak bagaimana kebijakan Ketahanan Pangan daerah di Kabupaten Kobar ?
	Terkait dengan kebijakan ketahanan pangan daerah pada tahun 2016 nanti minimal 70 % dari kebutuhan daerah mampu dipenuhi dari produksi daerah, saat ini 45 % sudah bisa dipenuhi sudah barang tentu kegiatan intensifikasi, ekstensifikasi perluasan areal termasuk juga kegiatan bagaimana mempertahankan lahan lahan supaya tidak alih fungsi tentu tetap kita lakukan.
2.	Bagaimana Program Peningkatan Produksi Beras Nasional di Kabupaten Kotawaringin Barat ?
	Sebagaimana yang saya sampaikan dimana pada tahun 2016 nanti minimal 70 % dari kebutuhan beras bisa dipenuhi dari produksi daerah sendiri pemerintah juga fokus dalam kaitan mendukung kegiatan itu karena itu maka semua instansi yang terkait masalah pengembangan pertanian tanaman pangan khususnya padi ini tentu harapan kita semua saling mendukung ada kebersamaan ada sinkronisasi ada harmonisasi ada sinergi kegiatannya kaitannya dengan itu terutama masalah penyediaan air dari dinas PU, Penyuluhan dari KP2KP dan penelitian dengan lembaga BPTP.
2	Dalam memenuhi kebutuhan beras daerah kebijakan apa yang telah dilaksanakan di kabupaten Kotawaringin Barat ?.

	<p>Dalam rangka memenuhi kebutuhan beras di kabupaten Kotawaringin Barat Kebijakan yang telah dilaksanakan salah satunya adalah P2BN dan ini sudah ada permentan 45 tentang tata Hubungan kerja antar lembaga teknis Penyuluhan dan penelitian dan pengembangan dalam rangka mendukung P2BN memang dalam implementasinya belum optimal betul kita sadar betul dukungan penyuluhan yang sangat dibutuhkan dalam kaitan pembangunan pertanian khususnya dalam peningkatan sdm dan penguatan kelembagan petani termasuk penerapan teknologi di tingkat lapangan.</p>
3	<p>Menurut Bapak Bagaimana peran ketiga lembaga tersebut dalam program P2BN ?</p> <p>Terkait dengan kegiatan P2BN ini masalah hubungan antara lembaga terkait seperti yang diatur oleh permentan perlu lebih disinkronkan diharmoniskan sehingga antar lembaga yang satu dengan yang lain saling mendukung, karena bagaimanapun dalam membangun pertanian tidak mungkin dinas pertanian bekerja sendiri perlu dukungan dari semua stakeholder mulai dari hulu sampai hilirnya memang dukungan pemerintah daerah terkait P2BN cukup besar kita bisa lihat dari kegiatan – kegiatan termasuk alokasi anggaran yang tersedia P2BN.</p>
4	<p>Bagaimana menurut bapak keterpaduan antar lembaga terkait.</p> <p>Keterkaitan masalah keterpaduan antar lembaga terkait dengan masalah p2bn distanak punya program kemudian tehnologinya ada teman – teman dari BPTP dalam membina mengerakan petani menerapkan tehnologi termasuk sarana penyuluhan pendampingan /pengawalan dilaksanakan teman teman dari Kp2KP dan sudah ada SK nya. Adanya penunjukan terhadap penyuluh dan penyuluh yang mendampingi di tingkat lapangan hanya memang kita akui karena penyuluh sekarang tidak bertempat di desa jadi yang masih kita rasakan masih kurang/tidak efektif.</p>
5	<p>Bagaimana Dukungan masyarakat terhadap program P2BN ?</p> <p>Dalam Pengembangan P2BN di Kotawaringin Barat kita lihat dari peningkatan produksi padi kita cukup signifikan dari tahun ketahun ya ini sudah barang tentu ya dukungan semua pihak diperlukan.</p>
6.	<p>Kalau Menurut bapak bagaimana komitmen dan konsistensi program P2BN ?</p>

	<p>Dalam membangun sesuatu perlu ada komitmen bersama termasuk harus konsisten terhadap komitmen itu tujuan itu bagaimana meningkatkan produksi pertanian khususnya diberas ini namun tidak bisa sekaligus meningkatkan pendapatan petani, ketepatan alokasi sumber dana keterkaitan p2bn seperti yang kita rasakan bahwa dukungan belum bisa optimal karena bantuan hanya berupa benih, kemudian sekolah lapang, sebetulnya kita ingin berhasil dengan baik pada saat kondisi masyarakat kita yang serba terbatas kemampuannya termasuk permodalan dan akses untuk mendapatkan modal seyogyanya bisa dibantu secara penuh pada tahap awal berikutnya mungkin bisa dibantu seperlunya.</p> <p>Komitmen pejabat semua pejabat di kobar mendukung program ini bahwa komitmen kita ingin bahwa sasaran yang telah kita sepakati dalam renstra bisa tercapai di tahun 2016 minimal 70 % tadi.</p>
7.	<p>Bagaimana Dukungan Antar lembaga teknis dalam P2BN ?</p>
8.	<p>Kebijakan P2BN semua daerah mendukung, keterkaitan dengan P2BN ini sudah ada permentan 45 tentang tata Hubungan kerja antar lembaga teknis Penyuluhan dan penelitian memang dalam implementasinya belum optimal betul kita sadar betul dukungan penyuluhan yang sangat dibutuhkan dalam kaitan pembangunan pertanian khususnya dalam peningkatan sdm dan penguatan kelembagan petani termasuk penerapan teknologi di tingkat lapangan.</p> <p>Terkait dengan masalah prilaku masyarakat bagaimana kebijakan P2BN dilaksanakan ?</p> <p>Masalah prilaku erat kaitannya dengan masalah sdm yang ada di lapangan yang menyangkut pelaku utama dalam pembangunan pertanian itu sendiri dalam kaitan dengan pembinaan bimbingan, penyuluhan sangat diperlukan kita sadari betul bahwa masyarakat kita sifatnya tradisional kemudian pksnya, pengetahuan, ketrampilan, kemampuan, masih sangat rendah termasuk masalah kelembagaannya masih belum bisa berfungsi dengan baik. Ini semua tentu perlu lebih kita tingkatkan lagi karena bagaimanapun aspek sumberdaya manusia inilah yang menentukan dalam melaksanakan pembangunan hampir di semua sektor termasuk dibidang pertanian.</p>
9.	<p>Lalu bagaimana pak dukungan publik terhadap kebijakan ketahanan Pangan daerah?</p>
	<p>Keterkaitan dengan dukungan publik saya kira semua respon cukup positif cukup baik karena masyarakat sangat berharap bahwa suatu saat kita bisa swasembada kita ingin bahwa masyarakat yang sebagian besar adalah petani dan petani miskin akan terangkat taraf kehidupannya, terangkat martabatnya ini yang kita inginkan. Kemudian dukungan publik</p>

	<p>baik dari media masa lsm dan lain sebagainya lebih intens dalam kaitan membeck up masalah ini ini termasuk menyoroti masalah p2bn ini.</p>
10.	<p>Menurut bapak Apakah kondisi sosial ekonomi mendukung kebijakan ?</p> <p>Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tehnologi yang diterapkan adalah sebenarnya adalah tehnologi yang spesifik lokasi yang cocok untuk lokasi itu sendiri dan ini ditemukan pada kegiatan sekolah lapang jadi tehnologi yang bisa diterapkan oleh petani setempat bersumber dari alam dan manusia setempat.</p>
11,	<p>Apakah ada hieraki hubungan antara pusat, propinsi sampai ke desa?.</p> <p>Terkait dengan hubungan antar lembaga antar kabupaten kemudian tadi ,kapupaten dengan propinsi dengan pusat yang selama ini kadang kadang terjadi mis komunikasi seringkali benih datang tidak tepat waktu, <i>kadangkala kualitasnya belum sebagaimana yang kita harapkan, yang kita liat makanya terakhir ini ada mekanisme yang berubah dimana benih tidak diberikan secara Cuma – Cuma tetapi benih diberikan secara subsidi dan ini perlu proses mulai tingkat lapangan mulai penyusunan RUK/RDKK perlu proses lebih panjang ini kita berharap bisa diperbaiki kedepan sehingga kebutuhan sarana produksi khususnya benih bisa tepat waktu di tingkat lapangan karena kita tahu bahwa tanaman pangan khususnya padi bersifat musiman tidak setiap saat bisa kita tanam karena memang kondisi pengairan masih sangat terbatas.</i></p>
12.	<p>Bagaimana pak peran masing – masing stokeholder ?.</p> <p>Kita harapkan kegiatan pendampingan sl /sekolah lapang laboratorium lapang yang dilakukan secara rutin di tingkat lapangan dalam jangka waktu tertentu mulai dari awal persiapan sampai panen bisa dilakukan dan didampingi sekaligus oleh teman teman penyuluh.</p>
13,	<p>Kalau pembagian tugas antara stoke holder bagaimana ? apakah sudah ada ?</p> <p>Dalam pembagian tugas masing masing harus jelas siapa melakukan apa sudah ada dalam pelaksanaannya kadang – kadang masih belum bisa sebagaimana yang kita harapkan. SOP dan lain sebagainya saya kira sudah lengkap petunjuk/pedoman juknis sudah ada.</p>
14.	<p>Kegiatan P2BN manfaat apa yang dapat diperoleh masyarakat?</p> <p>Kegiatan P2BN ada manfaatnya bagi masyarakat termasuk bagi daerah kenapa dukungan pemerintah pusat juga cukup besar makanya kita juga terbantu, kita bisa melihat bahwa dengan adanya bantuan – bantuan yang diberikan sebagai stimulan merangsang memotivasi masyarakat untuk bisa lebih bersemangat untuk melaksanakan kegiatan peningkatan produksi khususnya padi.</p>

<p>15.</p>	<p>Faktor – Faktor kendala apa yang mempengaruhi kebijakan tersebut ?</p> <p>Faktor kendala adalah petaninya sendiri yang kita akui bahwa petani kita sdmnya masih lemah, kemampuan ekonominya masih lemah, kelembagaanya masih lemah. Pengairan masih sangat terbatas jaringan yang sudah dibangun juga belum berfungsi dengan baik, lokasinya terpecah-pecah, kualitas lahan yang cukup rendah, kondisi – kondisi yang seperti itu kalau kita lihat masyarakatnya petaninya kondisi alamnya infrastruktur masih sangat terbatas, itulah kondisi yang kita hadapi betapa luasnya wilayah maka harus kita lakukan kegiatan kegiatan yang bisa mendorong ini semua seperti bantuan – bantuan stimulan, ada perbaikan sarana prasarana ada kegiatan pendampingan pengawasan ada kegiatan penyuluhan dan ini kita lakukan ada kegiatan pengkajian bersama – sama oleh BPTP dalam menemukan teknologi yang spesifik lokasi yang mudah diterapkan oleh masyarakat setempat ini yang kita lakukan dan banyak lagi pada inti faktor yang menghambat ini kalau kita mengatasi bersama sama secara perlahan akan bisa teratasi . kalau bicara masalah hambatan sangat komplek kalau dipertanian tetapi itulah tugas kita bersama kalau tidak ada masalah dibidang pertanian dalam produksi beras tidak perlu ada p2bn.</p>
<p>16,</p>	<p>Untuk faktor pendorong, faktor – faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kebijakan tersebut ?</p>
	<p>Faktor pendorong yang sangat utama adalah kita punya potensi sumberdaya alam, yang kedua beras ini makanan pokok setiap orang memerlukannya setiap waktu memerlukannya dan kebutuhan yang tidak bisa ditunda – tunda yang merupakan kebutuhan hak azasi seseorang. Yang kita coba lakukan hanya memang yang dirasakan oleh masyarakat kita bahwa bertani padi merupakan komoditas yang kurang begitu menguntungkan karena nilai jualnya termasuk rendah sementara nilai harga beras tidak terlalu signifikan naik sementara harga sarana produksi sangat melambung.sehingga cost biaya itu tidak seiring dengan naiknya pendapatan petani /penghasilan kita . memang kita akui ada beberapa lokasi yang terjadi alih fungsi lahan kenapa karena memang ada persaingan antar komoditas sangat terjadi ditingkat lapangan dan komoditas tertentu lebih menguntungkan daripada padi. Hanya karena memang tanaman padi ini makanan pokok yang utama ini yang membuat bertahan untuk menanam padi .disamping juga fasilitas yang disediakan oleh pemerintah ini yang mendorong mereka memanfaatkan lahan untuk menanam padi dan ini sangat dibutuhkan /sangat diperlukanoleh masyarakat kita.</p> <p>Hanya karena memang tanaman padi ini makanan pokok yang utama ini yang membuat bertahan untuk menanam padi .disamping juga fasilitas yang disediakan oleh pemerintah ini yang mendorong mereka memanfaatkan lahan untuk menanam padi dan ini sangat dibutuhkan /sangat diperlukanoleh masyarakat kita.</p>

Transkrip Wawancara

A. Identitas Responden :

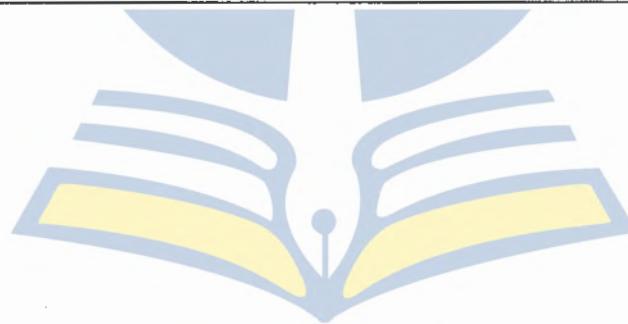
1. Nama : Ir. Abed Nego, M.Si
2. Pekerjaan/Jabatan : Kepala Kantor Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan
3. Instansi/Lembaga : Kantor Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan
4. Tanggal Wawancara: 7 Maret 2014

B. Hasil Wawancara

No	Pertanyaan/Jawaban
1.	<p>Menurut Bapak bagaimana kebijakan Ketahanan Pangan daerah di Kabupaten Kobar ?</p> <p>Dasar dari Kebijakan Ketahanan Pangan daerah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah Kebijakan Umum Ketahanan Pangan yang menjadi acuan common flat form bagi para stakeholder mulai dari instansi pemerintah, sektor swasta, BUMN, Perguruan Tinggi, Petani, Nelayan, industri pengolahan, perdagangan, penyedia jasa lain dan masyarakat umum dalam perannya dan upayanya untuk memberikan berkontribusi yang optimal untuk mewujudkan ketahanan pangan, sehingga yang kedua pemerintah membuat acuan dasar bagi lembaga pemerintah dan pemerintah daerah untuk membangun sinergi, integritas, dan koordinasi sehingga paling tidak kedua lembaga lebih saling menginformasikan kegiatan yang dilaksanakan secara transparan, akuntable efektif dalam rangka mewujudkan goodgovernance (pemerintahan yang baik) secara maksimal dalam mendukung tujuan ketahanan pangan.</p> <p>Yang menjadi dasar kebijakan ada banyak landasan hukum UU. 7 diganti UU 18 tahun 2012, PP 68 2002 tentang ketahanan pangan yang mengatur yang isinya mencakup empat aspek ketersediaan Pangan, cadangan pangan, pengankaraman pangan, pencegahan dan penanggulangan masalah - masalah pangan, keempat aspek ini bagaimana memproses supaya empat aspek ya sebagian yang tadi ada P2BN ada PP 22 ada perpres no 68 untuk percepatan pangan ada buku kebijakan umum ketahanan pangan, sejuta hektar.</p> <p>Renja, RPJM, Rencana Kerja, Permentan 45 bagaimana kita bekerja tetapi menurut saya ada yang kurang pas, ada sistem ini yang kebijakan pemerintah ini masih belum mengena antara pelaku, yang menurut saya belum - belum berjalan dengan baik, karena mereka hanya menyuruh menerapkan kita di daerah hanya disuruh menerapkan ini lho aturannya, ini loh aturannya tetapi pelaku (petani) tidak kita pikirkan nasibnya pendapatan tidak pernah dipikirkan pendapatan dibawah UMR, menanam padi resiko</p>

	tinggi tapi setelah gagal tidak diperhatikan sehingga dia beralih, ngapain mungkin menanam padi hanya pilihan terakhir saja sehingga yang tua – tua yang mengambil faktanya.
2.	Bagaimana koordinasi antar stakeholder dalam kebijakan ketahanan Pangan ?
	Dalam kebijakan ketahanan pangan baru tiga lembaga yang saling koordinasi yaitu peternakan dengan pertanian dan penyuluhan, belum dengan lembaga yang lain, dinas perikanan seperti apa makanya wadah yang dibentuk Dewan ketahanan pangan yang dipimpin langsung oleh bupati belum serius memikirkan kebijakan ketahanan pangan, pernahkah bupati memimpin, pernahkah bupati mengundang dinas instansi terkait dinas perkebunan, dinas perdagangan dinas yang lain untuk duduk bersama dalam satu wadah supaya kita membangun ketahanan pangan . artinya komitmen dan pemahanan pemerintah daerah rendah.
2	Menurut bapak bagaimana peran lembaga – lembaga teknis dalam kebijakan ketahanan pangan di kabupaten Kotawaringin Barat ?.
	Dikebijakan ketahanan pangan, akibat kebijakan ini ada kebijakan kebijakan yang sudah dibuat dalam uu seperti subsidi, resi gudang tidak berjalan, petani hanya diperankan sebagai obyek yang diperas aja itu, tidak diperankan sebagai subyek setelah dia rugi, kedua komoditas yang serahkan/diambil oleh petani padi mempunyai nilai harapan rendah dengan resiko tinggi, resiko gagal bencana alam serangan HPT, apa yang lain punya peran untuk menangani itu, tidak pernah mendapat perhatian bagaimana yang lain ada BPTP, tidak pernah melakukan pengkajian artinya peran semuanya (ketiga lembaga), lemah, tidak ada evaluasi kebijakan/program secara berkelanjutan. Peran masing masing lembaga sangat lemah.
3	Menurut Bapak bagaimana keterkaitan dengan kebijakan ketahanan pangan dari sisi ketersediaan melalui Program P2BN ?
	Program P2BN kurang tepat dengan kondisi daerah karena program digeneralisir dari pusat. Kurangnya sinergi antar lembaga, koordinasi kurang antar pelaksana. Dari sisi penganeekaragaman pangan masih baru slogan, kalau pun ada sangat kecil, baru dalam bentuk model.
4	Bagaimana menurut bapak keterpaduan antar lembaga terkait.
	Dari kebijakan P2BN, dinas sudah merencanakan 70 % dari kebutuhan tercukupi dari produksi sendiri, seharusnya masing – masing lembaga menerapkan tugas masing – masing, seperti BPTP bagaimana tehnologinya, kemudian tugas penyuluhan yang menyampaikan tehnologi akan tetapi walaupun sudah disampaikan maukah petani menerapkan kebijakan tersebut, karena nilai harapan rendah, Sasaran kurang respon karena membangun itu take and give dimana antara pengambil kebijakan dan pelaku sasaran tidak saling menguntungkan maka sasaran kurang respon. Sehingga penerapan

	<p>kebijakan tidak perlu dipaksakan. Karena daerah hanya menjalankan program dari pusat tetapi pemerintah tidak pernah memikirkan kesejahteraan petani, seharusnya ada subsidi produksi untuk menjamin petani dapat sejahtera. sehingga program ini merupakan program pemiskinan. agar kebijakan ini bisa berhasil maka setiap daerah yang mempunyai potensi adakah sarana dan prasarana sebagai misal bendungan , tetapi untuk ktw. Barat irigrasi yang dibuat PU bisa tidak bisa dimanfaatkan, artinya keterpaduan antar lembaga kurang. Karena daerah hanya menerima program dari pusat tetapi intinya bagaimana mensejahterakan petani tidak pernah dipikirkan.</p>
5	<p>Bagaimana koordinasi antar lembaga dalam program P2BN ?</p>
	<p>Koordinasi , integritas mulai dari pusat sampai ke daerah sangat lemah. Kondisi sosial ekonomi yang tidak mendukung, budaya menanam padi masih ada akan tetapi apabila petani menjalankan kebijakan p2bn kebutuhan dasar mereka tidak tercukupi. Iklim juga bisa menghambat, daya tarik budidaya padi rendah karena nilai harapan rendah sehingga petani padi seluruh indonesia tetap miskin dan jumlah petani semakin berkurang. Karena sarana prasarana kita yang kurang mendukung. Kebijakan ketahanan pangan merupakan , aturan /payung hukum lengkap tetapi pelaksanaannya tidak mudah karena nilai harapannya rendah. faktor yang bisa mendorong adalah nilai harapan. Dalam Pengembangan P2BN di Kotawaringin Barat kita lihat dari peningkatan produksi padi kita cukup signifikan dari tahun ketahun ya ini sudah barang tentu ya dukungan semua pihak diperlukan.</p>



Transkrip Wawancara

A. Identitas Responden :

1. Nama : Ir. M. Bahriwan
2. Pekerjaan/Jabatan : Kepala Desa
3. Instansi/Lembaga : Kantor Desa Rungun Kecamatan Kotawaringin Lama
4. Tanggal Wawancara: Maret 2014

B. Hasil Wawancara

No	Pertanyaan/Jawaban
1.	<p>Menurut Bapak bagaimana kebijakan Ketahanan Pangan daerah di Kabupaten Kobar ?</p>
	<p>Kalau setahu saya pemerintah sebenarnya punya komitmen untuk meningkatkan ketahanan pangan namun, disatu sisi pemerintah punya komitmen namun dalam perjalanannya masih belum berjalan secara optimal. pemerintah kurang serius kalau memang serius kenapa tidak dimaksimalkan yang ada ini dulu tidak perlu membuka lahan baru.</p>
2.	<p>Bagaimana prilaku masyarakat terhadap kebijakan ketahanan Pangan ?</p>
	<p>Dari segi masyarakat prilaku masyarakat di desa rungun menanggapi program ketahanan pangan sangat positif, artinya mereka berkeinginan bahwa walaupun sekarang belum bisa optimal namun kedepan suatu saat bisa swasembada. Dan kedepan mereka juga memikirkan kedepan juga ada cadangan lahan untuk tanaman pangan mereka juga berupaya bagaimana menjadikan lahan sawah.</p>
3.	<p>Menurut Bapak bagaimana komitmen pemerintah daerah dalam kebijakan ketahanan pangan?.</p>
	<p>Komitmen pejabat ada tetapi tingkat keseriusannya kurang, kalau memang serius tidak perlu membuka lahan baru lebih baik memaksimalkan potensi – potensi yang ada sampai dimana tingkat keberhasilannya, sehingga petani dapat berharap dari penghasilan budidaya padi . kalau memang pemerintah itu serius jangan petani disuruh meminjam uang ke bank seperti KUT, sebaiknya uangnya diserahkan kepada petani walaupun dengan jaminan atau perjanjian, jangan sampai petani dibebani dengan program ini kalau memang petani tidak punya modal ya dikasih modal. Kalau seperti desa rungun kalau hanya disediakan bank sementara jarak desa untuk mengakses permodalan di bank terlalu jauh dan memakan biaya ya petani tidak mampu untuk melaksanakan itu. karena budidaya padi tidak menjanjikan karena resiko sangat besar dan sarana yang disediakan pemerintah masih sangat minim hanya berupa benih dan kadang kadang hanya pupuk seadanya.</p>

4.	Menurut bapak bagaimana konsistensi dan keterpaduan program dari kebijakan ini ?
5.	<p>Kosistensi dan kejelasan dari tujuan kebijakan masih diragukan disatu sisi punya komitmen cuma disisi lain sekarang aja baru berjalan dan berjalan aja lambat. Dan bisa kita lihat lahan – lahan yang sudah dibuka belum bisa dimaksimalkan itulah yang menunjukkan bahwa Keterpaduan antara lembaga, sebetulnya program ketiga lembaga sudah ada namun dalam pelaksanaannya masih sulit karena yang ada baru sarana prasarana walaupun belum sempurna seharusnya dari pihak penyuluhan bisa memberikan pendampingan kepada petani bagaimana memanfaatkan lahan tersebut dan dari pihak BPTP bisa menciptakan tehnologi bagaimana lahan tersebut bisa optimal.</p> <p>Program itu datangnya dari pusat pada awalnya serius dibicarakan tetapi sekarang kurang dibicarakan, apabila program tersebut terus dibicarakan paling tidak petani terus berupaya untuk meningkatkan usaha dalam peningkatan produksi beras tersebut. Seharusnya kebijakan pemerintah tetap menjadi prioritas bagaimana bisa surplus beras kalau dana anggarannya tidak pernah dipikirkan. Kalau memang serius banyak dana dari dinas pertanian yang masuk ke desa untuk membangun pertanian terutama untuk meningkatkan produksi beras itu sendiri. Alokasi dana kurang artinya pemerintah punya komitmen tetapi hanya setengah setengah, mungkin juga ada pengaruh politik kali, kalau peningkatan produksi beras surplus kan tidak perlu impor.</p>
6.	Di dalam P2BN ada tiga lembaga yang terkait langsung yaitu dinas, penyuluhan dan penelitian bagaimana peran ketiga lembaga tersebut ?
	Tugas masing masing pelaksana memang sudah ada namun tingkat keseriusan pemerintah memang kurang jadi bagaimana kita bisa menjalankan tugas tersebut kalau pemerintah sendiri tidak serius seharusnya ada peningkatan jumlah anggaran yang dikucurkan agar pelaksana bisa menjalankan tugasnya. Apabila program pemerintah itu betul betul dijalankan dengan serius saya yakin manfaat besar akan dirasakan oleh masyarakat. Dimana tidak semua masyarakat punya kebun kalau pemerintah serius sehingga akan memberikan peluang bagi masyarakat untuk berusaha dalam budidaya padi jadi masyarakat yang tidak punya penghasilan dari kebun akan mendapatkan penghasilan dari pertanian.
7.	Menurut Bapak apa kendala yang mempengaruhi kebijakan Peningkatan Produksi beras kurang berhasil ?

	<p>Kendala utama adalah karena ketidakseriusan pemerintah dalam program ini karena sebenarnya masyarakat sudah terbiasa dalam bertani namun kita kesulitan bagaimana menyadarkan masyarakat benar benar menjadi petani kalau dari hasil ini tidak menjanjikan. Sebagai contoh masyarakat mempunyai lahan segini dapat meemberikan jaminan hidup. Ditambah lagi dengan permodalan petani yang terbatas sehingga bertanam padi kadang dipupuk kadang tidak sehingga usaha tani padi hanya menjadi sampingan bukan sebagai mata pencaharian pokok. Petani hanya berpikir mennaman padi agar bagaimana memenuhi kecukupan pangan untuk keluarga dalam setahun, bukan untuk berusaha untuk memenuhi kebutuhan lainnya. Sehingga petanipun tidak serius dalam usaha dibidang padi.</p>
8.	<p>Faktor – faktor apa yang dapat mendorong keberhasilan kebijakan ketahanan pangan terutama dari sisi ketersediaan dalam program P2BN ?</p>
	<p>Untuk mendorong keberhasilan dalam kebijakan peningkatan produksi beras karena potensi di Kotawaringin Barat cukup tinggal bagaimana pemerintah bisa memaksimalkan program program tersebut. Kalau memang bisa maksimal petani yang selama ini tidak tergiur dalam budidaya padi akan tergiur untuk berusaha tani padi.</p>
9.	<p>Bagaimana peran kepala desa terhadap peningkatan produksi beras pak?.</p>
	<p>Sebetulnya dari sisi pasar masih banyak peluang. Desa tidak pernah memfasilitasi petani untuk rembug dan lain sebagainya akan tetapi desa hanya di undang pada saat petani/poktan mengadakan pertemuan dan disitulah kita bisa menyampaikan apa yang harus kita perbuat.</p>

Transkrip Wawancara

A. Identitas Responden :

1. Nama : Yan Arifin
2. Pekerjaan/Jabatan : Kepala Desa
3. Instansi/Lembaga : Kantor Desa Natai Raya Kecamatan Arut Selatan
4. Tanggal Wawancara: Maret 2014

B. Hasil Wawancara

No	Pertanyaan/Jawaban
1.	<p>Menurut Bapak bagaimana kebijakan Ketahanan Pangan daerah di Kabupaten Kobar ?</p> <p>Menurut pendapat kami bahwa ketahanan pangan di kotawaringin barat ini sudah cukup baik tinggal bagaimana koordinasi secara keseluruhan sehingga sasaran lebih tepat. Dimana kendala kita disini adalah curah hujan kadang berlebihan.</p>
2.	<p>Keterkaitan dengan ketahanan pangan bagaimana penerapan Program P2BN ?</p> <p>Untuk program P2BN perlu pengembangan dilapangan karena dilapangan yang dihadapi oleh petani adalah kondisi alam kondisi lahan yang marjinal sehingga perlu ada bimbingan yang serius dari bidang teknologi dan penyuluhan.</p>
3.	<p>Dalam Program P2BN ada tiga lembaga yang berperan bagaimana menurut bapak peran ketiga lembaga tersebut ?.</p> <p>Peran ketiga komponen ini sebenarnya sudah bagus tinggal bagaimana kita mengatasi benturan dengan musim yang tidak menentu sehingga sulit untuk menyesuaikan dengan musim.</p>
4.	<p>Menurut Bapak bagaimana tanggapan masyarakat dengan kebijakan ketahanan pangan?.</p> <p>Sebetulnya masyarakat semangat sekali mereka berharap seperti di Jawa minimal mereka tidak perlu membeli beras syukur - syukur mereka bisa memberi kontribusi kepada daerah kotawaringin barat dalam penyediaan beras.</p>
5.	<p>Apa kendala – kendala yang dihadapi masyarakat dalam pelaksanaan P2BN ?</p> <p>Prilaku masyarakat dalam menerapkan program sebenarnya tidak sulit karena rata – rata penduduk nata i raya berasal dari Jawa yang sudah terbiasa bertani yang menjadi kendala adalah musim sedangkan irigasi kita yang kurang maksimal sehingga pada saat hujan kebanjiran dan pada saat kemarau kekeringan tidak bisa diatur pengairannya. dari tujuan sebetulnya jelas aja hanya kendala terpaku di musim aja. Peningkatan produksi beras ini bisa menjadi program.</p>

Transkrip Wawancara

A. Identitas Responden :

1. Nama : Warjoko
2. Pekerjaan/Jabatan : Kepala Desa
3. Instansi/Lembaga : Kantor Desa Berambai Makmur Kecamatan Pangkalan Banteng
4. Tanggal Wawancara: Maret 2014

B. Hasil Wawancara

No	Pertanyaan/Jawaban
1.	<p>Menurut Bapak bagaimana kebijakan Ketahanan Pangan daerah dalam program P2BN di Kabupaten Kobar ?</p>
	<p>Program P2BN di Kabupaten Kotawaringin Barat memang sudah dicanangkan dengan adanya pembentukan Tim Pelaksana dari Tingkat Kabupaten sampai ke desa dan sudah pernah melakukan rakor P2BN pada tahap awalnya namun hingga saat ini tidak ada tindak lanjut pembinaan program P2BN.</p>
2.	<p>Apa kegiatan – kegiatan yang sudah dilaksanakan dalam program P2BN untuk mendukung Ketahanan Pangan Daerah ?</p>
	<p>Kegiatan yang sudah dilaksanakan yang pertama pembukaan lahan itu , sarana dan prasarana irigasi sudah pendukungnya sudah sebetulnya pengadaan bibit sudah hanya kendala penyakit yang belum bisa diatasi karena peran popt tidak maksimal dan tidak jalan. Sedangkan pembinaan dari penyuluh masih kurang, petani sangat berharap selalu ada pembinaan terus menerus, sehingga program harus berkelanjutan.</p>
3.	<p>Keterkaitan dengan ketahanan pangan bagaimana seharusnya penerapan Program P2BN ?</p>
	<p>Program P2BN seharusnya begitu dicanangkan terus dilakukan pembinaan, pengawasan maka tingkat keberhasilan tinggi dari pada dicanangkan kemudian ditinggalkan atau dipantau lewat HP kan sekarang modelnya begitu sehingga program ini tidak jalan, sebenarnya komunikasi HP ini sangat menolong tetapi ketidakhadiran petugas membuat masyarakat lengah terhadap pelaksanaan program. Sedangkan kehadiran penyuluh tidak rutin setiap hari oleh karena itu desa sudah menyiapkan lahan untuk lokasi balai penyuluhan desa sehingga kedepan diharapkan kehadiran penyuluh bisa rutin artinya siap untuk menyediakan fasilitas untuk menunjang program penyuluhan, apabila penyuluh berada di tempat maka petani mudah untuk mengakses teknologi tidak perlu harus ke kecamatan atau ke kabupaten.</p>

4.	<p>Apa kendala – kendala yang di hadapi dalam meningkatkan Produksi beras?.</p>
	<p>Untuk berambai makmur kendala utama adalah pada pasca panen yang kurang maksimal sehingga hasil dari berambai makmur kurang diminati konsumen karena kualitas berasnya rendah, sehingga dalam berusaha tani padi petani berambai makmur hanya untuk mencukupi kebutuhan sendiri dan tidak berorientasi pada skala bisnis/usaha sehingga apabila sekali tanam diperkirakan sudah mampu mencukupi kebutuhan pangan dalam setahun ya sudah tidak mau menanam lagi di musim berikutnya sehingga mereka nyantai nyantai saja rata – rata mereka seperti itu pemikirannya, apabila hasil produksi mereka bisa masuk ke pasar dan petani sudah mengenyam pasar saya kira petani lebih termotivasi, sementara ini yang bisa membeli hasil padi dari berambai makmur hanya orang – orang kecamatan.</p>
5.	<p>Bagaimana Mekanisme Kerja Tim Pelaksana P2BN ?</p> <p>Mekanisme kerja Program P2BN yang berjenjang mulai dari Kabupaten kecamatan dan desa sangat terlalu jauh sedangkan apabila salah satu unsur tersebut kurang aktif sebagai misal kecamatan tidak fokus tidak pernah memberi motivasi ya petani kurang semangat. Dari masing masing sebetulnya sudah ada tugasnya masing – masing tetapi apabila ini tidak jalan ya masak kades yang harus hendel semua. Artinya pembagian tugas yang sudah dibuat tidak dilaksanakan sepenuhnya apabila hal itu dilaksanakan saya yakin tingkat keberhasilan akan lebih tinggi dalam mendukung ketahanan pangan, kami berharap pada tahun 2015 /2016 berambai makmur bisa meningkatkan produksi karena sudah ada tambahan lahan baru yang sudah dibuka oleh dinas, fasilitas sarana prasarana memang sudah cukup namun masih ada kekurangan disana sini terutama pada lahan sawah yang baru.</p>
6.	<p>Menurut Bapak apakah kondisi ekonomi masyarakat dapat mendukung Program P2BN?</p> <p>Sedangkan kondisi ekonomi masyarakat sangat mendukung karena disamping berusaha tani padi rata – rata masyarakat berusaha juga di bidang perkebunan dan saat ini sudah menghasilkan sehingga kebutuhan – kebutuhan yang lain bisa tercukupi dari hasil perkebunan dan kedepan masyarakat lebih fokus dalam berusaha tani padi.</p>
7.	<p>Terkait dengan pelaksanaan P2BN bapak sebagai anggota tim apakah tugas – tugas tim sudah dirinci ?</p> <p>Dengan adanya program P2bn yang sudah dirinci tugas – tugasnya yang pada akhirnya tugas tersebut tertumpu pada petani kan muaranya tugas tersebut ada pada petani dan kucinya pada petani, faktor pendukung adalah petani, potensi maksimal. Walaupun sarana baru 50 % tersedia tinggal tingkat pemikiran petani untuk mensiasati alam karena rata rata sawah disini tadah hujan.</p>

Transkrip Wawancara

A. Identitas Responden :

1. Nama : Yatno
2. Pekerjaan/Jabatan : Ketua KTNA
3. Instansi/Lembaga : KTNA Kecamatan Pangkalan Banteng
4. Tanggal Wawancara: Maret 2014

B. Hasil Wawancara

No	Pertanyaan/Jawaban
1.	Menurut Bapak bagaimana kebijakan Ketahanan Pangan daerah dalam program P2BN di Kabupaten Kobar ?
	Program P2BN dikecamatan Pangkalan banteng kalau hanya dilaksanakan SL sebetulnya kurang maksimal karena kendala yang utama adalah bagaimana petani mengatasi hama penyakit. Karena umur padi tidak terlalu panjang sehingga harus ada tindakan yang cepat untuk mengatasi hal tersebut, sehingga kehadiran pengamat hama sangat diperlukan untuk membina petani dalam mengatasi hama penyakit tersebut.



Transkrip Wawancara

A. Identitas Responden :

1. Nama : Sadilan
2. Pekerjaan/Jabatan : Ketua Kelompok Tani
3. Instansi/Lembaga : *Kelompok Tani Desa Berambai Makmur Kec. Pangkalan Banteng*
4. Tanggal Wawancara: Maret 2014

B. Hasil Wawancara

No	Pertanyaan/Jawaban
1.	<p>Menurut Bapak bagaimana kebijakan Ketahanan Pangan daerah dalam program P2BN di Kabupaten Kobar ?</p>
	<p>Kalau program P2BN saya tidak mengerti, tetapi kalau SLPTT saya tahu karena tidak pernah ada penjelasan tentang Program P2BN, hanya ada penjelasan bahwa kita menanam padi untuk mendukung produksi beras untuk kotawaringin barat.</p>
2.	<p>Apa kegiatan – kegiatan yang sudah dilaksanakan dalam program P2BN untuk mendukung Ketahanan Pangan Daerah ?.</p>
	<p>Program Ketahanan pangan khususnya produksi beras ada manfaatnya karena manusia yang diperlukan adalah pangan hal ini sangat dirasakan oleh petani karena dengan adanya program ini petani dapat bantuan sarana produksi sehingga petani tidak perlu membeli beras bahkan menjual beras, kehadiran teknologi sangat dirasakan oleh petani, sehingga program ini sangat dirasakan oleh petani.</p>

Transkrip Wawancara

A. Identitas Responden :

1. Nama : Suprapti
2. Pekerjaan/Jabatan : Penyuluh Pertanian Lapangan
3. Instansi/Lembaga : PPL Desa Bumiharjo Kec. Kumai
4. Tanggal Wawancara: Maret 2014

B. Hasil Wawancara

No	Pertanyaan/Jawaban
1.	Menurut ibu sebagai penyuluh apa yang ibu ketahui tentang kebijakan Ketahanan Pangan daerah dalam program P2BN di Kabupaten Kobar ?
	Saya tidak /kurang mengetahui masalah kebijakan ketahanan pangan daerah kabupaten kotawaringin barat, yang saya tahu adalah program P2BN dimana program tersebut sangat mendapat dukungan publik terutama petani diwilayah desa pangkalan satu .
2.	Bagaimana pelaksanaan program P2BN untuk mendukung Ketahanan Pangan Daerah ?.
	Menurut saya program P2BN dalam pelaksanaannya pemerintah kurang mengalokasikan sumberdaya baik dana maupun personil.
3.	Sebagai anggota tim Pelaksana P2BN apakah ibu tahun tugas – tugas ibu dan bagaimana ibu melaksanakan tugas tersebut ?.
	Dalam pelaksanaan program P2BN tugas – tugas suda terinci seperti yang sudah tertuang dalam SK Bupati tentang P2BN namun belum ada SOP sebagai pegangan bagi penyuluh. Tugas Penyuluh sebagai anggota tim pelaksana P2BN yang ada dilapangan tugas – tugas yang diberikan baru sebgaiian yang sudah dilaksanakan misal dalam hal penyusunan RUK/RDCK namun dalam hal bimbingan tehnologi spesifik lokasi, memfasilitasi petani dalam hal mengakses sarana produksi, permodalan dan informasi pasar serta pelaksanaan rembug desa belum dilaksanakan.
4.	Apa kendala – kendala yang di hadapi dalam meningkatkan Produksi beras?.
	Hal hal yang menghambat pelaksanaan program adalah bahwa dalam penyediaan sarana produksi tidak tepat waktu sehingga akan menghambat pelaksanaan program.

Transkrip Wawancara

A. Identitas Responden :

1. Nama : Jumarno, SPKP
2. Pekerjaan/Jabatan : Penyuluh Pertanian Lapangan
3. Instasi/Lembaga : PPL Desa Pangkalan Satu Kec. Kumai
4. Tanggal Wawancara: Maret 2014

B. Hasil Wawancara

No	Pertanyaan/Jawaban
1.	<p>Menurut bapak sebagai penyuluh apa yang bapak ketahui tentang kebijakan Ketahanan di Kabupaten Kobar ?</p> <p>Dalam Kebijakan ketahanan pangan daerah, kami sebagai penyuluh saya mengetahui program tersebut dengan digulirkannya beberapa program antara lain SLPTT Padi, SRI, Pencetakan sawah, optimasi dan lain – lain.</p>
2.	<p>Bagaimana pelaksanaan program P2BN untuk mendukung Ketahanan Pangan Daerah ?.</p> <p>Dalam mendukung ketahanan pangan daerah bahwa program P2BN merupakan cara untuk memenuhi kebutuhan beras bagi masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat maupun secara nasional namun dalam pelaksanaan program pemda masih kurang optimal dalam alokasi dana, waktu personil.</p>
3.	<p>Sebagai anggota tim Pelaksana P2BN apakah saudara tahu tujuan dari Program P2BN ?.</p> <p>Sedangkan tujuan dari program tersebut sudah jelas yaitu untuk mendukung swasembada dan swasembada berkelanjutan secara nasional namun tidak sesuai dengan kondisi lapangan.</p>

Transkrip Wawancara

A. Identitas Responden :

1. Nama : Tulus Widodo, SPKP
2. Pekerjaan/Jabatan : Koordinator BPP/Mantri Tani
3. Instansi/Lembaga : Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Pangkalan Lada
4. Tanggal Wawancara: Maret 2014

B. Hasil Wawancara

No	Pertanyaan/Jawaban
1.	Menurut bapak sebagai penyuluh apa yang bapak ketahui tentang kebijakan Ketahanan di Kabupaten Kobar ?
	Sedangkan diantara ketiga lembaga tersebut dalam pelaksanaan program dalam aplikasinya belum maksimal baik dari segi alokasi sumber dana waktu maupun personil. ada sinkronisasi antar lembaga terkait serta secara ekonomi masyarakat kurang mendukung.
2.	Bagaimana pelaksanaan program P2BN untuk mendukung Ketahanan Pangan Daerah ?
3.	Sebagai anggota tim Pelaksana P2BN apakah saudara tahu tujuan dari Program P2BN ?

Transkrip Wawancara

A. Identitas Responden :

1. **Nama** : Rinda Rumpel, SPKP
2. **Pekerjaan/Jabatan** : Koordinator BPP/Mantri Tani
3. **Instansi/Lembaga** : Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Pangkalan Banteng
4. **Tanggal Wawancara**: 17 April 2014

B. Hasil Wawancara

No	Pertanyaan/Jawaban
1.	Menurut bapak bagaimana kebijakan Ketahanan di Kabupaten Kobar ?
	Kebijakan Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dimana Pemerintah membuat kebijakan dibidang pembagunan pertanian untuk mendukung program P2BN, Pemerintah membuat rencana pencapaian produksi padi melalui penerapan tehnologi spesifik lokasi, pemerintah memberi peluang untuk mengembangkan program P2BN, pemerintah memberi arah pembangunan pertanian secara luas dengan mencetak sawah baru untuk mendukung program P2BN, Pemeintah memberikan biaya dalam mewujudkan ketahanan pangan daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat.
2.	Dalam mendukung kebijakan ketahanan pangan daerah apakah program P2BN sudah dilaksanakan sesuai dengan Permentan 45 tentang tata hubungan kerja antar lembaga teknis dalam mendukung P2BN?.
	Pihak Dinas dengan BPTP juga bekerjasama dalam memberikan bimbingan kepada dinas didaerah agar usaha tani padi sawah dapat berkembang sesuai tehnologi sekarang. Dinas Pertanian dan Peternakan Kebaupaten Kotawaringin Barat juga bekerjasama dalam mendampingi Program P2BN melalui petugas penyuluh di lapangan untuk mensukseskan program P2BN secara berkesinambungan.
3.	Program P2BN sudah dilaksanakan di kabupaten Kotawaringin Barat Apa kendala – kendala yang dihadapi dalam pelaksaan program ?.
	Kendala kendala yang dihadapi yaitu : (!) petani masih kurang respon dalam melaksanakan kegiatan usaha tani padi sawah karena budayanya masih sangat tradisional. Petani masih kurang tertarik terhadap usaha tani padi sawah karena usaha tani perkebunan lebih menjanjikan dibanding padi sawah.
4.	Menurut Bapak apakah Program P2BN tujuan sudah jelas dan konsisten?

	<p>Kejelasan dan konsistensi tujuan petani masih kurang respon terhadap usaha tani padi sawah karena kelapa sawit dan karet sangat menguntungkan petani. Dana untuk usaha tani padi sawah sangat besar dikarenakan sarana produksi sangat mahal dan agak sulit diperoleh di tingkat petani.</p>
5.	<p><i>Kalau Hieraki dan keterpaduan dalam dan antar lembaga pelaksana menurut bapak bagaimana?.</i></p> <p>Keterpaduan antara lembaga pelaksana masih kurang sinkron untuk membangun sektor pertanian khususnya padi karena di lapangan pencetakan sawah baru masih jauh dari apa yang diharapkan petani untuk diolah agar siap tanam.</p>
6.	<p>Apakah ada dukungan publik terhadap program P2BN ?</p> <p><i>Dukungan publik masih sangat kurang karena petani sudah bisa menghitung untung ruginya dalam berusaha tani padi dan membandingkan dengan usaha yang lain. Kondisi sosial ekonomi masyarakat kurang mendukung program karena pendidikan petani masih rendah dan karena berusaha tani padi kurang menguntungkan karena masih jauh dari sasaran. daeri berusaha tani padi sangat rendah sedangkan tehnologi speifik lokasi masih sulit diterapkan .</i></p>
7.	<p>Menurut Bapak Apakah kondisi sosial ekonomi dan tehnologi masyarakat dapat mendukung program P2BN?</p> <p><i>Di Kecamatan Pangkalan Banteng ini karena masyarakat sudah mempunyai penghasilan lain terutama dari kebun maka, masyarakat mau bertanam padi namun kalau hanya mengandalkan tanam padi tidak dapat menjamin kebutuhan hidup karena bertani padi resiko tinggi dan harga di tekan oleh pemerintah sehingga bertani padi sangat tidak menguntungkan, sedangkan tehnologi yang dikuasai petani sangat rendah.</i></p>
8.	<p>Kalau komitmen pejabat dalam mendukung ketahanan pangan daerah dan P2BN Bagaimana Pak ?</p> <p>Komitmen pejabat terhadap program ketahanan pangan maupun program P2BN masih sangat rendah dan belum dilaksanakan sampai tingkat bawah sehingga ketepatan alokasi waktu dana masih jauh dari sasaran.</p>
9.	<p>Menurut pandangan anda terhadap program ketahanan pangan daerah dan P2BN di Kabupaten Kotawaringin Barat bagaiman ?.</p>

	<p>Menurut saya ketahanan pangan di kabupaten kotawaringin barat masih jauh dari apa yang diharapkan petani karena pencetakan sawah masih setengah setengah, sehingga petani masih harus banyak mengeluarkan biaya agar sawah yang sudah dicetak bisa ditanami secara optimal. Saluran irigasi yang sudah dibuat banyak yang tidak dapat dipergunakan akibat pembuatannya yang tidak sesuai dengan teknis pengairan sehingga lahan menjadi mengalami kekeringan.</p>
10.	<p>Dalam pelaksanaan program ketahanan pangan daerah dan P2BN apakah pemerintah daerah sudah cukup memadai dalam mengalokasikan sumberdaya baik dana, personil maupun waktu?</p> <p>Pemerintah daerah masih kurang mendukung dana personil dan waktu untuk mendukung program P2BN. Koordinasi antara lembaga sudah dilakukan .</p>
11.	<p><i>Apakah tujuan dan sasaran program sudah jelas ?</i></p> <p>Tujuan dan sasaran dari program tersebut kurang jelas dan tugas – tugas yang diberikan kepada kami tidak /belum semua kami jalankan seperti melakukan pendampingan kepada mantri statistic</p>
12.	<p>Menurut anda apakah Program Ketahanan Pangan dan P2BN ada manfaatnya bagi masyarakat ?.</p> <p>Manfaat dari program ketahanan pangan daerah dan P2BN masih dianggap sangat kurang, karena berusaha tani padi kurang menguntungkan dibanding dengan usaha tani kebun terutama kelapa sawit sehingga sangat sedikit petani yang berusaha tani padi.</p>

Transkrip Wawancara

A. Identitas Responden :

1. Nama : *Syahrian*
5. Pekerjaan/Jabatan : *Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan*
6. Instansi/Lembaga : *KTNA. Kabupaten Kotawaringin Barat*
7. Tanggal Wawancara: *April 2014*

B. Hasil Wawancara

No	Pertanyaan/Jawaban
1.	<p>Menurut Bapak bagaimana kebijakan Ketahanan Pangan daerah di Kabupaten Kobar ?</p> <p><i>Program Ketahanan Pangan Daerah walaupun pemerintah sudah melaksanakan namun tidak bisa mencapai seperti yang diharapkan karena ada beberapa kendala terutama kebiasaan masyarakat yang dimanja oleh alam dan masih banyak alternatif pekerjaan lain, selain itu kondisi alam terutama struktur tanah sangat tidak mendukung. Kalau program ketahanan pangan terutama P2BN memang sudah dicanangkan tinggal bagaimana masyarakat yang menyambutnya sebagai pelaksana di lapangan.</i></p>
2.	<p>Selain kendala alam dalam program peningkatan produksi beras kendala – kendala apa yang menyebabkan Kabupaten Kotawaringin Barat belum mampu menyediakan kebutuhan beras dari produksi sendiri terutama dari sisi pelaksana program?. Bagaimana komitmen pemerintah?.</p> <p><i>Mungkin begini ada strategi yang belakangan ini mencuat seperti belum optimalnya penyediaan lahan yang merupakan kawasan pengembangan padi sehingga tidak saling berebut antar komoditas. Selain itu strategi pemerintah yang banyak membuka lahan namun tidak maksimal dan tidak kontinyu. Seharusnya dalam meluncurkan program harus sampai jadi dan terintegrasi baru mengembangkan yang lain.</i></p>
3.	<p>Menurut Bapak bagaimana peran ketiga lembaga pendukung P2BN dalam mendukung kebijakan ketahanan pangan?.</p> <p><i>Peran ketiga lembaga memang sudah jalan namun belum maksimal salah satunya peran penyuluh walaupun tidak semuanya banyak penyuluh yang kapasitasnya rendah karena penyuluh tidak dibekali sarana dan prasarana, mereka kerja seperti dukun aja. Contohnya ketika mau mengetahui PH tanah hanya dengan kira- kira. Jadi kemampuan penyuluh kalau untuk mencapai swasembada sangat berat. Oleh karena itu perlu dititik beratkan dalam meningkatkan kemampuan teknologi. Apalagi peran BPTP sangat kecil sekali dan tidak dirasakan oleh masyarakat.</i></p>

4. Menurut bapak bagaimana perilaku sasaran masyarakat terhadap Program P2BN ini pak.?

Begitu bu kita membangun pertanian ini berarti tidak hanya menyediakan sarana dan prasarana tetapi membangun manusianya juga, dari sisi ini pemerintah agak lemah keterkaitannya dengan sosialisasi, penyuluhan agak kurang, sarana belajar petani sangat minim sebagai contoh kalau di pulau jawa ada saung tani sebagai tempat pertemuan dan belajar para petani, kalau kita disini tidak ada. Ibu bisa cek hampir setiap desa tidak ada sarana tersebut kecuali di Kubu sudah mulai kita rintis P4S sebagai sarana belajar para petani. Kalau kita hanya mengandalkan penyuluh tidak mungkin karena kadang – kadang satu penyuluh ada yang merangkap beberapa desa. Artinya dalam mencapai suatu program harus secara terintegrasi baik penyediaan sarana prasarana maupun pembangunan manusianya.

5. Dalam kebijakan ketahanan pangan apakah tujuan sudah jelas dan konsisten pak?.

Tujuan kebijakan belum konsisten sebagai contoh program P2BN petani disuruh menanam padi tetapi ilmu pengetahuan dan tehnologinya tidak dibekali, kemudian nanti begitu dapat hasil banyak kita bingung mau jual kemana pasar tidak tersedia ? . Yang Paling krusial menurut saya adalah pasar.

6. Menurut bapak bahwa pemerintah dalam mengalokasikan anggaran apakah sudah tepat atau bagaimana ?

Menurut saya alokasi anggaran perlu ditingkatkan lagi karena sumber anggaran masih minim.

7. Sesuai dengan program P2BN menurut Bapak ada tidak kesinkronan antara ketiga lembaga pendukung P2BN ?.

Ketiga lembaga belum sinkron, yang paling ada sedikit nyambung itu antara Penyuluh dengan Dinas Pertanian, namun dengan BPTP belum ada sinkron sebagai contoh pengembangan tehnologi menjadi tugas BPTP yang Menyampaikan ke masyarakat petani adalah penyuluh, kalau dari BPTP tidak ada tehnologi jadi apa yang akan disampaikan oleh penyuluh.

8. Kalau dukungan publik terhadap program ketahanan pangan dan P2BN bagaimana ?

Begitu bu, kendalanya hanya satu aja yaitu masalah pasar aja, kalau pasarnya jelas maka dukungan masyarakat akan bagus karena dengan adanya pasar maka budidaya padi akan menjadi matapencaharian mereka. Kalau sekarang dukungan masyarakat lemah karena mereka masih mencari alternatif lain. Disamping sebagai bahan pokok masyarakat ini ada tambahan penghasilan dari berusaha tani padi karena berusaha tani padi tidak bisa menjamin kesejahteraan petani.

<p>9.</p>	<p>Bagaimana dengan Komitmen para pejabat pak ?</p> <p>Ya mungkin apa yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan propinsi juga dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten tetapi kalau ada yang mengatakan di Kobar kurang komitmen ya semuanya kurang komitmen. Ya kalau memang komitmen pemerintah itu kuat ya seharusnya kebijakan tersebut dilaksanakan jangan hanya sepotong – sepotong, jadi masyarakat yang berusaha tani padi bisa menggantungkan hidupnya pada usaha tersebut.</p>
<p>10.</p>	<p>Menurut pandangan bapak kedepan seperti apa program P2BN ke depan ?</p> <p><i>Dalam melaksanakan program seharusnya pemerintah fokus dan tuntas, misalnya ketika sudah ditetapkan suatu kawasan menjadi kawasan pertanian tanaman pangan maka pemerintah harus betul betul memperhatikan seperti bagaimana tehnologinya, penyuluhannya, sarana prasarannya, kemudian pasar juga harus disiapkan hal ini bukan berarti menghilangkan yang lain tetapi perhatianperlu perhatian khusus. Kalau pasar itu ada sangat mustahil orang tidak tertarik dengan budidaya padi, coba lihat seperti sawit karena pasarnya jelas orang berbondong – bondong menanam sawit padahal harga Cuma seribu rupiah per kilo, apalagi padi ini harganya jauh lebih tinggi daripada sawit dan turunan dari padi sangat banyak sebetulnya sangat menguntungkan.</i></p> <p>11. Bagaimana alokasi sumberdaya, personil dan anggaran untuk mendukung Program P2BN?</p> <p>Kalau untuk khususnya kabupaten Kobar untuk sumberdaya saya kira memadai saja namun untuk personil kurang, kemungkinan sumberdana juga kurang.</p> <p>12. Manfaat Program P2BN bagi Masyarakat Bagaimana ?</p> <p>Programnya dirasakan oleh masyarakat, cuma bila bicara masalah hasil tadi, maka keinginan dia bertani padi haya untuk mencukupi dia makan aja, kalau sudah lebih dia mikir ini mau kita jual kemana jadi sejak mulai tanam mereka sudah mikir mau dijual kemana.</p> <p>13. Khusus untuk Petugas Penyuluh apabila didesa apakah mereka hanya kunjungan atau mengadakan pertemuan dengan kelompok tani.</p> <p>Paling hanya kunjungan aja, untuk transfer tehnologi saya kira tidak ada kecuali ada program dari dinas. Itupun paling – paling Cuma satu kali. Kalau yang sifatnya penyuluhan dengan mengumpulkan anggota kelompok tani itu jarang dilakukan. Kedepan harapan kami penyuluh itu menetap di wilayah binaannya sehingga lebih intensif melakukan pembinaan.</p> <p>14. Faktor Kendala – kedala apa yang menghambat ?</p>

Faktor teknis dan non teknis seperti semangat petani untuk menanam padi yang rendah. Artinya program P2BN tidak tuntas dari hulu sampai hilir, bagaimana tehnologinya, bagaimana penyuluhannya, bagaimana pelaku usahanya, pasarnya dan lain- lain. Seharusnya Program dilaksanakan secara komprehensif dengan melibatkan berbagai stakeholder dan inipun sulit. *Infrastruktur aja hanya 20 persen yang memadai.*



Transkrip Wawancara

A. Identitas Responden :

1. Nama : Kambali
2. Pekerjaan/Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha
3. Instansi/Lembaga : KP2KP Kabupaten Kotawaringin Barat
4. Tanggal Wawancara: April 2014

B. Hasil Wawancara

No	Pertanyaan/Jawaban
1.	<p>Menurut data yang saya dapat bahwa struktur organisasi yang menangani Ketahanan Pangan tidak mampu menggerakkan organisasi. Bagaimana menurut bapak ?</p>
	<p><i>Begini antara beban tugas tidak imbang dengan institusi yang ada sehingga pelaksanaan program pincang, terutama SDM yang menangani kalau dulunya ketahanan pangan ketika masih di Distanak yang menangani kan eselon III dengan tiga seksi, namun setelah berdiri sendiri dengan status kantor justru yang menangani malah turun ke eselon IV nah otomatis kalau dulu yang menangani tiga seksi sekarang hanya satu seksi, betapa beratnya. Dari sisi anggaran ada korelasi walaupun diberi anggaran banyak dengan personil yang tidak memadai maka tidak bisa melaksanakan. Salah satunya jalan agar ketahanan pangan bisa jalan ya harus dengan sarana dan prasarana dan SDM yang mumpuni, jumlah personil terbatas dengan kapasitas rendah.</i></p>

Lampiran 3. Foto Dokumentasi Wawancara.

Foto Dokumentasi Wawancara
Wawancara Dengan Bapak Ir. H. Akhmad Yadi Mantan Kadistanak



Wawancara dengan Bapak Ir. Abed Nego, M.Si Kepala KP2KP















Wawancara Dengan Bp. Sadilan Ketua Kelompok Tani Makmur Desa Berambai Makmur



Wawancara Dengan Bapak Sadilan Ketua Kelompok Tani Makmur Ds. Berambai Makmur



Wawancara Dengan Bapak Yatno Ketua KTNA Kecamatan Pangkajene Bontone



Wawancara Dengan Bapak Yatno Ketua KTNA Kecamatan Pangkajene Bontone





Wawancara Dengan Bapak Warjoko Kepala Desa Berambai Makmur



Wawancara dengan Bapak Warjoko Kepala Desa Berambai Makmur



Wawancara dengan Bapak Yan Arifin Kepala Desa Natai Raya



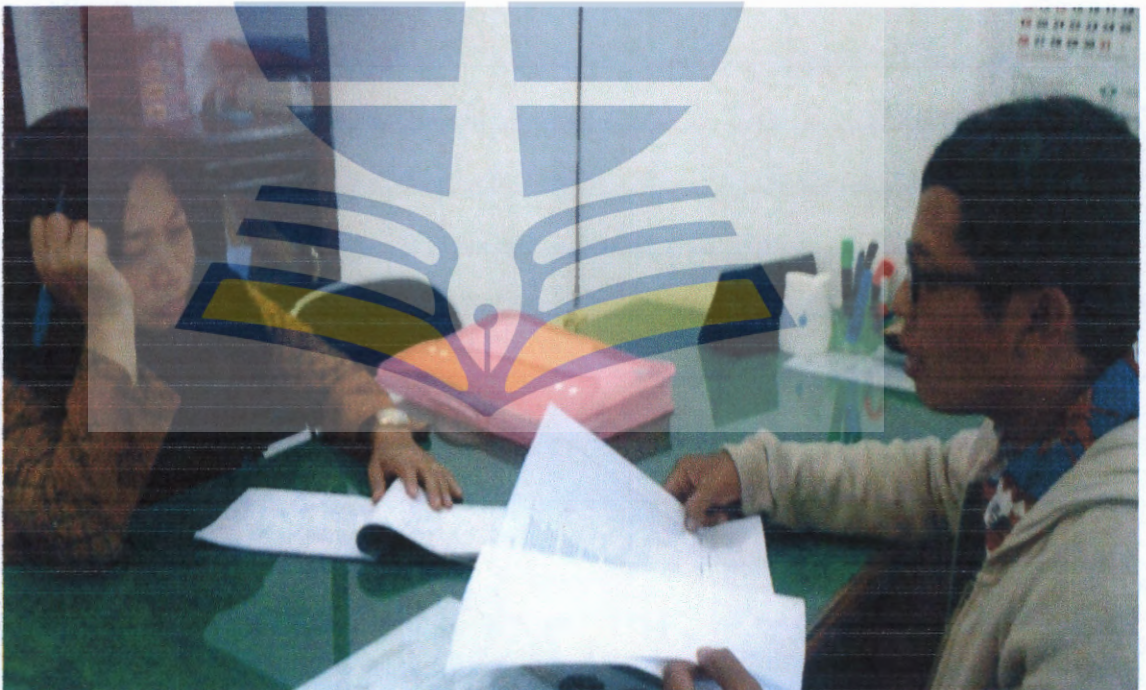
Wawancara Dengan bapak Yan Arifin Kepala desa Natai Raya



Wawancara dengan Bapak Jumarno PPL Desa Pangkalan Satu











**PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 45/Pementan/OT. 140/8/2011
TENTANG
TATA HUBUNGAN KERJA**

**ANTAR KELEMBAGAAN TEKNIS, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN, DAN PENYULUHAN PERTANIAN
DALAM MENDUKUNG PENINGKATAN PRODUKSI BERAS
NASIONAL (P2BN)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mencapai swasembada beras, pemerintah menetapkan Program Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN);
 - b. bahwa Program P2BN, dalam pelaksanaannya melibatkan banyak instansi/unit kerja, baik di Pusat maupun di Daerah;
 - c. bahwa atas dasar hal tersebut diatas dan untuk efektivitas pelaksanaan tugas masing-masing instansi/unit kerja dalam mewujudkan sasaran Program P2BN yang telah ditetapkan, dipandang perlu menetapkan tata hubungan kerja antar kelembagaan teknis, penelitian dan pengembangan, dan penyuluhan

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 6. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 92,

- Tambahan Lembaran Negara Nomor 4660);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 8. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4214) jo Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4418);
 9. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
 10. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 11. Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2009 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian Negara dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

3

12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1279/Kpts/OT.160/3/ 2011 tentang Pembentukan Tim Pemantauan Dan Pembinaan, Pelaksanaan Peningkatan Produksi Beras Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG TATA HUBUNGAN KERJA ANTAR KELEMBAGAAN TEKNIS, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, DAN PENYULUHAN PERTANIAN DALAM Mendukung PENINGKATAN PRODUKSI BERAS NASIONAL (P2BN)

Pasal 1

Tata hubungan kerja antar kelembagaan teknis, penelitian dan pengembangan dan pertanian dalam mendukung peningkatan produksi beras nasional (P2BN) seperti tercantum pada Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

Pasal 2

Tata hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dimaksudkan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas masing-masing instansi/unit kerja dalam mendukung program Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN).

4



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN
2011 NOMOR
LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 45/Permentan/OT.140/8/2011
TANGGAL: 23 Agustus 2011

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Pertanian ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 23 Agustus 2011



Diundangkan di Jakarta

Pada Tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

PATRIALIS AKBAR

TATA HUBUNGAN KERJA ANTAR KELEMBAGAAN TEKNIS, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, DAN PENYULUHAN PERTANIAN DALAM MENDUKUNG PENINGKATAN PRODUKSI BERAS NASIONAL (P2BN)

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, setelah negara Cina, India, dan Amerika Serikat. Dengan jumlah penduduk yang terus meningkat dari tahun ke tahun, maka ketahanan pangan nasional merupakan suatu keniscayaan dalam rangka mewujudkan stabilitas politik, ekonomi, sosial dan keamanan.

Untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional, pada tahun 2011 Kementerian Pertanian telah menetapkan target produksi padi sebesar 70,60 juta ton GKG. Sampai dengan tahun 2014 pertumbuhan produksi padi ditargetkan meningkat sebesar 5,22% per tahun.

Instrumen yang dapat digunakan untuk mencapai target produksi tersebut adalah 1) perluasan areal; 2) peningkatan produktivitas; dan 3) rekayasa teknologi dan sosial. Perluasan areal dilakukan melalui pencetakan sawah baru, optimalisasi lahan, dan peningkatan indeks pertanaman (IP). Peningkatan



produktivitas dilakukan melalui penggunaan varietas unggul, pemupukan, pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (POPT) dan teknologi pasca panen. Rekayasa teknologi dan sosial dilakukan melalui Demplot, Dem-Area dan SL-PTT.

Untuk meningkatkan sinergitas dan koordinasi dalam rangka pelaksanaan peningkatan program P2BN, perlu dibentuk Tim Pengendali di Tingkat Pusat, Tim Pembina di Tingkat Provinsi, dan Tim Pelaksana di Tingkat Kabupaten/Kota dan Kecamatan. Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas Tim Pengendali, Tim Pembina dan Tim Pelaksana perlu dirumuskan mekanisme dan tata hubungan kerja antara kelembagaan teknis, kelembagaan penelitian dan pengembangan, dan kelembagaan penyuluhan pertanian mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan.

B. Maksud dan Tujuan

Mekanisme dan tata hubungan kerja ini dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi kelembagaan teknis, kelembagaan penelitian dan pengembangan, serta kelembagaan penyuluhan pertanian di pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan dalam mendukung program P2BN.

Sedangkan penetapan mekanisme dan tata hubungan kerja ini bertujuan untuk :

1. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas program dan kegiatan antara Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Teknis Terkait, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian serta Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian di Tingkat Pusat;

7

2. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas program dan kegiatan antara Dinas Teknis Pertanian yang membidangi Tanaman Pangan, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian dan Kelembagaan Penyuluhan di Tingkat Provinsi;

3. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas program dan kegiatan antara Dinas Teknis Pertanian yang membidangi Tanaman Pangan, Peneliti Pendamping dan Kelembagaan Penyuluhan di Tingkat Kabupaten/Kota;

4. Meningkatkan kerjasama antara Kepala UPT/UPTD Pertanian, petugas POPT dan Penyuluh di Tingkat Kecamatan dalam pelaksanaan pengawasan saprotan, pengawalan teknologi, pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, dan penurunan kehilangan hasil panen;

5. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas antara kelembagaan terkait di tingkat pusat dengan kelembagaan terkait di tingkat provinsi, kabupaten/kota dan tingkat kecamatan.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup mekanisme dan tata hubungan kerja ini, meliputi:

1. Mekanisme dan tata hubungan kerja antara Tim Pengendali dengan Tim Pembina.;
2. Mekanisme dan tata hubungan kerja antara Tim Pembina dengan Tim Pelaksana kab/kota;
3. Mekanisme dan tata hubungan kerja antara Tim Pelaksana Kabupaten/kota dengan Tim Pelaksana Kecamatan;

8



4. Mekanisme dan tata hubungan kerja antara Kepala UPT/UPTD Pertanian, petugas POPT dan Penyuluh di Tingkat Kecamatan;
5. Mekanisme dan tata hubungan kerja antara kelembagaan terkait di tingkat pusat dengan kelembagaan terkait di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

D. PENGERTIAN

1. Program Peningkatan Produksi Beras Nasional disingkat P2BN adalah program pemerintah dalam rangka peningkatan produksi beras nasional.
2. Tata Hubungan Kerja adalah bentuk hubungan kerja yang mengatur terselenggaranya kerjasama yang harmonis antar unit kerja sehingga terhindarnya tumpang tindih atau tidak tertanganinya suatu pekerjaan.
3. Kelembagaan Teknis adalah Direktorat Jenderal lingkup Kementerian Pertanian, dan Dinas yang membidangi Tanaman Pangan.
4. Kelembagaan Penelitian dan Pengembangan Pertanian adalah kelembagaan yang menangani fungsi penelitian dan pengembangan pertanian di lingkungan Kementerian Pertanian, baik kelembagaan Pusat maupun Unit Pelaksana Teknis.
5. Kelembagaan Penyuluhan Pertanian adalah kelembagaan yang menangani fungsi penyuluhan pertanian, baik instansi Pusat maupun Daerah.

Program P2BN dalam pelaksanaannya melibatkan banyak instansi baik di tingkat Pusat maupun Daerah. Oleh karena itu untuk efektivitas pelaksanaan tugas, Organisasi Penyelenggara P2BN dibagi menjadi organisasi di tingkat Pusat dan di tingkat Daerah, yang terdiri dari :

- a. Tingkat Pusat : Tim Pengendali P2BN
- b. Tingkat Propinsi : Tim Pembina P2BN
- c. Tingkat Kabupaten/Kota : Tim Pelaksana P2BN Tingkat Kabupaten/Kota
- d. Tingkat Kecamatan : Tim Pelaksana P2BN Tingkat Kecamatan

A. TIM PENGENDALI P2BN

Dalam rangka meningkatkan koordinasi dan sinergitas program dan kegiatan antara Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Teknis Terkait, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian serta Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Menteri Pertanian membentuk Tim Pengendali untuk mendukung program P2BN dengan susunan organisasi sebagai berikut:

- | | |
|-----------------|------------------------------------|
| Penanggungjawab | : Menteri Pertanian |
| Ketua | : Direktur Jenderal Tanaman Pangan |
| Sekretaris | : Direktur Budidaya Serealia |
| Anggota | : |

1. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
2. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
3. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

BAB II

ORGANISASI PENYELENGGARA PROGRAM P2BN



4. Direktur Jenderal P2HP
5. Kepala Badan Ketahanan Pangan

Tim Pengendali mempunyai tugas utama :

1. Merumuskan program dan rencana kerja peningkatan produksi padi tingkat nasional;
2. Merumuskan program dan rencana kerja penelitian dan pengembangan;
3. Merumuskan program dan rencana kerja penyuluhan pertanian;
4. Merumuskan program dan rencana kerja fasilitasi prasarana dan sarana pertanian;
5. Merumuskan matrik program/kegiatan peningkatan produksi padi tingkat nasional.

Dalam menyelenggarakan tugas utamanya sebagaimana tersebut di atas, Tim Pengendali dibantu oleh Sekretariat, yang berkedudukan di Direktorat Budidaya Serealia, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Susunan keanggotaan dalam Sekretariat Tim Pengendali, terdiri dari :

Ketua : Direktur Budidaya Serealia

- Anggota :
1. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan
 2. Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian
 3. Kepala Pusat Pelatihan Pertanian

4. Direktur Pasca Panen
5. Direktur Pupuk dan Pestisida
6. Direktur Perluasan dan Pengelolaan Lahan
7. Direktur Pengelolaan Air Irigasi
8. Direktur Perlindungan Tanaman Pangan
9. Direktur Perbenihan Tanaman Pangan
10. Kepala Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian

Sekretariat Tim Pengendali mempunyai tugas :

1. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan Tim Pengendali;
2. Menyiapkan data indikatif dan definitif dalam rangka perencanaan peningkatan produksi padi;
3. Membangun database yang terkait dengan peningkatan produksi padi;
4. Memfasilitasi pelaksanaan rapat koordinasi Tim Pengendali Pusat;
5. Mendokumentasikan matrik program/kegiatan peningkatan produksi padi;
6. Mengkompilasi dan mengolah laporan dari provinsi tentang pelaksanaan peningkatan produksi padi;



7. Menyusun rencana dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi bagi Tim Pengendali Pusat;
8. Menyiapkan laporan Tim Pengendali Pusat.

Sedangkan rincian tugas dari masing-masing Eselon I terkait dalam pelaksanaan Program P2BN, sebagai berikut:

1. **Direktorat Jenderal Tanaman Pangan**, mempunyai tugas :
 - a. Merumuskan, merencanakan dan menetapkan target produksi padi tingkat nasional;
 - b. Merencanakan dan mengusulkan kebutuhan sarana produksi dan prasarana pertanian untuk mencapai target produksi padi tingkat nasional;
 - c. Melakukan pengawasan dan memberikan jaminan ketersediaan benih berbantuan sesuai prinsip 6 Tepat pada Sentra Produksi Padi
 - d. Menetapkan sentra produksi padi berdasarkan luas areal, luas tanam dan luas panen;
 - e. Mengusulkan kebutuhan teknologi untuk mendukung P2BN;
 - f. Mengusulkan kebutuhan penyuluh pada lokasi SL-PTT dan Sentra Produksi Padi
 - g. Merumuskan dan menetapkan calon petani/calon lokasi SL-PTT yang diusulkan daerah;

- h. Mengusulkan kebutuhan anggaran khusus eselon I dalam mendukung Program P2BN.

2. **Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian** mempunyai tugas:

- a. Menyediakan rekomendasi teknologi spesifik lokasi sesuai usulan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan;
- b. Menyediakan kalender dan pola tanam menurut lokasi;
- c. Menyediakan informasi dan teknologi adaptasi terhadap perubahan iklim;
- d. Menyediakan benih dasar dan merekomendasikan varietas unggul baru dalam spesifik lokalita;
- e. Merumuskan dan merencanakan kebutuhan tenaga peneliti dalam mendukung P2BN;
- f. Menyediakan publikasi dan teknologi tepat guna kepada Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian sebagai bahan materi penyuluhan.

3. **Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian**, mempunyai tugas:

- a. Menyusun program penyuluhan tingkat nasional untuk mendukung pencapaian target produksi padi yang ditetapkan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan;

- b. Menyusun dan menyebarluaskan informasi teknologi tepat guna dan teknologi spesifik lokasi yang direkomendasikan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
 - c. Merumuskan dan melaksanakan penyuluhan melalui media cetak dan media elektronik;
 - d. Meningkatkan kompetensi penyuluh melalui pendidikan, pelatihan dan permagangan dalam bidang teknis dan kewirausahaan agribisnis padi;
 - e. Merumuskan dan merencanakan kebutuhan tenaga penyuluh dan anggaran penyuluhan dalam mendukung peningkatan produksi padi;
 - f. Memfasilitasi pemberian penghargaan kepada penyuluh dan petani berprestasi yang berhasil dalam peningkatan produksi padi tingkat nasional;
 - g. Merumuskan perencanaan penyelenggaraan pelatihan pemandu lapang 1 (provinsi), pemandu lapang 2 (kabupaten/kota), dan pemandu lapang di unit SL-PTT.
4. **Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian**, mempunyai tugas:
- a. Menyediakan penambahan luas baku lahan padi melalui cetak sawah dan meningkatkan optimalisasi lahan;

- b. Menyediakan data iklim termasuk data banjir dan kekeringan serta informasi ketersediaan air;
- c. Meningkatkan indeks pertanaman (IP) padi melalui pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi (JITUT/JIDES), tata air mikro (TAM), embung dan pompanisasi serta pembinaan perkumpulan petani pemakai air (P3A);
- d. Memfasilitasi pengawasan dan jaminan ketersediaan pupuk berbantuan dan pestisida sesuai prinsip 6 Tepat (jumlah, waktu, dosis, harga, lokasi, dan mutu) pada Sentra Produksi Padi;
- e. Menyediakan sarana produksi pupuk organik untuk rehabilitasi lahan sawah;
- f. Fasilitasi aksesibilitas pembiayaan untuk usahatani padi.

B. TIM PEMBINA P2BN

Dalam rangka meningkatkan koordinasi dan sinergitas antar Dinas Teknis yang membidangi tanaman pangan, Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan/kelembagaan yang membidangi penyuluhan dan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian. Gubernur membentuk Tim Pembina Provinsi untuk mendukung program P2BN dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Penanggungjawab : Gubernur
Ketua : Kepala Dinas Teknis yang membidangi tanaman pangan

Sekretaris : Kepala Sub Dinas/Bidang yang membidangi Produksi Padi

Anggota :

1. Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian
2. Kepala Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan/kelembagaan yang membidangi penyuluhan
3. Kepala UPT Pelatihan Pusat/Kepala UPT Pelatihan Daerah
4. Instansi Terkait Lainnya sesuai kebutuhan

Tim Pembina mempunyai tugas utama :

1. Merumuskan program dan rencana kerja peningkatan produksi padi tingkat provinsi;
2. Merumuskan kegiatan pengkajian dan mengidentifikasi spesifik lokasi mendukung P2BN tingkat provinsi;
3. Merumuskan program penyuluhan mendukung P2BN tingkat provinsi;
4. Merumuskan program prasarana dan sarana mendukung P2BN tingkat provinsi;
5. Menyusun matrik program/kegiatan peningkatan produksi beras tingkat provinsi.

Dalam menyelenggarakan tugas utamanya sebagaimana tersebut di atas, Tim Pembina dibantu oleh Sekretariat, yang berkedudukan di Dinas yang menanganai tanaman pangan cq. Sub Dinas/Bidang yang menanganai produksi padi. Susunan anggota dalam Sekretariat Tim Pembina, terdiri dari :

Ketua : Kepala Sub Dinas/Bidang yang membidangi Produksi Padi

Anggota :

1. Kepala Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan, Bakorluh/Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan (BKPP)
2. Kepala Bidang/Unit Kerja yang membidangi Penyelenggaraan Pelatihan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelatihan Pusat/UPT Pelatihan Daerah
3. Kepala Sub Dinas/Bidang yang menanganai Sarana dan Prasarana Pertanian;
4. Kepala Seksi Kerjasama dan Sarana Pelayanan Pengkajian, Badan Pengkajian dan Teknologi Pertanian (BPTP)
5. Unit kerja terkait lainnya sesuai kebutuhan.



Sekretariat Tim Pembina, mempunyai tugas:

1. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan Tim Pembina
2. Mengumpulkan data indikatif dan definitif dalam rangka perencanaan peningkatan produksi padi;
3. Membangun database yang terkait dengan peningkatan produksi padi;
4. Memfasilitasi pelaksanaan rapat koordinasi Tim Pembina Provinsi;
5. Menjabarkan pelaksanaan matrik program/kegiatan P2BN;
6. Mengkompilasi dan mengolah laporan dari kabupaten/kota tentang pelaksanaan peningkatan produksi padi;
7. Menyiapkan laporan Tim Pembina Provinsi mengenai perkembangan pelaksanaan peningkatan produksi padi.

Sedangkan rincian tugas dari masing-masing instansi terkait dalam Tim Pembina Provinsi, sebagai berikut:

1. **Dinas yang membidangi Tanaman Pangan,** mempunyai tugas:
 - a. Merumuskan, merencanakan dan menetapkan target produksi padi tingkat provinsi;
 - b. Mengkoordinasikan dan menyusun rencana kebutuhan sarana produksi dan prasarana kebutuhan untuk mencapai target produksi padi tingkat provinsi;

- c. Menetapkan sentra produksi padi berdasarkan luas areal, luas tanam dan luas panen tingkat provinsi;
- d. Melaksanakan pemantauan pengawalan pupuk bersubsidi dan pestisida sesuai prinsip 6 tepat;
- e. Mengusulkan kebutuhan teknologi spesifik lokasi tingkat provinsi;
- f. Mengusulkan kebutuhan penyuluh pada lokasi Sentra Produksi Padi tingkat provinsi;
- g. Mengusulkan dan menetapkan calon petani/calon lokasi SL-PTT yang diusulkan kabupaten/kota;
- h. Meningkatkan indeks pertanaman (IP) padi melalui pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi (JITUT/JIDES), tata air mikro (TAM), embung dan pompanisasi serta pembinaan terhadap perkumpulan petani pemakai air (P3A) tingkat provinsi;
- i. Mengusulkan kebutuhan anggaran khusus Dinas/ Instansi yang menangani peningkatan produksi padi tingkat provinsi.

2. **Balai Pengkajian Teknologi Pertanian,** mempunyai tugas :

- a. Menyediakan rekomendasi teknologi spesifik lokasi sesuai usulan Dinas Teknis yang membidangi tanaman pangan;
- b. Menyediakan kalender dan pola tanam menurut lokasi sentra produksi padi;

- c. Menyediakan informasi dan teknologi adaptasi terhadap perubahan iklim;
 - d. Merancang dan menyediakan benih untuk display dan uji adaptasi varietas serta merekomendasikan penggunaan varietas unggul spesifik lokasi;
 - e. Menempatkan peneliti di paling lambat kabupaten/kota untuk mengawal penerapan teknologi rekomendasi spesifik lokasi;
 - f. Menyediakan publikasi dan menyampaikan teknologi tepat guna kepada Sekretariat Bakorluh/Bapeluh sebagai bahan materi penyuluhan;
3. **Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan**, mempunyai tugas:
- a. Menyusun program penyuluhan provinsi untuk mendukung pencapaian target produksi padi, yang telah ditetapkan oleh Dinas yang membidangi tanaman pangan;
 - b. Merumuskan kebutuhan materi penyuluhan dan menyebarluaskan informasi teknologi tepat guna yang direkomendasikan oleh Balai Pengkajian Teknologi Pertanian;
 - c. Melaksanakan penyuluhan melalui media cetak dan media elektronik;
 - d. Merumuskan dan merencanakan kebutuhan tenaga penyuluh lapangan, pemandu lapang (PL 2), dan pemandu lapang (PL 1) sesuai dengan kebutuhan dalam mendukung peningkatan produksi

padi berdasarkan usulan Dinas Teknis yang membidangi Tanaman Pangan;

- e. Melakukan seleksi calon penerima penghargaan bagi penyuluh dan petani berprestasi yang berhasil dalam peningkatan produksi padi tingkat nasional;
4. **UPT Pelatihan Pusat/ UPT Pelatihan Daerah**, mempunyai tugas:
- a. Merumuskan dan menyusun kebutuhan pelatihan bagi penyuluh, petugas POPT, pengawas mutu benih, petugas pertanian lainnya dan petani dalam mendukung peningkatan produksi padi di tingkat provinsi;
 - b. Meningkatkan kompetensi penyuluh, petugas POPT, pengawas mutu benih, petugas pertanian lainnya dan petani melalui pendidikan, pelatihan dan permagangan dalam bidang teknis dan kewirausahaan agribisnis padi;
 - c. Melaksanakan pelatihan pemandu lapang (PL 1 dan PL 2) sesuai kebutuhan yang diusulkan oleh dinas teknis yang membidangi tanaman pangan;
 - d. Meningkatkan kompetensi teknis dan profesionalisme widyaiswara dalam rangka peningkatan kapasitas penyuluh, petugas POPT, pengawas mutu benih, petugas pertanian lainnya dan petani untuk Program P2BN.

C. TIM PELAKSANA P2BN TINGKAT KABUPATEN/KOTA

Dalam rangka meningkatkan koordinasi dan sinergitas antar Dinas Teknis yang membidangi tanaman pangan, Badan Pelaksana Penyuluhan/ Kelembagaan yang membidangi penyuluhan dan Peneliti Pendamping pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian. Bupati/ Walikota membentuk Tim Pelaksana Kabupaten/ Kota untuk mendukung program P2BN dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

- Penanggungjawab : Bupati/Walikota
- Ketua : Kepala Dinas Teknis yang membidangi tanaman pangan
- Sekretaris : Kepala Sub Dinas yang membidangi Produksi Padi
- Anggota :
1. Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan
 2. Kepala Sub Dinas/ Bidang yang menangani sarana dan prasarana
 3. Peneliti Pendamping pada BPTP
 4. Instansi Terkait Lainnya sesuai kebutuhan

Tim Pelaksana kabupaten/kota mempunyai tugas utama :

1. Menyusun rencana kerja peningkatan produksi padi tingkat Kabupaten/Kota;
2. Mendampingi/ mengawal penerapan rekomendasi teknologi spesifik lokasi di lokasi P2BN tingkat kabupaten/kota;
3. Menyusun program penyuluhan mendukung P2BN tingkat kabupaten/kota;
4. Menyediakan kebutuhan prasarana dan sarana mendukung P2BN tingkat kabupaten/ kota;
5. Menindaklanjuti matrik program/kegiatan P2BN yang telah disusun oleh tim provinsi.

Dalam menyelenggarakan tugas utamanya sebagaimana tersebut di atas, Tim Pelaksana P2BN Tingkat Kabupaten/Kota dibantu oleh Sekretariat, yang berkedudukan di Dinas yang membidangi tanaman pangan cq. Sub Dinas/Bidang yang membidangi produksi padi. Susunan keanggotaan dalam Sekretariat Tim Pelaksana P2BN Tingkat Kabupaten/Kota, terdiri dari :

- Ketua : Kepala Sub Dinas yang membidangi Produksi Padi
- Anggota :
1. Kepala Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan, Bapelluh
 2. Kepala Sub Dinas/Bidang Perlindungan Tanaman Pangan

3. Kepala Sub Dinas/Bidang yang Menangani Pasca Panen Tanaman Pangan

4. Unit Kerja terkait lainnya sesuai kebutuhan

Sekretariat Tim Pelaksana, mempunyai tugas:

1. Melaksanakan administrasi kesekretariatan tim pelaksana;
2. Menyiapkan data indikatif dan definitif dalam rangka perencanaan peningkatan produksi padi;
3. Membangun database yang terkait dengan peningkatan produksi padi;
4. Memfasilitasi pelaksanaan rapat koordinasi Tim Pelaksana Kabupaten/Kota;
5. Melaksanakan program/kegiatan berdasarkan matrik program/kegiatan;
6. Menyiapkan bahan laporan tentang pelaksanaan peningkatan produksi padi;
7. Menyusun laporan Tim Pelaksana Kabupaten/Kota.

Sedangkan rincian tugas dari masing-masing pihak terkait dalam Tim Pelaksana P2BN Kabupaten/ Kota, sebagai berikut:

1. **Dinas Teknis yang membidangi Tanaman Pangan** mempunyai tugas:
 - a. Merencanakan dan menetapkan target produksi padi tingkat Kabupaten/Kota;

25

- b. Menetapkan kebutuhan sarana produksi untuk mencapai target produksi padi tingkat Kabupaten/Kota;
- c. Mengidentifikasi dan menetapkan sentra produksi padi berdasarkan luas areal, luas tanam dan luas panen;
- d. Menerapkan rekomendasi teknologo spesifik lokasi
- e. Meningkatkan optimalisasi lahan dan melaksanakan pencetakan sawah;
- f. Membangun dan memelihara jaringan irigasi (JITUT/JIDES/TAM), embung dan pompanisasi serta meningkatkan peranan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) untuk meningkatkan indeks pertanaman (IP) padi;
- g. Memfasilitasi penyediaan benih, pupuk organik dan anorganik bersubsidi serta pestisida sesuai prinsip 6 Tepat (waktu, tempat, jumlah, dosis, harga, kualitas);
- h. Merencanakan pengalokasian penempatan petugas POPT dan pengawas mutu benih pada lokasi sentra produksi padi;
- i. Fasilitasi aksesibilitas sumber permodalan dalam rangka mendukung peningkatan produksi padi;
- j. Menyiapkan kebutuhan anggaran untuk mendukung peningkatan produksi padi.

2. **Peneliti Pendamping dari BPTP** mempunyai tugas:

26

- a. Merancang dan menyediakan benih untuk display dan uji adaptasi varietas serta merekomendasikan penggunaan varietas unggul spesifik lokasi
 - b. Mengawal Penerapan teknologi spesifik lokasi dan penerapan kalender pola tanam;
 - c. Menjadi narasumber pelatihan pemandu lapangan SL-PTT;
 - d. Menyebarkan publikasi, bahan cetakan dan elektronik untuk bahan penyuluhan;
 - e. Mengidentifikasi masalah dan memberikan saran pemecahan masalah dalam penerapan teknologi;
 - f. Menyampaikan teknologi tepat guna melalui Badan Pelaksana Penyuluhan/Kelembagaan yang membidangi Penyuluhan di Kabupaten/Kota sebagai bahan materi penyuluhan pertanian.
3. **Badan Pelaksana Penyuluhan** mempunyai tugas:
- a. Menyusun program penyuluhan Kabupaten/Kota untuk mendukung pencapaian target produksi padi yang telah ditetapkan oleh Dinas Teknis yang membidangi Tanaman Pangan;
 - b. Menyusun materi penyuluhan dan menyebarluaskan teknologi spesifik lokasi yang direkomendasikan oleh Balai Pengkajian Teknologi Pertanian;

- c. Menyusun pengalokasian penugasan penyuluh pertanian berdasarkan lokasi SL-PTT dan sentra produksi padi;
- d. Melaksanakan penyuluhan melalui media cetak dan media elektronik;
- e. Meningkatkan kapasitas dan kinerja penyuluh melalui pelatihan di BPP dalam rangka peningkatan produksi padi;
- f. Menetapkan lokasi Demplot, Denfram, dan Demarea serta SLPTT berdasarkan usulan dari BPP/BP3K
- g. Merencanakan dan melaksanakan rebug/forum pertemuan petani, temu teknis dan temu tugas
- h. Melakukan seleksi dan mengusulkan calon penerima penghargaan bagi penyuluh dan petani berprestasi yang berhasil dalam peningkatan produksi padi tingkat kabupaten/kota.

D. TIM PELAKSANA P2BN TINGKAT KECAMATAN

Dalam rangka meningkatkan koordinasi dan keterpaduan pelaksanaan program/kegiatan di wilayah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota membentuk Tim Pelaksana P2BN tingkat Kecamatan, dengan susunan organisasi sebagai berikut:

Penanggungjawab : Camat
Ketua : Kepala UPT/UPTD Pertanian
Sekretaris : Kepala Balai Penyuluhan Kecamatan

Anggota

:

1. Kepala Seksi yang membidangi pertanian di kantor kecamatan
2. Koordinator Penyuluh Pertanian di tingkat Kecamatan
3. Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan
4. Kepala Desa/Kelurahan sentra produksi padi
5. Penyuluh Pertanian di desa sentra produksi padi.
6. Petugas Pertanian lainnya yang terkait.

Tim Pelaksana P2BN Tingkat Kecamatan mempunyai tugas utama :

1. Melaksanakan peningkatan produksi padi tingkat Kecamatan sesuai dengan target dan rencana kerja yang ditetapkan;
2. Menerapkan rekomendasi teknologi spesifik lokasi;
3. Melaksanakan program penyuluhan tingkat Kecamatan;
4. Mengkoordinasikan pemanfaatan prasarana dan sarana yang ada secara efektif dan efisien tingkat Kecamatan.

Dalam menyelenggarakan tugas utamanya sebagaimana tersebut di atas, Tim Pelaksana P2BN Tingkat Kecamatan dibantu oleh Sekretariat, yang berkedudukan di Balai/Kantor yang membidangi

penyuluhan pertanian. Susunan keanggotaan dalam Sekretariat Tim Pelaksana P2BN Tingkat Kecamatan, terdiri dari :

Secara rinci tugas masing-masing unit kerja dalam Tim Pelaksana P2BN Tingkat Kecamatan, sebagai berikut:

1. **Kepala UPTD/ UPT Pertanian**, mempunyai tugas:
 - a. Menetapkan sasaran areal luas tanam;
 - b. Mengkompilasi usulan RDK dan RDKK dari kelompok tani;
 - c. Mengkoordinasikan pengawasan peredaran benih, pupuk, pestisida, dan alsintan di tingkat kecamatan;
 - d. Menggerakkan kegiatan penanaman padi pada lokasi sentra produksi padi di tingkat kecamatan;
 - e. Menghitung luas areal panen padi;
 - f. Mendampingi Mantri Statistik dalam perhitungan hasil perhektar.
2. **Balai Penyuluhan/Koordinator Penyuluh Tingkat Kecamatan**, mempunyai tugas:
 - a. Merencanakan kegiatan pendampingan penerapan teknologi spesifik lokasi dan penerapan kalender pola tanam;
 - b. Menyusun program penyuluhan Kecamatan untuk mendukung pencapaian target produksi padi yang telah ditetapkan

- oleh Dinas Teknis yang membidangi Tanaman Pangan;
- c. Menyebarluaskan informasi teknologi spesifik lokasi yang direkomendasikan oleh peneliti pendamping kepada petani pada sentra produksi padi;
 - d. Mengawasi penyuluh pendamping pada sentra produksi padi;
 - e. Menyediakan dan menyebarluaskan informasi agribisnis di tingkat kecamatan;
 - f. Melaksanakan sistem latihan dan kunjungan (LAKU) dalam rangka peningkatan kapasitas penyuluh dan petani;
 - g. Melaksanakan Demplot, Demarea dan SL-PTT sebagai unit pembelajaran petani dalam rangka peningkatan produksi padi;
 - h. Melaksanakan forum penyuluhan tingkat desa dan temu lapang antara petani, penyuluh, dan peneliti pendamping di tingkat kecamatan.
3. **Petugas POPT**, mempunyai tugas :
- a. Merencanakan, melaksanakan, menyiapkan, mengevaluasi, membimbing, mengembangkan, melaporkan, mengamati, menganalisis, meramalkan dan mengendalikan organisme pengganggu tumbuhan serta melakukan pengawasan peredaran dan penggunaan pupuk serta pestisida;

- b. Perencanaan, penyiapan dan pelaksanaan pengamatan serangan organisme pengganggu tumbuhan dan dampak perubahan iklim;
- c. Perencanaan, penyiapan dan pelaksanaan pengendalian/penanggulangan organisme pengganggu tumbuhan dan dampak perubahan iklim;
- d. Analisis dan evaluasi perkembangan serangan organisme pengganggu tumbuhan dan dampak perubahan iklim;
- e. Bimbingan dan pendampingan dalam pengendalian/penanggulangan organisme pengganggu tumbuhan dan dampak perubahan iklim;
- f. Pendampingan penyusunan RDK/RDKK di tingkat kelompok tani (khususnya yang berhubungan dengan organisme pengganggu tumbuhan dan dampak perubahan iklim);
- g. Pengawasan rekomendasi penggunaan pupuk dan pestisida di tingkat petani;
- h. Pelaporan hasil pengamatan serangan organisme pengganggu tumbuhan dan dampak perubahan iklim dan hasil monitoring peredaran dan penggunaan pupuk dan pestisida.

4. **Kepala Desa/Kelurahan**, mempunyai tugas :

- a. Memfasilitasi pelaksanaan musyawarah/rembug desa antara penyuluh, petani, kepala UPT/UPTD Pertanian kecamatan, dalam rangka

- penyiapan CP/CL, penyusunan RDK dan RDKK di tingkat desa/kelurahan,
- b. Menggerakkan masyarakat untuk melakukan pemeliharaan jaringan irigasi desa (JIDES) dan jaringan irigasi usahatani (JITUT) serta pengaturan jadwal pembagian dan pergiliran penggunaan air irigasi di tingkat desa/kelurahan;
 - c. Menggerakkan masyarakat desa dalam pengendalian organisme pengganggu tumbuhan;
 - d. Memfasilitasi penumbuhan pos penyuluhan desa/kelurahan.
5. **Penyuluh Pertanian di tingkat desa**, mempunyai tugas :
- a. Mendampingi petani dalam penyusunan RDK dan RDKK;
 - b. Membimbing penerapan teknologi spesifik lokasi sesuai dengan pola tanam dan pola usahatani;
 - c. Memfasilitasi petani dalam mengakses sarana produksi, permodalan, dan informasi pasar;
 - d. Memberi umpan balik penerapan teknologi spesifik lokasi yang dibutuhkan petani untuk disalurkan kepada peneliti pendamping;
 - e. Melaksanakan rembug desa di posluhdes dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang dihadapi petani pada lokasi sentra produksi padi;

- f. Memfasilitasi para petani untuk menumbuhkembangkan kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani;

BAB III

MEKANISME DAN TATA HUBUNGAN KERJA TIM PENGENDALI, TIM PEMBINA DAN TIM PELAKSANA

Dalam upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan P2BN, baik di pusat maupun di daerah, diperlukan mekanisme dan tata hubungan kerja antara Tim Pengendali, Tim Pembina, dan Tim Pelaksana, sebagai berikut:

A. MEKANISME KERJA

1. Tim Pengendali

- a. Mekanisme kerja pengendalian dilakukan oleh tim pengendali pusat melalui rapat koordinasi perencanaan dengan Tim Pembina dan Tim Pelaksana paling kurang satu kali dalam setahun. Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh Penanggungjawab, Ketua Harian, dan Anggota Tim Pengendali, Tim Pembina, dan Tim Pelaksana.

b. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi bertujuan:

- 1) perumusan kebijakan dan strategi Peningkatan Produksi Beras Nasional;
- 2) perumusan program dan rencana kerja Peningkatan Produksi Beras Nasional;

- 3) perumusan kegiatan dan anggaran Peningkatan Produksi Beras Nasional;
 - 4) penyusunan matrik program peningkatan produksi padi, penelitian dan pengembangan, penyuluhan, serta sarana dan prasarana pertanian tingkat nasional.
- c. Tim Pengendali melaksanakan rapat teknis Tim Pengendali paling kurang sekali dalam setahun untuk menyiapkan bahan rapat koordinasi antara Tim Pengendali dengan Tim Pembina dan Tim Pelaksana.
- d. Sebagai tindak lanjut dari rapat koordinasi dengan Tim Pembina dan Tim Pelaksana, Tim Pengendali melaksanakan rapat teknis paling kurang dua kali dalam setahun untuk menyusun matrik program sesuai dengan bidang tugas masing-masing, yang mencakup:
- 1) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan menyusun program dan rencana kerja peningkatan produksi padi tingkat nasional;
 - 2) Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian menyusun program dukungan penelitian dan pengembangan terhadap peningkatan produksi padi tingkat nasional;

- 3) Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian menyusun program dukungan Pengawasan dan Pendampingan Penyuluh di lokasi SLPTT dan sentra produksi padi;
 - 4) Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian menyusun program dukungan prasarana dan sarana terhadap peningkatan produksi padi tingkat nasional;
- e. Tim Pengendali dibantu oleh Sekretariat Tim melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan peningkatan produksi beras tingkat nasional, yang meliputi realisasi:
- 1) program peningkatan produksi padi tingkat nasional;
 - 2) penyediaan dan penyaluran sarana produksi padi tingkat nasional;
 - 3) penerapan rekomendasi teknologi spesifik lokasi tingkat nasional;
 - 4) pelaksanaan pengawasan dan pendampingan penyuluh di lokasi SLPTT dan sentra produksi padi;
- f. Sebagai tindak lanjut dari hasil pemantauan, Tim Pengendali melaksanakan rapat evaluasi paling kurang dua kali dalam setahun untuk:
- 1) Membahas pencapaian target dan realiasi produksi beras tingkat nasional;
 - 2) Mengidentifikasi permasalahan dalam pencapaian target peningkatan produksi beras tingkat nasional;

- 3) Merumuskan rencana tindak lanjut penyelesaian masalah sesuai dengan matrik program instansi terkait;
- 4) Melaporkan perkembangan pencapaian peningkatan produksi beras nasional kepada Menteri Pertanian.

2. Tim Pembina

- a. Mekanisme kerja pembinaan dilakukan oleh Tim Pembina melalui rapat teknis Tim Pembina paling kurang satu kali dalam setahun untuk menyiapkan bahan rapat koordinasi dengan Tim Pengendali.
- b. Sebagai tindak lanjut dari rapat koordinasi dengan Tim Pengendali, Tim Pembina dan Tim Pelaksana, Tim Pembina melaksanakan rapat teknis paling kurang dua kali dalam setahun untuk menyiapkan bahan rapat koordinasi antara Tim Pembina dengan Tim Pelaksana pada tingkat provinsi.
- c. Sebagai tindak lanjut dari rapat koordinasi Tim Pembina dengan Tim Pelaksana, Ketua Harian Tim Pembina melaksanakan rapat teknis paling kurang dua kali dalam setahun untuk menyusun matrik program tingkat provinsi sesuai dengan bidang tugas masing-masing, yang mencakup:
 - 1) Dinas Teknis yang membidangi tanaman pangan menyusun program dan rencana kerja peningkatan produksi padi dan dukungan prasarana dan sarana pertanian tingkat provinsi;

- 2) Balai Pengkajian Teknologi Pertanian menyusun program dukungan penelitian dan pengembangan terhadap peningkatan produksi padi tingkat provinsi;
 - 3) Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan/Kelembagaan yang membidangi penyuluhan menyusun program dukungan Pengawasan dan Pendampingan Penyuluh di lokasi SLPTT dan sentra produksi padi tingkat provinsi.
- d. Tim Pembina dibantu oleh Sekretariat Tim melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan peningkatan produksi beras tingkat provinsi, yang meliputi realisasi:
 - 1) Program peningkatan produksi padi tingkat provinsi;
 - 2) Penyediaan dan penyaluran sarana produksi padi tingkat provinsi;
 - 3) Penerapan rekomendasi teknologi spesifik lokasi tingkat provinsi;
 - 4) Pelaksanaan pengawasan dan pendampingan penyuluh di lokasi SLPTT dan sentra produksi padi tingkat provinsi.
 - e. Sebagai tindak lanjut dari hasil pemantauan, Tim Pembina melaksanakan rapat evaluasi paling kurang dua kali dalam setahun untuk:
 - 1) Membahas pencapaian target dan realiasi produksi beras tingkat provinsi;

- 2) Mengidentifikasi permasalahan dalam pencapaian target peningkatan produksi beras tingkat provinsi;
- 3) Merumuskan rencana tindak lanjut penyelesaian masalah sesuai dengan matrik program instansi terkait;
- 4) Melaporkan perkembangan pencapaian peningkatan produksi beras nasional kepada Gubernur.

3. Tim Pelaksana Kabupaten/Kota

- a. Mekanisme kerja pelaksanaan Tim Pelaksana Kabupaten/Kota dilakukan melalui Rapat Teknis Tim Pelaksana paling kurang dua kali dalam setahun untuk menyiapkan bahan rapat koordinasi dengan Tim Pengendali dan bahan rapat koordinasi dengan Tim Pembina.
- b. Sebagai tindak lanjut dari rapat koordinasi dengan Tim Pengendali di Pusat dan Tim Pembina di provinsi, Tim Pelaksana Kabupaten/Kota melaksanakan rapat teknis Tim Pelaksana paling kurang dua kali dalam setahun untuk menyiapkan bahan rapat koordinasi antara Tim Pelaksana Kabupaten/Kota dengan Tim Pelaksana Kecamatan.
- c. Sebagai tindak lanjut dari rapat koordinasi Tim Pelaksana Kabupaten/Kota dengan Tim Pelaksana Kecamatan, Tim Pelaksana Kabupaten/Kota melaksanakan rapat teknis paling kurang dua kali dalam setahun untuk menyusun matrik program tingkat

kabupaten/kota sesuai dengan bidang tugas masing-masing, yang mencakup:

- 1) Dinas Teknis yang membidangi Tanaman Pangan menyusun program dan rencana kerja peningkatan produksi padi dan dukungan prasarana dan sarana pertanian tingkat kabupaten/kota;
- 2) Peneliti Pendamping menyusun rekomendasi teknologi spesifik lokasi terhadap peningkatan produksi padi tingkat kabupaten/kota;
- 3) Badan Pelaksana Penyuluhan/Kelembagaan yang membidangi penyuluhan menyusun program dukungan Pengawasan dan Pendampingan Penyuluh di lokasi SLPTT dan sentra produksi padi tingkat kabupaten/kota.
- d. Tim Pelaksana Kabupaten/Kota dibantu oleh Sekretariat Tim melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan peningkatan produksi beras tingkat kabupaten/kota, yang meliputi realisasi:
 - 1) Program peningkatan produksi padi tingkat kabupaten/kota;
 - 2) Penyediaan dan penyaluran sarana produksi padi tingkat kabupaten/kota;
 - 3) Penerapan rekomendasi teknologi spesifik lokasi tingkat kabupaten/kota;
 - 4) Pelaksanaan pengawasan dan pendampingan penyuluh di lokasi SLPTT

dan sentra produksi padi tingkat kabupaten/kota.

e. Sebagai tindak lanjut dari hasil pemantauan, Tim Pelaksana kabupaten/kota melaksanakan rapat evaluasi paling kurang dua kali dalam setahun untuk:

- 1) Membahas pencapaian target dan realiasi produksi beras tingkat kabupaten/kota;
- 2) Mengidentifikasi permasalahan dalam pencapaian target peningkatan produksi beras tingkat kabupaten/kota;
- 3) Merumuskan rencana tindak lanjut penyelesaian masalah sesuai dengan matrik program instansi terkait;
- 4) Melaporkan perkembangan pencapaian peningkatan produksi beras nasional kepada Bupati/Walikota.

4. Tim Pelaksana Kecamatan

a. Sebagai tindak lanjut dari rapat koordinasi dengan Tim Pelaksana Kabupaten/Kota, Tim Pelaksana Kecamatan melaksanakan rapat teknis paling kurang empat kali dalam setahun untuk menyusun matrik kegiatan tingkat Kecamatan, yang mencakup:

- 1) Kepala UPT/UPTD Pertanian kecamatan menyusun rencana kegiatan peningkatan produksi padi dan pengawasan peredaran dan mutu sarana produksi tingkat kecamatan;

2) Dukungan peneliti pendamping dalam penerapan rekomendasi teknologi spesifik lokasi tingkat kecamatan;

3) Dukungan Pengamat Organisme Pengganggu Tanaman dalam pengendalian ekspansi hama dan penyakit;

4) Dukungan Balai Penyuluhan di tingkat Kecamatan dalam Pengawasan dan Pendampingan Penyuluh di lokasi SLPTT dan sentra produksi padi tingkat kecamatan.

b. Tim Pelaksana Kecamatan melakukan pemantauan dan tindak lanjut pelaksanaan peningkatan produksi beras tingkat kecamatan, yang meliputi realisasi:

1) Kegiatan peningkatan produksi padi tingkat Kecamatan, yang meliputi areal luas tanam dan luas panen, ;

2) Penyediaan dan penyaluran kebutuhan sarana produksi (pupuk, benih, dan pestisida) padi tingkat Kecamatan;

3) Penerapan rekomendasi teknologi spesifik lokasi tingkat Kecamatan;

4) Serangan hama dan penyakit tingkat kecamatan;

5) Pelaksanaan pengawasan dan pendampingan penyuluh di lokasi sentra produksi padi tingkat Kecamatan;

- 6) Identifikasi permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target peningkatan produksi beras tingkat kecamatan;
 - 7) Pelaksanaan tindak lanjut penyelesaian masalah sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
 - 8) Melaporkan perkembangan pencapaian peningkatan produksi beras nasional kepada Camat.
- c. Khusus untuk permasalahan yang dihadapi oleh Tim Pelaksana Kecamatan di luar kewenangannya, Tim Pelaksana Kecamatan melakukan rapat teknis untuk:
- 1) Mengidentifikasi permasalahan yang berkaitan dengan ketersediaan sarana produksi, jaringan irigasi dan bencana alam;
 - 2) Menyusun usulan pemecahan masalah untuk disampaikan kepada instansi/lembaga terkait.

B. TATA HUBUNGAN KERJA

1. Tim Pengendali dengan Tim Pembina

- a. Hubungan Tim Pengendali dengan Tim Pembina adalah hubungan koordinasi pengendalian P2BN dalam rangka perumusan dan sinkronisasi program dan rencana kerja penelitian dan pengembangan, penyuluhan, prasarana dan sarana mendukung P2BN;
- b. Dalam penyelenggaraan hubungan koordinasi pengendalian P2BN, Tim Pengendali melaksanakan koordinasi dan komunikasi

dua arah dengan Tim Pembina, dengan tujuan:

- 1) Memantau pelaksanaan pencapaian target produksi beras pada tingkat provinsi;
- 2) Memantau penyaluran sarana produksi pada tingkat provinsi;
- 3) Memantau penerapan rekomendasi teknologi spesifik lokasi;
- 4) Memantau pelaksanaan pendampingan penyuluh dalam penerapan teknologi di tingkat petani.

c. Dalam keadaan khusus, Tim Pengendali bersama Tim Pembina dapat melaksanakan koordinasi dan komunikasi dua arah dengan Tim Pelaksana, dengan tujuan untuk:

- 1) Memantau terjadinya eksplosi organisme pengganggu tanaman yang berpengaruh terhadap penurunan produksi secara nyata;
- 2) Memantau terjadinya bencana alam (banjir, kekeringan, gempa bumi) yang menyebabkan terjadinya puso;

2. Tim Pembina dengan Tim Pelaksana

- a. Hubungan Tim Pembina dengan Tim Pelaksana adalah hubungan koordinasi pembinaan P2BN dalam rangka perumusan program dan rencana kerja penelitian dan pengembangan, penyuluhan, prasarana dan sarana mendukung P2BN;

b. Dalam penyelenggaraan hubungan koordinasi pembinaan P2BN, Tim Pembina melaksanakan koordinasi dan komunikasi dua arah dengan Tim Pelaksana Kabupaten/Kota, dengan tujuan:

- 1) Memantau pelaksanaan pencapaian target produksi beras pada tingkat kabupaten/kota;
- 2) Memantau penyaluran sarana produksi pada tingkat kabupaten/kota;
- 3) Memantau penerapan rekomendasi teknologi spesifik lokasi pada tingkat kabupaten/kota;
- 4) Memantau pelaksanaan pendampingan penyuluh dalam penerapan teknologi di tingkat petani pada tingkat kabupaten/kota.

c. Dalam keadaan khusus, Tim Pembina bersama Tim Pelaksana Kabupaten/Kota dapat melaksanakan koordinasi dan komunikasi dua arah dengan Tim Pelaksana Kecamatan, dengan tujuan untuk:

- 1) Memantau terjadinya eksplosif organisme pengganggu tanaman yang berpengaruh terhadap penurunan produksi secara nyata pada tingkat kecamatan;
- 2) Memantau terjadinya bencana alam (banjir, kekeringan, gempa bumi) yang menyebabkan terjadinya puso pada tingkat kecamatan.

3. Tim Pelaksana Kabupaten/Kota dengan Tim Pelaksana Kecamatan

a. Hubungan Tim Pelaksana kabupaten/kota dengan Tim Pelaksana kecamatan adalah hubungan koordinasi pelaksanaan P2BN dalam rangka pelaksanaan rencana kerja peningkatan produksi, pelaksanaan program penyuluhan, pelaksanaan penyediaan prasarana dan sarana sesuai kebutuhan mendukung P2BN;

b. Dalam pelaksanaan Peningkatan Produksi Beras Nasional, Tim Pelaksana Kabupaten/Kota melaksanakan koordinasi dan komunikasi dua arah dengan Tim Pelaksana Kecamatan, dengan tujuan:

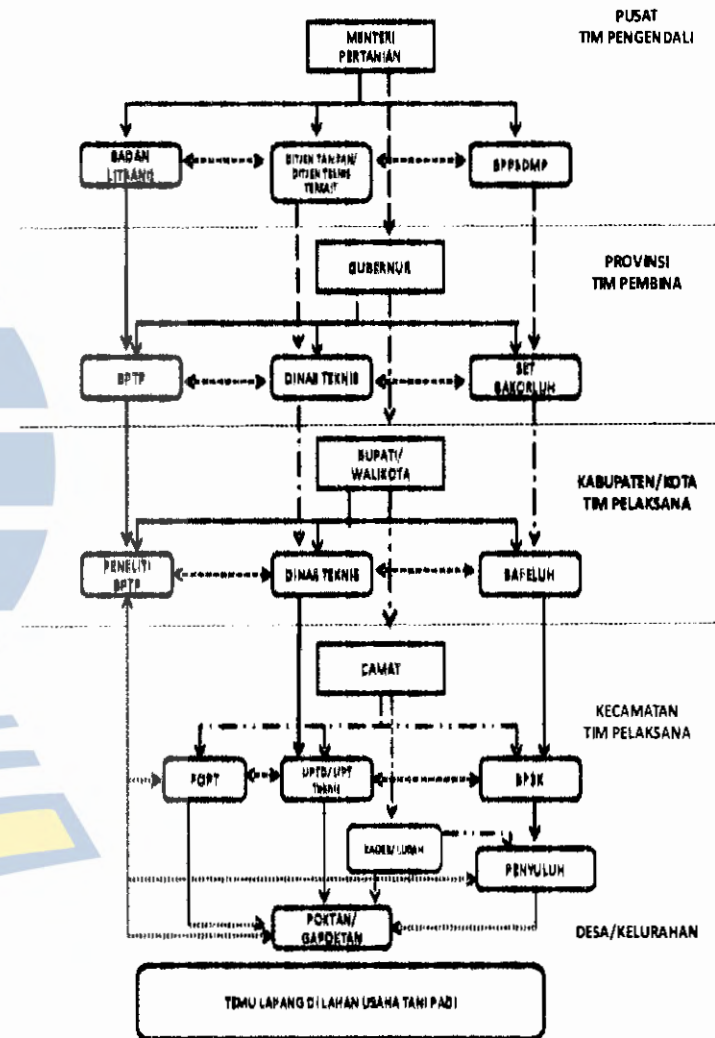
- 1) Memantau pelaksanaan pencapaian target produksi beras pada tingkat kecamatan;
- 2) Memantau penyaluran sarana produksi pada tingkat kecamatan;
- 3) Memantau penerapan rekomendasi teknologi spesifik lokasi pada tingkat kecamatan;
- 4) Memantau pelaksanaan pendampingan penyuluh dalam penerapan teknologi di tingkat petani pada tingkat kecamatan;
- 5) Memantau terjadinya eksplosif organisme pengganggu tanaman pada tingkat kecamatan;

6) Memantau terjadinya bencana alam (banjir, kekeringan, gempa bumi) yang menyebabkan terjadinya puso pada tingkat kecamatan.

4. Internal Tim Pengendali, Tim Pembina, dan Tim Pelaksana

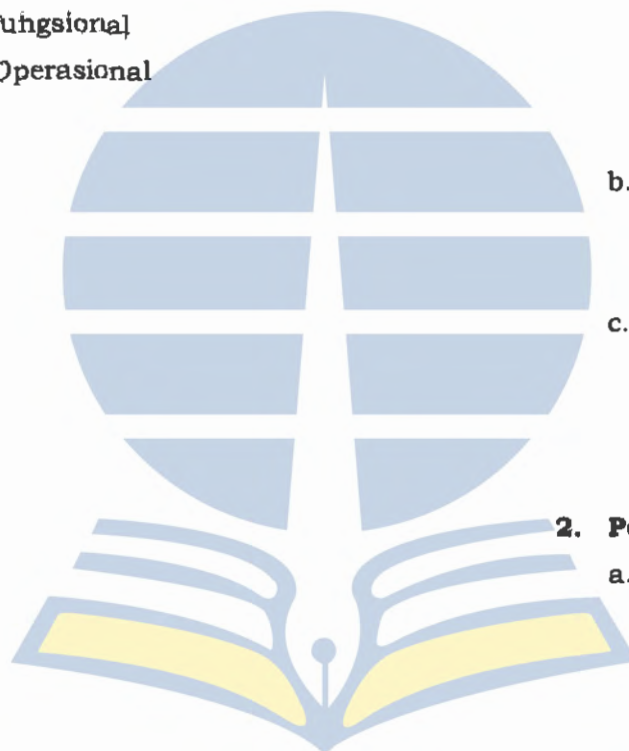
- a. Hubungan Kerja antara instansi eselon I lingkup pertanian dalam Tim Pengendali adalah hubungan koordinasi fungsional sesuai dengan tugas fungsinya masing masing dalam pelaksanaan program P2BN;
- b. Hubungan Kerja antar instansi teknis pertanian lingkup Pemerintah Provinsi dan UPT Teknis lingkup Kementerian Pertanian dalam Tim Pembina adalah hubungan kerja koordinatif fungsional sesuai dengan tugas fungsinya masing masing dalam pelaksanaan program P2BN;
- c. Hubungan Kerja antar instansi teknis pertanian lingkup Pemerintah Kabupaten/kota dan unsur peneliti pendamping dari BPTP dalam Tim Pelaksana Kabupaten/Kota adalah hubungan kerja koordinatif fungsional sesuai dengan tugas fungsinya masing masing dalam pelaksanaan program P2BN;

BAGAN TATA HUBUNGAN KERJA ANTARA TIM PENGE NDALI, TIM PEMBINA DAN TIM PELAKSANA



KETERANGAN:

1. _____ Alur Komando
2. _____ Alur Pengendalian
3. _____ Alur Pembinaan
4. _____ Alur Pelaksanaan
3. Alur Koordinasi [fungsional]
6. Alur Koordinasi Operasional

**BAB IV
PELAPORAN****A. Tingkat Kecamatan****1. Kepala UPT/UPTD Pertanian**

- a. Kepala UPT/UPTD Pertanian membuat laporan bulanan berdasarkan hasil pemantauan perkembangan pelaksanaan P2BN di tingkat kecamatan. Bentuk laporan bulanan Kepala UPT/UPTD seperti pada **Lampiran 1a, 1a.1, 1.a2, dan 1b**;
- b. Bahan laporan bulanan meliputi: lokasi, luas areal tanam, luas panen, produksi, dan produktifitas, dan kebutuhan sarana produksi berdasarkan RDK/RDKK ;
- c. Laporan bulanan disampaikan ke Camat selaku penanggungjawab program P2BN Kecamatan paling lambat tanggal 3, bulan berikutnya dengan tembusan kepada dinas teknis kabupaten/kota yang membidangi tanaman pangan .

2. Petugas POPT

- a. Petugas POPT membuat laporan bulanan hasil pengamatan tentang perkembangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) dan bencana alam pada lokasi sentra produksi padi. Bentuk laporan bulanan Petugas POPT seperti pada **Lampiran 2a, 2a1, 2a2 dan 2.a3**;

- b. Bahan laporan bulanan meliputi: intensitas dan luas serangan OPT, banjir dan kekeringan serta hasil analisis perkembangan OPT dan DPI;
- c. Laporan bulanan disampaikan ke Camat paling lambat tanggal 3, bulan berikutnya dengan tembusan dinas teknis kabupaten kota yang membidangi tanaman pangan.

3. Penyuluh Pertanian di Desa/Kelurahan

- a. Penyuluh membuat laporan bulanan tentang pendampingan dan pengawasan pelaksanaan penyuluhan di Desa/Kelurahan lokasi sentra produksi padi. Bentuk laporan bulanan Penyuluh Pertanian di Desa/Kelurahan seperti pada **Lampiran 3a dan 3b**;
- b. Bahan laporan bulanan meliputi: realisasi penyusunan RDK/RDCK, penerapan teknologi spesifik lokasi, kelembagaan petani, kelembagaan ekonomi petani dan petani yang mengakses sarana produksi permodalan dan informasi pasar, permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahan masalah di wilayah kerjanya;
- c. Laporan bulanan disampaikan ke Balai Penyuluhan Pertanian tingkat kecamatan paling lambat tanggal 1, bulan berikutnya.

4. Balai Penyuluhan Kecamatan

- a. Balai Penyuluhan Kecamatan membuat laporan bulanan perkembangan pelaksanaan penyuluhan berdasarkan laporan penyuluh pertanian di lokasi sentra produksi. Bentuk laporan bulanan Balai Penyuluhan

Kecamatan seperti pada **Lampiran 4a, 4a.1 dan 4b**;

- b. Bahan laporan bulanan meliputi: pelaksanaan program penyuluhan pertanian, pengawasan dan pendampingan teknologi, penyebaran informasi teknologi, pengawasan penyuluh pendamping, pelaksanaan LAKU, pelaksanaan rebug, forum, temu teknis, temu lapang, demplot dan demarea pada sentra produksi padi ;
- c. Laporan bulanan disampaikan ke Camat paling lambat tanggal 3, bulan berikutnya dengan tembusan ke Badan Pelaksana Penyuluhan/Kelembagaan yang membidangi penyuluhan.

5. Penanggungjawab Program P2BN Tingkat Kecamatan

- a. Laporan bulanan Camat selaku penanggungjawab program P2BN Kecamatan dirumuskan dan disusun oleh Tim Pelaksana Kecamatan. Bentuk laporan bulanan Program P2BN Kecamatan seperti pada **Lampiran 5**;
- b. Bahan laporan bulanan Tim Pelaksana Kecamatan, meliputi:
 - 1) lokasi dan luas areal, luas tanam, luas panen dan kebutuhan sarana produksi;
 - 2) intensitas dan luas serangan hama, banjir dan kekeringan, potensi serangan hama penyakit;

3) pelaksanaan penyuluhan pertanian, pengawalan dan pendampingan teknologi serta realisasi penerapan teknologi pada lokasi sentra produksi padi.

c. Laporan bulanan Tim Pelaksana Kecamatan disampaikan kepada Bupati/Walikota selaku penanggungjawab program P2BN Kabupaten/Kota paling lambat tanggal 5, bulan berikutnya dengan tembusan Dinas Teknis yang membidangi tanaman pangan dan Badan Pelaksana Penyuluhan/Kelembagaan yang membidangi penyuluhan.

B. Tingkat Kabupaten/Kota

1. Dinas Teknis yang membidangi Tanaman Pangan

a. Dinas Teknis yang membidangi Tanaman Pangan membuat laporan bulanan tentang perkembangan pelaksanaan P2BN kabupaten/kota berdasarkan laporan kepala UPT/UPTD dan Camat. Bentuk laporan bulanan Dinas Teknis yang membidangi Tanaman Pangan seperti pada **Lampiran 6a, 6a.1, 6a.2 dan 6b**;

b. Bahan laporan bulanan meliputi: lokasi, luas areal, luas tanam, luas panen dan kebutuhan sarana produksi, instensitas dan luas serangan hama dan penyakit serta potensi gangguan bencana alam lainnya;

c. Laporan bulanan disampaikan kepada Bupati/Walikota selaku penanggungjawab P2BN Kabupaten/Kota paling lambat tanggal

7 bulan berikutnya dengan tembusan kepada dinas teknis provinsi yang membidangi tanaman pangan.

2. Peneliti Pendamping

a. Peneliti Pendamping membuat laporan bulanan tentang dukungan penelitian dalam pelaksanaan P2BN di kabupaten/kota berdasarkan laporan dari tingkat kecamatan. Bentuk laporan bulanan peneliti pendamping seperti pada **Lampiran 7a**;

b. Bahan laporan bulanan meliputi : penerapan teknologi spesifik lokasi, kalender pola tanam, hasil uji adaptasi (display) varietas, penggunaan varietas unggul, penyebaran bahan publikasi dan umpan balik rekomendasi penerapan teknologi, permasalahan dan upaya pemecahannya pada lokasi sentra produksi padi di kabupaten/kota (**Lampiran 7b dan 7c**).

c. Laporan bulanan disampaikan kepada Bupati/Walikota selaku penanggungjawab P2BN Kabupaten/Kota paling lambat tanggal 7, bulan berikutnya dengan tembusan ke Balai Pengkajian Teknologi Pertanian.

3. Badan Pelaksana Penyuluhan

a. Badan Pelaksana Penyuluhan membuat laporan bulanan perkembangan pelaksanaan penyuluhan di kabupaten/kota berdasarkan laporan Balai Penyuluhan tingkat kecamatan. Bentuk laporan bulanan Badan Pelaksana Penyuluhan seperti pada **Lampiran 8a, 8a.1 dan 8b**;

- b. Bahan laporan bulanan meliputi: pelaksanaan program penyuluhan, pendistribusian materi dan informasi penyuluhan, pelaksanaan penyuluhan melalui media cetak dan elektronik, pengalokasian penugasan tenaga penyuluh, realisasi pelatihan pemandu lapangan, pengawalan, pendampingan dan realisasi penerapan teknologi, kelembagaan petani, pelaksanaan rebug, forum, temu teknis, dan temu tugas;
- c. Laporan bulanan disampaikan kepada Bupati/Walikota selaku penanggungjawab P2BN Kabupaten/Kota paling lambat tanggal 7 bulan berikutnya dengan tembusan ke Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan/Kelembagaan yang membidangi penyuluhan di provinsi.

4. Penanggungjawab Program P2BN Kabupaten/Kota

- a. Laporan bulanan Bupati/Walikota selaku penanggung jawab program P2BN Kabupaten/Kota dirumuskan, disusun, dan dikoordinasikan oleh Sekretariat Tim Pelaksana. Bentuk laporan bulanan Program P2BN Kabupaten/Kota seperti pada **lampiran 9**;
- b. Bahan laporan bulanan Tim Pelaksana kabupaten/kota meliputi:
 - 1) lokasi, luas areal, luas tanam, luas panen dan kebutuhan sarana produksi,

55

instensitas dan luas serangan hama dan penyakit serta potensi gangguan bencana alam lainnya;

- 2) perkembangan penerapan rekomendasi teknologi, umpan balik, permasalahan dan upaya pemecahannya pada lokasi sentra produksi padi di Kabupaten/Kota;
 - 3) pelaksanaan penyuluhan pertanian, pengawalan dan pendampingan teknologi serta realisasi penerapan teknologi pada lokasi sentra produksi padi,
- c. Laporan bulanan Tim Pelaksana Kabupaten/Kota disampaikan kepada Gubernur selaku penanggung jawab program P2BN Provinsi paling lambat tanggal 9 bulan berikutnya dengan tembusan Dinas Teknis yang membidangi tanaman pangan di tingkat provinsi, BPTP dan Sekretariat Bakorluh.

C. Tingkat Provinsi

1. Dinas Teknis yang membidangi Tanaman Pangan

- a. Dinas Teknis yang membidangi Tanaman Pangan membuat laporan bulanan tentang perkembangan pelaksanaan P2BN provinsi berdasarkan laporan Dinas Teknis yang membidangi tanaman pangan dan Bupati/Walikota. Bentuk laporan bulanan Dinas Teknis yang membidangi Tanaman Pangan seperti pada **Lampiran 10a, 10a.1, 10a.2 dan 10b**;
- b. Bahan laporan bulanan meliputi: luas areal, luas tanam, luas panen, produksi dan

56



produktifitas, kebutuhan sarana produksi, dukungan permodalan, intensitas dan luas serangan hama dan penyakit serta potensi gangguan bencana alam lainnya;

- c. Laporan bulanan disampaikan kepada Gubernur selaku penanggung jawab program P2BN Provinsi paling lambat tanggal 11 bulan berikutnya dengan tembusan kepada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian.

2. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian

- a. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian membuat laporan bulanan tentang dukungan penelitian dalam pelaksanaan P2BN provinsi berdasarkan laporan peneliti pendamping. Bentuk laporan bulanan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian seperti pada **Lampiran 11a**;
- b. Bahan laporan bulanan meliputi : rekomendasi teknologi, spesifik lokasi, kalender dan pola tanam, penggunaan varietas unggul, teknologi adaptasi terhadap perubahan iklim, umpan balik dan permasalahan dan upaya pemecahannya pada lokasi sentra produksi padi di provinsi (**Lampiran 11b dan 11c**);
- c. Laporan bulanan disampaikan kepada Gubernur selaku penanggung jawab program P2BN Provinsi paling lambat tanggal 11 bulan berikutnya dengan tembusan ke Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian.

3. Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan/Kelembagaan yang membidangi penyuluhan

- a. Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan/Kelembagaan yang membidangi penyuluhan membuat laporan bulanan perkembangan pelaksanaan penyuluhan berdasarkan laporan Bapeluh/kelembagaan yang membidangi penyuluhan di kabupaten/kota. Bentuk laporan bulanan Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan/Kelembagaan yang membidangi penyuluhan seperti pada **Lampiran 12a, 12a.1 dan 12b**;
- b. Bahan laporan bulanan meliputi: penjabaran program penyuluhan, penyebaran materi dan informasi penyuluhan, pelaksanaan penyuluhan melalui media cetak dan elektronik, pengalokasian tenaga penyuluh, realisasi pelatihan pemandu lapangan, pengawalan, pendampingan dan realisasi penerapan teknologi ;
- c. Laporan bulanan disampaikan kepada Gubernur selaku penanggung jawab program P2BN Provinsi paling lambat tanggal 11 bulan berikutnya dengan tembusan ke Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, Kementerian Pertanian.



4. Penanggungjawab Program P2BN Provinsi

- a. Laporan bulanan Gubernur selaku penanggung jawab program P2BN Provinsi dirumuskan, disusun, dan dikoordinasikan oleh Sekretariat Tim Pembina. Bentuk laporan bulanan, perkembangan Program P2BN Provinsi seperti pada **Lampiran 13**;
- b. Bahan laporan bulanan meliputi:
 - 1) lokasi, luas areal, luas tanam, luas panen dan kebutuhan sarana produksi, intensitas dan luas serangan hama dan penyakit serta potensi gangguan bencana alam lainnya;
 - 2) perkembangan penerapan rekomendasi teknologi, umpan balik, permasalahan dan upaya pemecahannya pada lokasi sentra produksi padi ;
 - 3) pelaksanaan penyuluhan pertanian, pengawalan dan pendampingan teknologi rekomendasi pada lokasi sentra produksi padi.
- c. Laporan bulanan Gubernur selaku penanggung jawab program P2BN Provinsi disampaikan kepada Menteri Pertanian paling lambat tanggal 13 bulan berikutnya dengan tembusan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Badan Litbang, dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian.



- b. Bahan laporan bulanan meliputi : rekomendasi teknologi, spesifik lokasi, kalender dan pola tanam, penggunaan varietas unggul, teknologi adaptasi terhadap perubahan iklim, unpan balik dan permasalahan terkait pelaksanaan penelitian dalam mendukung P2BN(**Lampiran 15b**);
- c. Laporan bulanan disampaikan kepada Menteri Pertanian selaku penanggung jawab program P2BN tingkat nasional paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.

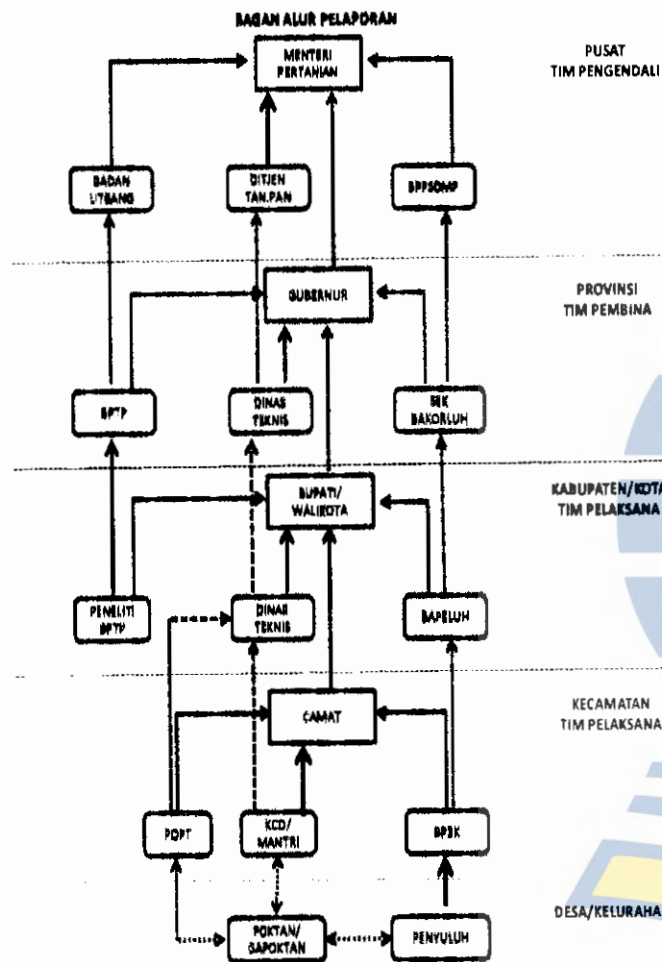
3. Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian

- a. Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian membuat laporan bulanan perkembangan penyelenggaraan penyuluhan dalam mendukung P2BN berdasarkan laporan dari Bakorluh/Kelembagaan yang menangani penyuluhan. Bentuk laporan bulanan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian seperti pada **Lampiran 16a, 16a.1 dan 16b**;
- b. Bahan laporan bulanan meliputi : pelaksanaan program penyuluhan, penyebarluasan materi teknologi penyuluhan, peningkatan kompetensi penyuluh, pengalokasian tenaga penyuluh, kelembagaan penyuluhan, pemberian insentif dan penghargaan kepada penyuluh serta perkembangan realisasi anggaran dalam mendukung P2BN ;

- c. Laporan bulanan disampaikan kepada Menteri Pertanian selaku penanggung jawab program P2BN tingkat nasional paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.

4. Pelaporan Program P2BN Nasional

- a. Laporan bulanan Menteri Pertanian selaku penanggung jawab program P2BN tingkat nasional dirumuskan, disusun, dan dikoordinasikan oleh Sekretariat Tim Pengendali Pusat Bentuk laporan bulanan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian seperti pada **Lampiran 17**;
- b. Berdasarkan laporan Tim Pengendali Pusat, Menteri Pertanian menyampaikan laporan bulanan perkembangan pelaksanaan P2BN kepada Presiden;
- c. Bahan laporan bulanan meliputi perkembangan pelaksanaan P2BN secara nasional;
- d. Laporan bulanan Menteri Pertanian disampaikan kepada Presiden paling lambat tanggal 17 bulan berikutnya dengan tembusan Wakil Presiden RI dan Menteri Koordinator Perekonomian.



BAB V PENUTUP

Mekanisme dan Tata Hubungan Kerja ini dibuat untuk menjadi acuan dan dilaksanakan oleh kelembagaan teknis, kelembagaan penelitian dan pengembangan, serta kelembagaan penyuluhan pertanian di pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan yang terkait dalam mendukung program P2BN.

Dengan terbitnya acuan ini, diharapkan terwujudnya mekanisme dan tata hubungan kerja yang harmonis melalui koordinasi pengendalian, pembinaan, dan pelaksanaan antar kelembagaan teknis, kelembagaan penelitian dan kelembagaan penyuluhan serta kelembagaan terkait lainnya dalam rangka pelaksanaan Program P2BN.

Agar Mekanisme dan Tata Hubungan Kerja ini dapat dilaksanakan sesuai dengan kondisi masing-masing wilayah pada lokasi sentra produksi padi perlu dijabarkan dalam bentuk Petunjuk Pelaksanaan oleh Gubernur dan Petunjuk Teknis oleh Bupati/ Walikota

Menteri Pertanian,

SUSWONO

Lampiran 1a

**FORUM KEMAHALIHAN
PERSAMAAN LURUS RW/RT**

No	Desa	Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Ok	Nov	Des	Jumlah
1														
2														
3														
dst														
Jumlah														

UP/RTD

66

Lampiran 1a

**FORUM KEMAHALIHAN
REALISASI LURUS TRAHAM PADI**

No	Desa	Realisasi Traham Padi 2012/2013												Jumlah		
		Des	Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Ok	Nov		Des	
1																
2																
3																
dst																
Jumlah																

UP/RTD

65

Lampiran 1b

FORMAT LAPORAN BELAJAR
KEMAHAPAN MANAJEMEN PRODUKSI DALAM MERENCANAKAN PRODUKSI UNTUK NEGARA RIKAWAN

Informasi :

No.	Materi	Kebijakan & Budaya MI 2023					Kebijakan & Budaya MI 2021					Jumlah Dik.	Jumlah Bisa	Jumlah Misi	Jumlah Misi	Jumlah Misi	Jumlah Misi		
		OSP	OSK	OSK	OSK	OSK	OSP	OSK	OSK	OSK	OSK								
1.	Ke-ributan																		
2.	Penilaian																		
	Uraian																		
	SOA																		
	MP																		
	SA																		
	Organis.																		
	Perencanaan																		
	Prosedur																		
	Penutup																		
Jumlah																			

68

UPTUPTD

UPTUPTD

Lampiran 1c

FORMAT LAPORAN BELAJAR
MANAJEMEN PRODUKSI

Informasi :

No.	Dua	Jan	Feb	Maret	April	MAY	Juni	Juli	Agus	Sept	OKT	Nov	Des	Jumlah
1.														
2.														
3.														
dit														
Jumlah														

67

UPTUPTD

Lampiran 2.5

**KOMISI LACONAN BULAWAN
PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN PENGELOMPOKAN**

Keputusan: ...
Materi: ...
No. Dokumen: ...
No. Revisi: ...

No	Date	BMT		Kategori
		T	P	
1				
2				
3				
4				

Halaman: 70

Page: 70

**KOMISI LACONAN BULAWAN
PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN PENGELOMPOKAN**

Keputusan: ...
Materi: ...
No. Dokumen: ...
No. Revisi: ...

No	Date	BMT		Kategori
		T	P	
1				
2				
3				
4				

Halaman: 69

Page: 69

Lampiran 2a.3

FORMULASI DAN KUALITAS REBUSITULAS PASIR BERKUALITAS BERBASIS KERSERONG

Keterangan: 1. Untuk uji kompresi, 2. Untuk uji tahanan geser

No	Uraian	Januari		Februari		Maret		April		Mei		Juni		Juli		Agustus		September		Oktober		November		Desember	
		T	P	T	P	T	P	T	P	T	P	T	P	T	P	T	P	T	P	T	P	T	P	T	P
1.	Uji tahanan geser																								
2.	Uji kompresi																								
	Jumlah																								

Uraian: 1. Untuk uji kompresi, 2. Untuk uji tahanan geser

Revisi: 10/11

Lampiran 2a.2

FORMULASI DAN KUALITAS REBUSITULAS PASIR BERKUALITAS BERBASIS CILIRI PAOI

Keterangan: 1. Untuk uji kompresi, 2. Untuk uji tahanan geser

No	Uraian	Januari		Februari		Maret		April		Mei		Juni		Juli		Agustus		September		Oktober		November		Desember	
		T	P	T	P	T	P	T	P	T	P	T	P	T	P	T	P	T	P	T	P	T	P	T	P
1.	Uji tahanan geser																								
2.	Uji kompresi																								
	Jumlah																								

Uraian: 1. Untuk uji kompresi, 2. Untuk uji tahanan geser

Revisi: 10/11



FORMULIR LAPORAN MELAKUKAN PENELITIAN/PROYEK PENELITIAN (RUMAH/UMUM)

Daftar Isi

1. No. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

1. Nama dan NPM
 2. Nama Dosen Pembimbing
 3. Judul Penelitian/Proyek
 4. Tujuan Penelitian/Proyek
 5. Metode Penelitian/Proyek
 6. Hasil Penelitian/Proyek
 7. Kesimpulan Penelitian/Proyek
 8. Saran Penelitian/Proyek
 9. Daftar Pustaka Penelitian/Proyek
 10. Lampiran Penelitian/Proyek

FORMULIR LAPORAN MELAKUKAN PENELITIAN/PROYEK PENELITIAN (RUMAH/UMUM)

Daftar Isi

1. No. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

1. Nama dan NPM
 2. Nama Dosen Pembimbing
 3. Judul Penelitian/Proyek
 4. Tujuan Penelitian/Proyek
 5. Metode Penelitian/Proyek
 6. Hasil Penelitian/Proyek
 7. Kesimpulan Penelitian/Proyek
 8. Saran Penelitian/Proyek
 9. Daftar Pustaka Penelitian/Proyek
 10. Lampiran Penelitian/Proyek

Berkas 8/2

FORMAT LAMPIRAN BUKU (REKAM/ILUAS)
PUSHTAMAN PRCTJUS 940

Subsistem : [Blank]
[Blank]

Table 1

No	Identifikasi	AM	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE
1																				
2																				
3																				
4																				
5																				

Langkah No. 1

FORMAT LAMPIRAN BUKU (REKAM/ILUAS)
PUSHTAMAN (LINSI PAKSI/PAI)

Subsistem : [Blank]
[Blank]

Table 1

No	Keterangan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agu	Sept	Ok	Nov	Dek	Jumlah
1														
2														
3														
4														
5														



FORMULIR EVALUASI PENERAPAN KOMPOSISI TEKNOLOGI PADI BERKAMPUS LOKAL
Bulan:, Tahun:

Kecamatan:, Kabupaten:, Provinsi:

Aspek Pengalihan

No	Aspek Pengalihan	Aspek Kemampuan Teknologi	Skor Akhir
1	Persepsi dan sikap petani	Persepsi petani akan nilai lokal	
2	Persepsi dan sikap petani	Persepsi petani akan teknologi	
3	Persepsi dan sikap petani	Persepsi petani akan pasar	
4	Persepsi dan sikap petani	Persepsi petani akan lingkungan	
5	Persepsi dan sikap petani	Persepsi petani akan sosial	
6	Persepsi dan sikap petani	Persepsi petani akan budaya	
7	Persepsi dan sikap petani	Persepsi petani akan ekonomi	
8	Persepsi dan sikap petani	Persepsi petani akan politik	
9	Persepsi dan sikap petani	Persepsi petani akan hukum	
10	Persepsi dan sikap petani	Persepsi petani akan kesehatan	
11	Persepsi dan sikap petani	Persepsi petani akan pendidikan	
12	Persepsi dan sikap petani	Persepsi petani akan agama	

Detik:, dan peneliti pendamping BP TA di Kabupaten/Kota:

FORMULIR ANGGARAN BELANJA PENELITIAN
#RUMAHKUNYU BELANJA PENELITIAN PRODUKSI PADI BERKAMPUS LOKAL

No	Uraian	Jumlah	Unit	Angka	Jumlah	Unit	Angka	Jumlah	Unit	Angka	Jumlah	Unit	Angka	Jumlah	Unit	Angka
1	Personalia															
2	Perjalanan															
3	Biaya															
4	Biaya															
5	Biaya															
6	Biaya															
7	Biaya															
8	Biaya															
9	Biaya															
10	Biaya															
11	Biaya															
12	Biaya															
13	Biaya															
14	Biaya															
15	Biaya															
16	Biaya															
17	Biaya															
18	Biaya															
19	Biaya															
20	Biaya															
21	Biaya															
22	Biaya															
23	Biaya															
24	Biaya															
25	Biaya															
26	Biaya															
27	Biaya															
28	Biaya															
29	Biaya															
30	Biaya															
31	Biaya															



FORMULIR LARANGAN RELAKSIAN PENGAMBILAN KESELURUHAN (PTUJUK)
 BUKU: **.....**

Keputusan No. 121/2017
 21 Desember 2017

Lampiran 7e

FORMULIR LARANGAN RELAKSIAN PENGAMBILAN KESELURUHAN (PTUJUK)
 BUKU: **.....**

Kategori: **.....**
 Nama Pengarang: **.....**
 Nama Penerbit: **.....**

No	Lama Cetak	Kategori Pengarang	Kategori Penerbit	Kategori Lain		Kategori Lain		Kategori Lain	Kategori Lain	Kategori Lain	Kategori Lain	Kategori Lain	Kategori Lain	Kategori Lain	Kategori Lain	Kategori Lain	Kategori Lain	Kategori Lain	Kategori Lain	Kategori Lain	Kategori Lain	Kategori Lain		
				Kategori Lain	Kategori Lain	Kategori Lain	Kategori Lain																	

21 Desember 2017
 Kepala PTUJUK
 Nama: **.....**
 Jabatan: **.....**

21 Desember 2017
 Kepala PTUJUK
 Nama: **.....**
 Jabatan: **.....**

21 Desember 2017
 Kepala PTUJUK
 Nama: **.....**
 Jabatan: **.....**

21 Desember 2017
 Kepala PTUJUK
 Nama: **.....**
 Jabatan: **.....**

21 Desember 2017
 Kepala PTUJUK
 Nama: **.....**
 Jabatan: **.....**

21 Desember 2017
 Kepala PTUJUK
 Nama: **.....**
 Jabatan: **.....**

Lampiran 10B

FORMASI LINGKARAN BUKAN BERKUMPULAN
DI BUKU, HASIL KUALITAS PRODUKSI DAN/ATAU MELAYAKI PRODUKSI

No.	Jumlah	Jumlah		Jumlah		Jumlah		Jumlah		Jumlah		Jumlah
		100%	90%	80%	70%	60%	50%	40%	30%	20%	10%	
1.	100%											
2.	100%											
3.	100%											
4.	100%											
5.	100%											
6.	100%											
7.	100%											
8.	100%											
9.	100%											
10.	100%											
11.	100%											
12.	100%											
13.	100%											
14.	100%											
15.	100%											
16.	100%											
17.	100%											
18.	100%											
19.	100%											
20.	100%											
21.	100%											
22.	100%											
23.	100%											
24.	100%											
25.	100%											
26.	100%											
27.	100%											
28.	100%											
29.	100%											
30.	100%											
31.	100%											
32.	100%											
33.	100%											
34.	100%											
35.	100%											
36.	100%											
37.	100%											
38.	100%											
39.	100%											
40.	100%											
41.	100%											
42.	100%											
43.	100%											
44.	100%											
45.	100%											
46.	100%											
47.	100%											
48.	100%											
49.	100%											
50.	100%											

90

Lampiran 10C

FORMASI LINGKARAN BUKAN BERKUMPULAN
Praktikum Praktikum 10B

No.	Jumlah	Jumlah		Jumlah		Jumlah		Jumlah		Jumlah		Jumlah
		100%	90%	80%	70%	60%	50%	40%	30%	20%	10%	
1.	100%											
2.	100%											
3.	100%											
4.	100%											
5.	100%											
6.	100%											
7.	100%											
8.	100%											
9.	100%											
10.	100%											
11.	100%											
12.	100%											
13.	100%											
14.	100%											
15.	100%											
16.	100%											
17.	100%											
18.	100%											
19.	100%											
20.	100%											
21.	100%											
22.	100%											
23.	100%											
24.	100%											
25.	100%											
26.	100%											
27.	100%											
28.	100%											
29.	100%											
30.	100%											
31.	100%											
32.	100%											
33.	100%											
34.	100%											
35.	100%											
36.	100%											
37.	100%											
38.	100%											
39.	100%											
40.	100%											
41.	100%											
42.	100%											
43.	100%											
44.	100%											
45.	100%											
46.	100%											
47.	100%											
48.	100%											
49.	100%											
50.	100%											

89

Kelembagaan dan Tata Kelola
Kelembagaan dan Tata Kelola
Kelembagaan dan Tata Kelola

No	Indikator	Kategori	Sub-kategori	Tingkat				Kategori	Sub-kategori
				1	2	3	4		
1	Struktur Organisasi	Struktur Organisasi	Struktur Organisasi						
2	Prosedur Kerja	Prosedur Kerja	Prosedur Kerja						
3	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan						
4	Tata Kelola	Tata Kelola	Tata Kelola						
5	Kelembagaan dan Tata Kelola	Kelembagaan dan Tata Kelola	Kelembagaan dan Tata Kelola						

1. Struktur Organisasi
 2. Prosedur Kerja
 3. Kelembagaan
 4. Tata Kelola
 5. Kelembagaan dan Tata Kelola

Kelembagaan dan Tata Kelola
Kelembagaan dan Tata Kelola
Kelembagaan dan Tata Kelola

No	Indikator	Kategori	Sub-kategori	Tingkat				Kategori	Sub-kategori
				1	2	3	4		
1	Struktur Organisasi	Struktur Organisasi	Struktur Organisasi						
2	Prosedur Kerja	Prosedur Kerja	Prosedur Kerja						
3	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan						
4	Tata Kelola	Tata Kelola	Tata Kelola						
5	Kelembagaan dan Tata Kelola	Kelembagaan dan Tata Kelola	Kelembagaan dan Tata Kelola						

1. Struktur Organisasi
 2. Prosedur Kerja
 3. Kelembagaan
 4. Tata Kelola
 5. Kelembagaan dan Tata Kelola

Lampiran 14.

**FORMAT LAPORAN JUMLAHAN (REKAPITULASI)
SEALIGAI LAM TINGKAP AND**

No.	Pemerolek	Berkas Terdaftar (10/11/2010/2011)		Lampiran		Lampiran OR		Lampiran, Tanggal 2011		Jumlah AP/
		ORI	Salin	ORI	Salin	ORI	Salin	ORI	Salin	
1.										
2.										
3.										
...										
...										

...

Dipin 77

Lampiran 15.

**Format Laporan Jumlahan (Rekapitulasi)
Sealigai Lam Tingkat And**

No.	Pemerolek	Berkas Terdaftar (10/11/2010/2011)		Lampiran		Lampiran OR		Lampiran, Tanggal 2011		Jumlah AP/
		ORI	Salin	ORI	Salin	ORI	Salin	ORI	Salin	
1.										
2.										
3.										
...										
...										

95

...

- 1. Tidak ada
- 2. Tidak ada
- 3. Tidak ada
- 4. Tidak ada
- 5. Tidak ada
- 6. Tidak ada
- 7. Tidak ada
- 8. Tidak ada
- 9. Tidak ada
- 10. Tidak ada

10001101316

PERENCANAAN LAPANGAN PEKERJAAN DAN GAMBARAN PEKERJAAN PERENCANAAN

No	Lokasi	Area	Spesifikasi	Detail	Detail		Detail	Detail	Detail	Detail
					Detail	Detail				

10001101316
 Nama: ...
 No. ...

10001101316

PERENCANAAN LAPANGAN PEKERJAAN DAN GAMBARAN PEKERJAAN PERENCANAAN

No	Lokasi	Area	Spesifikasi	Detail	Detail	Detail	Detail	Detail	Detail	Detail

10001101316
 Nama: ...
 No. ...

**OUTLINE****LAPORAN PENELITIAN PENDAMPING TINGKAT
KABUPATEN
BULAN:.....**

- I. PENDAHULUAN
- II. PELAKSANAAN TUGAS PENDAMPINGAN
 1. PENERAPAN TEKNOLOGI SPESIFIK LOKASI,
 2. KALENDER POLA TANAM
 3. DISPLAY VARIETAS,
 4. DEMFARM,
 5. DISTRIBUSI PUBLIKASI
 6. NARASUMBER
 7. KUNJUNGAN LAPANGAN
- III. MASALAH DAN MEMBERIKAN SARAN PEMECAHAN
MASALAH ADOPSI TEKNOLOGI
- IV. UMPAN BALIK PENERAPAN TEKNOLOGI
- V. PENUTUP

OUTLINE**LAPORAN TIM PELAKSANA KABUPATEN/KOTA****RINGKASAN LAPORAN**

- I. PENDAHULUAN
- II. PERKEMBANGAN PELAKSANAAN P2BN
 1. LUAS TANAM/PANEN (RENCANA DAN REALISASI)
 2. PRODUKSI (RENCANA DAN REALISASI)
 3. PENGGUNAAN SARANA PRODUKSI (RENCANA DAN REALISASI)
 4. KONDISI OPT DAN DPI
 5. PENERAPAN REKOMENDASI TEKNOLOGI (TANAM, PEMELIHARAAN, PANEN DAN PASCA PANEN)
 - KALENDER TANAM
 - VARIETAS
 - PEMUPUKAN
 - PANEN DAN PASCA PANEN
 6. PENYUSUNAN RDK/RDKK (RENCANA DAN REALISASI)
 7. PELAKSANAAN PENYULUHAN
 - PROGRAMA
 - PENDAMPINGAN DAN PENGAWALAN
 - BIMBINGAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
 - FASILITASI KELEMBAGAAN TANI DAN KELEMBAGAAN EKONOMI PETANI
 - REMBUG, FORUM, DAN TEMU-TEMU
- III. PERMASALAHAN
- IV. KESIMPULAN
LAMPIRAN (REKAPITULASI LAPORAN TIM PELAKSANA KECAMATAN)

**OUTLINE****LAPORAN BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI
PERTANIAN TINGKAT PROVINSI****BULAN:.....**

- I. PENDAHULUAN
- II. PELAKSANAAN TUGAS PENDAMPINGAN
 1. NARASUMBER (PELATIHAN),
 2. PENERAPAN TEKNOLOGI SPESIFIK LOKASI,
 3. KALENDER POLA TANAM
 4. DISPLAY VARIETAS,
 5. DEMFARM,
 6. DISTRIBUSI PUBLIKASI,
 7. PENDAMPINGAN OLEH PENELITI (KUNJUNGAN LAPANGAN)
- III. MASALAH DAN MEMBERIKAN SARAN PEMECAHAN MASALAH ADOPTSI TEKNOLOGI
- IV. UMPAN BALIK PENERAPAN TEKNOLOGI
- V. PENUTUP

OUTLINE**LAPORAN BULANAN TIM PEMBINA PROVINSI****RINGKASAN LAPORAN**

- I. PENDAHULUAN
- II. PERKEMBANGAN PELAKSANAAN P2BN
 1. LUAS TANAM/PANEN (RENCANA DAN REALISASI)
 2. PRODUKSI (RENCANA DAN REALISASI)
 3. PENGGUNAAN SARANA PRODUKSI (RENCANA DAN REALISASI)
 4. KONDISI OPT DAN DPI
 5. PENERAPAN REKOMENDASI TEKNOLOGI (TANAM, PEMELIHARAAN, PANEN DAN PASCA PANEN)
 - KALENDER TANAM
 - VARIETAS
 - PEMUPUKAN
 - PANEN DAN PASCA PANEN
 6. PENYUSUNAN RDK/RDKK (RENCANA DAN REALISASI)
 7. PELAKSANAAN PENYULUHAN
 - PROGRAM
 - PENDAMPINGAN DAN PENGAWALAN
 - BIMBINGAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
 - FASILITASI KELEMBAGAAN TANI DAN KELEMBAGAAN EKONOMI PETANI
 - REMBUG, FORUM, DAN TEMU-TEMU
- III. PERMASALAHAN
- IV. KESIMPULAN
LAMPIRAN (REKAPITULASI LAPORAN BULANAN PROGRAM P2BN KABUPATEN/KOTA)



OUTLINE
LAPORAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PERTANIAN TINGKAT PUSAT
BULAN:.....

- I. PENDAHULUAN
- II. PELAKSANAAN TUGAS PENDAMPINGAN
 1. NARASUMBER (PELATIHAN TOT),
 2. PENYALURAN BENIH,
 3. PENERAPAN TEKNOLOGI SPESIFIK LOKASI,
 4. KALENDER POLA TANAM
 5. DISPLAY VARIETAS,
 6. DEMFARM,
 7. DISTRIBUSI PUBLIKASI,
 8. PENDAMPINGAN OLEH PENELITI (KUNJUNGAN LAPANGAN)
- III. MASALAH DAN MEMBERIKAN SARAN PEMECAHAN MASALAH ADOPSI TEKNOLOGI
- IV. UMPAN BALIK PENERAPAN TEKNOLOGI
- V. PENUTUP

OUTLINE

LAPORAN PERKEMBANGAN PROGRAM P2BN
NASIONAL

RINGKASAN LAPORAN

- I. PENDAHULUAN
- II. PERKEMBANGAN PELAKSANAAN P2BN
 1. LUAS TANAM/PANEN (RENCANA DAN REALISASI)
 2. PRODUKSI (RENCANA DAN REALISASI)
 3. PENGGUNAAN SARANA PRODUKSI (RENCANA DAN REALISASI)
 4. KONDISI OPT DAN DPI
 5. PENERAPAN REKOMENDASI TEKNOLOGI (TANAM, PEMELIHARAAN, PANEN DAN PASCA PANEN)
 - KALENDER TANAM
 - VARIETAS
 - PEMUPUKAN
 - PANEN DAN PASCA PANEN
 6. PENYUSUNAN RDK/RDKK (RENCANA DAN REALISASI)
 7. PELAKSANAAN PENYULUHAN
 - PROGRAM
 - PENDAMPINGAN DAN PENGAWALAN
 - BIMBINGAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
 - FASILITASI KELEMBAGAAN TANI DAN KELEMBAGAAN EKONOMI PETANI
 - REMBUG, FORUM, DAN TEMU-TEMU
- III. PERMASALAHAN
- IV. KESIMPULAN
LAMPIRAN (REKAPITULASI LAPORAN BULANAN PROGRAM P2BN PROVINSI)



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

Nomor : DKP/ 228.1 /V/2010

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN KETAHANAN PANGAN

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan di daerah dan upaya menciptakan kondisi daerah terpenuhinya pangan yang cukup, baik dalam jumlah maupun mutunya, aman merata dan terjangkau oleh masyarakat perlu dilakukan upaya-upaya koordinatif yang terpadu antar instansi terkait,
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab III Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan, perlu membentuk Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten,
 - c. bahwa, untuk melaksanakan upaya-upaya koordinatif yang terpadu antar instansi terkait maka perlu diperbaharui Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : SK KPPKP/15/VIII/2008 tanggal 27 Agustus 2008.
 - d. bahwa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu ditetapkan Keputusan Bupati Kotawaringin Barat tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1820);
 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3656)
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat daerah;
 7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
 8. Perda Daerah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas;
 9. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat ;



- KESATU** : Membentuk Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten mempunyai tugas membantu Bupati dalam :
- Merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan Kabupaten Kotawaringin Barat dengan memperhatikan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Ketahanan Pangan Pusat dan Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah.
 - Merumuskan kebijakan dalam rangka mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan.
 - Merumuskan kebijakan di bidang Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Barat yang meliputi aspek ketersediaan, distribusi, konsumsi, mutu, gizi, keamanan dan kevaspadaan pangan.
 - Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pemantapan ketahanan pangan Kabupaten Kotawaringin Barat.
 - Melakukan rapat sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu sesuai keperluan.
 - Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati setiap satu bulan sekali atau sewaktu-waktu sesuai keperluan.
- KETIGA** : Untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten dapat mengundang unsur-unsur yang terkait untuk hadir dalam rapat atau pertemuan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten dan mengikutsertakannya dalam upaya pemantapan ketahanan pangan kabupaten.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan dan ditunjuk oleh Ketua Dewan Ketahanan Pangan.
- KELIMA** : Dengan ditetapkannya keputusan ini maka Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : SK KPPK⁹/15/III/2008 tanggal 27 Agustus 2008 dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Kotawaringin Barat
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkalan Bun
Pada tanggal : 1 Mei 2010

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,



Dr. H. HANG ISKANDAR, ST, M.Si

**Jabatan Pckok****Jabatan dalam Dewan**

	Jabatan Pckok	Jabatan dalam Dewan
1.	Bupati Kotawaringin Barat	Ketua
2.	Wakil Bupati Kotawaringin Barat	Wakil Ketua
3.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kab.Kobar	Ketua Harian I
4.	Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kab Kobar	Ketua Harian II
5.	Kepala Kantor Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab.Kobar	Sekretaris
6.	Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Kobar	Anggota
7.	Kepala Dinas Perkebunan Kab. Kobar	Anggota
8.	Kepala Dinas Kehutanan Kab. Kobar	Anggota
9.	Kepala Dinas Perhubungan Kab. Kobar	Anggota
10.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kotawaringin Barat	Anggota
11.	Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Pasar Kab. Kobar	Anggota
12.	Kepala Dinas Kesehatan Kab. Kobar	Anggota
13.	Ketua Tim Penggerak PKK Kab. Kobar	Anggota
14.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kobar	Anggota
15.	Kepala BAPPEDA Kab. Kobar	Anggota
16.	Kepala Badan Pusat Statistik Kab. Kobar	Anggota
17.	Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kobar	Anggota
18.	Kepala Bulog Sub. Divisi Reg. II/ Pangkalan Bun	Anggota
19.	Kepala Administratur Pelabuhan Pangkalan Bun	Anggota
20.	Perwira Seksi Teritorial (Pasiter) Kodim 1014 Pangkalan Bun	Anggota
21.	Kepala Bagian Administrasi (Kabagmin) Polres Kobar	Anggota
22.	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kab. Kotawaringin Barat.	Anggota
23.	Ketua KTNA Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
24.	Kepala Adpel Kumai	Anggota
25.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
26.	Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Ktw. Barat.	Anggota
27.	Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Pangkalan Bun.	Anggota
28.	Dekan Fakultas Pertanian Utama Pangkalan Bun.	Anggota
29.	Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat.	Anggota

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

Nomor : SEK. DKP/ 154 / III /2012

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) KABUPATEN DEWAN KETAHANAN PANGAN

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

- Menimbang** :
- bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari Dewan Ketahanan Pangan membentuk Kelompok Kerja (POKJA) yang berfungsi sebagai simpul koordinasi yang terpadu antar instansi terkait;
 - bahwa Kelompok Kerja (POKJA) Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten terdiri dari pejabat dari instansi teknis terkait membentuk Pokja sesuai bidang tugas instansi masing-masing;
 - bahwa untuk upaya-upaya koordinasi yang terpadu antar instansi terkait maka perlu diperbaharui Keputusan Bupati Kotawaringin Barat No. SEK.DKP/ 228.2/V/2010 tanggal 01 Mei 2010;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu ditetapkan Keputusan Bupati Kotawaringin Barat tentang Pembentukan Kelompok Kerja Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten;
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1820);
 - Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara RI Tahun 1966 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3656);
 - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 - Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat daerah;
 - Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
 - Perda Daerah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Kotawaringin Barat;
 - Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menunjuk Kelompok Kerja (POKJA) Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Para pejabat yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas sehari-hari sebagai Kelompok Kerja (Pokja) Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten.
- KETIGA** : Tugas dan fungsi Kelompok Kerja (POKJA) Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten adalah :
- Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan lintas sektor dalam mendukung Program Ketahanan Pangan.
 - Melaksanakan identifikasi dan pemecahan masalah dalam pelaksanaan program ketahanan pangan.
 - Merumuskan Program Ketahanan Pangan di wilayah Kabupaten.
 - Melaksanakan rapat sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu sesuai keperluan.
 - Melaporkan dan menghimpun hasil tugas Kelompok Kerja (POKJA) masing-masing dari instansi kepada Bupati melalui Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten.
- KEEMPAT** : Dengan ditetapkannya keputusan ini maka Keputusan Bupati Kotawaringin Barat No. SEK.DKP/ 228.2/V/2010 tanggal 01 Mei 2010 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA SKPD Kantor Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2012 No.910/34/V/DPA/DKPD/2012 tanggal 25 Januari 2012.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkalan Bun

Pada tanggal : 06 Maret 2012



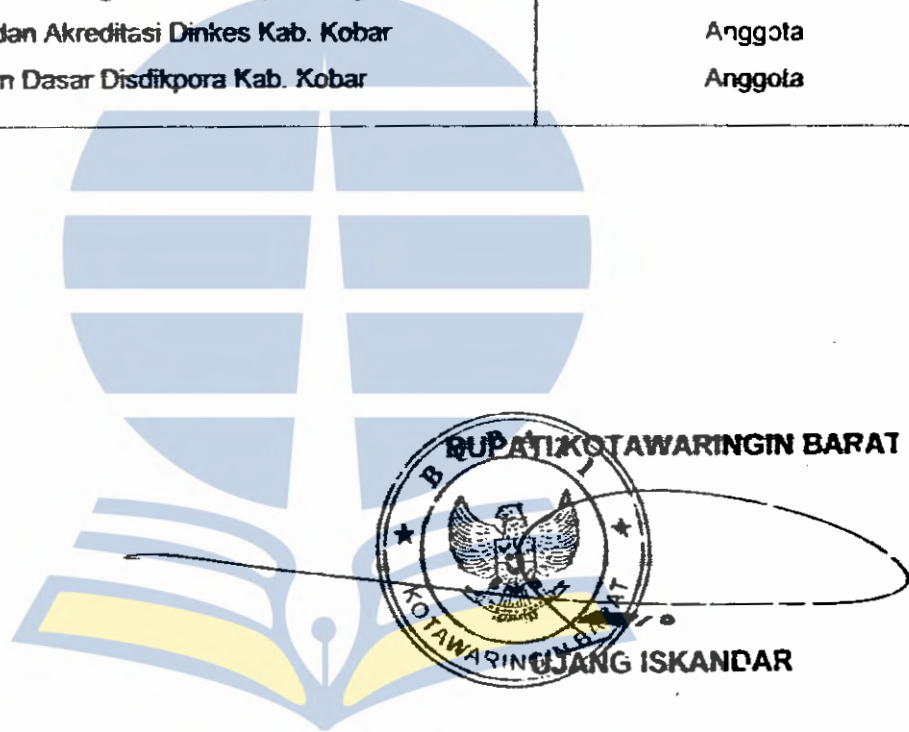
Tembusan disampaikan kepada Yth :

- Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
- Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah di Pangkalan Bun
- Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun
- Yang bersangkutan untuk diketahui.

Lampiran : Keputusan Bupati Kotawaringin Barat
 Tentang : Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Tingkat Kabupaten
 Program Dewan Ketahanan Pangan Tahun Anggaran, 2012
 Nomor : SEK. DKP/ 154 /III/2012
 Tanggal : 06 Maret 2012

No	Jabatan Pokok	Kedudukan Dalam Pokja
1	2	3
1.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat	Koordinator Kelompok Kerja DKP
2.	Kepala Kantor Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Kotawaringin Barat	Ketua
3.	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kab. Kotawaringin Barat	Sekretaris
4.	Kepala Seksi Ketahanan Pangan, KP2KP Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
5.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha KP2KP Kab. Kobar	Anggota
6.	Kepala Distanak Kab. Kobar	Koordinator Pokja Ketersediaan Pangan
7.	Kabid Pengembangan Produksi TPH, Distanak Kab. Kobar	Anggota
8.	Kabid Pengembangan Produksi Peternakan Distanak Kab. Kobar	Anggota
9.	Kabid Perikanan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Kobar	Anggota
10.	Kabid Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Kobar	Anggota
11.	Kabid Budidaya Perkebunan Disbun Kab. Kobar	Anggota
12.	Kabid Sumber Daya Air Dinas PU Kab. Kobar	Anggota
13.	Kepala Badan Meteorologi Geofisika Pangkalan Bun	Anggota
14.	Ketua KTNA Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
15.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Koordinator Pokja Distribusi, Cadangan Pangan dan Stabilisasi Harga
16.	Kabid Usaha Perdagangan Disperindag Kab. Kobar	Anggota
17.	Kabid LLAJ Dishub Kom dan Informatika Kab. Kobar	Anggota
18.	Kabid Koperasi Dinas Koperasi UKM dan Pasar.	Anggota
19.	Kepala Bulog Sub. Divisi Regional III Pangkalan Bun.	Anggota
20.	Pewira Seksi Teritorial (Pasiter) Kodim 1014 P. Bun.	Anggota
21.	Kepala Adminitrasi Pelabuhan Kumai	Anggota

1	2	3
22.	Kepala Admsinitrasi Pelabuhan P. Bun	Anggota
23.	Kepala Dinas Kesehatan Kab. Kotawaringin Barat	Koordinator Pokja Perganekaragaman Pangan dan Mutu Pangan
24.	Kabid Pelayanan Kesehatan Dinkes Kab. Kobar	Anggota
25.	Pokja III PKK Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
26.	Kasubid Pembinaan Ketahanan dan Kualitas Keluarga, Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kab. Kobar	Anggota
27.	Kepala Bagian Reskrim Polres Kobar	Anggota
28.	Kasi Pertanian BPS Kab. Kobar	Anggota
29.	Kasi Pengawasan Barang Beredar Disperindag Kab. Kobar	Anggota
30.	Kasi Regristasi dan Akreditasi Dinkes Kab. Kobar	Anggota
31.	Kabid Pendidikan Dasar Disdikpora Kab. Kobar	Anggota





BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR : PPP.020/11.a/11/2013

TENTANG
TIM PELAKSANA TINGKAT KABUPATEN, TINGKAT KECAMATAN
DAN TINGKAT DESA PADA POS SIMPUL KOORDINASI (POSKO) P2BN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2013

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

- Menimbang :**
- a. bahwa ketahanan pangan merupakan kebutuhan dasar manusia dan ketahanan pangan merupakan unsur penting dalam upaya mencapai kemandirian pangan;
 - b. bahwa beras merupakan komoditas strategis bagi bangsa Indonesia sehingga perlu dilakukan upaya peningkatan produksi secara berkelanjutan;
 - c. bahwa dalam rangka mensukseskan upaya peningkatan produksi padi dalam negeri diperlukan koordinasi, pembinaan, pemantauan dalam pelaksanaan Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) tahun anggaran 2013;
 - d. bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka dipandang perlu dibentuk Tim Pelaksana Tingkat Kabupaten, dan Tim Pelaksana Tingkat Kecamatan tahun anggaran 2013 di Kabupaten Kotawaringin Barat yang ditetapkan dengan surat keputusan.
- Mengingat :**
1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2001 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5167);
 5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4397);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4644);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 816);
 9. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 4212) juncto Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4418);

10. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode 2009-2011;
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2011;
13. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengamanan Produksi Beras Nasional dalam Menghadapi Kondisi Iklim Ekstrem;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PM.02/2009 tanggal 4 Maret 2009 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2010;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dekonsentrasi dan Tugas Pemanfaatan;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 66/Permentan/OT.140/12/2010, tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial untuk Pertanian Tahun Anggaran 2011;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/OT.140/12/2010, tentang Penugasan kepada Gubernur dalam Pengelolaan Kegiatan dan Tanggungjawab Dana Tugas Perbantuan Provinsi Tahun Anggaran 2011;
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 71/Permentan/OT.140/12/2010, tentang Pelimpahan kepada Gubernur dalam Pengelolaan Kegiatan dan Tanggungjawab Dana Dekonsentrasi Provinsi Tahun Anggaran 2011;
20. Permentan 45/Permentan/OT.140/8/2011 tentang Tata Hubungan Kerja Antar Kelembagaan Teknis, Penelitian dan Pengembangan dan Penyuluh Pertanian dalam Mendukung Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN).

Merhatikan : Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/246/2011 tentang Pembentukan Tim Pengawasan dan Pemanfaatan Perangkat Pelaksana pada Pos Simpul Koordinasi (POSKO) P2BN Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2011

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU :** Membentuk Tim Pelaksana Tingkat Kabupaten dan Tim Pelaksana Tingkat Kecamatan Pelaksanaan P2BN Tahun Anggaran 2013 yang selanjutnya disebut Tim, dengan susunan sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA :** Tim Pelaksana Tingkat Kabupaten mempunyai tugas :
1. Menyusun rencana kerja peningkatan produksi padi tingkat kabupaten.
 2. Mendampingi/mengawal penerapan teknologi spesifik lokasi di lokasi P2BN tingkat kabupaten.
 3. Menyusun program penyuluhan mendukung P2BN tingkat kabupaten.
 4. Menyediakan kebutuhan prasarana dan sarana mendukung P2BN tingkat kabupaten.
- KETIGA :** Tim Pelaksana Tingkat Kecamatan mempunyai tugas :
1. Meningkatkan peningkatan produksi padi tingkat kecamatan sesuai dengan target dan rencana kerja yang ditetapkan.
 2. Menerapkan rekomendasi teknologi spesifik lokasi.
 3. Melaksanakan program penyuluhan tingkat kecamatan.
 4. Mengkoordinasikan pemanfaatan prasarana dan sarana yang ada secara efektif dan efisien tingkat kecamatan.

- KEEMPAT** : Tim Pelaksana Tingkat Desa, mempunyai tugas :
1. Memfasilitasi mendampingi, melaksanakan musyawarah/ rambung desa antara penyuluh, petani kepala UPT/ UPTD Pertanian kecamatan dalam rangka penyusunan CP/CL, penyusunan RDK dan RDKK di tingkat desa/ kelurahan.
 2. Menggerakkan masyarakat untuk melakukan penanaman padi, penerapan teknologi spesifik lokasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, pengaturan jadwal pembagian dan pengaliran penggunaan air, serta pengendalian organisme pengganggu tumbuhan di masing-masing wilayahnya.
 3. Memfasilitasi para petani untuk memumbuhkembangkan kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi serta penumbuhan pos penyuluhan desa/ kelurahan.
 4. Memfasilitasi petani dalam mengakses sarana produksi, permodalan dan informasi pasar.
 5. Menyelesaikan permasalahan yang dihadapi petani dan memberikan umpan balik penerapan teknologi spesifik lokasi yang dibutuhkan petani untuk disalurkan kepada peneliti/ pendamping.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggungjawab dan wajib menyampaikan laporan secara berjenjang dan berkala kepada Bupati Kotawaringin Barat.
- KEENAM** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2013 sebagaimana tercantum dalam DPA-SKPD yang telah ditetapkan.
- KETUJUH** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2013 dan berakhir 31 Desember 2013, dengan ketentuan apabila terdapat ketidurutan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkajenean Barat
Pada tanggal : 7 Januari 2013



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Pertanian Republik Indonesia di Jakarta
2. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya
3. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
4. Kepala Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkajenean Barat
5. Kepala Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkajenean Barat
6. Masing-masing yang bersangkutan.
7. Arsip.



I. TIM PELAKSANA P2BN (POSKO II) TINGKAT KAB KOTAWARINGIN BARAT

- Penanggung Jawab : Bupati Kotawaringin Barat
- Koordinator : Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Setda Kabupaten Kotawaringin Barat
- Anggota :
1. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat
 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
 3. Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat
 4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat
 5. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotawaringin Barat
 6. Kepala Bulog Sub-Devisi VII Regional Kabupaten Kotawaringin Barat
 7. Kepala Kantor Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Barat
 8. Ketua HKTI Kabupaten Kotawaringin Barat

II. SEKRETARIAT TIM PELAKSANA P2BN (POSKO II) TINGKAT KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

- Koordinator : Sekretaris Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat Hortikultura
- Anggota :
1. Kepala Bidang Pengembangan Produksi Pertanian Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Ktw. Barat
 2. Kepala Bidang Pengembangan sarana dan prasarana Distanak Kab. Ktw. Barat
 3. Kepala Bidang Perlindungan Tanaman dan Kesehatan Hewan Distanak Kab. Ktw. Barat
 4. Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat.
 5. Kepala Seksi Pengendalian SDM Kelembagaan dan Tata Penyuluhan Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kantor P2KP Kabupaten Ktw. Barat
 6. Kepala Seksi Pengendalian Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Distanak Kab. Ktw. Barat
 7. Kepala Seksi Perbenihan dan Perbibitan Tanaman Pangan dan Hortikultura, Distanak Kab. Ktw. Barat
 8. Kepala Seksi Keteroberaan dan Usaha Tani, Distanak Kab. Ktw. Barat
 9. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Pengendalian Program Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Ban
pada tanggal 7 Januari 2013



LAMPIRAN II SURAT KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT**NOMOR : PPP.020/11.a /1/2013****TANGGAL : 7 JANUARI 2013****TENTANG : TIM PELAKSANA PENINGKATAN PRODUKSI BERAS NASIONAL (P2BN)
TINGKAT KECAMATAN (POSKO IV) KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TAHUN 2013****TIM PELAKSANA TINGKAT KECAMATAN****I. Kecamatan Arut Selatan****Penanggung****Jawab : Camat Arut Selatan****Ketua : Muntri Tani / Koordinator BPP Kecamatan Arut Selatan****Sekretaris : K.F Tanaman Pangan Kecamatan Arut Selatan**

- Anggota :**
1. Kepala Seksi yang membidangi pertanian Kecamatan Arut Selatan
Peugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Kecamatan Arut Selatan
 2. Arut Selatan

II. Kecamatan Arut Utara**Penanggung****Jawab : Camat Arut Utara****Ketua : Muntri Tani / Koordinator BPP Kecamatan Arut Utara****Sekretaris : K.F Tanaman Pangan Kecamatan Arut Utara**

- Anggota :**
1. Kepala Seksi yang membidangi pertanian Kecamatan Arut Utara
Peugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Kecamatan Arut Utara
 2. Arut Utara

III. Kecamatan Kotawaringin Lama**Penanggung****Jawab : Camat Kotawaringin Lama****Ketua : Muntri Tani / Koordinator BPP Kecamatan Kotawaringin Lama****Sekretaris : K.F Tanaman Pangan Kecamatan Kotawaringin Lama****Anggota :**

1. Kepala Seksi yang membidangi pertanian Kecamatan Kotawaringin Lama
Peugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Kecamatan Kotawaringin Lama
2. Kotawaringin Lama

IV. Kecamatan Kumai**Penanggung****Jawab : Camat Kumai****Ketua : Muntri Tani / Koordinator BPP Kecamatan Kumai****Sekretaris : K.F Tanaman Pangan Kecamatan Kumai**

- Anggota :**
1. Kepala Seksi yang membidangi pertanian Kecamatan Kumai
Peugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Kecamatan Kumai
 2. Kecamatan Kumai

V. Kecamatan Pangkalan Lada**Penanggung****Jawab : Camat Pangkalan Lada****Ketua : Muntri Tani / Koordinator BPP Kecamatan Pangkalan Lada****Sekretaris : K.F Tanaman Pangan Kecamatan Pangkalan Lada**

- Anggota :**
1. Kepala Seksi yang membidangi pertanian Kecamatan Pangkalan Lada
Peugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Kecamatan Pangkalan Lada
 2. Kecamatan Pangkalan Lada

VI. Kecamatan Pangkalan Banteng**Penanggung****Jawab**

: Camat Pangkalan Banteng

Ketua

: Matri Tani / Koordinator MPP Kecamatan Pangkalan Banteng

Sekretaris

: K. F. Tanama Pangar, Kecamatan Pangkalan Banteng

Anggota

1. Kepala Seksi yang membidangi pertanian Tingkat Kecamatan
2. Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Kecamatan Pangkalan Banteng

Ditetapkan di : Pangkalan Banteng

Pada tanggal : 7 Januari 2019



KOTAWARINGIN BARAT,

PANGKALAN BANTENG ISKANDAR



LAMPIRAN III SURAT KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT**NOMOR : PPP.020/11.a/11/2013****TANGGAL : 7 JANUARI 2013****TENTANG : TIM PELAKSANA PENINGKATAN PROFESI BERAS NASIONAL (PEBNA)
TINGKAT DESA (POSKO V) KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TAHUN 2013**

- I. Kecamatan Arut Selatan**
1. **Desa Kumpai Batu Atas** : Kepala Desa Kumpai Batu Atas (Ketua merangkap Anggota)
: PPL Desa Kumpai Batu Atas (Sekretaris merangkap Anggota)
: Ketua Gapoktan Desa Kumpai Batu Atas (Anggota)
 2. **Desa Sulung** : Kepala Desa Sulung (Ketua merangkap Anggota)
: PPL Desa Sulung (Sekretaris merangkap Anggota)
: Ketua Gapoktan Sulung (Anggota)
 3. **Kelurahan Mendawai** : Lurah Mendawai (Ketua merangkap Anggota)
: PPL Kelurahan Mendawai (Sekretaris merangkap Anggota)
: Ketua Gapoktan Kelurahan Mendawai (Anggota)
 4. **Desa Kumpai Batu Bawah** : Kepala Desa Kumpai Batu Bawah (Ketua merangkap Anggota)
: PPL Desa Kumpai Batu Bawah (Sekretaris merangkap Anggota)
: Ketua Gapoktan Desa Kumpai Batu Bawah (Anggota)
 5. **Desa Natai Baru** : Kepala Desa Natai Baru (Ketua merangkap Anggota)
: PPL Desa Natai Baru (Sekretaris merangkap Anggota)
: Ketua Gapoktan Desa Natai Baru (Anggota)
 6. **Desa Tanjung Putri** : Kepala Desa Tanjung Putri (Ketua merangkap Anggota)
: PPL Desa Tanjung Putri (Sekretaris merangkap Anggota)
: Ketua Gapoktan Desa Tanjung Putri (Anggota)
 7. **Desa Tanjung Terantang** : Kepala Desa Tanjung Terantang (Ketua merangkap Anggota)
: PPL Desa Tanjung Terantang (Sekretaris merangkap Anggota)
: Ketua Gapoktan Desa Tanjung Terantang (Anggota)
 8. **Kelurahan Mendawai Seberang** : Lurah Mendawai Seberang (Ketua merangkap Anggota)
: PPL Kelurahan Mendawai Seberang (Sekretaris merangkap Anggota)
: Ketua Gapoktan Kelurahan Mendawai Seberang (Anggota)
 9. **Kelurahan Baru** : Lurah Baru (Ketua merangkap Anggota)
: PPL Kelurahan Baru (Sekretaris merangkap Anggota)
: Ketua Gapoktan Kelurahan Baru (Anggota)
- II. Kecamatan Arut Utara**
1. **Desa Pandau** : Kepala Desa Pandau (Ketua merangkap Anggota)
: PPL Desa Pandau (Sekretaris merangkap Anggota)
: Ketua Gapoktan Desa Pandau (Anggota)
 2. **Desa Sungai Dau** : Kepala Desa Sungai Dau (Ketua merangkap Anggota)
: PPL Desa Sungai Dau (Sekretaris merangkap Anggota)
: Ketua Gapoktan Desa Sungai Dau (Anggota)
 3. **Desa Gandis** : Kepala Desa Gandis (Ketua merangkap Anggota)
: PPL Desa Gandis (Sekretaris merangkap Anggota)
: Ketua Gapoktan Desa Gandis (Anggota)



4. Desa Sukarani : Kepala Desa Sukarani (Ketua merangkap Anggota)
: PPL Desa Sukarani (Sekretaris merangkap Anggota)
: Ketua Gapoktan Desa Sukarani (Anggota)
 5. Desa Penyombaan : Kepala Desa Penyombaan (Ketua merangkap Anggota)
: PPL Desa Penyombaan (Sekretaris merangkap Anggota)
: Ketua Gapoktan Desa Penyombaan (Anggota)
 6. Desa Kerabu : Kepala Desa Kerabu (Ketua merangkap Anggota)
: PPL Desa Kerabu (Sekretaris merangkap Anggota)
: Ketua Gapoktan Desa Kerabu (Anggota)
 7. Kelurahan Pangkut : Lurah Pangkut (Ketua merangkap Anggota)
: PPL Kelurahan Pangkut (Sekretaris merangkap Anggota)
: Ketua Gapoktan Kelurahan Pangkut (Anggota)
 8. Desa Riam : Kepala Desa Riam (Ketua merangkap Anggota)
: PPL Desa Riam (Sekretaris merangkap Anggota)
: Ketua Gapoktan Desa Riam (Anggota)
 9. Desa Panahan : Kepala Desa Panahan (Ketua merangkap Anggota)
: PPL Desa Panahan (Sekretaris merangkap Anggota)
: Ketua Gapoktan Desa Panahan (Anggota)
- III Kecamatan Kotawaringin Lama
1. Desa Kinjil : Kepala Desa Kinjil (Ketua merangkap Anggota)
: PPL Desa Kinjil (Sekretaris merangkap Anggota)
: Ketua Gapoktan Desa Kinjil (Anggota)
 2. Desa Babual Baboti : Kepala Desa Babual Baboti (Ketua merangkap Anggota)
: PPL Desa Babual Baboti (Sekretaris merangkap Anggota)
: Ketua Gapoktan Desa Babual Baboti (Anggota)
 3. Desa Tempayung : Kepala Desa Tempayung (Ketua merangkap Anggota)
: PPL Desa Tempayung (Sekretaris merangkap Anggota)
: Ketua Gapoktan Desa Tempayung (Anggota)
 4. Desa Lalang : Kepala Desa Lalang (Ketua merangkap Anggota)
: PPL Lalang (Sekretaris merangkap Anggota)
: Ketua Gapoktan Desa Lalang (Anggota)
 5. Kelurahan Ktw. Hilir : Lurah Ktw. Hilir (Ketua merangkap Anggota)
: PPL Kelurahan Ktw. Hilir (Sekretaris merangkap Anggota)
: Ketua Gapoktan Kelurahan Ktw. Hilir (Anggota)
 6. Kelurahan Ktw. Hulu : Lurah Ktw. Hulu (Ketua merangkap Anggota)
: PPL Kelurahan Ktw. Hulu (Sekretaris merangkap Anggota)
: Ketua Gapoktan Kelurahan Ktw. Hulu (Anggota)
 7. Desa Sakabulin : Kepala Desa Sakabulin (Ketua merangkap Anggota)
: PPL Desa Sakabulin (Sekretaris merangkap Anggota)
: Ketua Gapoktan Desa Sakabulin (Anggota)
 8. Desa Palih Baru : Kepala Desa Palih Baru (Ketua merangkap Anggota)
: PPL Desa Palih Baru (Sekretaris merangkap Anggota)
: Ketua Gapoktan Desa Palih Baru (Anggota)



9. **Desa Ipuh Bangun Jaya** : Kepala Desa Ipuh Bangun Jaya (Ketua merangkap Anggota)
: PPL Desa Ipuh Bangun Jaya (Sekretaris merangkap Anggota)
: Ketua Gapoktan Desa Ipuh Bangun Jaya (Anggota)
10. **Desa Sumber Mukti** : Kepala Desa Sumber Mukti (Ketua merangkap Anggota)
: PPL Desa Sumber Mukti (Sekretaris merangkap Anggota)
: Ketua Gapoktan Desa Sumber Mukti (Anggota)
11. **Desa Sagu Suka Mulya** : Kepala Desa Sagu Suka Mulya (Ketua merangkap Anggota)
: PPL Desa Sagu Suka Mulya (Sekretaris merangkap Anggota)
: Ketua Gapoktan Desa Sagu Suka Mulya (Anggota)
12. **Desa Rungun** : Kepala Desa Rungun (Ketua merangkap Anggota)
: PPL Desa Rungun (Sekretaris merangkap Anggota)
: Ketua Gapoktan Desa Rungun (Anggota)
13. **Desa Dawak** : Kepala Desa Dawak (Ketua merangkap Anggota)
: PPL Desa Dawak (Sekretaris merangkap Anggota)
: Ketua Gapoktan Desa Dawak (Anggota)
- IV Kecamatan Kumai
1. **Desa Sei Bakau** : Kepala Desa Sei Bakau (Ketua merangkap Anggota)
: PPL Desa Sei Bakau (Sekretaris merangkap Anggota)
: Ketua Gapoktan Desa Sei Bakau (Anggota)
2. **Desa Pangkalan Satu** : Kepala Desa Pangkalan Satu (Ketua merangkap Anggota)
: PPL Desa Pangkalan Satu (Sekretaris merangkap Anggota)
: Ketua Gapoktan Desa Pangkalan Satu (Anggota)
3. **Desa Bumi Harjo** : Kepala Desa Bumi Harjo (Ketua merangkap Anggota)
: PPL Desa Bumi Harjo (Sekretaris merangkap Anggota)
: Ketua Gapoktan Desa Bumi Harjo (Anggota)
4. **Kelurahan Kumai Hilir** : Lurah Kumai Hilir (Ketua merangkap Anggota)
: PPL Kelurahan Kumai Hilir (Sekretaris merangkap Anggota)
: Ketua Gapoktan Kelurahan Kumai Hilir (Anggota)
5. **Desa Teluk Pulau** : Kepala Desa Teluk Pulau (Ketua merangkap Anggota)
: PPL Desa Teluk Pulau (Sekretaris merangkap Anggota)
: Ketua Gapoktan Desa Teluk Pulau (Anggota)
6. **Desa Sebuai** : Kepala Desa Sebuai (Ketua merangkap Anggota)
: PPL Desa Sebuai (Sekretaris merangkap Anggota)
: Ketua Gapoktan Desa Sebuai (Anggota)
7. **Desa Sei Cabang** : Kepala Desa Sei Cabang (Ketua merangkap Anggota)
: PPL Desa Sei Cabang (Sekretaris merangkap Anggota)
: Ketua Gapoktan Desa Sei Cabang (Anggota)
8. **Desa Sei Kapitan** : Kepala Desa Sei Kapitan (Ketua merangkap Anggota)
: PPL Desa Sei Kapitan (Sekretaris merangkap Anggota)
: Ketua Gapoktan Desa Sei Kapitan (Anggota)
9. **Kelurahan Kumai Hulu** : Lurah Kumai Hulu (Ketua merangkap Anggota)
: PPL Kelurahan Kumai Hulu (Sekretaris merangkap Anggota)
: Ketua Gapoktan Kelurahan Kumai Hilir (Anggota)
10. **Desa Kubu** : Kepala Desa Kubu (Ketua merangkap Anggota)
: PPL Desa Kubu (Sekretaris merangkap Anggota)
: Ketua Gapoktan Desa Kubu (Anggota)

10. Desa Sebau Timur : Kepala Desa Sebau Timur (Ketua merangkap Anggota)
: PPL Desa Sebau Timur (Sekretaris merangkap Anggota)
: Ketua Gapoktan Desa Sebau Timur (Anggota)

V. Kecamatan Pangkalan Lada

1. Desa Pangkalan Dewa : Kepala Desa Pangkalan Dewa (Ketua merangkap Anggota)
: PPL Desa Pangkalan Dewa (Sekretaris merangkap Anggota)
: Ketua Gapoktan Desa Pangkalan Dewa (Anggota)
2. Desa Makarti Jaya : Kepala Desa Makarti Jaya (Ketua merangkap Anggota)
: PPL Desa Makarti Jaya (Sekretaris merangkap Anggota)
: Ketua Gapoktan Desa Makarti Jaya (Anggota)
3. Desa Purbasari : Kepala Desa Purbasari (Ketua merangkap Anggota)
: PPL Desa Purbasari (Sekretaris merangkap Anggota)
: Ketua Gapoktan Desa Purbasari (Anggota)

VI Kecamatan Pangkalan Banteng

1. Desa Pangkalan Banteng : Kepala Desa Pangkalan Banteng (Ketua merangkap Anggota)
: PPL Desa Pangkalan Banteng (Sekretaris merangkap Anggota)
: Ketua Gapoktan Desa Pangkalan Banteng (Anggota)
2. Desa Amin Jaya : Kepala Desa Amin Jaya (Ketua merangkap Anggota)
: PPL Desa Amin Jaya (Sekretaris merangkap Anggota)
: Ketua Gapoktan Desa Amin Jaya (Anggota)
3. Desa Sungai Pakit : Kepala Desa Sungai Pakit (Ketua merangkap Anggota)
: PPL Desa Sungai Pakit (Sekretaris merangkap Anggota)
: Ketua Gapoktan Desa Sungai Pakit (Anggota)
4. Desa Berambai Makmur : Kepala Desa Berambai Makmur (Ketua merangkap Anggota)
: PPL Desa Berambai Makmur (Sekretaris merangkap Anggota)
: Ketua Gapoktan Desa Berambai Makmur (Anggota)
5. Desa Nantai Kerbau : Kepala Desa Nantai Kerbau (Ketua merangkap Anggota)
: PPL Desa Nantai Kerbau (Sekretaris merangkap Anggota)
: Ketua Gapoktan Desa Nantai Kerbau (Anggota)
6. Desa Marga Mulya : Kepala Desa Marga Mulya (Ketua merangkap Anggota)
: PPL Desa Marga Mulya (Sekretaris merangkap Anggota)
: Ketua Gapoktan Desa Marga Mulya (Anggota)

Ditetapkan di : Pangkalan Banteng
Pada tanggal : 7 Januari 2013

